LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

(LPPD)

TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianyalah Pemerintah Kota Sibolga dapat melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah.

Wali Kota Sibolga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2025 - 2029 selanjutnya diharapkan laporan ini menjadi media informasi eksternal sekaligus menjadi alat koreksi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disadari pula bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas sebagai upaya implementasi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah kedepan. Namun demikian, the show must go on karena banyak inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan yang masih harus diwujudkan di masa yang akan datang, oleh karenanya menjadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang dan awal keberhasilan di masa datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun 2025 ini disusun semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sibolga, Maret 2026

WALI KOTA SIBOLGA,

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
BAB I PENDAHULUAN 1
1. LATAR BELAKANG 1
1.1.1 PENJELASAN UMUM 1
a. Undang-undang Pembentukan Kota Sibolga; 1
b. Data Geografis Wilayah; 1
c. Jumlah Penduduk; 5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (untuk Kabupaten/Kota); 11
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah; 12
f. Pegawai Pemerintah; dan 14
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 16
h. Program /Kegiatan dan Realisasi Organisasi Perangkat Daerah 54
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 68
a.. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah; 68
b. Visi dan Misi Kepala Daerah; 121
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; dan 165
d. Dokumen Perencanaan Tahunan. 206
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 285
Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM) 285
Arah Kebijakan Strategis 285
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH 289
2.1 Capaian Kinerja Makro 289
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 297
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil 297
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 309
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH 311
a.. Capaian Kinerja Organisasi 311
b. Kerangka Pengukuran Kinerja 321
c. Capaian Kinerja Organisasi 323
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 391
1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN 391
2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN 391
3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 391
3.3.1 Target Kinerja 391
3.3.2 Realisasi 391
3.3.3 Permasalahan Dan Kendala 391
3.3.4 Saran dan Tindak Lanjut 391
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 393
4.1 URUSAN PENDIDIKAN 393
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 393
4.1.2 Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah 394

	4.1.3	Realisasi	394
	4.1.4	Alokasi Anggaran	395
	4.1.5	Dukungan Personil	395
	4.1.6	Permasalahan dan Solusi	397
	4.1.7	Program dan Kegiatan	398
4.2	URUSAN KESEHATAN		400
	4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	400
	4.2.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	400
	4.2.3	Realisasi	401
	4.2.4	Alokasi Anggaran	401
	4.2.5	Dukungan Personil	402
	4.2.6	Permasalahan dan Solusi	402
	4.2.7	Program dan Kegiatan	403
4.3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM		404
	4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	404
	4.3.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	404
	4.3.3	Realisasi	404
	4.3.4	Alokasi Anggaran	405
	4.3.5	Dukungan Personil	405
	4.3.6	Permasalahan dan Solusi	406
	4.3.7	Program dan Kegiatan	407
4.4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT		407
	4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	408
	4.4.2 .	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	409
	4.4.3	Realisasi	409
	4.4.4	Alokasi Anggaran	410
	4.4.5	Dukungan Personil	410
	4.4.6	Permasalahan dan Solusi	410
	4.4.7	Program dan Kegiatan	410
4.5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		411
	4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	411
	4.5.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	411
	4.5.3	Realisasi	411
	4.5.4	Alokasi Anggaran	411
	4.5.5	Dukungan Personil	411
	4.5.6	Permasalahan dan Solusi	413
	4.5.7	Program dan Kegiatan	413
4.6.	URUSAN SOSIAL		417
	4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	417
	4.6.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	418
	4.6.3	Realisasi	419
	4.6.4	Alokasi Anggaran	420
	4.6.5	Dukungan Personil	420
	4.6.6	Permasalahan dan Solusi	420
	4.6.7	Program dan Kegiatan	422
BAB V	PENUTUP		423

INDIKATOR KUNCI URUSAN PEMERINTAH DAERAH v - xxv

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Kota Sibolga.

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan Nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dengan wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor 999 tanggal 19 November 1946.
- Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 maka Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, selanjutnya sistem pengaturan pemerintahan ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga berubah menjadi Kota Sibolga yang statusnya Daerah Otonom yang dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga.

b. Data Geografis Wilayah Kota Sibolga

Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di Pantai Barat Sumatera. Wilayahnya berada pada ketinggian 0 - 62 m di atas permukaan laut. Secara astronomis, Sibolga terletak antara 01º42’ - 01º46’ Lintang Utara dan 98º46’ - 98º48’ Bujur Timur. Kota Sibolga di sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli

Sibolga memiliki wilayah seluas 11,47 km2 yang terdiri dari 11,36 km2 daratan di Pulau Sumatera dan 0,11 km2 daratan berupa kepulauan.

Kota Sibolga termasuk beriklim tropis dengan suhu maksimum pada tahun 2025 mencapai 35,80ºC di bulan Oktober. Jumlah hari hujan di Kota Sibolga pada tahun 2025 adalah sebanyak 218 hari, lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 311 hari.

Sejalan dengan jumlah hari hujan, rata–rata kelembaban udara Kota Sibolga adalah 84,64 persen pada tahun 2025. Sementara itu, rata–rata kecepatan angin di Kota Sibolga pada tahun 2025 adalah sebesar 1,72 knot, dan tekanan udara rata-rata 1008,49 mbar.

Secara rinci letak geografis dan luas wilayah, batas dan jarak 4 Kecamatan ke Pusat Kota Sibolga disajikan pada Tabel di bawah.

Kecamatan *District*	Tinggi Wilayah (mdpl) *Altitude (m.a.s.l)*	Jarak ke Ibukota (km) *Distance to the Capital (km)*
(1)	(2)	(3)
Sibolga Utara	0 - 62	1
Sibolga Kota	0 - 11	1
Sibolga Selatan	0 - 31	3
Sibolga Sambas	0 - 10	1

Sumber data : Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection

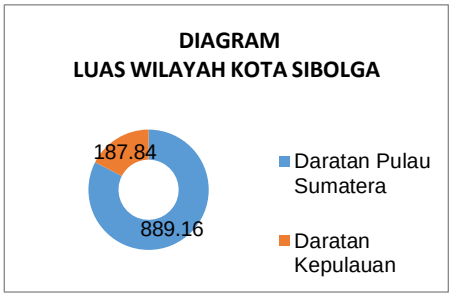
Adapun rincian luas wilayah Kota Sibolga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 1

LUAS WILAYAH KOTA SIBOLGA

NO.	WILAYAH	LUAS (Ha.)
1	2	3
1.	Daratan :	
	Daratan Pulau Sumatera	889,16
	Daratan Kepulauan	187,84
	JUMLAH	**1.077**

Sumber: SIPD Kota Sibolga



Daratan Kota Sibolga berada pada rata-rata ketinggian antara 1-200 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan adalah daratan rendah berupa bekas rawa dan pantai serta pegunungan yang permukaannya terjal. Kondisi ini menjadikan keadaan topografi wilayah Kota Sibolga terdiri dari 2 kategori, yaitu :

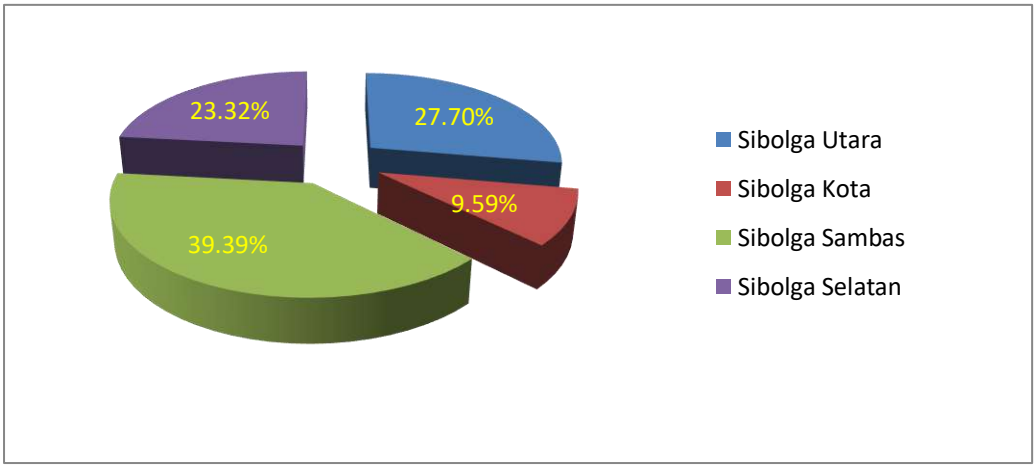
Pertama : Wilayah landai/datar mempunyai kemiringan lahan 0-2 % yang luasnya mencapai 29,14% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.

Kedua : Wilayah lereng mempunyai kemiringan > 40% dengan luasnya mencapai 638,2 Ha atau mencapai 59,62% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.

Dari kondisi topografi yang seperti ini, menyebabkan Kota Sibolga memiliki iklim yang cukup panas dan termasuk daerah beriklim tropis.

Secara administratif Kota Sibolga terbagi kedalam 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Sambas dan Sibolga Selatan yang luas wilayah masing-masing tergambar pada diagram berikut.

Diagram Luas Wilayah Sibolga Menurut Kecamatan (%)



Sumber: BPN Kantor Pertanahan Kota Sibolga

TABEL 2

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTA SIBOLGA

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (km^2)	Persentase (%)
1	2	3	4
I	**SIBOLGA UTARA**	**3,333**	**27,70**
	1. Sibolga Ilir	0,78	5,79
	2. Angin Nauli	0,87	6,48
	3. Huta Tonga-tonga	0,40	2,94
	4. Huta Barangan	0,57	7,20
	5. Simare-mare	0,71	5,30
II	**SIBOLGA KOTA**	**2,732**	**9,59**
	1. Kota Baringin	0,29	1,77
	2. Pasar Baru	0,46	1,33
	3. Pasar Belakang	1,08	4,34
	4. Pancuran Gerobak	0,90	2,15
III	**SIBOLGA SELATAN**	**3,139**	**23,32**
	1. Aek Habil	0,614	4,55
	2. Aek Manis	1,235	9,20
	3. Aek Parombunan	0,898	6,66
	4. Aek Muara Pinang	0,392	2,91
IV	**SIBOLGA SAMBAS**	**1,566**	**39,39**
	1. Pancuran Pinang	0,18	7,94
	2. Pancuran Kerambil	0,33	6,83
	3. Pancuran Dewa	0,51	9,19
	4. Pancuran Bambu	0,54	15,42

	KOTA SIBOLGA	***10,77***	***100***

Sumber : Kelurahan dan Kecamatan Kota Sibolga

TABEL 3

Letak Geografis Kecamatan Kota Sibolga

DAERAH	URAIAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*
SIBOLGA UTARA	Letak	010 42"-010 44" LU
		980 46" - 980 48" BT
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 – 54 m
	Luas Wilayah	333,33 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan	Sungai Aek Doras dan Kecamatan Sibolga Kota
	Sebelah Barat	Teluk Tapian Nauli
	Sebelah Timur	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	0,30 km
SIBOLGA KOTA	Letak	010 42"-010 44" LU
		980 45" - 980 47" BT
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 - 8 m
	Luas Wilayah	273,23 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Selatan	Kecamatan Sibolga Sambas
	Sebelah Barat	Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Timur	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	0,60 km
SIBOLGA SELATAN	Letak	01°43'- 01°44' LU
		98°47'- 98°48' BT
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 - 29 m
	Luas Wilayah	313,85 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan	Teluk Tapian Nauli
	Sebelah Barat	Kecamatan Sibolga Sambas
	Sebelah Timur	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	3,4 km
SIBOLGA	Letak	01°43'- 01°44' LU

DAERAH	URAIAN	KETERANGAN
SAMBAS		98°46'- 98°47' BT
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 - 13 m
	Luas Wilayah	156,59 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kecamatan Sibolga Utara
	Sebelah Selatan	Teluk Tapian Nauli
	Sebelah Barat	Kecamatan Sibolga Kota
	Sebelah Timur	Kecamatan Sibolga Selatan
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	1,0 km

Sumber data : Kantor Pertanahan Kota Sibolga/ *Land Office of Sibolga Municipality*

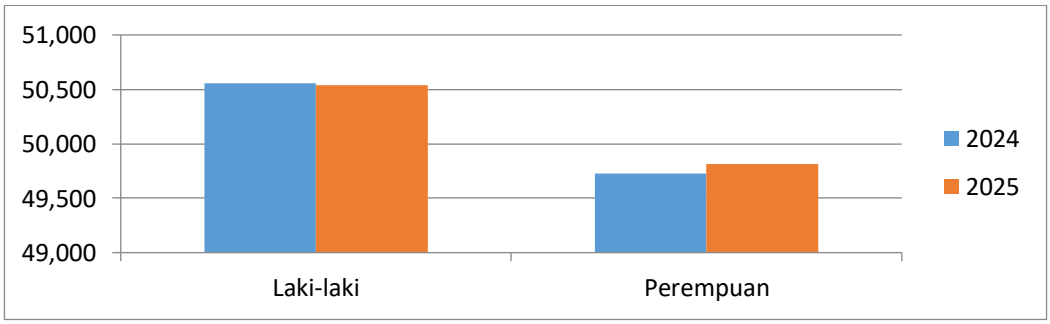
c. Informasi Umum Data Kependudukan

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah Penduduk Kota Sibolga tahun 2025 berjumlah 100.348 jiwa yang terdiri dari 50.536 jiwa penduduk laki-laki dan 49.812 jiwa perempuan dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 9.317 jiwa per km^2. Dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Sibolga Sambas yang mencapai 14.530 jiwa per km^2 dan terendah di Kecamatan Sibolga Kota sebesar 6.235 jiwa per km^2. Untuk tahun 2024 jumlah penduduk berjumlah 100.282 jiwa dengan 50.556 jiwa penduduk laki-laki dan 49.726 jiwa penduduk perempuan, dengan data demikian bahwa penduduk Kota Sibolga bertambah sebanyak 66 jiwa dari tahun 2024 dengan persentase 0,0658 %.

Grafik

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Kota Sibolga Tahun 2024-2025



TABEL 4

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kota Sibolga Tahun 2025

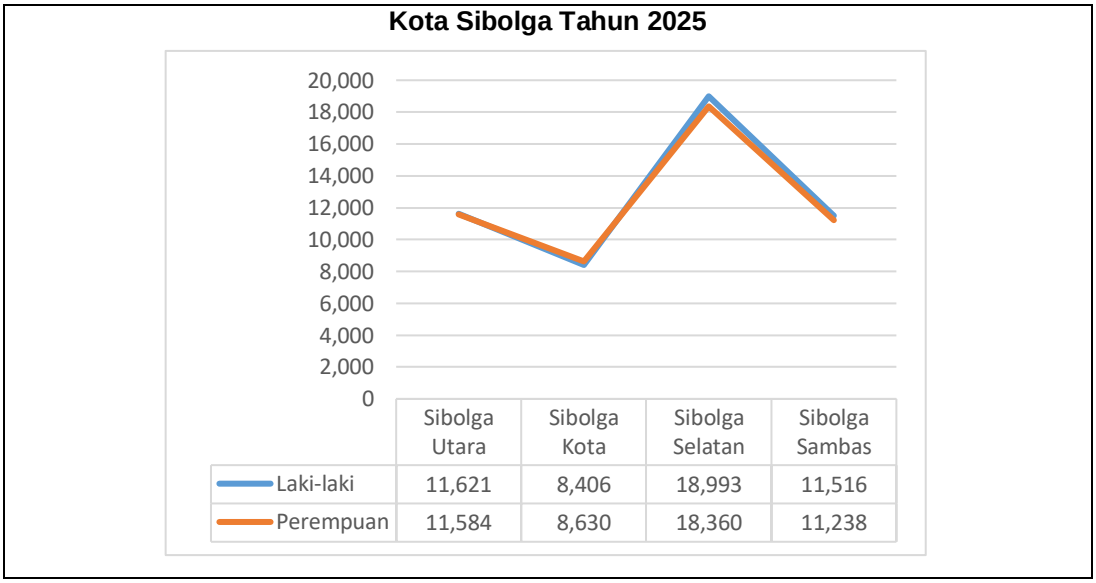
Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	n	%	n	%	n	%

1	2	3	4	5	6	7
Sibolga Utara	11.621	11,58	11.584	11,54	23.205	23,12
Sibolga Kota	8.406	8,38	8.630	8,60	17.036	16,98
Sibolga Selatan	18.993	18,93	18.360	18,30	37.353	37,22
Sibolga Sambas	11.516	11,48	11.238	11,20	22.754	22,68
Kota Sibolga	**50.536**	**50,36**	**49.812**	**49,64**	**100.348**	**100**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2025

Grafik

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin



TABEL 5

JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1.	Usia 0 Tahun	535	0,53	570	0,57	1.105	1,10
2.	Usia 1 Tahun	649	0,65	619	0,62	1.268	1,26
3.	Usia 2 Tahun	761	0,76	683	0,68	1.444	1,44
4.	Usia 3 Tahun	787	0,78	751	0,75	1.538	1,53
5.	Usia 4 Tahun	818	0,82	729	0,73	1.547	1,54
6.	Usia 5 Tahun	806	0,80	824	0,82	1.630	1,62
7.	Usia 6 Tahun	882	0,88	820	0,82	1.702	1,70
8.	Usia 7 Tahun	867	0,86	838	0,84	1.705	1,70
9.	Usia 8 Tahun	950	0,95	806	0,80	1.756	1,75
10.	Usia 9 Tahun	891	0,89	785	0,78	1.676	1,67

No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
11.	Usia 10 Tahun	954	0,95	892	0,89	1.846	1,84
12.	Usia 11 Tahun	973	0,97	903	0,90	1.876	1,87
13.	Usia 12 Tahun	968	0,96	903	0,90	1.871	1,86
14.	Usia 13 Tahun	935	0,93	910	0,91	1.845	1,84
15.	Usia 14 Tahun	978	0,97	946	0,94	1.924	1,92
16.	Usia 15 Tahun	961	0,96	944	0,94	1.905	1,90
17.	Usia 16 Tahun	964	0,96	907	0,90	1.871	1,86
18.	Usia 17 Tahun	741	0,74	763	0,76	1.504	1,50
19.	Usia 18 Tahun	939	0,94	862	0,86	1.801	1,79
20.	Usia 19 Tahun	981	0,98	925	0,92	1.906	1,90
21.	Usia 20 Tahun	1.001	1,00	959	0,96	1.960	1,95
22.	Usia 21 Tahun	969	0,97	972	0,97	1.941	1,93
23.	Usia 22 Tahun	1.071	1,07	949	0,95	2.020	2,01
24.	Usia 23 Tahun	987	0,98	942	0,94	1.929	1,92
25.	Usia 24 Tahun	897	0,89	838	0,84	1.735	1,73
26.	Usia 25 Tahun	965	0,96	920	0,92	1.885	1,88
27.	Usia 26 Tahun	907	0,90	906	0,90	1.813	1,81
28.	Usia 27 Tahun	774	0,77	813	0,81	1.587	1,58
29.	Usia 28 Tahun	850	0,85	783	0,78	1.633	1,63
30.	Usia 29 Tahun	833	0,83	863	0,86	1.696	1,69
31.	Usia 30 Tahun	844	0,84	829	0,83	1.673	1,67
32.	Usia 31 Tahun	817	0,81	711	0,71	1.528	1,52
33.	Usia 32 Tahun	822	0,82	766	0,76	1.588	1,58
34.	Usia 33 Tahun	821	0,82	735	0,73	1.556	1,55
35.	Usia 34 Tahun	692	0,69	666	0,66	1.358	1,35
36.	Usia 35 Tahun	812	0,81	745	0,74	1.557	1,55
37.	Usia 36 Tahun	807	0,80	737	0,73	1.544	1,54
38.	Usia 37 Tahun	846	0,84	729	0,73	1.575	1,57
39.	Usia 38 Tahun	794	0,79	697	0,69	1.491	1,49
40.	Usia 39 Tahun	850	0,85	724	0,72	1.574	1,57
41.	Usia 40 Tahun	864	0,86	742	0,74	1.606	1,60
42.	Usia 41 Tahun	772	0,77	740	0,74	1.512	1,51
43.	Usia 42 Tahun	746	0,74	788	0,79	1.534	1,53
44.	Usia 43 Tahun	829	0,83	806	0,80	1.635	1,63
45.	Usia 44 Tahun	698	0,70	693	0,69	1.391	1,39
46.	Usia 45 Tahun	848	0,85	813	0,81	1.661	1,66
47.	Usia 46 Tahun	769	0,77	708	0,71	1.477	1,47
48.	Usia 47 Tahun	660	0,66	665	0,66	1.325	1,32
49.	Usia 48 Tahun	634	0,63	617	0,61	1.251	1,25
50.	Usia 49 Tahun	623	0,62	556	0,55	1.179	1,17

No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
51.	Usia 50 Tahun	669	0,67	612	0,61	1.281	1,28
52.	Usia 51 Tahun	578	0,58	532	0,53	1.110	1,11
53.	Usia 52 Tahun	533	0,53	545	0,54	1.078	1,07
54.	Usia 53 Tahun	552	0,55	547	0,55	1.099	1,10
55.	Usia 54 Tahun	458	0,46	459	0,46	917	0,91
56.	Usia 55 Tahun	529	0,53	505	0,50	1.034	1,03
57.	Usia 56 Tahun	456	0,45	433	0,43	889	0,89
58.	Usia 57 Tahun	440	0,44	499	0,50	939	0,94
59.	Usia 58 Tahun	352	0,35	417	0,42	769	0,77
60.	Usia 59 Tahun	292	0,29	345	0,34	637	0,63
61.	Usia 60 Tahun	389	0,39	473	0,47	862	0,86
62.	Usia 61 Tahun	314	0,31	389	0,39	703	0,70
63.	Usia 62 Tahun	259	0,26	334	0,33	593	0,59
64.	Usia 63 Tahun	262	0,26	387	0,39	649	0,65
65.	Usia 64 Tahun	227	0,23	273	0,27	500	0,50
66.	Usia 65 Tahun	291	0,29	347	0,35	638	0,64
67.	Usia 66 Tahun	213	0,21	289	0,29	502	0,50
68.	Usia 67 Tahun	234	0,23	328	0,33	562	0,56
69.	Usia 68 Tahun	203	0,20	259	0,26	462	0,46
70.	Usia 69 Tahun	165	0,16	279	0,28	444	0,44
71.	Usia 70 Tahun	143	0,14	219	0,22	362	0,36
72.	Usia 71 Tahun	147	0,15	215	0,21	362	0,36
73.	Usia 72 Tahun	112	0,11	196	0,20	308	0,31
74.	Usia 73 Tahun	148	0,15	163	0,16	311	0,31
75.	Usia 74 Tahun	66	0,07	110	0,11	176	0,18
76.	Usia 75 Tahun	69	0,07	150	0,15	219	0,22
77.	Usia > 75 Tahun	293	0,29	715	0,71	1.008	1,00
JUMLAH		**50.536**	**50,36**	**50,36**	**49,64**	**49,64**	**100,00**

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2025

- **Distribusi Penduduk Menurut Tingkat pendidikan yang ditamatkan dan Jenis kelamin kota sibolga tahun 2025.**

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Sibolga hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat, SLTA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SLTA / sederajat sebesar 28,53%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 8.22%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 2.24% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 5.98%. Berikut ini tabel penduduk Kota Sibolga dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.

TABEL 6

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	Persentase (%)
1	2	3	4	5
Tidak/ Belum Sekolah	12.692	11.815	24.507	24,42
Belum Tamat SD/ Sederajat	5.584	5.186	10.770	10,73
Tamat SD/ Sederajat	6.889	6.728	13.617	13,57
SLTP/ Sederajat	7.594	6.977	14.571	14,52
SLTA/ Sederajat	14.431	14.201	28.632	28,53
Diploma I/II	83	217	300	0,30
Akademi/ Diploma II/ S. Muda	643	1.308	1.951	1,94
Diploma IV/ Strata I	2.484	3.295	5.779	5,76
Strata II	132	84	216	0,22
Strata III	4	1	5	0,00
Jumlah	**50.536**	**49.812**	**100.348**	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2025

- **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2025**

Berdasarkan mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Kota Sibolga bekerja sebagai Nelayan/Perikanan (5.11%), mengurus rumah tangga (18.56%), wiraswasta (8.08%) dan PNS/TNI/POLRI (2,92%), Buruh Harian Lepas (7.77%), Buruh Nelayan/Perikanan (1,38%), Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 7

Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2025

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belum/Tidak Bekerja	14.068	12.811	26.879	26.79
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	18.627	18.627	18.56
3.	Pelajar/Mahasiswa	11.706	10.624	22.330	22.25
4.	Pensiunan	384	455	839	0.84
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	995	1.380	2.375	2.37
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	361	1	362	0.36
7.	Kepolisian RI (POLRI)	182	9	191	0.19

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
8.	Perdagangan	1	2	3	0.00
9.	Petani/Pekebun	198	143	341	0.34
10.	Peternak	2	0	2	0.00
11.	Nelayan/Perikanan	5.109	14	5.123	5.11
12.	Industri	1	0	1	0.00
13.	Konstruksi	3	0	3	0.00
14.	Transportasi	129	0	129	0.13
15.	Karyawan Swasta	1.457	633	2.090	2.08
16.	Karyawan Bumn	142	61	203	0.20
17.	Karyawan Bumd	51	24	75	0.07
18.	Karyawan Honorer	357	316	673	0.67
19.	Buruh Harian Lepas	6.155	1.638	7.793	7.77
20.	Buruh Tani/Perkebunan	42	16	58	0.06
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	1.409	38	1.447	1.44
22.	Buruh Peternakan	1	3	4	0.00
23.	Pembantu Rumah Tangga	0	32	32	0.03
24.	Tukang Cukur	15	0	15	0.01
25.	Tukang Listrik	4	0	4	0.00
26.	Tukang Batu	11	1	12	0.01
27.	Tukang Kayu	15	0	15	0.01
28.	Tukang Sol Sepatu	3	1	4	0.00
29.	Tukang Las/Pandai Besi	12	0	12	0.01
30.	Tukang Jahit	27	34	61	0.06
31.	Tukang Gigi	0	0	0	0.00
32.	Penata Rias	0	3	3	0.00
33.	Penata Busana	0	0	0	0.00
34.	Penata Rambut	1	10	11	0.01
35.	Mekanik	45	0	45	0.04
36.	Seniman	4	0	4	0.00
37.	Imam Masjid	2	0	2	0.00
38.	Pendeta	46	10	56	0.06
39.	Pastor	64	0	64	0.06
40.	Wartawan	9	1	10	0.01
41.	Ustadz/Mubaligh	6	0	6	0.01
42.	Promotor Acara	1	0	1	0.00
43.	Walikota	1	0	1	0.00
44.	Wakil Walikota	1	0	1	0.00
45.	Anggota DPRD Kab./Kota	5	3	8	0.01
46.	Dosen	14	22	36	0.04
47.	Guru	155	444	599	0.60

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
48.	Pilot	0	0	0	0.00
49.	Pengacara	5	1	6	0.01
50.	Notaris	0	5	5	0.00
51.	Arsitek	4	0	4	0.00
52.	Konsultan	1	0	1	0.00
53.	Dokter	26	47	73	0.07
54.	Bidan	0	110	110	0.11
55.	Perawat	18	60	78	0.08
56.	Apoteker	0	4	4	0.00
57.	Penyiar Televisi	0	0	0	0.00
58.	Penyiar Radio	0	1	1	0.00
59.	Pelaut	49	0	49	0.05
60.	Sopir	331	0	331	0.33
61.	Pedagang	432	511	943	0.94
62.	Perangkat Desa	2	0	2	0.00
63.	Biarawan/Biarawati	3	49	52	0.05
64.	Wiraswasta	6.460	1.652	8.112	8.08
65.	Anggota Lembaga Tinggi Lainnya	0	1	1	0.00
66.	Pekerjaan Lainnya	11	15	26	0.03
Jumlah		**50.536**	**49.812**	**100.348**	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Sibolga

Secara administrasi Kota Sibolga memiliki luas wilayah *10,77* Km^2, dan terbagi atas 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:

TABEL 8

Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sibolga

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (km²)	Persentase (%)
I	**Sibolga Utara**	**3,33**	**30,92**
	1. Sibolga Ilir	0,78	
	2. Angin Nauli	0,87	
	3. Huta Tonga-tonga	0,40	
	4. Huta Barangan	0,57	
	5. Simare-mare	0,71	
II	**Sibolga Kota**	**2,73**	**25,37**
	1. Kota Baringin	0,29	
	2. Pasar Baru	0,46	
	3. Pasar Belakang	1,08	

	4. Pancuran Gerobak	0,90	
III	**Sibolga Selatan**	**3,14**	**29,16**
	1. Aek Habil	0,61	
	2. Aek Manis	1,24	
	3. Aek Parombunan	0,90	
	4. Aek Muara Pinang	0,39	
IV	**Sibolga Sambas**	**1,57**	**14,58**
	1. Pancuran Pinang	0,18	
	2. Pancuran Kerambil	0,33	
	3. Pancuran Dewa	0,51	
	4. Pancuran Bambu	0,54	
KOTA SIBOLGA		***10,77***	***100***

Sumber : SIPD Kota Sibolga tahun 2017

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Sibolga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga. Urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi:

TABEL 9

Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perengkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 2 Tahun 2017
3	Inspektorat	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2017
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 4 Tahun 2017
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 5 Tahun 2017
6	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 6 Tahun 2017
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2017
8	Dinas Sosial	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2017

No	Nama Perengkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 9 Tahun 2017
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 10 Tahun 2017
11	Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 11 Tahun 2017
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017
14	Dinas Perhubungan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 15 Tahun 2017
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017
17	Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 17 Tahun 2017
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 18 Tahun 2017
19	Dinas Perpustakaan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 19 Tahun 2017
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 20 Tahun 2017
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 21 Tahun 2017
22	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 22 Tahun 2017
23	Badan Kepegawaian Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 23 Tahun 2017
24	Kecamatan Sibolga Utara	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
25	Kecamatan Sibolga Kota	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
26	Kecamatan Sibolga Selatan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
27	Kecamatan Sibolga Sambas	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2019
29	Kesatuan Bangsa & Politik	Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012
30	RSU Dr F L Tobing	

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada disetiap Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas,

rentang kendali, tata kerja yang jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kota Sibolga telah menindaklanjuti kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga berubah menjadi Kota Sibolga, Penataan kelembagaan di Kota Sibolga diatur Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga yang terdiri dari 30 Perangkat Daerah, yaitu : Jumlah PNS Pemerintah Kota Sibolga yang menerima pelayanan Kepegawaian se Kota Sibolga berdasarkan data yang terakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 diluar guru dan tenaga kesehatan sebanyak 1335 orang, terdiri dari PNS dan PPPK sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 6 Bagian
2. Sekretariat DPRD, yang terdiri dari 3 Bagian
3. Inspektorat
4. Dinas : 16
5. Badan : 3
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Rumah Sakit Umum Daerah
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Kecamatan : 4

TABEL 10

JUMLAH PEGAWAI ASN DILUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2025

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN				TOTAL
			STRUK TURAL	FUNG SIONAL	PELAK SANA	PPPK	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	12	16	24	187	239
2	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN	4	385	22	8	48

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN				TOTAL
			STRUK TURAL	FUNG SIONAL	PELAK SANA	PPPK	
		PELAYANAN DASAR					
3	RSU Dr F L TOBING	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	21	-	44	31	35
4	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	9	12	26	9	56
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	9	9	19	11	48
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	5	5	5	10	25
7	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	6	7	15	7	35
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	14	-	9	26	49
9	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	4	4	14		22
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	15	1	6	6	28
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	6	8	13	6	33
12	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	10	6	12	12	40
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	5	7	4	8	24
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	7	5	5	7	24

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN				TOTAL
			STRUK TURAL	FUNG SIONAL	PELAK SANA	PPPK	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	5	5	11	18	39
16	DINAS PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	4	6	7	2	19
17	DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	9	8	15	13	45
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA & OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	6	6	24	8	44
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	7	16	30	12	65
20	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14	21	38	22	95
21	SEKRETARIAT DPRD KOTA SIBOLGA	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	3	30	7	45
22	INSPEKTORAT	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	33	17	6	61
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7	8	19	5	39
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	16	3	39	-	58
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	6	30	19	59
26	KESATUAN BANGSA & POLITIK	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	-	7	5	17
27	KANTOR KECAMATAN SIBOLGA UTARA	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	27	-	21	4	52
28	KANTOR KECAMATAN SIBOLGA KOTA	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	26	-	7	4	37
29	KANTOR KECAMATAN SIBOLGA SELATAN	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	28	-	10	4	42
30	KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24	-	11	4	39
Jumlah …….			319	580	534	461	1462

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan data yang terakhir Tahun 2025 Kota Sibolga, Realisasi Pendapatan sebesar Rp. **631.532.073.312,21** yaitu **93,29** % dari Target Rp. **676.945.950.118,91** dan Realisasi Belanja sebesar Rp. **599.675.067.175,95** yaitu **89,67** % dari Target Rp. **668.778.402.243,65** dengan perincian yang terdapat pada Tabel :

TABEL 11

PEMERINTAHAN KOTA SIBOLGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	676,945,950,119	631,532,073,312	93	645,706,647,616
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135,319,583,233	103,693,905,622	77	86,577,030,313
4.1.01	Pajak Daerah	17,834,753,693	17,414,191,151	98	12,373,706,574
4.1.01.06	Pajak Hotel	0	0	0	403,776,869
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0	0	0	376,401,869
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0	0	0	376,401,869
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0	0	0	27,375,000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0	0	0	27,375,000
4.1.01.07	Pajak Restoran	0	0	0	1,537,420,250
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	0	0	48,887,311
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	0	0	48,887,311
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0	0	0	493,368,499
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0	0	0	493,368,499
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0	0	0	995,164,440
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0	0	0	995,164,440
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0	0	0	158,027,000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	0	0	12,237,000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	0	0	12,237,000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0	0	0	11,200,000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	0	0	0	11,200,000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0	0	0	117,040,000

4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0	0	0	117,040,000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0	0	0	17,550,000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0	0	0	17,550,000
4.1.01.09	Pajak Reklame	371,340,400	341,807,400	92	384,441,200
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	318,740,400	292,947,000	92	308,249,600
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	318,740,400	292,947,000	92	308,249,600
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40,000,000	39,703,000	99	65,272,700
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	40,000,000	39,703,000	99	65,272,700
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	300,000	0	0	0
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	300,000	0	0	0
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	12,200,000	9,157,400	75	10,918,900
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	12,200,000	9,157,400	75	10,918,900
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	100,000	0	0	0
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	100,000	0	0	0
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	5,706,348,392
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0	0	0	5,706,348,392
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0	0	0	5,706,348,392
4.1.01.11	Pajak Parkir	0	0	0	84,516,000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0	0	0	84,516,000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0	0	0	84,516,000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2,662,579,383	2,190,901,659	82	2,031,535,313
4.1.01.15.01	PBBP2	2,662,579,383	2,190,901,659	82	2,031,535,313
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2,662,579,383	2,190,901,659	82	2,031,535,313
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2,310,000,000	1,882,625,075	81	2,067,641,550
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2,100,000,000	1,729,091,850	82	2,036,899,750
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2,100,000,000	1,729,091,850	82	2,036,899,750
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	210,000,000	153,533,225	73	30,741,800
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	210,000,000	153,533,225	73	30,741,800
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	7,825,658,766	7,843,881,887	100	0
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1,943,536,037	1,822,024,672	94	0
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	1,943,536,037	1,822,024,672	94	0
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	5,300,000,000	5,440,231,551	103	0

4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5,300,000,000	5,440,231,551	103	0
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	392,758,729	376,932,364	96	0
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	360,273,729	350,212,364	97	0
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	32,485,000	26,720,000	82	0
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	90,509,000	91,310,800	101	0
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	90,509,000	91,310,800	101	0
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	98,855,000	113,382,500	115	0
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1,000,000	0	0	0
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	71,901,000	83,492,000	116	0
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	8,404,000	12,300,500	146	0
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	15,840,000	14,290,000	90	0
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1,710,000	3,300,000	193	0
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2,733,569,190	3,033,182,185	111	0
4.1.01.20.01	Opsen PKB	2,733,569,190	3,033,182,185	111	0
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	2,733,569,190	3,033,182,185	111	0
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1,931,605,954	2,121,792,945	110	0
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	1,931,605,954	2,121,792,945	110	0
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	1,931,605,954	2,121,792,945	110	0
4.1.02	Retribusi Daerah	64,543,982,336	70,197,864,955	109	5,540,909,774
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	61,971,397,851	68,537,794,185	111	3,489,799,760
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	58,381,978,851	65,488,658,185	112	86,942,500
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	8,349,279,851	6,744,146,995	81	54,243,500
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	50,000,000,000	58,687,767,190	117	0
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	32,699,000	56,744,000	174	32,699,000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,695,940,000	1,484,860,000	88	1,695,940,000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1,695,940,000	1,484,860,000	88	1,695,940,000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600,000,000	345,206,000	58	411,218,260
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	600,000,000	345,206,000	58	411,218,260
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1,263,279,000	1,191,140,000	94	1,263,279,000

4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	521,170,000	643,405,000	123	521,170,000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	191,909,000	230,935,000	120	191,909,000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	550,200,000	316,800,000	58	550,200,000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30,200,000	27,930,000	92	32,420,000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30,200,000	27,930,000	92	32,420,000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2,512,584,485	1,564,234,504	62	1,932,294,271
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	666,780,485	562,849,504	84	570,084,271
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	526,169,950	427,925,704	81	428,682,586
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	54,804,535	58,633,050	107	55,498,485
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	14,850,000	900,000	6	14,850,000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	70,956,000	75,390,750	106	71,053,200
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	142,960,000	135,197,000	95	155,373,000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	142,960,000	135,197,000	95	155,373,000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	90,143,000	95,230,000	106	90,143,000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	90,143,000	95,230,000	106	90,143,000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	78,051,000	82,340,000	105	74,737,000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	78,051,000	82,340,000	105	74,737,000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1,500,000,000	632,643,000	42	1,004,842,000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1,500,000,000	632,643,000	42	1,004,842,000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	34,650,000	55,975,000	162	37,115,000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	34,650,000	55,975,000	162	37,115,000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	60,000,000	95,836,266	160	118,815,743
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60,000,000	95,836,266	160	118,815,743
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	60,000,000	95,836,266	160	118,815,743
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,227,264,682	10,257,264,682	100	9,816,845,722
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10,227,264,682	10,257,264,682	100	9,816,845,722
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9,839,822,520	9,839,822,520	100	9,388,781,094

4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9,839,822,520	9,839,822,520	100	9,388,781,094
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0	30,000,000	0	0
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	0	30,000,000	0	0
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	387,442,162	387,442,162	100	428,064,628
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	387,442,162	387,442,162	100	428,064,628
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	42,713,582,522	5,824,584,834	14	58,845,568,243
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	860,000,000	133,465,400	16	688,469,100
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500,000,000	133,465,400	27	688,469,100
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0	270,194,000
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	200,000,000	113,049,200	57	148,176,000
4.1.04.01.02.0056	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0	0	47,890,100
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	100,000,000	0	0	98,670,000
4.1.04.01.02.0059	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	100,000,000	0	0	118,649,000
4.1.04.01.02.0069	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	0	0	0	4,890,000
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	100,000,000	20,416,200	20	0
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	360,000,000	0	0	0
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	360,000,000	0	0	0

4.1.04.05	Jasa Giro	1,280,000,000	178,974,140	14	46,065,178
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	900,000,000	169,607,400	19	34,679,486
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	900,000,000	169,607,400	19	34,679,486
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	380,000,000	9,366,740	2	11,385,692
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	380,000,000	9,366,740	2	11,385,692
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	20,000,000	4,834,639	24	28,585,450
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20,000,000	4,834,639	24	28,585,450
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20,000,000	4,834,639	24	28,585,450
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23,140,000,000	1,673,809,135	7	4,254,371,204
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	23,140,000,000	1,673,809,135	7	4,254,371,204
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	23,140,000,000	1,673,809,135	7	4,254,371,204
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2,794,787,771	13,621,000	0	1,833,115,772
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2,794,787,771	13,621,000	0	1,833,115,772
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2,794,787,771	13,621,000	0	1,833,115,772
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	367,455,000	101,611,269	28	11,672,382
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	0	0	1,421,000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	0	0	1,208,500
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0	0	0	212,500
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	0	0	6,597,573
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	0	0	299,652
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0	0	0	3,261,430
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0	0	0	3,036,491
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0	0	0	50,125
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	0	0	22,425
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0	0	0	27,700

4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250,000	2,069,481	828	2,761,403
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	200,000	1,864,761	932	2,183,404
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	20,000	173,220	866	294,499
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	30,000	31,500	105	283,500
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	0	0	190,690
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	0	0	190,690
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	305,000,000	48,273,606	16	651,591
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	305,000,000	48,273,606	16	651,591
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2,705,000	7,352,469	272	0
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2,000,000	5,809,482	290	0
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	350,000	876,247	250	0
4.1.04.12.19.0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	80,000	228,800	286	0
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200,000	219,420	110	0
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	40,000	105,000	263	0
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0	28,445	0	0
4.1.04.12.19.0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	25,000	75,400	302	0
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	10,000	9,675	97	0
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	59,500,000	43,875,727	74	0
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	59,500,000	43,875,727	74	0
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0	39,986	0	0
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0	39,986	0	0
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	6,600,000	7,900,500	120	6,036,000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	6,600,000	7,900,500	120	6,036,000

4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	6,600,000	7,900,500	120	6,036,000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	14,244,739,751	3,710,368,751	26	8,303,740
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	200,000,000	431,210,000	216	0
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	200,000,000	431,210,000	216	0
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	240,000,000	0	0	1,268,740
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	60,000,000	0	0	1,268,740
4.1.04.15.08.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	60,000,000	0	0	0
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	60,000,000	0	0	0
4.1.04.15.08.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK	60,000,000	0	0	0
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,000,000	0	0	0
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1,000,000	0	0	0
4.1.04.15.09.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1,326,000,000	0	0	210,000
4.1.04.15.11.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD	100,000,000	0	0	0

4.1.04.15.11.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-Tunjangan Keluarga DPRD	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD	20,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD	500,000,000	0	0	210,000
4.1.04.15.11.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD	6,000,000	0	0	0
4.1.04.15.11.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	620,000,000	894,000	0	0
4.1.04.15.15.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	100,000,000	894,000	1	0

4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.15.0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.15.0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	60,000,000	0	0	0
4.1.04.15.15.0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	60,000,000	0	0	0
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	220,000,000	4,000,000	2	0
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50,000,000	0	0	0
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50,000,000	0	0	0
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.16.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10,000,000	0	0	0
4.1.04.15.16.0673	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel	10,000,000	4,000,000	40	0
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	1,308,000,000	0	0	0

4.1.04.15.17.0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.17.0550	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	100,000,000	0	0	0
4.1.04.15.17.0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	408,000,000	0	0	0
4.1.04.15.17.0569	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	500,000,000	0	0	0
4.1.04.15.17.0612	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	200,000,000	0	0	0
4.1.04.15.30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	3,268,739,751	3,268,739,751	100	0
4.1.04.15.30.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3,268,739,751	3,268,739,751	100	0
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	50,000,000	0	0	0
4.1.04.15.46.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	40,000,000	0	0	0
4.1.04.15.46.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10,000,000	0	0	0
4.1.04.15.48	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	2,000,000,000	0	0	0

4.1.04.15.48.0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.49	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	2,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.49.0058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan	2,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	1,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.51.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	1,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.65.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Lainnya	1,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	1,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.66.0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	1,000,000,000	0	0	0
4.1.04.15.87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	10,000,000	5,525,000	55	6,825,000
4.1.04.15.87.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	10,000,000	5,525,000	55	6,825,000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0	0	0	51,968,949,418
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	0	0	51,968,949,418
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0	0	0	51,968,949,418
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	135,319,583,233	103,693,905,622	77	86,577,030,313
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	536,348,487,136	521,119,602,894	97	552,842,570,426
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	498,748,726,282	485,056,514,134	97	526,151,349,147
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0	0	0	519,277,822,147
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0	0	0	16,788,145,000

4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	2,357,662,000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0	0	0	7,780,167,000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	0	0	617,336,000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0	0	0	293,490,000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0	0	0	230,376,000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	0	0	6,364,000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0	0	0	47,701,000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	0	0	2,152,358,000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0	0	0	2,192,277,000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0	0	0	1,110,414,000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0	0	0	416,863,636,472
4.2.01.01.02.0001	DAU	0	0	0	356,476,320,000
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0	0	0	3,400,000,000
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0	0	0	5,449,314,472
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0	0	0	24,957,635,000
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0	0	0	23,278,292,000
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0	0	0	3,302,075,000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	0	0	39,617,484,382
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0	0	0	224,297,000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0	0	0	878,157,500
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0	0	0	7,597,768,311
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0	0	0	797,565,000
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0	0	0	1,572,900,000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0	0	0	28,546,796,571
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0	0	0	46,008,556,293
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0	0	0	14,110,935,773
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0	0	0	427,500,000

4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0	0	0	20,299,375,000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0	0	0	527,208,000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0	0	0	1,444,342,000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0	0	0	267,660,000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0	0	0	2,947,154,409
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0	0	0	1,607,727,322
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	0	0	406,000,000
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0	0	0	3,970,653,789
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	23,704,116,000	20,492,904,000	86	0
4.2.01.07.01	DBH Pajak	12,792,239,000	14,441,003,000	113	0
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	2,736,145,000	3,733,343,000	136	0
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9,113,398,000	9,649,010,000	106	0
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	612,934,000	724,126,000	118	0
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	329,762,000	334,524,000	101	0
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	10,059,870,000	5,199,894,000	52	0
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	11,050,000	11,051,000	100	0
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	1,029,000	1,029,000	100	0
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	133,354,000	131,614,000	99	0
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	7,059,975,000	4,112,780,000	58	0
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	986,395,000	99,538,000	10	0
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	1,868,067,000	843,882,000	45	0
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	852,007,000	852,007,000	100	0
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	852,007,000	852,007,000	100	0
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	424,615,492,000	417,473,315,237	98	0
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	350,344,206,000	349,989,458,769	100	0
4.2.01.08.01.0001	DAU	350,344,206,000	349,989,458,769	100	0
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	74,271,286,000	67,483,856,468	91	0
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	3,400,000,000	3,400,000,000	100	0
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13,938,826,000	7,151,396,468	51	0
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	31,206,009,000	31,206,009,000	100	0
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	25,726,451,000	25,726,451,000	100	0

4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	50,429,118,282	47,090,294,897	93	0
4.2.01.09.01	DAK Fisik	2,549,978,000	2,523,973,900	99	0
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	249,978,000	249,856,500	100	0
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	2,300,000,000	2,274,117,400	99	0
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	47,879,140,282	44,566,320,997	93	0
4.2.01.09.02.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	1,882,320,000	469,433,215	25	0
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	13,836,231,263	13,830,099,063	100	0
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	355,000,000	355,000,000	100	0
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	1,352,650,000	1,326,610,000	98	0
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45,000,000	45,000,000	100	0
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	306,540,000	306,540,000	100	0
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2,165,695,000	0	0	0
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	116,421,000	116,421,000	100	0
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	1,754,699,019	1,754,699,019	100	0
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	24,878,279,000	25,308,993,700	102	0
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	184,530,000	51,750,000	28	0
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	997,215,000	997,215,000	100	0
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	4,560,000	4,560,000	100	0
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	498,748,726,282	485,056,514,134	97	519,277,822,147
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0	0	0	6,873,527,000
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0	0	0	6,873,527,000
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0	0	0	6,873,527,000
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0	0	0	6,873,527,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37,599,760,854	36,063,088,760	96	26,691,221,279
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	37,474,760,854	33,438,088,760	89	26,691,221,279
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37,474,760,854	33,438,088,760	89	26,691,221,279

4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2,643,027,978	2,643,027,978	100	1,907,334,212
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,832,258,740	1,832,258,740	100	1,092,367,304
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20,453,517,351	22,294,052,054	109	11,337,819,852
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	517,153,021	301,687,173	58	252,746,329
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12,028,803,764	6,367,062,815	53	12,100,953,582
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	125,000,000	2,625,000,000	2,100	0
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	125,000,000	2,625,000,000	2,100	0
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	125,000,000	2,625,000,000	2,100	0
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	37,599,760,854	36,063,088,760	96	26,691,221,279
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	536,348,487,136	521,119,602,894	97	552,842,570,426
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,277,879,750	6,718,564,796	127	6,287,046,876
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,267,140,000	2,707,825,046	214	48,916,642
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1,267,140,000	2,707,825,046	214	48,916,642
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1,267,140,000	2,707,825,046	214	48,916,642
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1,267,140,000	2,707,825,046	214	48,916,642
4.3.02	Dana Darurat	4,000,000,000	4,000,000,000	100	0
4.3.02.01	Dana Darurat	4,000,000,000	4,000,000,000	100	0
4.3.02.01.01	Dana Darurat	4,000,000,000	4,000,000,000	100	0
4.3.02.01.01.0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	4,000,000,000	4,000,000,000	100	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10,739,750	10,739,750	100	6,238,130,234
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0	0	0	38,000
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0	0	0	38,000
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0	0	0	38,000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10,739,750	10,739,750	100	6,238,092,234
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10,739,750	10,739,750	100	6,238,092,234
4.3.03.02.01.000	Pendapatan Dana Kapitasi	10,739,750	10,739,750	100	6,238,092,234

1	JKN pada FKTP				
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5,277,879,750	6,718,564,796	127	6,287,046,876
	JUMLAH PENDAPATAN	676,945,950,119	631,532,073,312	93	645,706,647,616
5	BELANJA DAERAH	668,778,402,244	599,675,067,176	90	634,937,821,175
5.1	BELANJA OPERASI	611,323,616,436	557,823,663,149	91	539,711,097,852
5.1.01	Belanja Pegawai	303,856,085,794	274,631,306,866	90	252,686,424,106
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	205,790,599,851	179,766,359,773	87	160,814,307,594
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	141,418,818,344	132,372,858,284	94	124,428,324,538
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	116,763,047,674	112,112,184,812	96	113,047,865,062
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	24,655,770,670	20,260,673,472	82	11,380,459,476
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	13,685,088,531	11,830,810,521	86	11,269,705,370
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11,073,115,198	10,340,981,384	93	10,402,849,754
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2,611,973,333	1,489,829,137	57	866,855,616
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4,900,270,250	4,571,572,000	93	4,823,365,267
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4,900,270,250	4,571,572,000	93	4,823,365,267
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10,002,103,620	8,141,138,358	81	7,173,422,000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7,444,998,990	6,711,675,000	90	6,809,414,000
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2,557,104,630	1,429,463,358	56	364,008,000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2,729,023,125	1,832,253,895	67	1,849,603,000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1,891,725,625	1,418,465,000	75	1,392,413,000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	837,297,500	413,788,895	49	457,190,000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	8,781,601,876	7,111,812,973	81	6,735,929,040
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	6,437,842,864	5,972,260,140	93	6,094,939,620
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,343,759,012	1,139,552,833	49	640,989,420
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	281,002,559	210,367,891	75	120,619,690
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	275,157,559	210,367,891	76	120,619,690
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5,845,000	0	0	0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2,480,885	1,791,832	72	1,790,090
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,825,473	1,453,653	80	1,572,467
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	655,412	338,179	52	217,623
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21,480,706,868	11,642,230,586	54	2,398,083,764
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17,284,243,349	9,139,472,999	53	1,124,860,996

5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4,196,463,519	2,502,757,587	60	1,273,222,768
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	591,354,433	466,395,540	79	496,047,289
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	282,671,153	230,061,075	81	228,943,905
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	308,683,280	236,334,465	77	267,103,384
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1,332,828,720	1,061,166,613	80	1,062,072,986
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	850,000,000	690,184,691	81	686,834,258
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	482,828,720	370,981,922	77	375,238,728
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	585,320,640	523,961,280	90	455,344,560
5.1.01.01.13.0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	585,320,640	523,961,280	90	455,344,560
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	80,761,415,840	78,871,696,991	98	53,756,323,161
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	50,739,305,972	48,791,235,022	96	49,954,080,161
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50,739,305,972	48,791,235,022	96	49,954,080,161
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3,683,018,530	3,575,293,000	97	3,802,243,000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3,683,018,530	3,575,293,000	97	3,802,243,000
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26,339,091,338	26,505,168,969	101	0
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	10,905,600	10,905,600	100	0
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	72,981,090	72,981,090	100	0
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	57,900,000	57,900,000	100	0
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	242,962,123	231,645,413	95	0
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	82,007,076	82,007,076	100	0
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	57,948,179	57,948,179	100	0
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	980,970	980,970	100	0

5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50,878,200	50,878,199	100	0
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18,000,000	9,600,000	53	0
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	37,898,370	37,646,370	99	0
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	906,000	906,000	100	0
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	20,003,414	16,843,974	84	0
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	4,288,800	4,288,800	100	0
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2,704,290	2,704,290	100	0
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2,341,530	2,341,529	100	0
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1,386,000	1,165,500	84	0
5.1.01.02.06.0044	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	43,960,000	24,000,000	55	0
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	2,840,000	2,840,000	100	0
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	25,159,349,000	25,600,714,100	102	0
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	184,530,000	51,750,000	28	0
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	284,320,696	185,121,879	65	0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0	0	0	24,595,631,899
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0	0	0	542,878,148

5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0	0	0	19,368,000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0	0	0	46,429,200
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0	0	0	5,884,000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0	0	0	13,827,000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	283,861,183
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0	0	0	3,738,000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0	0	0	87,270,765
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	82,500,000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0	0	0	144,127,405
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0	0	0	2,379,780
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0	63,252,750
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0	0	0	5,689,211
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	0	0	0	1,138,500
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	21,437,244
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	0	0	0	6,316,246
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	0	0	0	10,833,674
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0	0	0	1,387,500

5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	0	0	0	26,000,000
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	0	0	0	5,692,500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0	0	0	20,010,997,300
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0	0	0	20,010,997,300
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0	0	0	526,500,000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0	0	0	526,500,000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0	2,822,159,046
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	0	0	2,822,159,046
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0	0	0	548,970,000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0	0	0	151,420,000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	0	41,450,000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0	0	0	356,100,000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7,673,720,326	7,111,241,516	93	7,386,582,726
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	451,290,000	451,290,000	100	451,290,000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	451,290,000	451,290,000	100	451,290,000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47,663,070	26,636,400	56	33,734,400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	47,663,070	26,636,400	56	33,734,400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64,395,864	49,680,120	77	49,535,280
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64,395,864	49,680,120	77	49,535,280
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	58,476,600	45,129,000	77	44,982,000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	58,476,600	45,129,000	77	44,982,000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654,370,500	654,370,500	100	654,370,500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654,370,500	654,370,500	100	654,370,500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	114,266,313	81,210,150	71	46,405,800
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	114,266,313	81,210,150	71	46,405,800
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63,750,744	0	0	0
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63,750,744	0	0	0
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,512,000,000	1,512,000,000	100	1,512,000,000

5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1,512,000,000	1,512,000,000	100	1,512,000,000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378,000,000	0	0	0
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	378,000,000	0	0	0
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	13,338,506	1,400,874	11	8,823,418
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	13,338,506	1,400,874	11	8,823,418
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	32,260	14,840	46	14,840
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	32,260	14,840	46	14,840
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1,562,136,469	1,535,509,632	98	1,532,266,488
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59,400,469	38,821,632	65	22,678,488
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	18,816,000	16,128,000	86	16,128,000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	23,520,000	20,160,000	86	20,160,000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1,460,400,000	1,460,400,000	100	1,473,300,000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2,754,000,000	2,754,000,000	100	2,875,500,000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2,754,000,000	2,754,000,000	100	2,875,500,000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	0	0	177,660,000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	0	0	177,660,000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	577,695,777	291,459,308	50	160,008,726
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	180,180,000	97,500,000	54	54,600,000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	180,180,000	97,500,000	54	54,600,000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9,702,000	5,250,000	54	2,940,000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9,702,000	5,250,000	54	2,940,000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	324,324,000	175,500,000	54	98,280,000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	324,324,000	175,500,000	54	98,280,000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10,037,412	5,431,500	54	3,041,640
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	10,037,412	5,431,500	54	3,041,640
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2,353,105	1,169,028	50	695,846
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2,353,105	1,169,028	50	695,846
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6,860	3,500	51	1,960
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	6,860	3,500	51	1,960
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	20,568,240	0	0	0
5.1.01.05.07.000	Belanja Iuran Jaminan	20,568,240	0	0	0

1	Kesehatan bagi KDH/WKDH				
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10,131,040	2,848,320	28	112,320
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	10,131,040	2,848,320	28	112,320
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	20,393,120	3,756,960	18	336,960
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	20,393,120	3,756,960	18	336,960
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	529,360,000	527,670,000	100	443,920,000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	129,360,000	129,360,000	100	73,920,000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	129,360,000	129,360,000	100	73,920,000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400,000,000	398,310,000	100	370,000,000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400,000,000	398,310,000	100	370,000,000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8,523,294,000	8,062,879,278	95	5,529,650,000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	8,523,294,000	8,062,879,278	95	5,529,650,000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	8,523,294,000	8,062,879,278	95	5,529,650,000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293,957,847,651	272,013,976,502	93	249,741,824,398
5.1.02.01	Belanja Barang	82,587,320,315	73,659,056,125	89	58,124,314,217
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82,358,559,415	73,434,106,125	89	57,951,914,217
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	253,390,120	253,000,540	100	414,677,602
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0	0	0	6,240,000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6,470,617,903	5,315,941,769	82	5,128,055,152
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	110,514,700	110,514,700	100	81,440,000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1,129,500	0	0	5,175,000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	17,369,000	14,995,000	86	8,831,400
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31,375,000	31,324,800	100	31,199,500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	121,860,100	68,030,750	56	0
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	4,128,400	3,990,000	97	15,100,000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	63,405,930	26,942,610	42	75,203,147
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2,159,327,697	1,883,005,531	87	153,373,500
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	897,600	0	0	0
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3,279,000	3,279,000	100	4,099,500
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	28,948,800	28,943,000	100	0
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8,437,876,886	8,190,260,588	97	6,600,478,710
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3,464,460,700	3,281,757,009	95	3,457,623,800

5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,083,395,199	6,253,119,124	88	6,030,759,188
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	279,049,480	237,532,800	85	297,512,200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5,093,448,300	4,901,989,430	96	4,686,068,200
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1,840,583,786	1,663,766,098	90	1,726,979,324
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,234,843,500	1,203,842,867	97	1,210,924,285
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	441,930,022	430,320,467	97	1,707,040,498
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	229,137,000	228,966,000	100	8,653,500
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1,029,456,600	1,005,849,600	98	660,864,650
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1,463,157,261	1,242,106,391	85	1,231,710,634
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4,535,588,776	4,472,076,503	99	1,242,352,129
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,269,645,477	989,061,464	78	426,720,136
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7,165,474,067	5,811,042,517	81	2,975,733,102
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	549,816,600	49,812,000	9	1,072,485,650
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2,482,678,700	2,252,538,850	91	3,638,961,824
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,873,090,452	9,815,669,431	83	9,938,654,669
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5,661,165,670	5,264,835,520	93	1,585,813,532
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	298,970,028	297,673,100	100	110,421,000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4,914,999,164	4,885,685,000	99	0
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0	0	0	248,444,000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0	0	0	9,000,000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2,247,821,797	1,802,456,016	80	1,784,349,545
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	218,500,000	215,062,800	98	0
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	180,306,000	179,265,000	99	206,410,050

5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	133,648,000	133,200,000	100	76,462,350
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	138,500,000	135,930,000	98	29,900,000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	79,730,000	58,248,000	73	247,393,000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0	0	389,003,940
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	116,190,000	115,560,000	99	129,708,000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	29,950,000	29,900,000	100	0
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	192,675,000	158,406,800	82	60,000,000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	320,427,200	303,340,000	95	238,091,500
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	45,000,000	44,816,250	100	0
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	40,800,000	40,048,800	98	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	228,760,900	224,950,000	98	172,400,000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	228,760,900	224,950,000	98	172,400,000
5.1.02.02	Belanja Jasa	83,803,890,911	74,063,518,130	88	84,962,885,610
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	55,703,383,952	50,142,604,780	90	67,644,679,186
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,709,030,000	3,824,546,654	81	3,197,550,900
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	159,840,000	149,730,000	94	439,580,000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	16,830,000	16,830,000	100	201,870,000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	48,000,000	2,800,000	6	1,200,000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	251,400,000	250,800,000	100	0
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1,311,700,000	1,285,750,000	98	421,860,000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	245,400,000	169,700,000	69	186,300,000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2,017,320,000	1,924,904,000	95	2,421,200,000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2,115,108,400	1,528,664,184	72	3,519,955,700
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	83,645,000	67,251,485	80	10,385,500
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	693,096,000	646,896,000	93	425,016,000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1,656,000,000	1,633,500,000	99	1,658,500,000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	938,520,000	935,682,000	100	1,394,685,000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	719,410,000	718,776,000	100	1,727,410,000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	720,100,000	548,030,000	76	444,450,000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	929,288,000	918,038,000	99	2,449,855,000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4,560,000	4,560,000	100	53,400,000

5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	521,850,000	457,850,000	88	474,850,000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7,556,804,000	6,753,972,000	89	13,212,155,000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	283,536,000	272,940,000	96	1,109,130,000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	374,400,000	361,200,000	96	221,300,000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,987,974,800	1,426,780,800	72	1,631,892,700
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	760,192,000	688,492,000	91	1,501,600,000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	297,592,000	266,990,000	90	4,619,180,000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	562,096,000	510,600,000	91	1,892,275,000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	74,913,000	68,810,000	92	213,798,000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1,427,350,000	1,426,300,000	100	1,688,805,000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	20,800,000	20,800,000	100	151,800,000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	493,950,000	462,150,000	94	892,250,000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	0	0	136,654,800
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	24,000,000	5,500,000	23	22,400,000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	161,000,000	125,500,000	78	10,000,000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	49,000,000	44,751,000	91	34,730,000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	298,903,519	197,133,761	66	49,985,000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5,316,877,500	5,267,197,500	99	5,228,973,502
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	15,000,000	0	0	17,500,000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	317,542,000	272,509,000	86	180,875,000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	34,800,000	1,256,894	4	15,954,726
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1,088,865,390	802,651,826	74	785,552,482
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5,423,551,791	4,649,072,593	86	11,001,221,223
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	128,023,109	125,091,325	98	88,506,200
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4,422,364,780	4,179,192,390	95	2,713,133,750
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	7,540,000	831,000	11	824,990
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	0	0	18,544,500
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	570,330,663	353,951,865	62	253,966,714
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	6,420,000,000	6,350,362,503	99	0
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	4,000,000	0	0	0
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	0	0	0	923,602,499

5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	60,600,000	60,300,000	100	0
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	321,680,000	305,360,000	95	0
5.1.02.02.01.0082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	58,600,000	58,600,000	100	0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22,413,011,000	19,306,719,550	86	13,332,073,200
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	19,513,549,400	17,817,046,750	91	12,842,078,800
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	196,660,800	138,516,000	70	86,794,400
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1,608,810,000	804,260,000	50	240,000,000
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	1,093,990,800	546,896,800	50	163,200,000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	70,235,892	53,115,394	76	14,700,000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	28,292,602	27,115,394	96	0
5.1.02.02.03.0013	Belanja Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	20,029,800	20,000,000	100	4,200,000
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	21,913,490	6,000,000	27	10,500,000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3,277,553,000	2,556,419,532	78	2,201,180,381
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	155,000,000	155,000,000	100	130,000,000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	43,500,000	30,500,000	70	0
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0	0	0	2,400,000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2,500,000	1,250,000	50	0
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	0	0	74,020,000
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	14,400,000	3,048,032	21	3,250,526
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5,000,000	5,000,000	100	0
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	707,453,000	462,571,500	65	372,629,935
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0	0	0	25,000,000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	978,000,000	860,500,000	88	20,700,000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10,500,000	10,500,000	100	682,500,000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	219,200,000	215,800,000	98	34,000,000
5.1.02.02.04.0335	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja	0	0	0	7,800,000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1,030,000,000	700,250,000	68	768,879,920

5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	112,000,000	112,000,000	100	80,000,000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	362,524,000	268,644,000	74	264,643,000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	320,500,000	230,000,000	72	193,750,000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	42,024,000	38,644,000	92	70,893,000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	567,722,367	537,320,900	95	0
5.1.02.02.10.0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	567,722,367	537,320,900	95	0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1,409,460,700	1,198,693,974	85	1,505,609,843
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2,000,000	500,000	25	0
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1,407,460,700	1,198,193,974	85	1,505,609,843
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12,118,668,652	10,130,268,058	84	7,336,154,689
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,830,070,000	6,248,521,911	91	5,140,251,269
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	146,500,000	146,360,000	100	114,132,000
5.1.02.03.02.0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	0	0	0	417,368,750
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	60,000,000	59,960,000	100	0
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	60,000,000	29,720,000	50	0
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	147,180,000	121,210,771	82	80,330,000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1,150,575,000	1,010,621,821	88	884,715,542
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2,067,775,000	1,906,049,128	92	1,382,690,247
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	720,830,000	720,269,311	100	144,255,000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	216,700,000	191,497,900	88	158,317,000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	199,272,000	199,120,400	100	86,023,300
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	180,370,000	169,946,200	94	134,762,600

5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	19,488,000	19,395,000	100	30,666,500
5.1.02.03.02.0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0	0	0	19,995,800
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0	0	0	39,407,600
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	5,000,000	4,900,000	98	9,435,000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	212,410,000	201,993,500	95	343,873,050
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	168,900,000	136,495,700	81	125,494,500
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0	0	0	24,536,200
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	357,940,000	349,518,000	98	395,232,280
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	340,000,000	320,135,880	94	45,530,000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0	0	0	4,320,000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	393,490,000	344,530,000	88	672,760,100
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	303,640,000	251,802,000	83	0
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	80,000,000	64,996,300	81	0
5.1.02.03.02.0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	0	0	0	26,405,800
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,193,602,193	3,750,162,178	89	1,878,021,080
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3,322,422,069	2,887,096,393	87	1,379,376,616
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	122,213,380	122,213,380	100	27,759,100

	Tempat Kerja Lainnya				
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	748,966,744	740,852,405	99	397,340,000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0	0	0	73,545,364
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,014,235,420	50,839,200	5	317,882,340
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	14,937,000	14,937,000	100	128,476,140
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	399,117,400	8,118,200	2	139,955,700
5.1.02.03.04.0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	150,181,020	27,784,000	19	0
5.1.02.03.04.0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	0	0	0	49,450,500
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	450,000,000	0	0	0
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	59,261,039	59,244,769	100	0
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	59,261,039	59,244,769	100	0
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	21,500,000	21,500,000	100	0
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	21,500,000	21,500,000	100	0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	41,820,543,134	37,132,387,243	89	34,196,790,566
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41,820,543,134	37,132,387,243	89	34,196,790,566
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37,619,555,134	33,947,862,193	90	29,920,878,766
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,112,595,000	2,126,747,050	68	3,880,139,800
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	939,303,000	908,688,000	97	395,772,000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	149,090,000	149,090,000	100	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,211,800,000	8,822,950,606	96	4,363,575,000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7,762,700,000	7,562,838,000	97	4,363,575,000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6,447,700,000	6,443,838,000	100	4,363,175,000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0	0	0	400,000

5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1,000,000,000	1,000,000,000	100	0
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	315,000,000	119,000,000	38	0
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,449,100,000	1,260,112,606	87	0
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	63,500,000	50,833,332	80	0
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1,385,600,000	1,209,279,274	87	0
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0	8,877,855,499
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0	8,877,855,499
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	0	0	8,877,855,499
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	9,524,092,600	9,524,019,600	100	329,410,000
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	9,167,502,600	9,167,429,600	100	0
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	8,899,432,600	8,899,359,600	100	0
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	268,070,000	268,070,000	100	0
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	50,050,000	50,050,000	100	61,750,000
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	50,050,000	50,050,000	100	61,750,000
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	306,540,000	306,540,000	100	267,660,000
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	306,540,000	306,540,000	100	267,660,000
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3,112,955,000	2,756,145,928	89	3,450,681,019
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3,112,955,000	2,756,145,928	89	3,450,681,019
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3,112,955,000	2,756,145,928	89	3,450,681,019
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51,778,577,039	55,925,630,812	108	48,100,157,798
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51,778,577,039	55,925,630,812	108	48,100,157,798
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	51,778,577,039	55,925,630,812	108	48,100,157,798
5.1.03	Belanja Bunga	3,972,444,293	3,972,444,293	100	4,810,720,372
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3,972,444,293	3,972,444,293	100	4,810,720,372
5.1.03.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3,972,444,293	3,972,444,293	100	4,810,720,372
5.1.03.04.02.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	3,972,444,293	3,972,444,293	100	4,810,720,372
5.1.04	Belanja Subsidi	270,000,000	135,000,000	50	0
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	270,000,000	135,000,000	50	0
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	270,000,000	135,000,000	50	0

5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	270,000,000	135,000,000	50	0
5.1.05	Belanja Hibah	7,626,988,698	5,500,685,488	72	30,344,160,976
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,200,000,000	1,087,613,000	91	24,218,104,940
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,200,000,000	1,087,613,000	91	24,218,104,940
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1,200,000,000	1,087,613,000	91	24,218,104,940
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2,902,969,010	930,000,000	32	2,430,000,000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50,000,000	50,000,000	100	1,795,000,000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50,000,000	50,000,000	100	1,795,000,000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1,730,000,000	580,000,000	34	635,000,000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1,730,000,000	580,000,000	34	635,000,000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1,122,969,010	300,000,000	27	0
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1,122,969,010	300,000,000	27	0
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	387,919,688	387,919,688	100	319,368,486
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	387,919,688	387,919,688	100	319,368,486
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	387,919,688	387,919,688	100	319,368,486
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	3,136,100,000	3,095,152,800	99	3,376,687,550
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1,788,500,000	1,782,367,800	100	1,994,095,550
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	1,788,500,000	1,782,367,800	100	1,994,095,550
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1,347,600,000	1,312,785,000	97	1,382,592,000
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	1,347,600,000	1,312,785,000	97	1,382,592,000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1,640,250,000	1,570,250,000	96	2,127,968,000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	400,000,000	368,000,000	92	1,448,968,000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	400,000,000	368,000,000	92	1,448,968,000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	400,000,000	368,000,000	92	1,448,968,000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	873,000,000	850,500,000	97	366,000,000

5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	873,000,000	850,500,000	97	366,000,000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	873,000,000	850,500,000	97	366,000,000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	367,250,000	351,750,000	96	313,000,000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	367,250,000	351,750,000	96	313,000,000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	367,250,000	351,750,000	96	313,000,000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	611,323,616,436	557,823,663,149	91	539,711,097,852
5.2	BELANJA MODAL	51,089,883,309	39,328,736,532	77	94,093,777,097
5.2.01	Belanja Modal Tanah	902,279,800	902,279,800	100	3,190,184,400
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	902,279,800	902,279,800	100	3,190,184,400
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	902,279,800	902,279,800	100	3,190,184,400
5.2.01.01.02.0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	902,279,800	902,279,800	100	3,190,184,400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,435,644,872	19,860,621,966	89	45,563,355,122
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1,126,877,398	1,103,296,798	98	416,050,788
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	945,356,600	927,738,000	98	0
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	770,356,600	754,800,000	98	0
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	175,000,000	172,938,000	99	0
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	181,520,798	175,558,798	97	416,050,788
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	105,000,000	103,119,000	98	188,000,000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	23,735,798	23,599,798	99	168,361,938
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	52,785,000	48,840,000	93	59,688,850
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	164,950,000	150,799,999	91	2,728,800,000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	164,950,000	150,799,999	91	2,728,800,000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0	2,638,800,000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	164,950,000	150,799,999	91	90,000,000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	41,480,498	41,466,498	100	239,294,593
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	37,966,498	37,966,498	100	239,294,593
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	37,966,498	37,966,498	100	239,294,593
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	3,514,000	3,500,000	100	0
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3,514,000	3,500,000	100	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7,629,640,614	7,229,403,506	95	4,226,427,167
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	523,307,800	406,888,700	78	592,719,750

5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	195,728,200	161,786,200	83	131,030,500
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	327,579,600	245,102,500	75	461,689,250
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7,025,639,164	6,744,333,906	96	3,456,333,917
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3,504,234,070	3,457,700,294	99	605,015,130
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	44,975,000	44,622,000	99	0
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	118,337,596	79,840,495	67	277,854,041
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1,250,040,900	1,197,291,600	96	512,734,000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	211,033,500	156,453,645	74	68,121,300
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,801,716,200	1,713,123,974	95	1,824,475,504
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	95,301,898	95,301,898	100	168,133,942
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	80,693,650	78,180,900	97	177,373,500
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	50,800,000	48,451,500	95	152,373,500
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29,893,650	29,729,400	99	25,000,000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1,149,879,000	844,609,047	73	77,278,900
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	936,924,000	750,519,045	80	77,278,900
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	535,450,000	503,014,345	94	53,350,000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	286,474,000	140,278,700	49	23,928,900
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	115,000,000	107,226,000	93	0
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	212,955,000	94,090,002	44	0
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	212,955,000	94,090,002	44	0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3,262,053,868	2,256,879,364	69	31,978,673,129
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3,183,978,868	2,178,957,364	68	31,973,549,329
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	972,442,626	761,681,246	78	4,242,982,250
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	933,953,842	635,663,117	68	0
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0	0	0	2,551,374,655
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	673,469,000	406,221,075	60	64,720,000
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	108,711,000	72,394,200	67	185,900,000
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	15,806,400	0	0	0
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	65,740,000	20,291,826	31	2,660,280,390
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	108,186,000	0	0	274,500,000
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0	0	0	4,047,700,588
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	0	0	0	626,384,800

5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0	0	0	15,661,500,000
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0	0	0	1,018,000,000
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	0	0	0	406,406,646
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	305,670,000	282,705,900	92	233,800,000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	78,075,000	77,922,000	100	5,123,800
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	78,075,000	77,922,000	100	5,123,800
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	569,048,400	221,890,060	39	790,936,800
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	569,048,400	221,890,060	39	676,150,000
5.2.02.08.01.0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia	0	0	0	77,750,000
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	42,218,000	32,407,560	77	592,900,000
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	526,830,400	189,482,500	36	0
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0	0	0	5,500,000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	0	0	0	114,786,800
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	0	0	0	49,736,800
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	0	0	0	65,050,000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6,849,179,995	6,645,893,714	97	1,345,608,700
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1,606,783,675	1,437,059,868	89	1,141,033,700
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	241,500,000	240,500,370	100	0
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1,365,283,675	1,196,559,498	88	1,141,033,700
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	5,242,396,320	5,208,833,846	99	204,575,000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5,036,766,320	5,004,153,844	99	193,975,000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2,680,000	2,680,000	100	10,600,000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	202,950,000	202,000,002	100	0
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	0	0	2,639,450,000
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0	0	0	2,639,450,000
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	0	0	0	2,639,450,000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	82,478,895	82,443,895	100	110,373,595
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	5,999,245	5,999,245	100	42,396,153
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	5,999,245	5,999,245	100	42,396,153
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	76,479,650	76,444,650	100	67,977,442
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	14,274,650	14,274,650	100	67,977,442
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	62,205,000	62,170,000	100	0
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0	0	0	73,376,550
5.2.02.18.02	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0	0	0	73,376,550

5.2.02.18.02.0001	Belanja Modal Runway/Threshold Light	0	0	0	73,376,550
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	38,550,000	25,311,885	66	0
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	38,550,000	25,311,885	66	0
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	38,550,000	25,311,885	66	0
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0	351,321,300
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0	351,321,300
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0	0	0	351,321,300
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	554,090,100	554,090,100	100	0
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	554,090,100	554,090,100	100	0
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	554,090,100	554,090,100	100	0
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	967,416,104	704,537,100	73	585,763,600
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	967,416,104	704,537,100	73	585,763,600
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	967,416,104	704,537,100	73	585,763,600
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,842,335,522	9,010,293,881	57	24,509,089,004
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15,842,335,522	9,010,293,881	57	24,509,089,004
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15,842,335,522	9,010,293,881	57	24,509,089,004
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1,859,118,480	1,837,245,111	99	1,322,838,200
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2,364,004,036	2,324,348,000	98	13,182,075,950
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	18,766,650	18,316,650	98	886,209,750
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8,457,627,000	2,416,559,900	29	0
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1,190,146,356	501,223,750	42	9,117,965,104
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1,458,000,000	1,419,999,970	97	0
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	494,673,000	492,600,500	100	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8,852,085,815	6,523,246,035	74	17,516,454,071
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7,313,165,015	5,003,955,835	68	16,222,700,171
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	7,313,165,015	5,003,955,835	68	16,222,700,171
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	4,816,743,135	4,620,401,435	96	15,363,412,571
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2,496,421,880	383,554,400	15	859,287,600
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1,461,327,550	1,441,696,950	99	498,229,050
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	41,327,550	41,327,550	100	498,229,050
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	41,327,550	41,327,550	100	498,229,050

5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1,420,000,000	1,400,369,400	99	0
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1,420,000,000	1,400,369,400	99	0
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	77,593,250	77,593,250	100	795,524,850
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	77,593,250	77,593,250	100	795,524,850
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	77,593,250	77,593,250	100	795,524,850
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,882,537,300	2,857,797,300	99	3,314,694,500
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	200,000,000	175,260,000	88	0
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	200,000,000	175,260,000	88	0
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	31,775,600	29,040,000	91	0
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	40,192,400	33,820,000	84	0
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	68,328,000	59,680,000	87	0
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	59,704,000	52,720,000	88	0
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	0	0	3,314,694,500
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	0	0	3,314,694,500
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0	0	0	3,314,694,500
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2,682,537,300	2,682,537,300	100	0
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	2,682,537,300	2,682,537,300	100	0
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	2,682,537,300	2,682,537,300	100	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175,000,000	174,497,550	100	0
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	175,000,000	174,497,550	100	0
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	175,000,000	174,497,550	100	0
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	175,000,000	174,497,550	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	51,089,883,309	39,328,736,532	77	94,093,777,097
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,364,902,499	2,522,667,495	40	1,132,946,226
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,364,902,499	2,522,667,495	40	1,132,946,226
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,364,902,499	2,522,667,495	40	1,132,946,226
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	6,364,902,499	2,522,667,495	40	1,132,946,226
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	6,364,902,499	2,522,667,495	40	1,132,946,226
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	6,364,902,499	2,522,667,495	40	1,132,946,226
	JUMLAH BELANJA	668,778,402,244	599,675,067,176	90	634,937,821,175
	SURPLUS/DEFISIT	8,167,547,875	31,857,006,136	390	10,768,826,440
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(8,167,547,875)	(8,167,547,875)	100	(6,138,569,328)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4,630,257,113	4,630,257,113	100	6,659,235,660

6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4,630,257,113	4,630,257,113	100	6,659,235,660
6.1.01.05	Penghematan Belanja	4,628,858,376	4,630,257,113	100	1,627,396,172
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	4,628,858,376	4,630,257,113	100	1,584,614,479
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	350,595,103	4,630,257,113	1,321	1,584,614,479
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	2,920,007,292	0	0	0
6.1.01.05.01.0039	Penghematan Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1,358,255,981	0	0	0
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0	0	0	42,781,693
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0	0	0	42,781,693
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1,398,737	0	0	5,031,839,489
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	0	0	5,031,839,489
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	0	0	5,031,839,489
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	1,398,737	0	0	0
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	1,398,737	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	4,630,257,113	4,630,257,113	100	6,659,235,660
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12,797,804,988	12,797,804,988	100	12,797,804,988
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12,797,804,988	12,797,804,988	100	12,797,804,988
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	12,797,804,988	12,797,804,988	100	12,797,804,988
6.2.03.04.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	12,797,804,988	12,797,804,988	100	12,797,804,988
6.2.03.04.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	12,797,804,988	12,797,804,988	100	12,797,804,988
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12,797,804,988	12,797,804,988	100	12,797,804,988
	PEMBIAYAAN NETTO	(8,167,547,875)	(8,167,547,875)	100	(6,138,569,328)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	23,689,458,261	0	4,630,257,113

Data Diolah Oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

TABEL 12
PROGRAM/KEGIATAN DAN REALISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA SIBOLGA

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI

1	2	3	4	5
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**87.236.779,009**	**84,695,285,729**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,720,462,693	83,307,931,551	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339,962,505	339,863,000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,033,682,811	905,025,178	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142,671,000	142,466,000	
	Program Pengelolaan Pendidikan	**55,212,923,007**	**54,975,682,802**	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25,849,274,519	25,778,289,500	
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19,898,311,769	19,875,859,402	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8,653,293,835	8,511,066,300	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	812,042,884	810,467,600	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	**1,791,819,453**	**1,781,842,800**	
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1,791,819,453	1,781,842,800	
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	**1,892,354,890**	**1,890,891,100**	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	**1.892,354,890**	**1,890,891,100**	
	Program Pengembangan Kebudayaan	**1,262,041,232**	**1,261,287,100**	
1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,262,041,232	1,261,287,100	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	**478,665,820**	**478,395,500**	
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	478,665,820	478,395,500	
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	**151,647,838**	**151,208,500**	
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	99,957,466	99,666,500	
2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	51.690.372	51.542.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**35.149.603.675**	**34.133.474.761**	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.370.412.067	79.801.273.642	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	300.688.108	289.384.438	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.352.230.200	2.087.997.854	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.273.300	118.355.520	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**58.413.731.109**	**50.397.664.552**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.058.165.271	11.187.660.157	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**58.413.731.109**	**50.397.664.552**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.058.165.271	11.187.660.157	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.841.967.241	37.809.116.745	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintergrasi	850.097.200	783.924.030	
	Penerbitan izin Rumah sakit Kelas C & D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatanntingkat Daerah	708.501.397	616.945.620	

	Kabupaten/Kota			
	Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	876.509.312	575.693.049	
	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	10.479.870	9.519.370	
	Perencanaan Kebutuhan & pendaya gunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan UKP & UKM di wilayah Kabupaten/Kota	262.085.012	190.417.379	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	603.944.430	375.756.300	
	Program sediaan Farmasi , alat Kesehatan dan Makanan Minuman	**126.487885**	111.617.999	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Penerbitan sertifikat Produksi PIRT & dan No PIRTsebagai izin produk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh industry rumah tangga	65.332.037	58.416.166	
	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post Market pada produk makanan Minuman Industri Rumah tang	61.155.848	53.201.833	
	Program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	**195.531.818**	170.604.118	
	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotive preventif tingkat kabupaten/kota	134.105.905	132.968.625	
	Pengembangan dan pelaksanaan UKBM tingkat daerah Kabupaten./kota	37.462.853	17.679.693	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	**78,836,771,025**	**83,473,300,156.53**	RSU F.L.Tobing
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,659,202,135	25,174,346,511	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105,836,381	85,293,079	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,240,000	71,698,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211,275,000	148,214,281	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	52,785,217,509	57,993,748,285.53	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	**3,111,489,036**	**2,580,659,304**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,111,489,036	2,580,659,304	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*4.223.102.026*	*4.068.981.938*	Dinas PKPLH Kota Sibolga
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.500.000	25.097.000	
3	Administrasi Umum Perangakat Daerah	1.112.640.485	1.057.656.927	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daera	5.560.633.255	5.506.182.713	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	3.157.604.400	2.940.622.414	
	Program Pengembanan Perumahan	**183.730.411**	**66299.535**	Dinas PKPLH Kota Sibolga
1	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	100.000.000	13.739.200	
2	*Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	*83.730.411*	52.560.335	
	Program Kawasan Permukiman	**2.135.011.005**	**1.049.527.500**	
1	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	2.135.011.005	1.049.527.500	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**916.180.367**	**885.640.517**	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**38.467.389**	**23.278.485**	

	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**234.136.739**	**234.070.269**	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	***150.181.020***	**27.784.000**	
1	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*150.181.020*	27.784.000	
	Program Pengelolaan Persampahan	**834.846.400**	**819.125.620**	
1	Pengelolaan Sampah	834.846.400	819.125.620	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**6,289,304,130**	**5,694,018,388**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,756,629,417	4,603,259,412	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333,642,050	332,555,031	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672,584,663	533,958,735	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526,448,000	224,245,210	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	**41,327,550**	**41,327,550**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	41,327,550	41,327,550	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	**77,593,250**	**77,593,250**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota	77,593,250	77,593,250	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	**27,470,400**	**27,470,400**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten / Kota	27,470,400	27,470,400	
	Program Dan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	**1,540,357,100**	**1,520,726,500**	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,540,357,100	1,520,726,500	
	Program Penataan Bangunan Gedung	**12,523,660,250**	**5,874,093,120.00**	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	12,523,660,250	5,874,093,120	
	Program Penyelenggaraan Jalan	**5,099,860,635**	**4,903,518,935**	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5,099,860,635	4,903,518,935	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**187.153.411**	**187.153.411**	
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.990.596	149.990.596	
2	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	149.990.596	149.990.596	Satpol PP Kota Sibolga
3	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.162.815	37.162.815	
4	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Ko	37.162.815	37.162.815	
5	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	47.208.000	47.208.000	

6	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	47.208.000	99.993.000	
7	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	47.208.000	99.993.000	
8	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.208.000	99.993.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.687.663.714**	**3.388.363.305**	BPBD Kota SIbolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.341.908.319	2.163.265.905	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.000.000	31.700.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.777.700	202.053.534	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.013.995	783.832.766	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.963.700	207.511.100	
	Program Penanggulangan Bencana	**369.993.162**	**297.559.060**	BPBD Kota SIbolga
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	369.993.162	297.559.060	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.401.395.532**	**3.239.494.556**	Dinas Sosial Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.544.340.568	2.466.547.574	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.996.766	319.962.100	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.121.398	333.986.225	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.936.800	118.998.657	
	Program Pemberdayaan Sosial	**1.123.498.600**	**1.107.784.700**	
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.123.498.600	1.107.784.700	
	Program Rehabilitasi Sosial	**855.827.880**	**554.089.800**	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	855.827.880	554.089.800	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	**146.878.700**	**141.874.800**	Dinas Sosial Kota Sibolga
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	146.878.700	141.874.800	
	Program Penanganan Bencana	**215.639.580**	**166.120.000**	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	215.639.580	166.120.000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	**223.911.107**	**133.014.301**	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	**99.640.277**	**46.516.952**	
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	20.154.440	17.500.952	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	79.485.837	29.016.000	
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	**70.983.246**	**42.189.286**	
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	70.983.246	42.189.286	
	Program Perlindungan Khusus Anak	**53.287.584**	**44.308.063**	
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	24.315.725	20.801.500	
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.971.859	23.506.563	
	Urusan Pemerintahan Bidang	**3.799.383.215**	**3.461.842.536**	

	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**3.113.412.805**	**2.904.305.290**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.457.238.708	2.361.177.824	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.158.996	260.813.539	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.060.601	172.650.983	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.954.500	109.662.944	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**6.380.000**	**6.380.000**	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.380.000	6.380.000	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**679.590.410**	**551.157.246**	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	679.590.410	551.157.246	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	**484.197.830**	**235.944.300**	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	484.197.830	235.944.300	
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	484.197.830	235.944.300	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**200.000.000**	**154.603.700**	
1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	154.603.700	
2	Perluasan Kesempatan Kerja	200.000.000	154.603.700	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.936.434.430**	**2.716.167.539**	
1	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	205.739.620	146.154.266	
2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	205.739.620	146.154.266	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
3	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	205.739.620	146.154.266	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	**438.432.219**	**362.250.200**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	438.432.219	362.250.200	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	438.432.219	362.250.200	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**2.877.638.941**	**2.717.339.902**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.311.299.251	2.184.085.256	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.379.792	158.203.275	
3	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	377.517.198	344.828.071	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
4	Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.442.700	30.223.300	
	Program Pembinaan Perpustakaan	**997.215.000**	**943.288.511**	
1	Pengelolaan Perpustakaan TingkatDaerah Kabupaten/Kota	997.215.000	943.288.511	

	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	**902.279.800,00**	**902.279.800,00**	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	902.279.800,00	902.279.800,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**781.338.816,00**	**610.372.561,00**	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.193.388,00	201.288.491,00	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.639.228,00	309.191.645,00	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.506.200,00	99.892.425,00	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.182.600.783**	**4.009.739.115**	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.853.124.102	2.787.225.467	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.746.129	433.221.160	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.013.200	3.344.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.617.529	6.611.500	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	51.543.300	51.532.300	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
6	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.622.000	92.231.360	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	311.050.000	292.670.370	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.841.252	416.607.035	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.581.252	126.551.035	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311.760.000	289.056.000	
11	Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.839.300	80.015.083	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	**3.374.979.488**	**3.227.229.257**	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.374.979.488	3.227.229.257	
2	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	**220.206.300**	**217.498.000**	
	- Sub Kegiatan Penyedian komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.036.000	6.028.500	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.791.600	74.674.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.493.600	9.478.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	52.787.100	52.757.500	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	76.098.000	74.560.000	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
3	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.058.177.003**	**963.394.915**	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.350.000	10.350.000	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	240.915.003	165.470.915	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	806.912.000	787.574.000	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
4	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**295.336.600**	**283.191.000**	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kenderaan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan	279.246.600	267.340.000	
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.090.000	15.851.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**6.420.000.000**	**6.350.362.503**	

	- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	6.420.000.000	6.350.000.000	
1	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**459.338.881**	**451.544.000**	
	- Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama Penunjang)	100.173.442	97.874.000	
	- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama Penunjang)	359.165.439	353.670.000	
2	**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaeringan jalan Kabupaten/ Kota**	**248.940.000**	**236.273.332**	
	- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebiakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	248.940.000	236.273.332	
	Program Pengelolaan Pelayanan	**170.147.700**	**168.953.000**	
1	**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**170.147.700**	**168.953.000**	
	- Sub kegiatannya adalah Pengawasan, Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	170.147.700	168.953.000	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	**9,001,592,533**	**7,805,172,392**	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	**861,146,564**	**721,849,914**	
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	**49,999,990**	**45,733,000**	
1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	49,999,990	45,733,000	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	**541,146,574**	**541,116,914**	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	541,146,574	541,116,914	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	**270,000,000**	**135,000,000**	
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	270,000,000	135,000,000	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	**8,140,445,969**	**7,083,322,478**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**7,593,195,738**	**6,591,101,278**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,454,289,827	4,309,893,459	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360,065,300	301,192,780	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	999,999,706	309,172,600	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,564,067,055	1,458,436,424	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214,773,850	212,406,015	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	**547,250,231**	**492,221,200**	
2	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	547,250,231	492,221,200	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.148.216.746	3.040.658.048	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,695,000	1,581,000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,693,900	3,845,000	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9,655,100	5,039,000	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177,436,000	99,945,763	
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,616,000	2,616,000	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	115,407,850	59,270,455	
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278,784,000	247,588,000	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	131,396,462	68,409,062	

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,320,000	6,400,000	
11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	115,500,000	115,500,000	
12	Pengendalian Program KKBPK	971,600	971,600	
13	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	239,745,970	85,825,595	
14	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	389,805,324	225,886,100	
15	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	173,706,300	70,473,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	3,698,800	3,698,800	
17	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	38,511,796	19,146,500	
18	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	599,614,000	176,696,784	
19	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	23,275,000	23,275,000	
20	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48,784,600	25,640,000	
21	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	170,000,000	154,000,000	
22	Pembinaan Terpadu Kampung KB	260,000,000	253,835,847	
23	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	50,300,100	43,425,000	
24	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Bencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	8,525,100	4,750,000	
25	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	2,775,500	2,775,000	
26	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	429,980,000	301,410,000	
27	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	9,400,000	9,400,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,945,800	2,190,000	
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33,510,100	28,620,600	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4,038,609,372**	**3,882,871,799**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,132,199,196	3,026,955,976	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,132,199,196	3,026,955,976	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341,436,330	340,262,700	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,187,200	14,146,000	

5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46,446,700	46,238,800	
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,055,200	44,626,000	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,777,834	24,696,300	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,783,400	20,732,000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,469,996	6,450,000	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183,716,000	183,373,600	
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387,152,046	341,001,903	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,065,000	16,060,000	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136,631,046	110,559,903	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	234,456,000	214,382,000	
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177,821,800	174,651,220	
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81,881,800	79,076,000	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31,100,000	30,943,000	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64,840,000	64,632,220	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	**2.534.122.586**	**2.418.795.367**	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**2.534.122.586**	**2.418.795.367**	
1	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.096.188.039**	**2.006.980.998**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.096.188.039	2.006.980.998	
2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.000.000**	**21.440.000**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.000.000	21.440.000	
3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**172.566.228**	**172.248.700**	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.850.100	43.644.600	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.364.200	5.356.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.499.528	9.445.300	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.678.400	2.659.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.174.000	111.143.000	
4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.678.319**	**146.992.469**	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.490.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.418.319	55.102.469	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.760.000	90.400.000	
5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.690.000**	**71.133.200**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	61.400.000	61.283.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.290.000	9.850.000	
	Belanja daerah	**6.574.436.424**	**6.349.552.504**	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sibolga
	Belanja operasi :	**6.516.956.424**	**6.292.072.504**	
1	Belanja Pegawai	2.237.262.152	2.104.216.817	
2	Belanja Barang dan Jasa	4.279.694.272	4.187.855.687	
	Belanja Modal	**57.480.000**	**57.480.000**	
1	Belanja Modal dan Peralatan Mesin	57.480.000	57.480.000	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan			Sekretariat

	Rakyat			Daerah Kota Sibolga
1	Administrasi Tata Pemerintahan	775,815,415	568,978,500	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7,350,260,954	5,828,053,012	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	880,052,400	807,412,010	
4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	66,602,080	57,366,258	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan			
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	434,776,396	390,183,472	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	252,441,900	251,061,160	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1,296,523,400	1,276,055,618	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,733,931,732	8,433,195,624	
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65,555,790	52,556,378	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	493,165,505	411,887,627	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9,084,856,438	8,910,451,633	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,678,988,925	5,256,502,546	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,874,114,820	3,327,841,741	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,394,421,644	6,363,622,166	
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,355,068,377	1,106,277,628	
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3,415,895,201	3,164,601,240	
10	Penataan Organisasi	549,628,645	422,464,980	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,177,960,000	985,345,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**20,682,898,256**	**18,426,363,710**	Sekretariat DPRD Kota Sibolga
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108,289,112	104,457,112	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,378,313,559	3,731,766,264	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162,082,000	154,887,193	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,581,053,349	2,363,685,366	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,648,913,960	1,330,143,500	
6	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,452,783,194	1,278,818,706	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,034,229,025	1,690,165,685	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8,317,234,057	7,772,439,884	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	**25,496,591,729**	**21,976,207,052**	
1	Layanan Administrasi DPRD	**1,061,720,115**	**645,388,280**	
2	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**735,865,483**	**394,165,979**	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	49,483,460	49,368,500	
4	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**982,660,360**	922,418,455	
5	Peningkatan Kapasitas DPRD	**2,164,941,291**	1,653,254,048	
6	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi MasyarakatPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**2,899,374,000**	**780,479,800**	
7	Fasilitasi Tugas DPRD	17,602,547,020	17,531,131,990	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**52.067.076.701**	**31.508.947.575**	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.041.840.454	28.812.849.147	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	216.158.450	180.969.500	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.000.000	40.880.000	

6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	736.223.428	662.952.304	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.657.900	359.815.500	
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.157.669	1.150.113.286	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.038.800	301.367.838	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**16.576.529.028**	**6.756.985.280**	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.137.580.262	1.635.829.091	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	884.215.844	682.475.679	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	515.946.130	440.994.300	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	13.038.786.792	3.997.686.210	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	**1.314.817.042**	**888.305.040**	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.314.817.042	888.305.040	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**1.285.398.062**	**1.046.788.468**	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.285.398.062	1.046.788.468	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**8,724,233,567**	**8,160,876,806**	Inspektorat Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,838,260,291	7,399,067,966	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	36,135,000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503,347,413	430,184,680	
4	Penyediaan Jasa Penunjang	220,589,363	199,162,981	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	112,036,500	96,326,179	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	**344,520,000**	**343,610,000**	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	269,940,000	269,140,000	
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	74,580,000	74,470,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	**7,586,589,761**	**6,587,347,823**	Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,372,650,485	4,218,034,536	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,677,186,496	1,143,525,244	
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	403,262,900	387,289,189	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398,106,500	331,209,106	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735,383,380	507,289,748	
	Program Kepegawaian Daerah	**1,694,409,950**	**720,122,725**	
	Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian Asn	330,420,456	271,324,900	
	Mutasi Dan Promosi Asn	1,217,175,280	437,605,325	
	Pengembangan Kompetensi Asn	132,181,984	0	
3	Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14,632,230	11,192,500	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**91,030,864**	**17,934,000**	
	Pengembangan Kompetensi Teknis	65,640,864	0	
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional	25,390,000	17,934,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**4,646,996,893**	**4,107,996,257**	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,562,595,669	3,393,584,209	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	34,850,000	34,850,000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	707,071,524	426,445,884	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146,368,700	143,715,700	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76,784,600	64,944,464	
6	Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119,326,400	44,456,000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan	**476,919,307**	**323,100,847**	

	Evaluasi Pembangunan Daerah			
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	427,524,907	304,329,247	
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	11,148,845	0	
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	49,394,400	18,771,600	
	Program Koordinasi Dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**265,223,264**	**142,829,100**	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	195,485,264	93,722,400	
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	69,738,000	49,106,700	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	**277,623,350**	**149,306,300**	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	271,175,350	149,306,300	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	6,448,000	6,448,000.	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.060.758.843**	**3.916.171.820**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.171.392.687	3.100.802.784	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.422.250	197.916.300	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	654.218.406	583.761.955	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.725.500	33.690.781	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**158.982.600**	**6.825.000**	Kecamatan Sibolga Kota
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	158.982.600	6.825.000	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keamanan Umum	**5.609.500**	**5.609.500**	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.609.500	5.609.500	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**833.698.850**	**330.394.354**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	24.049.250	23.428.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kota Baringin	**203.012.400**	**77.880.407**	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	50.948.000	50.943.007	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	152.064.400	26.937.400	
3	Pemberdayaan Mukim			Kecamatan Sibolga Kota
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pancuran Gerobak	**202.212.400**	**77.590.300**	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	53.252.900	53.252.900	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	148.959.500	24.337.400	
3	Pemberdayaan Mukim	-		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pasar Baru	**202.212.400**	**76.031.317**	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	51.527.200	50.393.917	Kecamatan Sibolga Kota
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	150.685.200	25.637.400	
2	Pemberdayaan Mukim			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Pasar Belakang	**202.212.400**	**75.464.330**	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	49.827.200	49.826.930	Kecamatan Sibolga Kota
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	152.385.200	25.637.400	
2	Pemberdayaan Mukim			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**4.956.978.221**	**4.772.137.497**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.667.127.971	3.552.318.501	Kecamatan Sibolga Selatan
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.679.360	233.086.600	
3	Penyediaan jasa penunjang urusan	951.602.590	909.573.872	

	pemerintahan daerah			
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	88.568.300	77.158.524	
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**152.000.000**	**0**	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.000.000	0	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**14.545.186**	**13.552.500**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.545.186	13.552.500	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	**1.034.875.000**	**544.008.700**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	428.828.012	428.875.500	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	606.046.988	115.133.200	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.862.982.513	5.644.275.671	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.730.251.170	4.536.553.666	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.818.138	246.329.650	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	771.453.205	748.756.206	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.460.000	112.636.149	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	199.197.800	9.197.800	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	199.197.800	9.197.800	Kecamatan Sibolga Utara
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.308.055.556	781.723.452	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	31.768.984	31.274.400	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1,423,579,828	750,449,052	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	597.153.265	449,420,591	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	826.426.563	301,028,461	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	19.254.600	19.254.600	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.254.600	19.254.600	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**4.172.689.480,**	**3.968.979.911**	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.327.525.810	3.204.202.594	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.154.374	152.996.800	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	612.481.696	555.688.817	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.527.600	56.091.700	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	**159.169.096,00**	**3.723.000**	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.811.596	804.000	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	-	-	Kecamatan Sibolga Sambas
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6.357.500	2.919.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**14.248.080,**	**13.286.100**	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	14.248.080,	13.286.100	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	**-**	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	**5.910.180**	**4.065.600**	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.910.180	4.065.600	

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**1.661.632.593**	**1.567.224.389**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1.339.515.451**	**1.266.571.380**	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**134.630.642**	**134.234.562**	
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**124.524.600**	**107.281.670**	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**62.961.900**	**59.136.777**	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	**478.811.573**	**477.012.961**	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**478.811.573**	**477.012.961**	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	**387.919.688**	**387.919.688**	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**387.919.688**	**387.919.688**	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**2.372.969.010**	**1.437.613.000**	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**2.372.969.010**	**1.437.613.000**	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	**449.021.840**	**431.695.640**	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**449.021.840**	**431.695.640**	

1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan otonomi daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi secara luas, terlebih pada konteks global, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.

a. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen

pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan periode 2025-2029, permasalahan pembangunan Kota Sibolga memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Permasalahan ini harus mampu menggambarkan setiap detil kondisi Kota Sibolga sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan dapat relevan dengan penyelesaian permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kota Sibolga dilakukan dengan cara mengidentifikasi kinerja seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2023 dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 serta arah kebijakan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005-2025. Selanjutnya dilakukan analisis kedalaman masalah dengan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut ini merupakan identifikasi permasalahan Kota Sibolga.

- **Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**
  1. **Pendidikan**, menghadapi permasalahan:
     a. Masih rendahnya APK PAUD;
     b. Masih rendahnya satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi ;
     c. Makin menurunnya APM SD dan Masih rendahnya APM SMP;
     d. Rapor Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai Standar Nasional ;
     e. Rapor Mutu Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang SD dan SMP di Kota Sibolga masih rendah karena belum sesuai Standar Nasional;
     f. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu di Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan Ketenagaan serta pada Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;

g. Belum Optimalnya Pengembangan pada Kurikulum

2. **Kesehatan** , menghadapi permasalahan:
   a. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi kesehatan ibu, bayi dan balita.
   b. Peningkatan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi prevalensi wasting pada balita, penurunan angka stunting pada balita, persentase makanan dan minuman yang memenuhi syarat.
   c. Peningkatan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat meliputi persentase kepesertaan jaminan kesehatan.
   d. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, meliputi persentase penanganan penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes mellitus.
   e. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan meliputi kelurahan stop BABS, peningkatan penyakit berbasisi lingkungan (Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Kelurahan ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
   f. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan sebagian masyarakat tidak menyadari jika memiliki faktor resiko penyakit tidak menular sehingga tidak perlu melakukan pemeriksaan *screening* faktor resiko PTM dan masih kurangnya upaya pencegahan pengendalian dan pemberantasan melalui kegiatan promotif.
3. **Rumah Sakit Umum** , menghadapi permasalahan:
   a. Prosedur tetap tentang mutu dan standar pelayanan belum dilaksanakan secara maksimal di unit pelayanan tertentu.
   b. Belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sarana dan Prasarana Kesehatan yang belum maksimal berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat;
4. **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, menghadapi permasalahan:
   a. Pemutahiran Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Sibolga, mengingat SSK sangat diperlukan untuk mempercepat implementasi terkait dengan pencapaian target Universal Access, dan juga sebagai nilai strategis bagi kota Sibolga dalam membenahi kondisi sarana sanitasi kota.
   b. Belum adanya Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum

(RISPAM) serta grand design Air Minum Kota Sibolga yang terbaru berdasarkan Permen PUPR 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, sehingga masih sulit untuk Merumuskan arahan rencana perbaikan modifikasi /penggantian/penambahan instalasi produksi, jaringan perpipaan, dan pengembangan untuk perencanaan strategis di bidang air minum yang terintegrasi dan berkesinambungan.

c. Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dan Peeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dengan adanya regulasi ini maka PU akan merevisi RTRW Kota Sibolga 2017-2037.

5. **Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**, menghadapi permasalahan:
   a. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Sibolga masih banyak;
   b. Pemenuhan Prasarana Sarana Utilytas (PSU) Perkotaan.
   c. Penanganan/Pengurangan Kawasan Kumuh.
   d. Penataan Drainase Kota Terintegrasi untuk pencegahan dan penanganan banjir.
   e. Terbatasnya lahan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan kawasan permukiman.
   f. Belum Optimalnya Ruang Terbuka Hijau dan pemanfaatannya
6. **Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**, menghadapi permasalahan:

   Urusan ini ditangani oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbang. Adapun permasalahan adalah:

   a. Belum Optimalnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
   b. Pengaktifan kembali poskamling untuk menjaga keamanan lingkungan.
   c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan non kebakaran di daerah padat penduduk untuk mengurangi resiko kebakaran.

d. Masih perlu dibangun 2 Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Sibolga Utara dan Kecamatan Sibolga Selatan untuk mempercepat akses penanganan kejadian kebakaran.
e. Kurangnya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja
f. Wilayah Manajemen bencanaKebakaran (WMK) disertai dengan kemampuan teknis petugas Damkar, Lahan untuk Tandon Air dan peningkatan sarana prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Miniman Sub Urusan Kebakaran;
g. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana;
h. Mitigasi bencana belum optimal.
i. Bencana sering terjadi di daerah yang sama karena warga yang sering terkena dampak bencana masih menempati daerah yang rawan bencana sementara daerah tersebut tidak layak dijadikan daerah permukiman (berada di lereng perbukitan).

7. **Sosial,** menghadapi permasalahan:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bidang sosial ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial baik secara eksternal maupun internal. Permasalahan yang dihadapi yaitu :

a. Tingkat kemiskinan masih rentan akibat belum optimalnya pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai dengan hasil pemutahiran data terbaru kesejahteraan sosial;
b. Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang sosial sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 serta Permensos Nomor 9 Tahun 2018.
c. Disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti belum tertangani karena kerterbatasan anggaran;
d. Belum optimalnya kesiapagaan penanganan bencana.

- Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. **Tenaga kerja**, menghadapi permasalahan:

a. Belum optimalnya peningkatan produktivitas tenaga kerja
b. Kurangnya lowongan kerja serta kurangnya kemampuan

menciptakan kesempatan kerja ;

c. Tidak adanya kewenangan pemerintah kota tentang wajib lapor perusahaan ;
d. Belum adanya Balai Latihan Kerja (BLK) serta instruktur yang bersertifikat di Kota Sibolga ;
e. Belum optimalnya penyampaian informasi tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat Kota Sibolga.
f. Standar Pengupahan tidak sesuai dengan UMK di Kota Sibolga.
g. Belum optimalnya promosi informasi pasar kerja

2. **Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**, menghadapi permasalahan:
   a. Masih lemahnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
   b. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   c. Belum optimalnya perlindungan terhadap anak
   d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak
3. **Pangan,** menghadapi permasalahan:
   a. Ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah sangat berpotensi menimbulkan kerawanan pangan khususnya jika terjadi permasalahan atau kendala di dalam pemasokan komoditas pangan tersebut;
   b. Harga yang fluktuatif khususnya terhadap bahan pangan tertentu yang mempengaruhi inflasi daerah antara lain cabe merah, bawang merah dan ikan;
   c. Pola konsumsi masyarakat yang belum menerapkan pola makan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang ditandai oleh nilai Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih di bawah nilai ideal;
   d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);
   e. Masih adanya potensi rawan pangan kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan. Hal ini ditandai dengan masih adanya kasus gizi buruk dan kurang gizi balita di Kota Sibolga;

f. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menjamin cadangan pangan berupa gudang penyimpanan (Coldstorage).

4. **Lingkungan hidup** , menghadapi permasalahan:
   a. Nilai indeks pencemaran air sungai di 3 sungai yang ada di Kota Sibolga menunjukkan tercemar ringan;
   b. Lahan Tempat Pembuangan Akhir Kota Sibolga akan melebihi kapasitas beberapa tahun kedepan sehingga diperlukan kerjasama penanganan sampah skala regional dengan daerah Hinterland;
   c. Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
   d. Belum optimalnya pengolahan B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) dan limbah B3;
5. **Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**, menghadapi permasalahan:
   a. Peningkatan Kebutuhan Penerbitan Administrasi Kependudukan akibat Pertambahan jumlah penduduk yang disebabkan perluasan wilayah Kota Sibolga berdasarkan Permendagri No. 135 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.
   b. Masyarakat Kota Sibolga, khususnya anak usia 0-17 tahun telah memudahkan untuk memiliki akte kelahiran dengan adanya penerbitan Kartu Identitas Anak yang telah dilaksanakan.
6. **Pemberdayaan masyarakat dan desa/Kelurahan**, menghadapi permasalahan:
   a. Masih lemahnya peran serta masyarakat dalam perlindungan perempuan, baik dari segi kekerasan dalam rumah tangga maupun dari ekonominya, serta keterlibatan perempuan dalam bidang politik masih rendah.
   b. Belum semua OPD dan Non Pemerintah menganggap Pengarusutamaan Gender sebagai Strategis Prioritas dalam Pembangunan karena selama ini dianggap PUG merupakan Program Perempuan semata.
   c. Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan anak
7. **Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**, menghadapi permasalahan:
   a. Pandangan masyarakat secara adat yang menyatakan banyak anak banyak rezeki hal ini mengakibatkan petugas keluarga

berencana akan kesulitan untuk mengajak masyarakat untuk ber-KB.

b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Advokasi Keluarga Berencana Kurang Optimal disebabkan tidak adanya anggaran untuk melakukan kegiatan seperti: Sosialisasi, Orientasi, Pembinaan, Fasilitasi, Promosi, Evaluasi dan Pelatihan Teknis.
c. Tingkat Kesertaan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) belum Optimal, hal ini ditandai dengan tingginya angka unmed need.
d. Penyediaan Alat Kontrasepsi yang belum memadai.
e. Partisipasi Pria dalam Ber-KB masih rendah.

8. **Perhubungan**, menghadapi permasalahan:

Secara umum permasalahan terkait transportasi di Kota Sibolga adalah belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi di Kota Sibolga masalah tersebut disebabkan:

a. Rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Jaringan jalan yang tersedia saat ini tidak sesuai dengan pola distribusi yang dipengaruhi faktor belum adanya terminal khusus angkutan barang yang menjadi sentral distribusi barang ataupun kawasan pergudangan sehingga angkutan ekspedisi melakukan kegiatan bongkar muat barang di pusat perkotaan yang menyebabkan kesemrawutan dan kema cetan lalu lintas.
b. Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan jaringan jalan yang tersedia. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi dengan penambahan jaringan jalan/ruas jalan di Kota Sibolga. Adapun faktor yang mempengaruhinya ada lah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit).
c. Kekurangan ketersedian alokasi dana yang menyebabkan terkendalanya rencana pembangunan pergudangan, gedung pengujian dan terminal truk beserta fasilitasnya yang direncanakan sebagai tempat pangkalan mobil truk untuk bongkar muat barang dalam mengantisipasi timbulnya kecelakaan serta menghindari kerusakan jalan dan kemacetan yang terjadi di inti kota.
d. Masih adanya beberapa pemilik usaha yang memakai ruas jalan yang bukan untuk peruntukannya misalnya ruas jalan tersebut

dijadikan lahan parkir.

e. Kemacetan lalu lintas di pagi hari pada saat hari kerja adapun faktor yang mendorong adalah kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah perbatasan Kota Sibolga menuju daerah perkantoran, sekolah dan s entra usaha lainnya.

f. Terbatasnya SDM aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perhubungan atau masih kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Perhubungan Kota Sibolga yang memil iki latar belakang pengetahuan tentang transportasi.

9. **Komunikasi dan informatika**, menghadapi permasalahan:
   a. Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
   b. Rendahnya Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi.
10. **Koperasi, usaha kecil, dan menengah**, menghadapi permasalahan:
   a. Kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam melakukan Diversifikasi produk (memperbanyak jenis produk) dan kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam menjaga Higiene dan sanitasi produk;
   b. Pelaku UMKM belum menyadari pentingnya legalitas produknya seperti: Pengurusan PIRT, HALAL, HAki (Hak Kekayaan Intelektual), NIB (Nomor Induk Berusaha);
   c. Kurangnya kemampuan pelaku UMKM untuk memperluas akses pemasaran produk UMKM sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan branding produk dan gitalisasi produk;
11. **Penanaman modal**, menghadapi permasalahan:
   a. Banyaknya Investor Atau Pengusaha Yang Membuka Usahanya Tidak Sesuai Dengan RTRW Daerah;
   b. Kurangnya Aktivitas Hubungan Perdagangan/Investasi Produk Unggulan Antar Daerah, Regional, Nasional, Dan Internasional Melalui Pelabuhan Sibolga;
   c. Kecilnya Wilayah Sibolga sehingga Wilayah (Tanah) Untuk Tempat Berinvestasi Terbatas;
   d. Belum Adanya Produk Unggulan Yang Benar -Benar Menarik Untuk Dijual Keluar Daerah;
   e. Kurangnya Kesadaran Para Investor Untuk Melaporkan Kegiatan Usahanya Melalui LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
   f. Kurangnya Pengetahuan Tentang Potensi Investasi Yang Ada di

Kota Sibolga.

12. **Kepemudaan dan olah raga**, menghadapi permasalahan:
    a. Belum ditindak lanjutinya Peraturan Daerah tentang Kepemudaan yang merupakan syarat ditetapkannya Sibolga menjadi Kota Layak Pemuda
    b. Belum memadainya fasilitas olahraga, khususnya olahraga yang telah mengukir prestasi di tingkat provinsi maupun nasional seperti Karate, Silat, Atletik dan lain-lain
13. **Statistik**, menghadapi permasalahan:
    a. Data sektoral yang harus dihimpun dan diolah hingga dapat disajikan dengan baik sehingga dapat menjadi sumber data bagi pihak yang membutuhkan.
14. **Persandian**, menghadapi permasalahan:
    a. Belum ada perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah;
    b. Belum ada Sumber Daya Manusia yang mampu menerjemahkan setiap kawat sandi;
    c. Pendidikan bagi aparatur persandian (Sandi man)
15. **Kebudayaan**, menghadapi permasalahan:
    a. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan karakter budaya.
16. **Perpustakaan**, menghadapi permasalahan:
    a. Pada Tahun 2020, Dinas Perpustakaan sudah mendapatkan tambahan Gedung layanan namun sarana dan prasarana pendukung masih kurang seperti sarana komputer untuk internet gratis, sarana pendukung untuk mengakses bahan buku digital, rak buku dan koleksi bahan bacaan serta meubeleur untuk pemustaka.
17. **Kearsipan**, menghadapi permasa lahan:
    a. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil (bersertifikasi Pengelolaan dan Pengawasan kearsipan) untuk urusan Kearsipan sehingga penyelenggaraan urusan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

- **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Daerah di Kota Sibolga, berbagai permasalahan yang dihadapi adalah:

1. **Kelautan dan Perikanan**, menghadapi permasalahan:
   a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap;
   b. Setelah diberlakukannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine net) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, Kota Sibolga konsisten mematuhi peraturan tersebut yang berdampak pada hasil tangkapan nelayan yang semakin menurun, harga ikan melambung tinggi dan memicu inflasi di Kota Sibolga. Kompensasi dari larangan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berjanji akan memberi bantuan kepada eks ABK yang bekerja di kapal pukat tarik berupa bantuan kapal dan alat tangkap yang ramah lingkungan kepada 87 kelompok dan koperasi, namun hingga saat ini bantuan tersebut belum terealisasi;
   c. Sulitnya mendapatkan data dari tangkahan – tangkahan di Kota Sibolga;
   d. Berkurangnya kewenangan kabupaten/kota sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan yang mengakibatkan disefisiensi peran serta pemerintah daerah dalam melayani masyarakat;
   e. Kurangnya sarana dan prasarana juga kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan TPI/PPI milik pemerintah;
   f. Kurangnya kemandirian pelaku usaha perikanan dalam pengembangan usaha;
   g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan TP/PPI milik pemerintah;
   h. Komoditas pangan masih sering menjadi penyumbang inflasi di Kota Sibolga;
   i. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap suplai komoditas pangan dari luar daerah/hinterland;
   j. Masih adanya ditemukan kasus stunting dan kurang gizi di Kota Sibolga;
   k. Masih rendahnya diversifikasi pangan masyarakat Kota Sibolga;
   l. Tingginya tingkat inflasi komoditas strategis nasional di Kota Sibolga berupa cabai, bawang putih dan bawang merah disebabkan antara lain : optimalisasi lahan dan ruang oleh masyarakat yang belum maksimal di Kota Sibolga, penyediaan

bibit berkualitas untuk diserahkan kepada masyarakat masih terkendala, minimya tenaga penyuluh pertanian;

m. Belum optimalnya layanan rumah potong hewan ruminansia (RPH – R) Aek Parombunan disebabkan oleh akses jalan yang rusak, lampu penerangan jalan yang tidak tersedia, kurangnya ketersediaan air dan tidak adanya keahlian ASN dalam hal pemeriksaan kebuntingan di RPH;
n. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan di masyarakat karena belum adanya kendaraan roda 4 sebagai kendaraan puskeswan keliling dan minimnya tenaga dokter hewan di Kota Sibolga (1 orang)
o. Mutu ikan olahan yang belum baik, hal ini disebabkan oleh proses pengolahan belum menerapkan cara pengolahan yang baik dan benar serta sarana dan prasarana dalam pengolahan ikan tidak sesuai dengan standar higienis dan kesehatan;
p. Pelaku usaha pengolahan ikan di Kota Sibolga belum bankable;
q. Diversifikasi produk olahan ikan yang masih sangat terbatas disebabkan terbatasnya modal dalam pengembangan usaha, tingginya harga bahan baku dalam melakukan kegiatan pengolahan, kurangnya antusias masyarakat dalam mengembangkan usaha secara mandiri.

2. **Pariwisata**, menghadapi permasalahan:
   a. Belum Optimalnya Budaya Sadar Wisata Masyarakat dalam hal menjaga fasilitas wisata yang sudah dibangun seperti Perusakan lampu hias Pantai Ujung Sibolga dan Lokasi Tanggo Seratus, Kebersihan pantai dan objek wisata lain nya.
   b. Masih Belum terjalinnya konekvitas dengan stakeholder pembangunan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Danau Toba sebagai daerah hinterland Kota Sibolga yang memperoleh multiplier effect dari pembangunan tersebut
   c. Belum dimaksimalkannya peran Dinas Parpora dalam memberikan rekomendasi izin terkait urusan kepariwisataan (Hotel, Restoran, Cafe, Konser, dan lain -lain).
3. **Pertanian**, menghadapi permasalahan:
   a. Belum optimalnya produksi pertanian baik pada tanaman pangan utama, holtikultura, dan perkebunan dan Peternakan .
   b. Masih kurangnya populasi beberapa komoditas peternakan (kambing, ayam buras), dan produksi daging.

c. Berkurangnya lahan pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi tantangan bagi Kota Sibolga untuk meningkatkan produksinya. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan kualitas benihakan menjadi prioritas, selain itu peningkatan dalam pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi bidang pertanian dan peternakan khususnya pertanian perkotaan.

4. **Kehutanan**, menghadapi permasalahan:
   a. Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Taman Hutan Rakyat.
5. **Energi dan Sumber Daya Mineral**, menghadapi permasalahan:
   a. Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Energi Panas Bumi.
6. **Perdagangan**, menghadapi permasalahan:
   a. Penataan berkelanjutan dalam pelayanan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), karena di Kota Sibolga banyak pedagang kaki lima/asongan musiman.
   b. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan sehingga perlu revitalisasi pasar rakyat
   c. Terbatasnya bantuan modal dan sarana usaha bagi pedagang.
   d. Kurangnya fasilitas umum untuk dijadikan ikon di Kota Sibolga guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga.
7. **Perindustrian**, menghadapi permasalahan:
   a. Masih rendahnya pertumbuhan industri di Kota Sibolga.
   b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB masih labil (capaian turun naik)
   c. Masih rendahnya pembinaan bagi kelompok pengrajin sehingga perlu adanya pembinaan dan pengembangan berkelanjutan bagi kelompok pengrajin di Kota Sibolga
8. **Transmigrasi**, menghadapi permasalahan:
   a. Sesuai dengan kewenangan, Kota Sibolga tidak memiliki Lahan Transmirasi.

- **Urusan Penunjang Pemerintahan**

1. Sekretariat Daerah, menghadapi permasalahan: Adapun yang menjadi permasalahan pada Sekretariat Daerah Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

a. Server yang dipakai saat ini sudah rusak dan server masih menumpang pada Dinas Kominfo Kota Sibolga yang mana pada Tahun 2021 Sekretariat Kota Sibolga bagian Administrasi Pembangunan telah merencanakan untuk pengadaan server HPE Proliant DL380g 10 .
b. Belum adanya personil/SDM bagian teknis dari Sekretariat Daerah Kota Sibolga. Adapun Personil LPSE saat ini masih dibantu dari Dinas Kominfo Kota Sibolga.
c. SDM Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa kurang memahami/kurang update mengenai peraturan -peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang mana bisa dilihat pada website LKPP dan website PUPR (Konstruksi).
d. Belum Terlaksananya Pengisian LKE (Lembaran Kinerja Elektronik) dikarenakan tahun 2016 -2019 vakumnya bagian organisasi sehingga tidak menjadi prioritas dan saat ini sulitnya berkoordinasi ke Provinsi terkendala Covid 19.

2. Sekretariat DPRD, menghadapi permasalahan:
   a. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan terhadap fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.
3. Perencanaan , menghadapi permasalahan:
   a. Pembangunan Kota Sibolga memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek agar dapat meningkatkan daya saing dan kemadirian menghadapi persaingan global.
   b. Belum seluruh aspirasi masyarakat terakomodir dalam perencanaan dan penganggaran.
4. Keuangan, menghadapi permasalahan:
   a. Pendapatan asli daerah yang belum optimal untuk menunjang kemandirian fiskal daerah, disebabkan oleh: kurang akuratnya data objek pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan objek pajak dan retribusi, dan penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang belum optimal.
5. Kepegawaian (serta pendidikan dan pelatihan), menghadapi permasalahan:
   a. Adanya kesenjangan kompetensi antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia;
   b. Belum terpusatnya pela ksanaan pengembangan kompetensi;
   c. Masih rendahnya kemampuan Pemerintah Kota Siboga dalam memenuhi kebutuhan diklat pegawai ;

d. Masih ditemukan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
e. Masih belum optimalnya distribusi penempatan pegawai.

6. Penelitian dan Pengembangan, menghadapi Belum permasalahan:
   a. optimalnya penelitian dan kajian;
   b. Fungsi penelitian masih mengerjakan fungsi perencanaan daerah sehingga ke depannya perlu dikaji peran Penelitian dan Pengembangan baik secara Tugas dan Fungsi, Organisasi atau kelembagaan yang dapat berdiri sendiri, tidak dirumpun dengan Urusan Perencanaan atau digabung dengan Urusan Perencanaan dengan Tugas dan Fungsi yang jelas dan Nomenklatur OPD yang jelas;
   c. Inovasi daerah masih kurang dalam mendukung daya saing daerah sesuai Visi RPJ MN 2020 -2021 dan RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005 -2025.
7. Pengawasan , menghadapi permasalahan:
   a. Belum optimalnya kapasitas APIP.
   b. Perencanaan Program Pengawasan Tahunan (PKPT) yang belum berdasarkan prioritas;
   c. Belum semua temuan BPK ditindaklanjuti sampai tuntas.
8. Kecamatan, menghadapi permasalahan:
   8.1 Kecamatan Sibolga Utara
      a. Pelaksanaan PATEN dalam pemberian layanan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL) tanpa adanya pendampingan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), hal ini berdampak kepada tidak adanya kontrol dan dan pengawasan melekat sehingga sulit mengukur kinerjanya. Para THL juga tidak mendapat pelatihan khusus maupun bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hanya mengandalkan pengetahuan dan etika pribadi yang melekat pada masing- masing petugas pelayanan;
      b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan instansi lain tidak memiliki kekuatan hukum dan standar operasional yang baku sehingga berdampak kepada ketidakpastian dalam penetapan persyaratan yang diberikan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi yang dibutuhkan. Salah satu

ketidakpastian tersebut bisa dilihat pada pemberian surat rekomendasi ijin usaha mikro dan kecil dimana tidak ada standar baku yang memiliki kekuatan hukum tentang persyaratan- persyaratan yang dibutuhkan se hingga PATEN hanya memberikan persyaratan–persyaratan berdasarkan kebiasaan. Masyarakat menjadi pihak yang dirugikan karena sering kembali ke kantor kecamatan untuk mendapatkan persyaratan lain yang dibutuhkan.

8.2 Kecamatan Sibolga Kota, menghadapi permasalahan:

a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia/Aparatur (PNS) di Kecamatan Sibolga Kota, dimana pada saat ini yang dihunjuk sebagai petugas PATEN hanya THL yang berjumlah 6 (enam) orang. Kendala yang dihadapi saat ini tidak adanya PNS yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas PATEN untuk mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika salah satu dari THL Petugas PATEN sedang berhalangan sehingga dapat memperlambat pengurusan pelayanan yang ada di Loket PATEN.

b. Masih kurangnya kesadaran pekerja pemasang tenda di Sibolga Square, dimana tenda seharusnya dipasang Pukul 17.00 Wib (jam 5 sore) namun pukul 14.00 Wib tenda telah dipasang dan beberapa gerobak jualan sudah diletakkan di badan jalan sebelum waktu yang telah disepakati bersama sehingga mengganggu aktivitas pedagang permanen (Toko) yang ada di Jalan Ahmad Yani Sibolga (sekitar Sibolga Square).

8.3 Kecamatan Sibolga Sambas, menghadapi permasalahan:

a. Kurangnya Jumlah SDM Pegawai Kecamatan Sibolga Sambas pada saat ini dimana 6 orang dari THL ditunjuk sebagai Petugas Paten. Kendala saat ini tidak adanya ASN yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk mengkoordinir pelayanan kepada masyarakat ketika salah satu dari Petugas Paten sedang berhalangan sehi ngga dapat memperlambat tugas-tugas yang di Pelayanan Paten;

b. Belum adanya Standar Persyaratan terkait persyaratan yang harus dipenuhi dalam kepengurusan rekomendasi izinyang dilimpahkan kewenanangannya kepada

Kecamatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebahagian wewenang walikota kepada camat untuk menangani sebahagian urusan otda sehingga tidak adanya kekuatan hukumnya kepada usaha mikro kecil dan menengah apa bila tidak mengurus surat rekomendasi izin Usaha;

c. Belum adanya gedung aula pertemuan Kelurahan Pancuran Kerambil, sehingga membuat kendala terhambatnya pelayanan yang dilakukan oleh Kelurahan Pancuran Kerambil kepada masyarakat, dimana saat ada kegiatan yang dilakukan oleh Kelurahan dan kecamatan sering terjadi jadwal bentrok. Jadi terpaksa kegiatan yang dilakukan kelurahan pancuran kerambildi dalam Ruangan Kantor; Tidak adanya lahan parkir yang memadai untuk bisa dijadikan sebagai lahan parker karena luas tanah sebahagian tempat berdirinya Gedung Kantor Kelurahan Pancuran Kerambil, sehingga masyarakat dan para pegawai yang dating ke Kantor Kecamatan dan kelurahan Pancuran Kerambil terpaksa mempergunakan badan jalan/trotoar jalan Utama yang intens dan padat arus lalu lintasnya.

8.4 Kecamatan Sibolga Selatan, menghadapi permasalahan:

a. Kurangnya Tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sibolga Selatan, yang mengakibatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) hanya ditangani satu orang ASN yaitu Kasi Pelayanan dibantu 6 orang dari THL ya ng ditunjuk sebagai Petugas Paten. Hal ini disebabkan tidak adanya ASN yang bisa ditugaskan sebagai Pendamping Petugas Paten untuk mengkoordinir, sehingga dapat memperlambat tugas-tugas Pelayanan kepada masyarakat;

b. Pengelolaan hasil validasi data penduduk yang dilaksanakan di seluruh lingkungan dan kelurahan se-Kecamatan Sibolga Selatan, khususnya yang berada di setiap kelurahan belum tertata dengan baik akibat terbatasnya fasilitas (lemari data, Map, File Box) yang tersedia.

9. Kesbangpol, menghadapi permasalahan:

Unit organisasi kemasyarakatan harus mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bentuk pengakuan keberadaan ormas tersebut. Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas diterbitkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah organisasi masyarakat tidak lagi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, namun pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tetap dari Kesbangpol, ini yang menjadi permasalahan di Kantor Kesbangpol disamping keterbatasan anggaran.

Setelah menelaah kajian data dan informasi serta hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kota Sibolga adalah “Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga”. Beberapa permasalahan pokok pembangunan daerah Kota Sibolga sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang merata dan berdaya saing;
2. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
3. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan;
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
5. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah;
6. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Rangkaian pokok permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan kedepan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Sibolga tahun 2025

2029.

1. Belum optimalnya kualitas SDM yang merata dan berdaya saing Sumber daya manusia merupakan aset pokok pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat. Sumber daya manusia merupakan inti dari pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subyek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu untuk meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada berbagai aspek kehidupan. Semakin meningkatnya teknologi informasi menyebabkan persaingan akan kualitas, dan kompetensi sangat di butuhkan bagi SDM Indonesia. Terkait dengan hal itu, daya saing sumber daya manusia memiliki hubungan dengan bagaimana kualitas masyarakat Kota Sibolga berperan di berbagai sektor penting dalam perekonomian daerah. Berdasarkan dari data BPS Kota Sibolga, capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sibolga pada tahun 2023 mencapai 78,61 yang masuk dalam kategori “tinggi”. Capaian IPM jika dilihat pada rentang waktu 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Akan tetapi untuk mengetahui posisi capaian IPM Kota Sibolga, maka perlu adanya perbandingan IPM antar kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sibolga masih berada di bawah Kota Medan yang mencapai 77,0,7; Kota Pematang Siantar 81,17; Kota Tebing Tinggi dengan IPM mencapai 78,68 dan Kota Binjai yang mencapai 78,67. Memahami situasi ini, maka perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu keharusan bagi Pemerintah Daerah Kota Sibolga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia, memungkinkan masyarakat dapat bersaing efektif dengan kota kota sekitar. Menyadari adanya persaingan dalam dunia kerja yang dapat membuka peluang bagi SDM dari luar daerah untuk masuk ke Kota Sibolga, perlu adanya peningkatan kualitas daya saing SDM Kota Sibolga melalui langkah-langkah perbaikan dalam sektor pendidikan, sektor kesehatan dan

pendapatan. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM Kota Sibolga merupakan imbas dari permasalahan yang terus mengiringi sepanjang pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan yang memberikan kendala dalam pembangunan seperti belum optimalnya layanan pendidikan; belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; angka pengangguran yang masih tinggi dan belum optimalnya peran serta perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya dan akan semakin majulah daerah tersebut. Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam institusi terkecil seperti rumah tangga, pendidikan seyogyanya telah menjadi kebutuhan utama. Kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut, karena bagaimanapun juga SDM yang bermutu merupakan syarat utama bagi terwujudnya kemajuan daerah.

Pendidikan merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas SDM agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pendidikan masyarakat di Kota Sibolga memiliki capaian rata-rata lama sekolah hingga selama 10,45 tahun pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan masyarakat yang berumur 25 tahun ke atas memiliki rata-rata sekolah hingga 10,45 tahun atau hampir setara dengan menyelesaikan pendidikan menengah atas (SMA). Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sibolga masih berada di bawah beberapa wilayah perkotaan di Provinsi Sumatera Utara seperti Kota Pematang Siantar (11,82 tahun), Kota Medan (11,79 tahun), dan Kota Binjai (11,20 tahun). Sementara itu Harapan Lama Sekolah di Kota Sibolga memiliki capaian sebesar 13,43 tahun artinya seorang anak diharapkan bisa merasakan lamanya sekolah hampir 14 tahun atau mereka memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi, seperti Diploma III atau bahkan lebih, tergantung pada sistem pendidikan yang ada dan kebijakan pemerintah. Jika dibandingkan dengan beberapa Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara kondisi harapan lama sekolah Kota sibolga masih berada di bawah Medan (14,79 tahun).

Selain pendidikan, kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk memberikan

pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang sakit. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah Angka Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Sebagai indikator yang dapat melihat derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, UHH menjadi salah satu impact yang harus diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan bidang kesehatan daerah. Umur Harapan Hidup Kota Sibolga pada tahun 2024 tercatat sebesar 74,19 tahun pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2024 dapat bertahan hidup hingga usia 74 tahun. Dengan capaian tersebut, bila dibandingkan dengan keadaan beberapa kota di Provinsi Sumatera Utara UHH Kota Sibolga berada di posisi bawah. Dimana UHH Medan (75,09 tahun), Kota Pematang Siantar (75,03 tahun), Kota Binjai (74,45 tahun), Kota Tebing Tinggi (74,29 tahun), Kota Gunung Sitoli (74,23 tahun), Kota Sibolga (74,19 tahun), dan Kota Tanjung Balai (74,18 tahun). Indeks Ketimpangan Gender adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender memberikan gambaran tentang sejauh mana kesenjangan gender terjadi di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Kesetaraan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia dan masyarakat di Kota Sibolga juga masih membutuhkan optimalisasi kesetaraan pembangunan gender, dimana kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi. Indeks Ketimpangan Gender tahun 2023 sebesar 0,259. Berdasarkan capaian pada tahun 2023 IKG Kota Sibolga masih dibawah beberapa Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara seperti Kota Sibolga (0,259), Tanjung Balai (0,244), Tebing Tinggi (0,256), Medan (0,232) dan Binjai (0,142).

2. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi adalah elemen krusial dalam mencapai kemandirian daerah. Kemandirian merujuk pada kemampuan Kota Sibolga melalui entitas ekonomi bergerak mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada sumber daya luar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam rangka melihat perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari capaian kinerja PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan lapangan usaha ataupun pengeluaran dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sibolga pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga mencapai 3,92 persen. Dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan trend penurunan. Hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang mengakibatkan kontraksi hingga mencapai -0,73 persen. Kemudian untuk melihat posisi capaian LPE Kota Sibolga maka perlu adanya perbandingan LPE Kota Sibolga dengan kota sekitar di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kendatipun demikian untuk keadaan tahun 2024, capaian LPE Kota Sibolga sebesar 3,92 persen masih di dibawah kota-kota yang ada di Sumatera Utara selain Kota Medan dengan LPE sebesar 5,07 persen. Perkembangan LPE Kota Sibolga yang cenderung semakin menurun ini disebabkan oleh pengelolaan sektor-sektor unggulan daerah yang belum optimal.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu dampak dari pembangunan dan perputaran perekonomian masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ekonomi daerah adalah produktivitas masyarakat. Produktivitas masyarakat dapat diartikan aktivitas masyarakat yang mampu menghasilkan pendapatan. Dengan ini diharapkan pengelolaan sektor ekonomi Kota Sibolga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berimplikasi pada perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian diharapkan peningkatan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Sibolga. Dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan berkarakter terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti evaluasi terhadap sektor pendidikan termasuk untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan, evaluasi dalam bidang kesehatan juga perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan kualitas generasi penerus yang berkompeten. Selain itu, pentingnya kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan dan

industri terlihat sebagai kunci keberhasilan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Pemahaman mendalam terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat Sibolga memiliki keterampilan yang relevan dalam era teknologi saat ini. Kondisi ini jika tidak optimalkan berisiko menghadapi peningkatan pengangguran dan rendahnya kompetensi SDM dalam menghadapi tantangan masa depan. Tanpa pendidikan, keterampilan dan kesehatan yang memadai, tenaga kerja akan sulit bersaing, menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Daya saing ekonomi juga berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), pada tahun 2024 TPT Kota Sibolga tercatat sebesar 6,52 persen dan sudah lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2023 yang mencapai 6,79 persen. Memahami hal ini, angka pengangguran Kota Sibolga mengalami penurunan walaupun hanya sedikit, kondisi ini mengindikasikan masih belum optimalnya penanganan dalam penurunan angka pengangguran di Kota Sibolga. Hal ini disebabkan oleh dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 yang mana ditahun 2020 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal dan penurunan faktor produksi yang menyebabkan tingkat pengangguran menjadi meningkat. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka juga disebabkan oleh ketidaksesuaian ketersediaan pekerjaan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Kemudian perubahan dalam struktur ekonomi lokal, seperti penutupan industri tertentu atau pergeseran ke sektor lain dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Dalam rangka melihat posisi capaian TPT Kota Sibolga dengan kota sekitar, maka perlu adanya perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antar kota se-Provinsi Sumatera Utara. TPT Kota Sibolga dengan capaian TPT kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Selain itu angka pengangguran Kota Sibolga juga lebih tinggi daripada angka pengangguran kota-kota lainnya (Kota Gunungsitoli, Kota Tanjungbalai, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Sidempuan). Menelaah permasalahan terkait angka pengangguran dari beberapa penyataan di atas, maka diharapkan Pemerintah Kota Sibolga kedepannya mampu mengatasi pengangguran lebih optimal. Dengan melibatkan serangkaian tindakan dan kebijakan yang terkoordinasi untuk meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi

yang inklusif. Salah satu indikator yang mampu menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat adalah PDRB Perkapita. Berdasarkan data BPS Kota Sibolga pada tahun 2024, PDRB Perkapita Kota Sibolga mencapai sebesar Rp78,77 juta.

3. Belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan

Dalam dimensi ekonomi, kesenjangan sosial dapat terlihat dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata di antara individu dan kelompok masyarakat. Kesenjangan pendidikan mencerminkan perbedaan dalam akses dan kualitas pendidikan antara berbagai kelompok, yang dapat menghasilkan ketidaksetaraan peluang dan hasil akhir. Kesenjangan sosial dapat memicu ketidakadilan, ketegangan sosial dan konflik dalam suatu masyarakat. Kualitas hidup yang layak bagi masyarakat salah satunya ditunjukkan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat dituntut harus mempunyai pendapatan yang cukup. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kota Sibolga. Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat atas ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga menyebabkan kualitas hidup masyarakat buruk. Kemiskinan disuatu daerah dapat diukur dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan mengacu pada ukuran atau indikator yang digunakan untuk menentukan sejauh mana suatu populasi atau individu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau hidup di bawah garis kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang berada di bawah ambang batas tertentu yang ditetapkan sebagai tanda kemiskinan. Berdasarkan data kondisi kemiskinan Kota Sibolga pada tahun 2024 berada di angka 11,39 persen, angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 yang berada di angka 11,42 persen. Dalam melihat posisi capaian Kota Sibolga maka perlu adanya perbandingan tingkat kemiskinan Kota Sibolga dengan capaian tingkat kemiskinan kota se-Provinsi Sumatera Utara. Tingkat kemiskinan di Kota Sibolga masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Binjai yang tercatat sebesar 4,75 persen pada tahun 2024, mencerminkan perbedaan dalam kondisi sosial ekonomi. Dengan ini menunjukkan Pemerintah Kota Sibolga perlu meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Terkait dengan pendapatan

masyarakat, salah satu indikator yang mampu menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat yaitu pengeluaran per kapita. Dengan mengetahui kondisi pengeluaran perkapita masyarakat maka akan tergambarkan tingkat kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya. Berdasarkan data BPS Kota Sibolga pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditahun 2024 mencapai sebesar Rp 12.713 ribu. Untuk melihat posisi capaian Kota Sibolga maka perlu adanya perbandingan di level antar kota wilayah Sumatera Utara. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kota Sibolga masih berada di posisi terendah dari 8 (delapan) kota yang ada di Sumatera Utara. Pengeluaran Kota Sibolga masih lebih besar dibandingkan dengan Kota Gunung Sitoli yang tercatat sebesar Rp 9.056 ribu. Hal ini disebabkan belum maksimalnya permberian pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini dapat mencakup pelatihan vokasional, kewirausahaan, dan peningkatan keterampilan teknis, sehingga diharapkan dengan kemampuan tersebut mampu meningkatkan peluang kerja maupun usaha dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat. Kualitas hidup masyarakat yang baik dan layak merujuk pada kesetaraan terhadap pemenuhan hak, akses, dan peluang antara berbagai kelompok dalam suatu masyarakat. Hal ini berkaitan dengan gambaran kesenjangan sosial di Kota Sibolga. Kesenjangan sosial tampak dari berbagai aspek termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan partisipasi politik. Salah satu faktor yang berdampak pada pendapatan masyarakat adalah pemerataan pembangunan daerah. Dengan pemerataan pembangunan masyarakat akan mudah mengakses kebutuhan dan meningkatkan aktivitas serta mobilisasi untuk melakukan kegiatan yang produktif. Memahami hal tersebut, maka untuk melihat pemerataan pembangunan di Kota Sibolga dapat diukur dari nilai Gini Rasio (Indeks Gini). Nilai indeks gini rasio berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan. Dengan ketentuan kategori sebagai berikut G 0,35 kategori ketimpangan Rendah, 0,35 G 0,5 kategori ketimpangan Sedang, G 0,5 kategori ketimpangan tinggi. Semakin tinggi nilai Gini Rasio suatu daerah, semakin besar kesenjangan pendapatan atau kekayaan di masyarakat tersebut.

Berdasarkan data BPS Kota Sibolga, Gini Rasio Kota Sibolga

pada tahun 2024 sebesar 0,313 yang masuk pada kategori “ketimpangan rendah”. Meskipun memiliki ketimpangan yang rendah namun masih perlu peningkatan pemerataan pembangunan, agar pembangunan tidak pada daerah atau kawasan tertentu saja. Menindaklanjuti hal ini perlu adanya perhatian Pemerintah Kota Sibolga untuk meningkatkan pemerataan pembangunan yang berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga yang baik dan layak.

4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Urusan ini diselenggarakan dalam cakupan yang cukup luas dan kompleks yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan. Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga sulit juga menentukan target-terget kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai. Pencapaian reformasi birokrasi di Sibolga juga masih belum optimal dimana capaian indeks reformasi birokrasi masih rendah dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 56,91 (CC).

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja juga memiliki kepentingan yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Sibolga adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN)

pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab kinerja pemerintah daerah terhambat adalah koordinasi antar OPD di Kota Sibolga belum optimal disebabkan adanya ego sektoral. Sebagai contoh, belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral dikarenakan kinerja berfokus pada teknis. Padahal data statistik sektoral merupakan tools untuk menyusun perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan di setiap urusan pembangunan daerah, termasuk kordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum reliabel, sehingga berimplikasi pada kesulitan mengukur capaian pembangunan, merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis baseline data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem database yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem. Permasalahan yang lebih khusus adalah terkait pengelolaan SAKIP. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran dan pengklasifikasian kinerja instansi pemerintah. Masih kurangnya pemahaman tanggung jawab termasuk evaluasi kinerja dan capaian kinerja untuk mencapai sistem manajemen kinerja menjadikan lemahnya komitmen pimpinan dan kapasitas bagi kepala Perangkat Daerah dalam perbaikan manajemen di instansi pemerintahan. Pengaplikasian SAKIP dalam kinerja pemerintahan diharapkan akan mengubah pola kebiasaan ASN agar memiliki kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2023 memperoleh nilai SAKIP sebesar 54,60 atau memiliki predikat CC dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 56,77 atau predikat CC. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Sibolga masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Meskipun nilai SAKIP pada tahun 2024 naik dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun masih perlu perbaikan ke depannya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain dari beberapa permasalahan di atas, dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik masih ada beberapa yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapatkan Kota Sibolga menjadi bukti semakin optimalnya pengelolaan keuangan daerah baik dari segi penggunaannya maupun administrasinya. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif tehadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah. Secara umum, faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif serta lemahnya implementasi kebijakan dan belum diterapkannya prinsip good governance. Indeks Pelayanan Publik Sibolga pada tahun 2024 sebesar 3,75 capaian ini merupakan hasil positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Sibolga. Namun capaian tersebut, masih perlu diperbaiki dengan mewujudkan pelayanan publik yang prima, efektif, efisien dan berkualitas khususnya dalam pelayanan dasar masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, transformasi pelayanan publik sudah menjadi suatu keniscayaan untuk diterapkan melalui berbagai inovasi dan juga improvisasi dalam memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik berkualitas. Teknologi informasi hadir dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berkompeten dan mudah. Hal ini menjadi suatu adaptasi bagi unit pelaksana pelayanan publik guna menjawab kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Transformasi digital ini nantinya diharapkan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan dengan cepat dan efisien. Selain itu, layanan ini juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi pelayanan sehingga terhindar dari kondisi yang tidak diharapkan seperti pungutan liar dan sebagainya.

5. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah.

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan bagian utama dari tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok aparatur pemerintah daerah adalah pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah harus merumuskan program- program kegiatan yang mengoptimalkan berbagai sarana prasarana penunjang pembangunan daerah. Hal tersebut dilaksanakan karena peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga saat ini masih belum maksimal direalisasikan. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas jaringan jalan yang baik, tentunya ditujukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat Kota Sibolga untuk melakukan aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun layanan pemerintahan, dan sekaligus memperkuat daya saing daerah. Namun pada realitanya, kondisi jalan di Kota Sibolga masih tergolong memperihatinkan mengingat sebagian panjang jalan berada pada kondisi rusak/rusak berat yang mencapai 31,61 KM pada tahun 2024. Selain itu, masih terdapat panjang jalan yang memiliki jenis permukaan kerikil dan tanah yakni sepanjang 8,45 KM. Infrastruktur merupakan faktor utama daya saing antar daerah. Belum meratanya infrastruktur, menjadikan rendahnya kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur diupayakan cenderung lebih ke daerah yang pendapatan perkapitanya lebih rendah agar pembiayaan yang dikeluarkan menjadi minim dan perbaikan infrastruktur juga diharapkan agar mengurangi kesenjangan karena untuk mewujudkan ekonomi tidak sekedar tumbuh tinggi namun juga tumbuh secara inklusif dan adil. Daerah perkotaan dan pedesaan merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pihak yang berkepentingan dalam hal pembangunan ini, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman. Seharusnya hal ini menjadi panduan untuk melaksanakan pemerataan dalam pembangunan antar keduanya. Tetapi yang kita temui

dilapangan sekarang adalah semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada kota, sehingga daerah pedesaan semakin tertinggal. Pesatnya pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota, inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya. Ketika melihat kondisi infrastruktur, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota di Kota Sibolga tahun 2024 hanya mencapai 58,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam memastikan jaringan transportasi yang memadai untuk mendukung konektivitas dan mobilitas di seluruh wilayah. Sementara itu, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan atau non-perpipaan terlindungi mencapai 100 persen. Angka ini menyoroti tidak perlunya peningkatan dalam penyediaan layanan air bersih yang aman dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam bidang sanitasi, tingkat sanitasi layak di Kota Sibolga juga masih rendah, pada tahun 2024 tercatat masih 37,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai dan layak. Peningkatan dalam infrastruktur sanitasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan di wilayah ini. Selain bidang sanitasi, capaian rumah tangga layak huni di Kota Sibolga pada tahun 2024 sebesar 97,11 persen, hal ini juga menjadi sebuah permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

6. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Sejatinya segala potensi sumber daya alam di Kota Sibolga dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar maupun penunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pendayagunaan potensi sumber daya alam sering kali kurang memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan pembangunan itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sibolga , aktivitas ekonomi daerah yang berlangsung memiliki potensi untuk berdampak pada kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan yang seringkali terjadi akibat aktivitas pembangungan seperti deforestasi, pengelolaan sampah yang belum

maksimal, perubahan tata guna lahan, dan praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Aktivitas tersebut yang akan menimbulkan permasalahan lingkungan terkait dengan polusi air dan udara. Dengan adanya potensi kerusakan lingkungan sebagai dampak aktivitas ekonomi daerah maka setiap kegiatan usaha yang dilakukan di Kota Sibolga baik dalam upaya peningkatan ekonomi maupun peningkatan infrastruktur harus memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan menjaga kesehatan lingkungan. Kondisi kerusakan lingkungan hidup di Kota Sibolga dapat dilihat dari indikator kualitas lingkungan hidup yang mencakup kualitas air dan kualitas udara dan tutupan lahan untuk melihat kualitas lingkungan hidup. Indikator lingkungan hidup sejak 2020 sampai 2024 bergerak secara fluktuatif. Terjadi penurunan dan peningkatan beberapa komponen indeks kualitas lingkungan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semula 64,90 poin ditahun 2023 naik menjadi 47,42 poin di tahun 2024 ini turun dikarenakan indeks kualitas air tidak dihitung. Sesuai penilaian PermenLHK nomor 27 Tahun 2021, capaian IKLH tahun 2023 Kota Sibolga berada pada kategori, “sedang”. Dengan melihat capaian ini terlihat belum optimalnya pengelolaan, pengawasan dan penanganan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan ini perlu adanya peningkatan dalam menjaga kualitas air, udara dan lahan, pengelolaan persampahan dan limbah, serta pengawasan terhadap AMDAL dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga nantinya Pemerintah Kota Sibolga mampu meningkatkan status kategori kualitas lingkungan hidup Kota Sibolga menjadi kategori baik dan sangat baik. Salah satu permasalahan yang ada di Kota Sibolga adalah belum optimalnya pengelolaan sampah. Tempat pembuangan akhir sampah merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai lebih baik. Penyediaan tempat pembuangan akhir sampah lebih sering dianggap hanya merupakan tempat pembuangan sampah, hal ini menyebabkan pengalokasian pendanaan bagi penyediaan fasilitas di TPA yang dirasa kurang prioritas dibanding dengan pembangunan sektor lain. Sampah yang berada di TPA masih mengalami penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa TPA setelah selesai digunakanpun masih ada proses yang berlangsung dan

menghasilkan beberapa zat yang mengganggu lingkungan. Karenanya masih diperlukan pengawasan terhadap TPA yang telah ditutup. Disisi lain, Kota Sibolga merupakan daerah rawan bencana banjir, baik karena alam maupun ulah manusia. Untuk itu diperlukan usaha pengembalian ekosistem lingkungan agar potensi terjadinya ancaman bencana banjir seperti badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata ruang wilayah dapat teratasi sedini mungkin. Ditambah dengan peningkatan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Pelestarian dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, namun kolaborasi bersama stakeholders dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk menjaga bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 13
Keterkaitan Permasalahan Utama, Permasalahan Pokok dan Permasalahan Kota Sibolga Tahun 2025-2029

PERMASALAHAN UTAMA	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga	Belum Optimalnya Kualitas SDM yang merata dan berdaya saing	Belum optimalnya akses dan layanan pendidikan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan
		Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan perpustakaan
		Belum optimalnya kualitas keluarga
		Masih Kurangnya Pemuda yang Inovatif, Kompetitif dan berkarakter
		Belum Optimalnya Prestasi Olahraga
	Belum Optimalnya pengentasan kemiskinan dan penurunan ketimpangan pendapatan	Belum Optimalnya Penanganan PPKS
		Masih rendahnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	Belum Optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Masih tingginya angka pengangguran terbuka Belum Optimalnya peningkatan kualitas ketahanan pangan
		Belum Optimalnya Pengelolaan, Pelestarian dan Pembinaan Kebudayaan
		Masih Rendahnya Nilai Investasi Daerah
		Masih Rendahnya Daya Saing Sektor Perdagangan

		Masih Rendahnya Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah
	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Belum optimalnya penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Belum Optimalnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Belum optimalnya pelayanan pemerintahan berbasis elektronik
		Masih lemahnya persandian dan keamanan informasi
		Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah
		perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya peningkatan inovasi dan kualitas hasil penelitian untuk dimanfaatkan
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
		Belum optimalnya Sistem Manajemen Kepegawaian
		Belum optimalnya peningkatan Kompetensi Aparatur
		Belum optimalnya sistim pengendalian intern perangkat daerah
		Belum optimalnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kearsipan
		Belum optimalnya penetapan Perda
		Belum optimalnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
		Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
		Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik
		Belum optimalnya pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran serta peran masyarakat
	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Belum memadainya infrastruktur kota yang memadai
		Belum optimalnya pengelolaan tata ruang
		Belum optimalnya lahan yang bersertifikat
		Belum optimalnya perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana	Belum optimalnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi

perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka panjang agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka panjang. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

1. **Isu Strategis Global**

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 berperan penting sebagai pondasi awal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Isu dan tantangan pembangunan perlu dimitigasi dan dioptimalisasi menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah serta trajektori pembangunan jangka panjang. Adapun mitigasi terhadap resiko untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

a. Cuaca Ekstrem;
b. Perubahan kritikal terhadap ekosistem;
c. Biodiversity loss dan gangguan ekosistem;
d. Krisis sumber daya alam;
e. Misinformasi dan disinformasi;
f. Dampak buruk teknologi AI;
g. Involuntary migration;
h. Cyber insecurity;
i. Polarisasi sosial;
j. Polusi.

Gambar 2. 7 Isu Strategis Global Jangka Menengah



Sumber: World Economic Forum, Risk Global Report 2024

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029, ada beberapa isu global menjadi peluang dalam pembangunan jangka menengah ke depan, sebagai berikut:

a. Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia, yaitu hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar.
b. Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral, yaitu sinkronisasi kebijakan perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.
c. Penerapan standar *Sustainability* yang tinggi di *Level* Global, yaitu produk Indonesia harus berorientasi ramah lingkungan agar tetap bersaing di pasar global.
d. Transisi energi untuk mendorong pemerataan, yaitu perlu *national grid* yang mampu mendistribusikan pasokan listrik ke luar pulau dan perlunya pembangunan PLT EBT di luar Pulau Jawa untuk mendorong pemerataan.
e. Aging population negara maju, yaitu usia produktif negara maju menurun dan potensi indonesia untuk mendorong penyediaan pariwisata kesehatan untuk lansia.

2. **Isu Strategis Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dua dokumen perencanaan pembangunan yang saling terkait dan berfungsi sebagai panduan strategis dalam pembangunan nasional dan Daerah. RPJMN berfungsi sebagai peta jalan yang menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan nasional selama lima tahun, sementara RPJM Daerah merupakan implementasi dari RPJMN di tingkat Daerah, disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik setiap Daerah.

RPJMN 2025-2029 akan menjadi periode pertama dalam rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang difokuskan pada tema penguatan fondasi transformasi. Tema penguatan fondasi transformasi dalam RPJMN 2025 2029 merupakan langkah awal yang krusial menuju transformasi yang lebih luas dan mendalam di berbagai aspek pembangunan nasional. Langkah ini bertujuan untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi perubahan struktural yang diperlukan untuk mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

Dalam mencapai visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, diperlukan berbagai upaya transformasi yang dituangkan ke dalam lima pilar utama, yaitu Transformasi Sosial; Transformasi Ekonomi; Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Pada periode RPJMN 2025-2029 ini juga telah ditentukan arah kebijakan di setiap transformasi untuk memastikan fondasi pembangunan yang kuat dan terukur pada awal periode pembangunan jangka panjang, yang secara lebih lanjut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.

Transformasi dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029

No	Transformasi	Arah Kebijakan
1	Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
2	Transformasi Ekonomi	Hilirissi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3	Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integrase partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan budaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Memperkuat ketahanan social budaya dan Ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Sumber: RPJMN 2025–2029, diolah tahun 2025.

Arah kebijakan yang disusun dalam RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mengatasi berbagai isu strategis yang dihadapi Indonesia melalui lima pilar transformasi utama. Dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi, reformasi tata kelola pemerintahan, penegakan supremasi hukum, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, kebijakan ini dirancang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun isu-isu strategis yang menjadi pokok pembahasan pada setiap pilar transformasi pada RPJMN 2025-2029 secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.

Arah Pembangunan dan Isu Strategis RPJMN Tahun 2025-2029

No	Transformasi	Arah Pembangunan	Isu Strategis
1	Transformasi Sosial	Kesehatan Untuk Semua	1. Masalah gizi dan kesehatan anak 2. Tingginya kasus penyakit menular (TBC dan kusta) 3. Belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan
		Pendidikan yang Merata Berkualitas	1. Akses dan kualitas pendidikan yang belum memadai 2. Tenaga pendidik terbatas dan tidak merata 3. Masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan produktivitas angkatan kerja
		Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Akurasi program bantuan sosial yang rendah 2. Ancaman bencana dan dampak perubahan iklim 3. Kesempatan yang belum merata bagi kelompok rentan 4. Masih rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 5. Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan 6. Belum optimalnya Program Jaminan Sosial

2	Tranformasi Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonom	1. Deindustrialisasi dini 2. Rendahnya produktivitas tenaga kerja 3. Kurangnya daya saing produk 4. Keterbatasan tenaga kerja terlatih dan berpendidikan tinggi 5. Ketidaksesuaian produksi dengan permintaan global 6. Kurangnya kemampuan inovasi 7. Tantangan menuju energi hijau 8. Degradeasi lingkungan dan hilangnya budaya lokal 9. Keterbatasan amenitas, aksesibilitas, dan atraksi pada sektor pariwisata 10. Pengelolaan destinasi dan kualitas layanan pariwisata seringkali tidak memprioritaskan kepuasan pengalaman wisatawan 11. Rendahnya pengeluaran wisatawan dan investasi pariwisata 12. Kurangnya keterampilan SDM pariwisata dan pemanfaatan ekonomi lokal 13. Belum optimalnya ekosistem kekayaan intelektual 14. Terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif 15. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi kreatif 16. Rendahnya daya saing SDM ekonomi kreatif 17. Belum optimalnya rantai pasok ekonomi kreatif, terutama di Daerah 18. Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi dan inovasi usaha 19. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia dibanding negara-negara di kawasan ASEAN 20. Rendahnya kinerja dan daya saing BUMN 21. Belum optimalnya peran BUMN sebagai agen pembangunan

		Penerapan Ekonomi Hijau	1. Rendahnya produktivitas ekonomi di sektor perairan 2. Biaya lingkungan perairan yang belum terkuantifikasi dan kemiskinan di masyarakat pesisir 3. Tuntutan pembangunan berkelanjutan 4. Ketergantungan terhadap energi fosil 5. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tinggi 6. Potensi energi terbarukan yang besar 7. Kualitas infrastruktur ketenagalistrikan yang belum memadai 8. Belum optimalnya tata kelola ketenagalistrikan, termasuk kebijakan tarif dan harga 9. Keterbatasan dukungan pendanaan dan rantai nilai domestik untuk transisi energy 10. Ketergantungan pada produksi impor energy 11. Keterbatasan untuk adopsi dan adaptasi teknologi 12. Pemanfaatan limbah yang belum optimal 13. Keterbatasan pengolahan limbah elektronik 14. Ketergantungan pada bahan baku kritis 15. Keterbatasan pemanfaatan limbah untuk bahan bakar dan industry 16. Kurangnya kesadaran industri pariwisata akan penerapan ekonomi sirkular dan prinsip berkelanjutan dalam operasional usahanya 17. Keterbatasan pemahaman dan informasi mengenai pekerjaan hijau 18. Belum memadainya sistem pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mempersiapkan tenaga kerja hijau 19. Kurangnya integritas kebijakan dan keterlibatan berbagai pihak terkait pekerjaan hijau 20. Kontribusi sektor kehutanan yang rendah terhadap pdb nasional 21. Rendahnya produktivitas dan perkembangan bioekonomi 22. Belum optimalnya tata batas kawasan hutan dan perhutanan social 23. Proses transaksi izin dan persetujuan bisnis yang belum efektif 24. Keterlibatan para pihak/multisektor yang belum optimal

		Transformasi Digital	1. Belum optimalnya kontribusi ekonomi perkotaan terhadap nasional 2. Digitalisasi sektor strategis 3. Peningkatan aspek pendukung dan akselerator transformasi digital
		Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global	1. Keterkaitan perekonomian secara domestik masih terbatas 2. Belum optimalnya perdagangan antar wilayah dan ekspor serta partisipasi dalam rantai nilai global 3. Belum optimalnya penguatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global 4. Daya dukung tercapainya integrase ekonomi domestik dan konektivitas global perlu ditingkatkan
		Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Masih terbatasnya keterkaitan perekonomian secara domestik 2. Pemenuhan Layanan Perkotaan yang belum memadai dan inklusif 3. Tata kelola yang belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif 4. Masalah sosial-ekonomi masyarakat perkotaan 5. Pola pembangunan perkotaan yang menyerak 6. Degradasi lingkungan perkotaan dan rendahnya ketangguhan bencana
3	Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif	1. Belum tercapainya integrasi partai politik 2. Belum terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif 3. Belum optimalnya reformasi regulasi dan peningkatan partisipasi publik 4. Belum adanya sistem penilaian K/L/D terintegrasi yang berbasis pada penilaian kinerja, anggaran, dan integritas
4	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesian	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	1. Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM 2. Rendahnya kepatutan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan 3. Keterbatasan akses terhadap keadilan 4. Kelembagaan penegak hukum yang belum professional 5. Belum optimalnya keamanan dan stabilitas negara 6. Pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional 7. Disrupsi teknologi dan keamanan siber 8. Demokrasi yang masih prosedural

		Stabilitas Ekonomi Makro	1. Krisis ekonomi dan keuangan global 2. Tensi geopolitik dan geoekonomi 3. Perubahan lingkungan dan social 4. Tingkat penerimaan dan pengeluaran fiskal yang tidak seimbang 5. Imbal hasil obligasi yang tinggi
		Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	1. Ketidakpastian dalam kebijakan luar negeri 2. Disrupsi rantai pasok global dan tren decoupling ekonomi 3. Belum terselesaikannya permasalahan perbatasan dan diplomasi wilayah 4. Belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia 5. Peningkatan kompleksitas dan ancaman dalam konflik global
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	1. Nilai agama belum optimal diejawantahkan menjadi kerja-kerja pembangunan yang membawa kebaikan bersama 2. Wawasan dan identitas nasional sebagai bangsa majemuk tidak serta merta melahirkan kehidupan beragama dan berbudaya yang inklusif 3. Beragama belum disertai dengan kemampuan literasi keagamaan yang inklusif, moderat, dan berorientasi kemaslahatan 4. Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global 5. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 6. Kearifan lokal belum dipertimbangkan 7. sebagai modal dasar pembangunan dan penggerak transformasi masyarakat
		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1. Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga menyebabkan ancaman krisis moral dan karakter di kalangan generasi muda 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia belum optimal 3. Ketimpangan gender yang masih tinggi 4. Kesulitan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesetaraan gender

		Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Penurunan kualitas lingkungan hidup 2. Peningkatan luasan lahan terkontaminasi limbah B3 3. Terbatasnya daya tampung sampah 4. Krisis keanekaragaman hayati dan ancaman kepunahan spesies
		Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Akses dan kualitas energi yang tidak merata 2. Rendahnya pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional 3. Kurangnya efisiensi pengusahaan dan pemanfaatan energy 4. Belum optimalnya eksplorasi energy 5. Kurangnya efisiensi dalam institusi pengelolaan energy 6. Ketersediaan air bersih yang terbatas 7. Penurunan kualitas air 8. Pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien 9. Kekurangan infrastruktur penyimpanan air 10. Ketersediaan pangan yang tidak memadai 11. Rendahnya kualitas dan keamanan pangan 12. Rendahnya keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan 13. Tingginya fluktuasi harga pangan 14. Rendahnya kesejahteraan petani dan nelayan sebagai penyedia utama komoditas pangan
		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Belum optimalnya upaya pencegahan, kesiapsiahaan, mitigasi, dan peringatan dini terpadu 2. Belum optimalnya tata kelola penanganan darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pascabencana 3. Kurangnya infrastruktur berketahanan bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana 4. Belum terintegrasinya sistem penataan ruang dan pengembangan informasi geospasial berbasis risiko bencana 5. Tantangan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim 6. Kurangnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan 7. Ketergantungan pada bahan bakar fosil

Sumber: Data Diolah

ISU STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA

a. **Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkeadilan**

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan. Persoalan yang perlu diatasi meliputi luasnya permukiman kumuh, rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, serta kondisi infrastruktur SDA yang masih buruk. Penanganan banjir juga menjadi isu penting. Urban sprawl atau perkembangan kota yang tidak terstruktur serta tingginya risiko bencana di provinsi ini memerlukan perhatian khusus. Layanan ketenagalistrikan masih kekurangan pasokan daya dan tidak efisien, terutama di Daerah perbatasan dan pulau terluar. Jangkauan jaringan seluler belum dimanfaatkan optimal untuk kegiatan produktif.

b. **Pembangunan Antar Daerah serta Desa-Kota**

Keterkaitan antara Daerah dan desa-kota di Sumatera Utara masih belum optimal, sehingga tidak dapat mendukung rantai pasok yang efektif. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan masih menghadapi masalah permukiman kumuh, kualitas lingkungan hidup yang menurun, dan infrastruktur transportasi massal yang belum memadai. Urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang terpusat menyebabkan migrasi manusia ke wilayah dengan ekonomi yang lebih baik.

c. **Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan**

Pengelolaan SDA berkelanjutan belum sepenuhnya mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang. Tantangan lain meliputi adaptasi perubahan iklim, pengawasan deforestasi, kebakaran hutan, dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar. Akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA, termasuk kelompok marginal, masih perlu ditingkatkan.

d. **Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Transisi demografi menimbulkan tantangan dalam pembangunan kesehatan, seperti meningkatnya penyakit menular dan tidak menular, serta masalah kesehatan penduduk lanjut usia dan kesehatan jiwa. Kualitas pendidikan yang rendah akibat kurangnya sarana-prasarana, distribusi guru yang tidak merata, dan rendahnya kualifikasi pendidikan

mempengaruhi keterserapan tenaga kerja. Pemahaman dan kepesertaan dalam jaminan sosial juga masih rendah.

e. **Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur**

Konektivitas dan sistem logistik yang kurang memadai menyebabkan mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas ke lokasi pengolahan dan pemasaran. Peningkatan fasilitas perhubungan darat, laut, dan udara perlu diupayakan untuk mengurangi biaya logistik dan mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan informasi.

f. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel**

Pelayanan publik di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan melalui reformasi birokrasi dan peningkatan SDM profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi. Optimalisasi infrastruktur TIK, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, serta manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme.

ISU STRATEGIS KLHS RPJMD KOTA SIBOLGA

Berdasarkan hasil analisa terhadap dokumen KLHS RPJMD, terdapat Isu strategis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis - RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029, yang menjadi isu strategis pembangunan berkelanjutan wilayah Kota Sibolga adalah:

a. Kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup manusia (kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, peran gender bagi kesejahteraan keluarga serta layanan kesehatan dan layanan pendidikan.
b. Pertumbuhan ekonomi wilayah yang terus berkembang dengan dukungan ekonomi masyarakat.
c. Permukiman kota yang sehat, aman dan atraktif, dengan dukungan, infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh kota.
d. Perlindungan dan Pemanfaatan Lestari Ekosistem Darat, Pantai, Pulau Kecil dan Perairan Laut
e. Tata kelola dan kapasitas pemerintahan (governance) yang menyangkut masyarakat damai, partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadahap hukum, kualitas birokrasi, kapasitas pemerintahan, kerjasama daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria

yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis utama Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan

   Data persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Sibolga menunjukkan tren penurunan yang positif pasca lonjakan signifikan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi. Sejak tahun 2022 hingga 2024, Kota Sibolga berhasil menekan angka kemiskinan dari 11,47 % menjadi 11,39, merefleksikan efektivitas program pemulihan ekonomi dan bantuan sosial. Meskipun demikian, angka ini masih mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kota Sibolga masih hidup di bawah garis kemiskinan, serta tantangan untuk mencapai target nasional percepatan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen masih menjadi prioritas Oleh karena itu, percepatan penurunan kemiskinan tetap menjadi isu strategis yang membutuhkan intervensi terarah dan komprehensif dari pemerintah daerah. Ke depan, strategi percepatan penurunan kemiskinan di Kota Sibolga harus berfokus pada pendekatan multidimensional yang menyasar akar permasalahan kemiskinan. Hal ini mencakup penguatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja, peningkatan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penyediaan infrastruktur dasar yang memadai seperti air bersih, sanitasi, dan listrik yang terjangkau. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat juga krusial untuk memastikan program-program ini berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong lebih banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Kota Sibolga.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM

   Terdapat berapa isu mengenai sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Salah satu permasalahan utama adalah kualitas pembangunan manusia, khususnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan gender. Hal ini berakibat pada kualitas SDM sebagai modal sosial utama Daerah yang belum optimal. Permasalahan kualitas SDM ini dapat menghambat proses pembangunan Daerah yang baik. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan sebagai isu strategis untuk dicegah dan ditangani guna mewujudkan kualitas SDM yang lebih baik.

Pemerintah Kota Sibolga belum optimal dalam pembangunan pariwisata sehingga menjadi isu strategis daerah. Masih rendahnya Pendapat Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga dan kunjungan tamu wisatawan yang hanya berkunjung ke kota sibolga pada event-event tertentu saja, padahal Kota Sibolga mempunyai laut yang sangat indah untuk dikunjungi, mempunyai peluang untuk peningkatan pariwisata dikarenakan kota sibolga dekat dengan laut sehingga dari faktor wisatawan kuliner kota sibolga masih memadai dimana pemerintah sibolga akan lebih focus lagi pembangunan infrastruktur khusus dibidang parawisata.

Di sisi lain, terdapat pemenuhan gizi yang masih belum optimal pada masyarakat sehingga menjadikan akar masalah pada isu strategis ini. Masih adanya kasus stunting yang disebabkan karena masih rendanya masyarakat terhadap keragaman pangan dan masih kurangnya terhadap keamanan pangan di Kota Sibolga. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi kelangsungan hidup masyarakat di Kota Sibolga .

3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

   Infrasturktur Daerah yang memadai merupakan elemen penting untuk pembangunan Daerah yang berkelanjutan. Di Kota, terdapat beberapa masalah utama yang menjadi fokus pembangunan, seperti komunikasi dan telekomunikasi yang belum merata untuk meningkatkan literasi digital, penyediaan website yang memberikan informasi terkini dan aman dapat membantu meningkatkan minat baca masyarakat. Infrastruktur jalan di sibolga juga perlu ditingkatkan, terutama jalan lokal di Lingkungan yang mengalami kerusakan berat. Ketidakmerataan pembangunan disebabkan oleh kurangnya konektivitas antar wilayah. Kekurangan sumber air bersih dimana pada musim kemarau, air bersih sulit didapatkan oleh masyarakat Kota sibolga kedepannya pemerintah akan mengoptimalisasi sistem penyediaan air bersih di setiap kelurahan kota sibolga.

4. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan disebabkan oleh berbagai kendala mulai dari pariwisata, investasi, perdagangan, perikanan, dan kelautan. Faktor-faktor seperti kurangnya daya saing ekonomi yang rendah merupakan penghambat utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga. Selain itu, Kota Sibolga merupakan Daerah yang memiliki pesisir, namun dalam pemanfaatannya Kota Sibolga dinilai masih kurang maksimal dalam memanfaatkan hasil laut sehingga hal

tersebut tentu menjadi salah satu isu yang perlu ditangani. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Kota Sibolga juga menimbulkan kesenjangan yang cukup besar di antara masyarakat. Meskipun Sibolga menunjukkan capaian yang relatif baik dalam mengurangi kesenjangan dibandingkan yang tercermin dalam penurun rasio gini, tantangan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan pemerataan pendapatan tetap krusial. Kesenjangan ekonomi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi inklusif, memicu potensi konflik sosial, serta melemahkan daya beli masyarakat yang lebih rentan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas hidup dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses kesempatan kerja, pemberdayaan UMKM, pendidikan berkualitas, dan layanan dasar yang merata, akan sangat vital untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Sibolga.

5. Pelestarian Lingkungan Hidup

   Pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang penting karena memberikan dampak keberlanjutan terhadap pembangunan. Terdapat beberapa isu serius mengenai lingkungan di Kota Sibolga seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, penambangan liar, pengelolaan sampah yang tidak memadai dan pencemaran lingkungan. Hal tersebut tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan perencanaan tata ruang dan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi dan melakukan pelestarian lingkungan hidup.

   Menjaga dan memulihkan ekosistem laut dan pesisir yang berkelanjutan

   - Jasa ekosistem seperti terumbu karang dan padang lamun dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati laut dan pesisir serta menyediakan sumber daya perikanan bagi masyarakat setempat.
   - Ekosistem laut dan pesisir yang sehat juga dapat berkontribusi dalam mengurangi bencana alam seperti banjir dan badai, serta memberikan tempat perlindungan bagi hewan dan tumbuhan.

6. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi

   Bidang tata kelola pemerintahan Daerah adalah salah satu aspek penting untuk mendukung pembangunan yang efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis masalah yang telah diuraikan, ada beberapa isu

utama yang perlu diprioritaskan penanganannya. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana infrastruktur pengelolaan pemerintahan. Keterbatasan ini menghambat integrasi sistem informasi sehingga akses masyarakat terhadap informasi terbaru dan faktual belum terpenuhi. Masalah ini memengaruhi kinerja pemerintah Daerah dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga perlu menjadi prioritas penanganan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Selain masalah akuntabilitas kinerja pemerintah dan infrastruktur manajemen sistem informasi yang belum optimal, perwujudan kemandirian kelurahan yang belum signifikan juga menjadi isu strategis. Masalah ini mencakup mekanisme perencanaan pembangunan yang belum kolaboratif dan kurangnya kapasitas sumber daya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik. Kekhawatiran ini dapat memengaruhi kualitas keputusan yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang holistik diharapkan dapat menjadikan perangkat Daerah Kota Sibolga sebagai penyelenggara pemerintahan yang didukung publik, sehingga meningkatkan keberhasilan implementasi program dan kegiatan. Selain itu, kapasitas dan keahlian sumber daya manusia perlu diselaraskan antara pemerintah dan Instansi vertical untuk mewujudkan tata kelola yang inovatif dan adaptif.

7. Stabilitas Ketahanan Pangan Pangan

   Merupakan sumber utama bagi keberlangsungan hidup manusia. Pemerintah Kota Sibolga tentu sangat memperhatikan ketersediaan pangan untuk memastikan keberlangsungan hidup masyarakat sehingga dapat mencapai kondisi yang sejahtera. Hingga saat ini ketersediaan pangan di Kota Sibolga masih tercukup, namun dengan bertambahnya jumlah penduduk tentu saja ketahanan pangan menjadi prioritas dan akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Ketahanan pangan juga tidak hanya mencakup ketersediaan saja, tetapi juga dengan keterjangkauan dan pemanfaatan pangannya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mendukung ketahanan pangan di Kota Sibolga, seperti produksi perikanan yang berkelanjutan, ketersediaan infrastruktur Perikanan, kesesuaian program pemerintah, manajemen risiko, keterjangkauan pangan, dan diversifikasi pangan. Dalam mencapai ketahanan pangan yang stabil tentu memiliki tantangan yang besar seperti cuaca yang ekstrem, perubahan pola konsumsi, dan pertambahan jumlah penduduk

yang pesat.

8. Mitigasi Bencana dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

   Saat ini perubahan iklim merupakan salah satu isu yang dihadapi dunia. Adanya perubahan iklim yang memprihatinkan tentu akan memberikan dampak berupa bencana. Kota Sibolga memiliki potensi terhadap beberapa bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Hal tersebut tentu menjadikan pemerintah Daerah Kota Sibolga untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat mengenai mitigasi bencana yang kemungkinan akan terjadi di Kota Sibolga. Ketenteraman dan ketertiban umum dipengaruhi oleh tingkat kriminalitas. Semakin tinggi tingkat kriminalitas, semakin tidak kondusif suatu Daerah. Tindak kriminalitas dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kemiskinan, krisis moneter, kurangnya lapangan kerja, dan penyalahgunaan narkoba.

Tabel

Permasalahan dan Isu Strategis Global-Nasional-Provinsi-Kota Sibolga

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai sektor yang berpotensi menyerap lapangan kerja berkontribusi terhadap PDRB Kota Sibolga tahun 2024 yang kemudian diikuti dengan dengan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terutama pada sektor Perikanan dan sektor transportasi dan pergudangan. komposisi sektoral ini kedepannya dapat diintergrasikan agar sektor primer khususnya perikanan dapat dikembangkan dan menjadi sumber bahan baku bagi sektor penyediaan Akomodasi dan Makan minuman menjadi lebih Optimal.	Belum Optimalnya Kualitas SDM yang merata dan berdaya saing	Kesejahteraan keluarga dan Kualitas hidup manusia (kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, peran gender bagi kesejahteraan keluarga serta layanan kesehatan dan layana n pendidikan.	Cuaca Eksterm	Isu Globalisasi Ekonomi: transformasi Ekonomi	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM
Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan Kota Sibolga melalui berbagai Program Strategis bidang kewirausahaan, koperasi, serta intervensi yang terstruktur untuk nelayan dan sektor informal lainnya.					Percepatan Penurunan Kemiskinan

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
Indeks Pembangunan Manusia Kota Sibolga tercatat sebesar 77,52 poin lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing berada di angka 75,76 dan 75,02. kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya Indeks Pembangunan Manusia mengalami Peningkatan secara fluktuatif	Belum Optimalnya pengentasan kemiskinan dan Penurunan ketimpangan pendapatan.	Pertumbuhan Ekonomi wilayah yang terus berkembang dengan dukungan ekonomi masyarakat	Perubahan kritikal terhadap ekosistem	Isu Sustainable Development Goals; Pembangunan Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
TPT Kota Sibolga memiliki tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2020 mencapai angka 8 % dan Pada tahun 2021 masih mengalami kenaikan menjadi 8,72 sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 7,05 % dan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 6,79 % penurunan ini kembali terjadi pada tahun 2024 menjadi 6,52 % ini disebabkan oleh adanya perkembangan pada sektor skunder yang cukup baik.	Belum Optimalnya daya saing ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Permukiman kota yang sehat, aman dan atraktif, dengan dukungan, infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh kota.	Biodiversity loss dan gangguan ekosistem	Isu Sustainable Development Goals; Transformasi Sosial; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada penyelenggaran urusan wajib terkait pelayanan dasar	
SAKIP Kota Sibolga terus Menunjukkan perbaikan yang signifikan, meningkat dari 2020 sampai dengan pada tahun 2024 pada Tahun 2020 SAKIP kota Sibolga 50,15 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 53,29 begitu juga pada tahun 2022 menjadi 53,51 dan pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 54,60 dan pada tahun 2024 kembali meningkat 56,77.	Belum optimalnya tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Tata kelola dan Kapasitas pemerintahan(governance) yang menyangkut masyarakat damai, partisipasi masyarakat, kepatuhan terhadahap hukum,	Krisis sumber daya alam	Perubahan Iklim Dunia dan Kebutuhan Mengatasinya; Isu Sustainable Development Goals; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
Peningkatan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintahan yang bersih (clean government). Peningkatan kualitas tatakelola yang diindikasikan dengan nilai SAKIP Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi.		kualitas birokrasi, kapasitas pemerintahan, kerjasama daerah			
Sebagian besar alokasi belanja modal difokuskan pada pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan infrastruktur wilayah. Tren alokasi anggaran untuk belanja modal menunjukkan peningkatan, terutama pada tahun 2024. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan wilayah secara lebih luas, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota Sibolga secara keseluruhan.	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah	Permukiman kota yang sehat, aman dan atraktif, dengan dukungan, infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh kota.	Misinformasi dan disinformasi	Isu Geopolitik dan Geoekonomi; Disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK); Transformasi Tata Kelola; Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/ perubahan; Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur
		Perlindungan dan Pemanfaatan Lestari Ekosistem Darat, Pantai, Pulau Kecil dan Perairan Laut	Dampak buruk teknologi AI		Pelestarian Lingkungan Hidup

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Global	Isu Eksternal (Internasional, Nasional dan Provinsi)	Isu Strategis Daerah
			Involuntary migration		Stabilitas Ketahanan Pangan
			Cyber insecurity		
			Polarisasi sosial		
			Polusi		

b. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah:

MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH,
SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Peduli : Merupakan keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintah yang demokratis, proaktif mengatasi dan menggali berbagai permasalahan serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat serta komitmen yang baik dalam peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan peningkatan SDM yang berkualitas.

Amanah : Memiliki makna dasar dipercaya dan konsisten melaksanakan apa yang direncanakan dan merencanakan apa yang akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Setia : Memiliki makna sikap pemimpin yang taat berpegang teguh pada prinsip dan memiliki komitmen, rasa kekeluargaan, mampu bekerjasama serta berpegang teguh kepada janji pembangunan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan partisipasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara merata.

Sejahtera : Memiliki makna kondisi masyarakat Kota Sibolga yang hidup dalam kemakmuran ini diartikan sebagai keaadaan masyarakat yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kata "sejahtera" merujuk pada kondisi dimana Seluruh masyarakat Kota Sibolga dapat hidup dengan kualitas hidup yang baik dan merata, mencakup kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan. Sejahtera berarti masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan yang layak serta lingkungan yang bersih dan aman. Pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan di Kota Sibolga juga berarti menciptakan peluang yang adil bagi semua warga, termasuk kelompok rentan untuk berpartisipasi dan menikmati hasil dari kemajuan kota. Ini mencerminkan visi pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029 didukung dengan 7 (tujuh) misi pembangunan daerah dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini memiliki pengertian, Pemerintah Kota Sibolga akan melaksanakan pembangunan secara transparan, akuntabel dalam konsep Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan profesionalisme pegawai serta kualitas pengawasan. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu dilakukan langkah- langkah penataan, pembinaan dan pemberdayaan baik kelembagaan, sistem ketatalaksanaan maupun kapasitas pegawai. Selain itu Kota Sibolga akan melaksanakan konsep perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik yang prima dengan melibatkan

partisipasi masyarakat.

2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing.

Misi ini dimaksud untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat serta mampu menciptakan generasi penerus yang memiliki keunggulan, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global sehingga memiliki daya asing dan didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta menjungjung tinggi nilai-nilai agama.

3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu.

Misi ini dimaksud untuk meningkatakan derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan bayi yang diukur dengan berkurangnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Standar lain yang juga harus dicapai seperti meningkatnya status gizi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan keluarga berencana. Berbagai kondisi ini harus dicapai dengan akses masyarakat yang baik terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata di Kota Sibolga.

4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wirawasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan.

Misi ini dimaksud untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan membangun jiwa kewirausahaan sebagai solusi menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mampu menunjang upaya pengentasan pengangguran dan kemiskinan daerah. Pemanfaatan potensi daya saing daerah seperti potensi kelautan/perikanan tangkap dan budidaya, sumberdaya alam wisata bukit dan sejarah, pengelolaan kawasan wisata laut di pulau poncan dan sarudik, potensi perdagangan dan jasa, potensi industri rumah tangga. Misi ini ditempuh melalui penciptaan iklim investasi ekonomi kreatif, penguatan sektor pariwisata, serta dukungan terhadap

kemudahan berusaha/investasi dan penguatan UMKM untuk meningkatkan daya saing untuk mensejahterakan masyarakat.

5. Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur- unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Misi ini memiliki pengertian, pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pencapaian infrastruktur untuk mencegah terjadinya kawasan kumuh, penanganan kumuh, peningkatan akses air minum dan sanitasi lingkungan dengan pertimbangan unsur sejarah dan kebudayaan Peningkatan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, peningkatan kualitas lingkugan hidup dengan mencegah terjadinya pencemaran air (sungai, laut, maupun sumber air lainnya), pencemaran udara, dan meningkatkan tutupan lahan dengan melibatkan masyarakat. Penanganan bencana untuk mengurangi perluasan banjir dan penanganan banjir termasuk penanganan bencana kebakaran merupakan hal yang juga menjadi prioritas misi ini.

6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah.

Misi ini memiliki pengertian, untuk mewujudkan Sibolga yang peduli melalui upaya meningkatkan kerukunan umat beragama dan menangani penurunan nilai-nilai moral, sosial dan budaya yang terus terjadi dimasyarakat. Melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap budaya tradisional. Meningkatkan pembinaan generasi muda di berbagai bidang, melalui peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan partisipatif, pelestarian seni budaya, berbasis kearifan lokal.

7. **Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyelahgunaan narkotika, serta penyakit masyarakat lainnya.**

Misi ini memiliki pengertian, untuk meningkatkan pembinaan generasi muda dan mempersiapkan sumber daya manusia terhindar dari penyelahgunaan narkotika dengan meningkatkan peran serta pemuka agama, tokoh masyarakat dan pemuda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan penyakit masyarakat lainnya. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga Negara dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Penyelahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Lem Kambing, dan penyakit masyarakat (pekat) lainnya.

- **Penyelarasan Visi, Misi RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029**

Visi Kepala daerah Terpilih Kota Sibolga sudah selaras dengan Visi RPJMN 2025-2029 dan selaras terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Penyelarasan Visi RPJMN, Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan Visi RPJMD Kota Sibolga

RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga 2025-2029
Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Sibolga Peduli, Amanah dan Setia Untuk Masyarakat yang Sejahtera

Selanjutnya, RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025–2029 disusun tidak hanya sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, tetapi juga sebagai bentuk konkret dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Dalam hal ini, RPJMD menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda Asta Cita, yaitu 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional yang meliputi:

Asta Cita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Asta Cita 2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Asta Cita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
Asta Cita 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Asta Cita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Asta Cita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Asta Cita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum. dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Asta Cita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2029

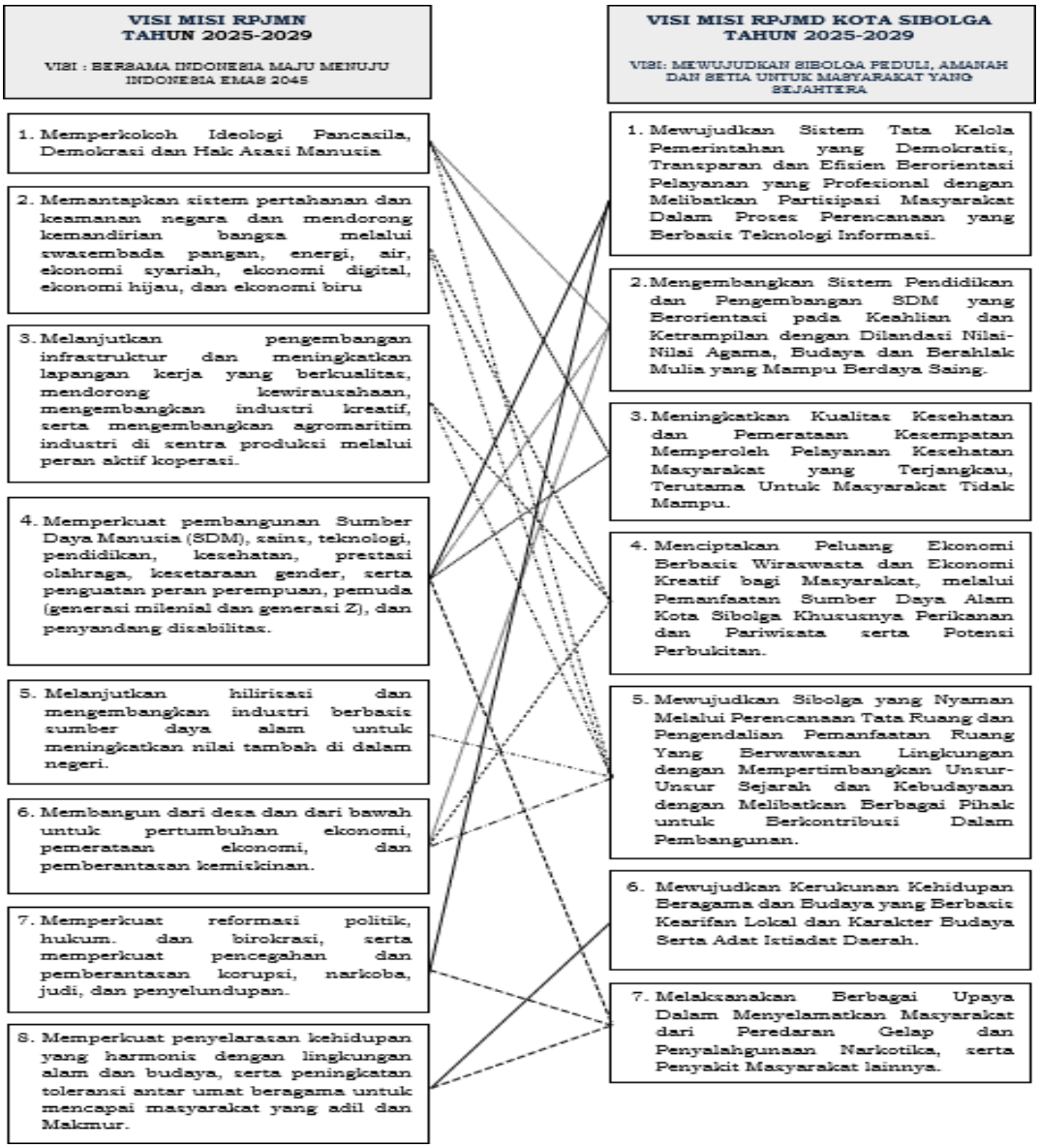
Misi 1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Misi 2	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah
Misi 3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan tujuan pembangunan
Misi 4	Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan
Misi 5	Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh

Keterkaitan antara RPJMD Kota Sibolga, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Asta Cita dijabarkan secara nyata dalam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama	Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan dan Efisien Berorientasi Pelayanan yang Profesional dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan yang Berbasis Teknologi Informasi mendukung Astacita 4 dan 7, Provinsi Sumatera Utara mendukung Misi 3.
Misi Kedua	Mengembangkan Sistem Pendidikan dan Pengembangan SDM yang Berorientasi pada Keahlian dan Ketrampilan dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama, Budaya Berahlak Mulia yang Mampu Berdaya Saing mendukung Astacita 1, 4 dan 6 dan Misi Provinsi Sumatera Utara 1
Misi Ketiga	Meningkatkan Kualitas Kesehatan dan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Terjangkau, Terutama Untuk Masyarakat Tidak Mampu mendukung Astacita 1 dan 4 dan Misi Provinsi Sumatera Utara 1
Misi Keempat	Menciptakan Peluang Ekonomi Berbasis Wiraswasta dan Ekonomi Kreatif bagi Masyarakat, melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kota Sibolga Khususnya Perikanan dan Pariwisata serta Potensi Perbukitan mendukung Astacita 2,3 dan 6 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara 2
Misi Kelima	Mewujudkan Sibolga yang Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan dengan Mempertimbangkan Unsur-Unsur Sejarah dan Kebudayaan dengan Melibatkan Berbagai Pihak untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan mendukung Astacita 1,2,3,5 dan 6 dan Prioritas Provinsi Sumatera Utara 4.
Misi Keenam	Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Berbasis Kearifan Lokal dan Karakter Budaya Serta Adat Istiadat Daerah mendukung Astacita 8 dan Misi Propinsi Sumatera Utara 5.

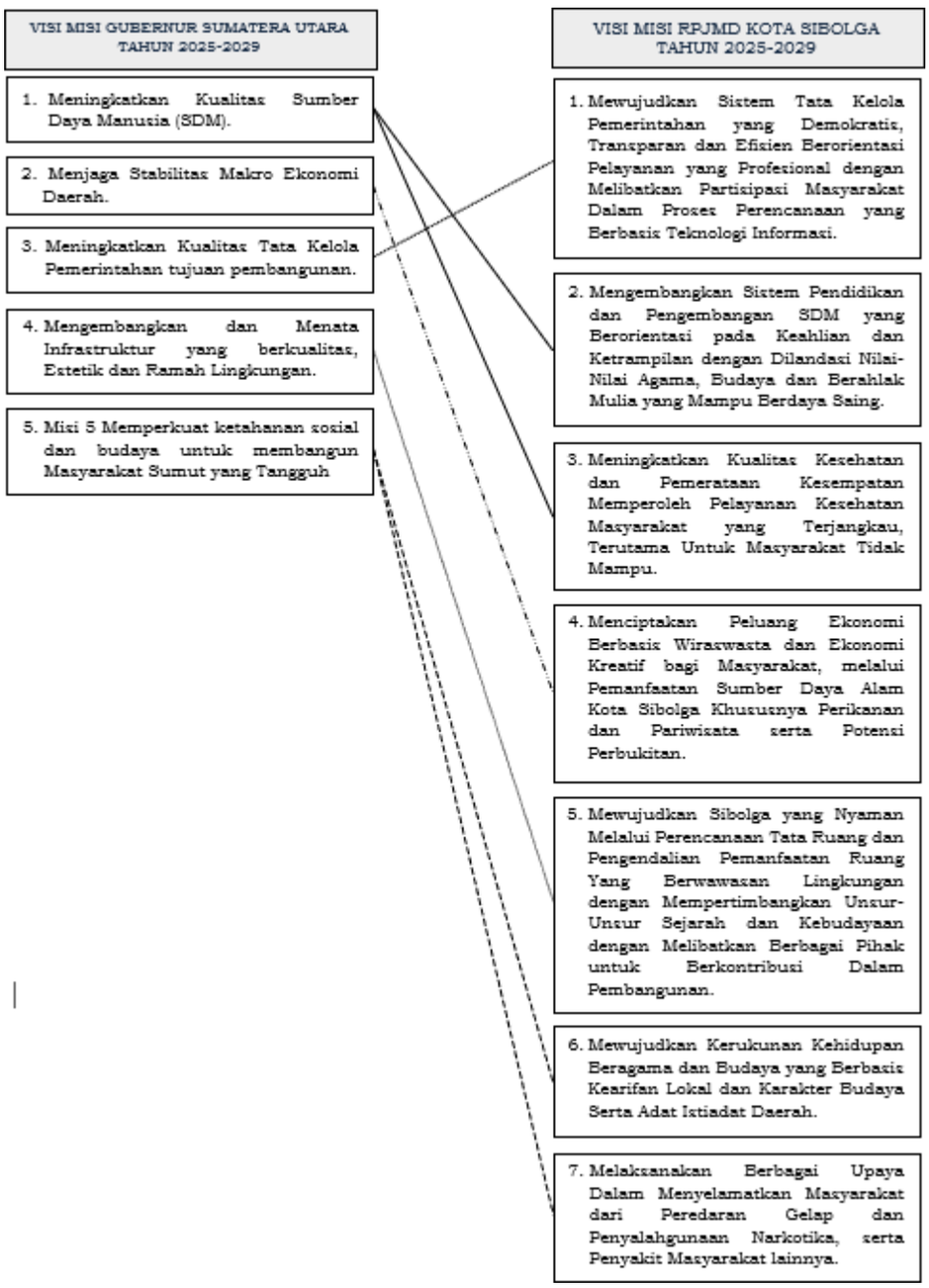
Misi Ketujuh Melaksanakan Berbagai Upaya Dalam Menyelamatkan Masyarakat dari Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika, serta Penyakit Masyarakat lainnya mendukung Astacita 4,7 dan 8 dan Misi Provinsi Sumatera Utara 5

Korelasi Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga dapat digambarkan sebagai gambar berikut.



Gambar 3.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
Sumber: Data diolah

Korelasi Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga dapat digambarkan sebagai gambar berikut.



Gambar 3.2 Keselarasan Visi Misi Gubernur Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029
Sumber: Data diolah

- **Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Implementasi pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran kinerja bersifat operasional disertai dengan indikator kinerja. Rumusan Misi kepala daerah diterjemahkan kedalam Tujuan dan Sasaran pembangunan Jangka Menengah. Secara lebih rinci, perumusan tujuan dan sasaran pada setiap misi dapat dilihat sebagai berikut.

1. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

   Pada Misi 1 dijabarkan kedalam satu tujuan dan empat sasaran. Tujuan pada misi ini adalah mewujudkan birokrasi profesional dan melayani. Tujuan ini dikembangkan menjadi 4 sasaran antara lain Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel, Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif, dan Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN. Dengan fokus keempat sasaran ini, diharapkan mampu mewujudkan tata kelola yang demokrasi, transparan dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam misi ini pemanfaatan teknologi digital menjadi aspek penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan serta proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi.

   Dalam mewujudkan Birokrasi yang ideal terdapat sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel yang maksudnya tata kelola pemerintahan harus transparan, bebas dari korupsi serta bertanggungjawab dalam pengelolaan Sumber daya publik agar layanan publik menjadi lebih cepat, mudah diakses, efisien dan inovatif yang tentunya semua ini harus didukung oleh aparatur yang kapabel sehingga dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur negara agar mampu memberikan layanan yang profesional dan berkualitas.

Tabel 15

Tujuan dan Sasaran Misi 1

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel
		Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif
		Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN
		Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah

2. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Penjabaran dan tujuan pada misi 2 dijabarkan kedalam satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan pada misi ini Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas secara detail digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 16

Tujuan dan Sasaran Misi 2

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Literasi Masyarakat

Misi dua berfokus pada Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berorientasi pada keahlian dan ketrampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berakhlak mulia sehingga mampu berdaya saing.

Dengan kata lain SDM ini harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga dengan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skills dengan tujuan besarnya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kota Sibolga. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Sasaran pada misi 2 meliputi Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dan Meningkatnya Literasi Masyarakat.

Pada sasaran satu diharapkan pendidikan dan beasiswa dapat dirasakan bagi masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi.

Pada sasaran dua diharapkan masyarakat Kota Sibolga meningkatkan melek huruf. Tujuan yang konkrit dan sasaran yang terukur untuk meningkatkan Sumber daya yang unggul dan berkualitas.

3. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Pada misi ketiga yang terkait dengan kualitas dan pelayanan kesehatan dijabarkan menjadi satu tujuan dan satu sasaran secara konseptual dapat disajikan pada tebel berikut ini.

Tabel 17

Tujuan dan Sasaran Misi 3

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Tabel diatas menunjukkan strategi kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau bagi masyarakat tidak mampu penjabaran misi ini dilihat melalui keterikatan antara misi tiga, tujuan dan sasaran. Tujuan misi tiga yaitu meningkatnya kesehatan masyarakat. Fokusnya adalah mewujudkan kualitas dan pelayanan kesehatan dapat menjamin Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan serta penguatan peran keluarga sehingga setiap indivdu dapat menerima pelayanan kesehatan yang merata. Secara keseluruhan strategi yang digambarkan menunjukkan bahwa pembangunan kualitas dan pelayanan kesehatan tidak hanya

berorientasi pada masyarakat menengah keatas tetapi juga harus memastikan kualitas dan pelayanan kesehatan mudah terjangkau bagi masyarakat yang tidak mampu.

4. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Penjabaran tujuan dan sasaran pada misi empat difokuskan pada aspek pertumbuhan ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif khusunya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan, sehingga pada misi empat terdiri atas satu tujuan dan empat sasaran.

Tabel 18
Tujuan dan Sasaran Misi 4

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah
		Menurunnya Tingkat Pengangguran
		Menurunnya Angka Kemiskinan
		Menguatnya sistem Pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal

Misi empat bertujuan Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi untuk mencapai misi empat tersebut terdapat empat sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah, Menurunnya Tingkat Pengangguran, Menurunnya angka Kemiskinan dan Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. Misi empat berfokus pada peningkatan pengelolaan dan nilai tambah diberbagai sektor termasuk perikanan, pangan, pariwisata, perindustian, perdagangan dan UMKM. Misi ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan,

menciptakan usaha seluas-luasnya, serta meningkatkan daya saing usaha, ekonomi lokal dan ekonomi kreatif.

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong keberlanjutan usaha berbasis sumber daya setempat dengan mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Sibolga.

5. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Pada misi kelima yang terkait dengan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan dijabarkan menjadi satu tujuan dan dua sasaran secara konseptual dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 19
Tujuan dan Sasaran Misi 5

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 5: Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Risilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi

Tujuan pada misi ini adalah Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan. Tujuan ini dikembangkan menjadi tiga sasaran antara lain Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah dan Meningkatnya Konektivitas Transportasi dengan fokus ketiga sasaran ini pembangunan dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat bagi seluruh warga Kota Sibolga dan juga melibatkan

peran serta masyarakat dalam mengatasi bencana daerah serta terciptanya konektivitas transportasi yang aman dan lancar.

6. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 6

   Penjabaran dan tujuan pada misi enam dijabarkan kedalam satu tujuan dan dua sasaran. Tujuan pada misi ini Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah secara detail digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 20
Tujuan dan Sasaran Misi 6

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah	Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar Umat beragama dan budaya	Meningkatnya keamanan kerukunan umat beragama
		Meningkatnya Pelestarian Budaya

Tujuan pada pencapaian misi ini yaitu Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya. Fokus terhadap pencapaian ini terdapat pada dua sasaran yaitu Meningkatnya keamanan kerukunan umat beragama dan Meningkatnya pelestarian budaya. Pencapaian pada sasaran satu diharapkan terlaksananya forum umat beragama di Kota Sibolga. Pada sasaran kedua diharapkan seluruh kegiatan ditengah masyarakat Kota Sibolga sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal.

7. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 7

   Penjabaran pada misi ketujuh yaitu Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta penyakit masyarakat lainnya dapat dicapai melalui satu tujuan dan dua sasaran terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 21

Tujuan dan Sasaran Misi 7

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta penyakit masyarakat lainnya.	Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya Pemuda Berprestasi
		Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika

Dalam pencapaian misi ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu Meningkatnya Kondusifitas Wilayah yang aman dan tertib, fokus pencapaian tujuan ini adalah rasa aman bagi masyarakat Kota Sibolga. Dalam pencapaian tujuan terdapat tiga sasaran yaitu Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak, Meningkatnya Pemuda Berprestasi dan Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika.

Fokus dalam pencapaian sasaran ini yaitu pembangunan karakter masyarakat Kota Sibolga yang jauh dari penyakit masyarakat lainnya dan pemerintah Kota Sibolga akan berperan aktif untuk memberikan kesempatan yang sama untuk meningkatkan partisipasi pembangunan dan berfokus pada Pemuda yang berprestasi.

Tabel 22

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola Pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi Pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi Masyarakat dalam Proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi	1.1	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	56,91 (CC)	60,15 (B)	62,35 (B)	65,45 (B)	67,30 (B)	69,50 (B)	70,15 (BB)
		1.1.1	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)	Angka	56,77 (CC)	58,78 (CC)	60,20 (B)	62,30 (B)	64,40 (B)	66,50 (B)	68,60 (B)
				3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1.1.2	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2.41	2.5	2.6	2.75	2.8	2.85	3
		1.1.3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,75 (B)	3,85 (B)	3,95 (B)	4,05 (A-)	4,1 (A-)	4,15 (A-)	4,2 (A-)
				6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	B (38,64)	B (40,2)	B (42,50)	B (44,30)	B (45)	B (48)	B (50,20)
		1.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	7	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	63,20	65	66.8	68.6	70.4	72.2	74

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		1.1.5	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	8	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Rintisan (level 2)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)	Berkembang (Level 3)
2	Misi 2. Mengembangkan system pendidikan dan pengembangan SDM yang Berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing	2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, dan Berkualitas	9	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77.52	78.50	79.98	81.18	82.48	83.50	84.70
		2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.16	13.18	13.20	13.22	13.24	13.26	13.28
				11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.4	10.54	10.68	10.82	10.96	11.10	11.24
		2.1.2	Meningkatnya Literasi Masyarakat	12	Indeks Pembangunan Literasi	Angka	72.96	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9	80-89.9
3	Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu	3.1	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	13	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77.52	78.50	79.98	81.18	82.48	83.50	84.70
				14	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.19	74.56	75.02	75.29	75.56	76.02	76.29

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	15	Indeks Keluarga Sehat	Angka	N/A	0.21	0.31	0.41	0.61	0.81	0.82
4	Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat , melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan	4.1	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	16	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,92	4.75	5.28	5.82	6.36	6.50	7
				17	Indeks Gini	Angka	0.313	0,310	0,308	0,307	0,305	0,304	0,302
		4.1.1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	18	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Persen	28,25	28,45	28,65	28,86	29,08	29,31	29,55
				19	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Persen	5,41	5,50	5,59	5,68	5,77	5,86	5,95
		4.1.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,52	6.48	6,06	5,80	5,72	5,66	5,02
		4.1.3	Menurunnya Angka Kemiskinan	21	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.32	10.50	9.85	9.20	8.55	7.90	7.25

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		4.1.4	Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	22	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	81.03	82.21	83.39	84.57	85.75	86.93	88.11
5	Misi 5: Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan	5.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Risilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	23	Indeks Infrastruktur	Angka	77,75	77.9	78.2	78.7	79.2	79.7	80.2
		5.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	47,42	73.48	73.63	73.84	73.99	74.16	74.30
		5.1.2	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah	25	Indeks Risiko Bencana	Angka	165.92	165	164	163	162	161	160
		5.1.3	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	26	Rasio Konektivitas	Persen	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65
6	Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan	6.1	Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	27	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	N/A	78	80	82	84	86	87

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah			28	Indeks Pembangunan kebudayaan	Persen	N/A	40	42	44	46	48	50
		6.1.1	Meningkatnya keamanan kerukunan umat beragama	29	Persentase Fasilitasi Kasus kerukunan umat beragama	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		6.1.2	Meningkatnya Pelestarian Budaya	30	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	N/A	14	14	14	14	14	14
7	Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta penyakit masyarakat lainnya.	7.1	Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	31	Indeks Rasa Aman	Angka	N/A	62	65	67	69	71	73
		7.1.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	32	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibum	Persen	N/A	82	83.70	85.40	87.10	88.80	90.30
		7.1.2	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan	33	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.146	0.144	0.142	0.140	0.138	0.136	0.134

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA													
MISI		TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Perempuan dan anak	34	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60.16	61.31	62.46	63.61	64.76	65.91	67.06
		7.1.3	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	35	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	N/A	62	66	69	72	76	81
		7.1.4	Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika	36	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

Sumber: Data diolah

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

a. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Misi 1	Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pertama adalah:

1. Mengembangkan sistem pemerintahan yang responsif, dinamis dan kolaboratif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan penguatan inovasi pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan sistem egoverment yang terintegrasi dan inovasi layanan publik berbasis digital;
3. Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas Yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan;
4. Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme;
5. Peningkatan Pengawasan Internal Pemerintah.

Misi 2	Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi kedua adalah:

1. Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skills;

2. Menyiapkan anggaran untuk beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi;
3. Peningkatan pemerataan jumlah, kualitas guru dan pengajaran pada setiap satuan Pendidikan;
4. Meningkatkan akses pendidikan dan mutu Pendidikan;
5. Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi.

Misi 3	Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi ketiga adalah:

1. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi;
2. Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSU dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas yang lebih baik;
4. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan serta penguatan peran keluarga;
5. Menyederhanakan sistem rujukan dan administrasi;

Misi 4	Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi keempat adalah:

1. Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah disertai dengan upaya untuk mendorong ekonomi yang mampu menyerap

tenaga kerja lokal, penciptaan tenaga kerja yang terampil, unggul dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai serta pemanfaatan IPTEK namun tetap memperhatikan aspek lingkungan;

2. Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, diversifikasi industri dan produk lokal, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif;
3. Peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan di Sibolga dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas penginapan, restoran, serta tempat wisata yang mendukung kenyamanan wisatawan. Pengembangan inovasi dalam memberikan menawarkan layanan yang lebih menarik, baik dari segi fasilitas, kenyamanan, maupun keunikan produk kuliner lokal;
4. Perluasan jaringan informasi lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengembangan platform digital;
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja;
6. Pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.

Misi 5	Mewujudkan sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi kelima adalah:

1. Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui Kerja Sama antar Lembaga

dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana;

3. Kelembagaan Bencana Kota; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam tanggap dan tangguh bencana;
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana transportasi.

Misi 6	Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi keenam adalah:

1. Meningkatnya nilai-nilai budaya;
2. Meningkatnya nilai-nilai agama

Misi 7	Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta penyakit masyarakat lainnya.

Strategi yang dijanjikan selama kampanye untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi ketujuh adalah:

1. Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Penguatan Keluarga yang sejahtera berbasis gender;
3. Meningkatnya generasi muda diberbagai bidang,
4. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah.

Tabel 23

Strategi Pembangunan Kota Sibolga tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi		
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Mengembangkan sistem pemerintahan yang responsif, dinamis dan kolaboratif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan penguatan inovasi pelayanan publik serta peningkatan kapasitas fiskal daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan Akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penerapan sistem e-government yang terintegrasi dan inovasi layanan publik berbasis digital
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas Yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme
	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	Peningkatan Pengawasan Internal Pemerintah
Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing		
Terwujudnya Sumber Daya Manusi yang Unggul dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		perkembangan karakter dan soft skills
		Menyiapkan anggaran untuk beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi
		Peningkatan pemerataan jumlah, kualitas guru dan pengajaran pada setiap satuan Pendidikan
		Meningkatkan akses pendidikan dan mutu Pendidikan
	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi
Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu		
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi
		Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala
		Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSU dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas yang lebih baik
		Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan kesehatan serta penguatan peran keluarga Menyederhanakan sistem

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		rujukan dan administrasi
Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan		
Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah disertai dengan upaya untuk mendorong ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, penciptaan tenaga kerja yang terampil, unggul dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai serta pemanfaatan IPTEK namun tetap memperhatikan aspek lingkungan
		Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, diversifikasi industri dan produk lokal, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif
	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Perluasan jaringan informasi lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengembangan platform digital
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja
	Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan local	Pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.
Misi 5: Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Risilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.
	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah dan	Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
		Kelembagaan Bencana Kota; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana.
		Pemberdayaan masyarakaat dalam tanggap dan tangguh bencana
	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi
Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah		
Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	Meningkatnya toleransi umat beragama	Meningkatnya nilai-nilai agama
	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya nilai-nilai budaya
Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, serta penyakit masyarakat lainnya.		
Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Meningkatnya generasi muda diberbagai bidang
	Meningkatnya Kesetaraan	Penguatan Keluarga yang sejahtera berbasis gender

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah

Sumber : Data diolah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis karena menjadi prioritas pembangunan tahunan yang dijabarkan dalam pentahapan pembangunan tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Adapun, pentahapan pembangunan tahunan Kota Sibolga Tahun 2025-2029, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah;
2. Penguatan kapasitas SDM, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur layanan dasar;
3. Penguatan kebijakan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Penguatan pembangunan yang berkelanjutan dan penguatan ketahanan daerah
5. Penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung yang andal untuk meningkatkan daya saing daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan tema atau fokus pembangunan sebagai arah yang jelas dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu dari Misi RPJPD Kota Sibolga Tahun 2025-2045 yaitu:

Misi 1 Mewujudkan transformasi Sosial untuk membangun Sumber Daya Manusia Unggul yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Misi 2 Mewujudkan transformasi ekonomi untuk Perekonomian yang Kokoh melalui Pembangunan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Misi 3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang

Akuntabel, Efektif dan Efisien

Misi 4 Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro

Misi 5 Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan tangguh individu, keluarga, masyarakat, pembangunan karakter dan lingkungan hidup berkelanjutan

Misi 6 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah

Misi 7 Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi 8 Mewujudkan kesinambungan pembagunan melalui sinkronisasi perencaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerataan dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Berdasarkan penelaahan terhadap isu dan dinamika pembangunan yang akan dihadapi, maka dirumuskan tema pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 23
Arah Kebijakan /Tahapan Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2025-2029

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	**Tahun 2027**	**Tahun 2028**	**Tahun 2029**	**Tahun 2030**
Konsolidasi dan penguatan infrastruktur dasar	Peningkatan Daya Saing dan inovatif	Peningkatan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Perlindungan Sosial Yang Inklusif dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Maju dan Berkelanjutan
Tahapan ini merupakan tahap awal pembangunan periode pertama yang bertujuan untuk memastikan pemerataan akses infrastruktur dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Sibolga. Dalam tahap ini langkah – langkah yang akan diambil meliputi: 1. Peningkatan akses Infrastruktur Dasar 2. Peningkatan Kesehatan pelayanan primer 3. Digitalisasi layanan publik 4. Penanganan Penyakit masyarakat	Tahapan ini dikhususkan perwujudan aspek pendukung daya saing daerah. Peningkatan daya saing adalah modal dasar daya tarik investasi daerah yang memiliki kontribusi besar dalam percepatan pembangunan. Tahapan ini meliputi: 1. Infrastruktur, regulasi dan kestabilan daerah 2. Kualitas SDM yang kompeten dan tangguh 3. Meningkatnya kinerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih 4. Meningkatnya sistem	Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengutamakan penguatan sektor-sektor unggulan yang memili potensi dan daya saing tinggi seperti perikanan, industri kreatif, pariwisata dan usaha Mikro melalui berbagai langkah: 1. Penguatan sektor perikanan dan ketahanan pangan	Tahapan ini bertujuan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan pendekatan ini mengutamakan penguatan sektor-sektor unggulan yang memili potensi dan daya saing tinggi seperti perikanan, industri kreatif, pariwisata dan usaha Mikro melalui berbagai langkah: 1. Penguatan sektor perikanan dan ketahanan pangan 2. Pengembangan Industri kreatif dan pariwisata 3. Penguatan kapasitas	Tahapan ini merupakan tanggung jawab pemimpin daerah yang difokuskan pada capaian pembangunan yang maju dan stabil hal ini ditandai dengan Kualitas SDM, Tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran, Kesetaraan Gender dan kualitas Lingkungan Hidup yang akan setara dengan capaian rata-rata Provinsi Sumatera Utara

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	pelayanan publik yang inovatif 5. Digitalisasi pelayanan publik kualitas SDM yang kompoten dan tangguh	2. Pengembangan Industri kreatif dan pariwisata 3. Penguatan kapasitas usaha mikro dan sektor informal 4. Implementasi ekonomi berkelanjutan 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6. Koperasi Merah Putih	usaha mikro dan sektor informal 4. Implementasi ekonomi berkelanjutan 5. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 6. Pemberdayaan Koperasi Merah Putih	

Sumber: Data diolah

Tabel 24

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Sibolga
Tahun 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi	Terwujud nya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Mengembangan sistem pemerintahan yang responsif, dinamis dan kolaboratif melalui reformasi manajemen pemerintahan dan penguatan inovasi pelayanan publik serta peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
				Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, Kualitas pengawasan pengguna anggaran
				Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan penguatan tata kelola kelembagaan penerapan
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Efisiensi Dan Efektifitas Yang Berorientasi Hasil dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui transparansi dan	Penguatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis kinerja

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			akuntabilitas pemerintahan dalam pelayanan, penguatan infrastruktur, teknologi dan informasi, penerapan sistem government yang terintegrasi dan inovasi layanan publik berbasis digital	Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang adaptif, berdampak, berorientasi pelayanan publik prima
		Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme	Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan penguatan tata kelola kelembagaan penerapan
		Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	Peningkatan Pengawasan Internal Pemerintah	Peningkatan peran dan fungsi Aparat Pengawas
Misi 2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada keahlian dan keterampilan dengan dilandasi nilai- nilai agama, budaya dan berahlak mulia yang mampu berdaya saing	Terwujud nya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memperkenalkan program pendidikan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skills	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi, pemenuhan dan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana Pendidikan
			Menyiapkan anggaran untuk beasiswa bagi anak yang kurang mampu dan berprestasi	Bantuan beasiswa bagi anak kurang mampu yang berprestasi
			Peningkatan pemerataan jumlah, kualitas guru dan pengajaran	Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan,

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			pada setiap satuan Pendidikan	melalui pemerataan dan peningkatan kompetensi serta penyediaan insentif berbasis kinerja
			Meningkatkan akses pendidikan dan mutu Pendidikan	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
				Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik melalui Penguatan sistem pembinaan komunitas
				Percepatan Dini, Dasar, dan Menengah,
				Peningkatan peran keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan pendidikan dan pembelajaran yang baik untuk mendukung peningkatan partisipasi sekolah

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatnya Literasi Masyarakat	Peningkatan peran masyarakat yang lebih luas melalui pemberdayaan literasi	Pemerintah Kota Sibolga menyusun panduan literasi dalam pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
				Pengembangan Perpustakaan sekolah dengan pemilihan buku bermutu, penjenjangan buku sesuai dengan kemampuan baca anak, serta pelatihan pendampingan bagi guru di sekolah penerima buku.
Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	Peningkatan Rumah Sakit Umum dan Layanan Kesehatan Tingkat Pertama

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
untuk masyarakat tidak mampu			Penguatan pendidikan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kesehatan mental serta melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat secara berkala	Edukasi mengenai gaya hidup sehat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta kesehatan mental
			Meningkatkan pelayanan kesehatan di	Pengembangan Layanan kesehatan rujukan
			RSU dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas yang lebih baik	Percepatan penurunan stunting dan eliminasi penyakit menular Melalui intervensi terintegrasi
			Penguatan kapasitas dan kualitas SDM yang berfokus pada peningkatan akses pelayanan kesehatan kesehatan serta penguatan peran keluarga	Perluasan
			Menyederhanakan sistem rujukan dan administrasi	Penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan berbasis teknologi digital menuju sistem pelayanan kesehatan universal dan berkualitas

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan			Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah
			Pengembangan dan diversifikasi sektor ekonomi daerah melalui pengembangan sektor unggulan, diversifikasi industry dan Produk lokal, pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pemberdayaan UMKM dan industri kreatif	Identifikasi
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Peningkatan sektor penyediaan Akomodasi dan makan di Sibolga dapat dilakukan dengan mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pariwisata, seperti memperluas dan meningkatkan kualitas fasilitas penginapan, restoran, serta tempat wisata yang mendukung	Peningkatan Produktivitas Sumber Daya Pariwisata dan Pelaku Sektor Industri Kreatif Memperkenalkan potensi wisata Sibolga melalui berbagai media promosi, Pengembangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			kenyamanan wisatawan. Pengembangan inovasi dalam memberikan menawarkan layanan yang lebih menarik, baik dari segi fasilitas, kenyamanan, maupun keunikan produk kuliner lokal.	
VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Perluasan jaringan informasi lapangan kerja melalui pemanfaatan dan pengembangan platform digital	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang unggul, terampil dan kompetitif sesuai kebutuhan pasar kerja;
				Fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi penduduk Kota Sibolga
				Fasilitasi pemenuhan jaminan sosial bagi tenaga kerja
		Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan local	Pengembangan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan kebun rumah tangga (urban farming) yang dapat memenuhikebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi keluarga dengan ekonomi terbatas.	Melakukan edukasi dan Peningkatan peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan urban farming

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
Misi 5: Mewujudkan sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan	Terwujud nya Pembangunan Infrastruktur yang berkualit as, Risilensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanj utan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara maupun tanah melalui Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (RPPLH) secara konsisten; dan Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi, serta Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.	Menjaga kelestarian lingkungan hidup agar memiliki ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta meningkatan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah	Peningkatan kesiapsiagaan bencana melalui Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Penguatan perencanaan pengendalian
			Kelembagaan Bencana Kota; dan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca bencana.	Optimalisasi drainase
				Meningkatkan ketertiban
				Memfasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Pemberdayaan masyarakaat dalam tanggap dan tangguh bencana	Pengelolaan Bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di Satuan pendidikan,
VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
				sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat
				Melengkapi sarana prasarana dalam penanganan bencana
				Memberikan edukasi dalam siaga bencana
			Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi	Peningkatan Jalan dan Penyediaan perlengkapan jalan
				Revitalisasi terminal penumpang Tipe C
Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah	Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya	Meningkatnya toleransi umat beragama	Meningkatnya nilai-nilai agama	Penguatan dukungan dan pemberdayaan forum keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan dan solidaritas
				Peningkatan silaturahmi antar kelembagaan melalui memperkuat dialog antar kelompok dengan forum-forum terbuka yang mengedepankan saling pengertian dan toleransi.

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya nilai-nilai budaya	Pelestarian Budaya dan kesenian tradisional
Misi 7. Melaksanakan berbagai upaya dalam menyelamatkan masyarakat dari peredaran gelap dan penyalahguna a n narkotika, serta penyakit masyarakat lainnya.	Terwujud nya Manusia yang berpresta si dan setara sehingga terciptan ya wilayah yang aman dan tertib	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Peningkatan sinergitas penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Penguatan Keluarga yang sejahtera berbasis gender	Pengurusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan
				Peningkatan perlindungan terhadap anak dan perempuan
VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA				
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**	**KEBIJAKAN**
			Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan sekolah	Penyelenggaraan program pendidikan multicultural untuk menanamkan nilai-nilai saling menghargai perbedaan sejak dini, baik di sekolah maupun di masyarakat.
				Penguatan layanan perlindungan melalui fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Perempuan dan Anak, pengembangan pusat layanan terpadu dan peningkatan layanan konseling dan dukungan psikososial
		Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Meningkatnya generasi muda diberbagai bidang	Melaksanakan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika	Menguatkan kerjasama dengan dengan aparat hukum	Kampanye pencegahan dan penyuluhan Narkoba
				Menyediakan program rehabilitasi

Sumber: Data diolah

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.

- **Prioritas Pembangunan**

Program prioritas pembangunan Daerah merupakan sekumpulan program yang bersifat strategik yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan Daerah. Perumusan program prioritas Daerah sangat erat hubungannya dengan janji politik yang telah dirumuskan di dalam Visi dan Misi yang kemudian dijabarkan dalam serangkaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah. Di dalam Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga 2025-2029, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dikelompokkan melalui pendekatan Slogan Pembangunan berupa 7 (Tujuh) Program Unggulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sibolga Cerdas dan Berkarakter

   Prioritas pada penguatan fasilitas layanan dan sistem penyelenggaraan pendidikan, akses pendidikan bagi anak kurang mampu yang berprestasi, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, peningkatan seni budaya dan karakter;

2. Sibolga Sehat

   Prioritas pada penguatan pada penyelenggara fasilitas dan sistem penyelenggaraan kesehatan yang merata, percepatan penurunan stunting, peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan pemberdayaan anak dan perempuan.

3. Sibolga Ekonomi Bangkit

   Prioritas pada upaya peningkatan investasi daerah, pengembangan potensi unggulan daerah, pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dan UMKM, pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Penurunan angka pengangguran dan angka kemiskinan.

4. Sibolga Infrastruktur Kuat

   Prioritas pada optimalisasi kualitas layanan infrastruktur daerah.

5. Sibolga Religius

   Prioritas pada mendorong harmonisasi dalam kehidupan, beragama, masyarakat dalam penguatan SDM dan fasilitasi sarana dan prasarana keagamaan.

6. Sibolga Pemerintahan Bersih

   Prioritas pada percepatan proses transparansi birokrasi, peningkatan kualitas SDM

7. Sibolga Nyaman dan Seimbang

   Penguatan gerakan keberlanjutan lingkungan dan penguatan tangguh bencana serta Meningkatnya rasa aman di wilayah Kota Sibolga

Langkah langkah Program dalam mendorong tercapaianya Program Prioritas Daerah termuat dalam Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang terdiri dari:

1. Beasiswa bagi pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa yang kurang mampu dan berprestasi
2. Fasilitasi pelayanan kesehatan gratis
3. Fasilitasi pemberian makanan bergizi
4. Pengembangan pasar tradisional
5. Penguatan UMKM
6. Fokus pada penanganan banjir dan rumah layak huni
7. Peningkatan kegiatan keagamaan bagi siswa SD dan SMP
8. Penguatan Birokrasi
9. Fasilitasi Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih
10. Dukungan Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat

Prioritas program pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga tahun 2025-2029 memperhatikan program-program prioritas yang dicanangkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Jenis program yang menjadi prioritas Walikota dan Wakil Walikota pada RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029 yang disinkronkan dengan program nomenklatur perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Pemetaan Program Prioritas RPJMD Kota Sibolga Tahun 2025-2029

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
1	**Misi 1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang professional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi**	1.1	Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani	Pemerintahan yang lebih baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka		
		1.1.1	Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)	Angka	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setiap Perangkat Daerah
					3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan
		1.1.2	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Digitalisasi Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	4	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		1.1.3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Meningkatnya pelayanan publik daerah	5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah
								Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi dan Pencatatatan Sipil
								Program Pencatatan Sipil	Administrasi dan Pencatatatn Sipil

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Administrasi dan Pencatatatn Sipil
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
								Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Ketertiban Umum Sub Kebakaran
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah	6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan
		1.1.4	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN	Meningkatnya Tata kelola pengembangan Profesionalitas ASN	7	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
		1.1.5	Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah	Meningkatnya pengawasan	8	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		**TUJUAN/SASARAN**		**OUTCOME**	**INDIKATOR**		**SATUAN**	**PROGRAM PRIORITAS**	**URUSAN BIDANG**
2	**Misi 2. Mengembangkan sistem Berorientasi pada keahlian berahlak yang mampu berdaya saing**	**2.1**	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas**	**Meningkatnya kualitas Pendidikan**	**9**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**		
		2.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi masyarakat terhadap Pendidikan	10	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
					11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
								Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
		2.1.2	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi	12	Indeks Pembangunan Literasi	Angka	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Perpustakaan
								Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
3	**Misi 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu**	**3.1**	**Meningkatnya Kesehatan Masyarakat**	**Meningkatnya kualitas Hidup**	**13**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Angka**		
					14	**Usia Harapan Hidup**	**Tahun**		
		3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Keluarga Sehat	15	Indeks Keluarga Sehat	Angka	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
								Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan KB
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pengendalian Penduduk dan KB

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA								
VISI/MISI		**TUJUAN/SASARAN**		**OUTCOME**	**INDIKATOR**		**SATUAN**	**PROGRAM PRIORITAS**	**URUSAN BIDANG**
4	**Misi 4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wiraswasta dan ekonomi kreatif pariwisata**	**4.1**	**Terwujudnya Pertumbuhan**	**Meningkatnya Nilai Pertumbuhan Ekonomi**	**16**	**Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**		
				Menurunnya tingkat kesenjangan	**17**	**Indeks Gini**	**Angka**		
		4.1.1	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
				Meningkatnya Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	19	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK)	Persen	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
		4.1.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Meningkatnya ketrampilan	20	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA								
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
								Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata
								Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
								Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan
		4.1.3	Menurunnya	Menurunnya tingkat kemiskinan	21	Tingkat Kemiskinan	Persen	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA								
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Keci dan Menengah
								Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
								Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
								Program Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
								Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA								
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pengelolaan dan Pengembnagan Sistem Penyediaan Air minum	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang
								Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan barang penting	Perdagangan
								Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		4.1.3	Menguatnya pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal	Meningkatnya kemandirian	22	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	Program Peningkatan Diservikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		**TUJUAN/SASARAN**		**OUTCOME**	**INDIKATOR**		**SATUAN**	**PROGRAM PRIORITAS**	**URUSAN BIDANG**
5	**Misi 5. Mewujudkan Sibolga nyaman pengendalian pemanfaatan ruang yang ber wawasan lingkungan dengan mempertimbangkan unsur-unsur sejarah dan**	**5.1**	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur**	**Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan**	**23**	**Indeks Infrastruktur**	**Angka**		
		5.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Lingkungan Hidup
		5.1.2	Meningkatnya ketahanan dan mitigasi bencana daerah	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan bencana yang sesuai standar	25	Indeks Risiko Bencana	Angka	Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum sub Bencana
								Program penanganan Bencana	Sosial
		5.1.3	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Meningkatnya kelancaran transportasi	26	Rasio Konektivitas	Persen	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Perhubungan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pelayaran	Perhubungan
								Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	**Misi 6. Mewujudkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan karekter budaya serta adat istiadat daerah**	**6.1**	**Meningkatnya toleransi pemahaman**	**Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama di Kota Sibolga**	**27**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**Angka**		
		6.1.1	Meningkatnya keamanan kerukunan umat beragama	Meningkatnya forum kerukunan dan toleransi	28	Persentase Fasilitasi Kasus kerukunan umat beragama	Persen	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
								Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		6.1.2	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Meningkatnya Pengembangan Kebudayaan daerah	29	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	Program Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
								Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA									
VISI/MISI		**TUJUAN/SASARAN**		**OUTCOME**	**INDIKATOR**		**SATUAN**	**PROGRAM PRIORITAS**	**URUSAN BIDANG**
7	**Misi 7. Melaksanakan berbagai peredaran**	**7.1**	**Terwujudnya Manusia yang berprestasi dan setara sehingga terciptanya wilayah yang aman dan tertib**	**Meningkatnya Rasa aman di Kota Sibolga**	**30**	**Indeks Rasa Aman**	**Angka**		
		7.1.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	31	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub urusan trantibum	Angka	Program Peningkatan dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
								Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		7.1.2	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Kesetaraan Gender serta Pemenuhan hak anak	32	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					33	Indeks Perlindungan Anak	Angka	Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

VISI: MEWUJUDKAN SIBOLGA PEDULI, AMANAH, SETIA UNTUK MASYARAKAT YANG SEJAHTERA								
VISI/MISI		TUJUAN/SASARAN		OUTCOME	INDIKATOR		SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN BIDANG
								Program Pemenuhan hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7.1.3	Meningkatnya Pemuda Berprestasi	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan	34	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	Program Kapasitas daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga
		7.1.4	Menurunnya aktivitas masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika	Menurunnya aktivitas terhadap narkotika	35	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Kesatuan bangsa dan Politik

Sumber: Data diolah

Untuk mewujudkan visi “Mewujudkan Sibolga Peduli, Amanah, Setia untuk masyarakat yang Sejahtera” dan mendukung prioritas nasional Zuntuk pencapaian sasaran utama Pembangunan RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029 yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi dari 4,75 persen pada tahun 2025 menjadi 6,50 persen pada tahun 2029;
2. Peningkatan PDRB Per Kapita dari 81,16 Juta Rupiah pada tahun 2025 menjadi 116,95 Juta Rupiah pada tahun 2029;
3. Peningkatan kontribusi PDRB Kota Sibolga terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara 0,63 persen dari tahun 2025 sampai dengan 2029;
4. Penurunan tingkat kemiskinan dari 10,50 persen pada tahun 2025 menjadi 7,90 persen pada tahun 2029;
5. Rasio Gini dari 0,310 poin pada tahun 2025 menjadi 0,304 poin pada tahun 2029;
6. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 78,50 persen menjadi 83,50 persen ditahun 2029;
7. Penurunan Emisi GRK yang ditargetkan sebesar 80777,69 TonCo2eq di tahun 2025 menjadi 133701.77 TonCo2eq pada tahun 2029;
8. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah yang ditargetkan 73,48 di tahun 2025 menjadi 74,16 pada tahun 2029;
9. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 6,48 persen menjadi 5,66 persen pada tahun 2029;

Tabel 26

Penyelarasan sasaran pembangunan RPJMD Kota Sibolga dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran Per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029						
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.3	7.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5.3	7.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4.75	5.28	5.82	6.36	6.50	7
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78.4	115.3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78.4	115.3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	81.16	90.10	95.05	108.03	116.95	120.35
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5.2	5.3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5.2	5.3	Kontribusi PDRB Kab/Kota (%)	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 - 7,46	2,82 - 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	10,50	9.85	9.20	8.55	7.90	7.25
5	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,310	0.308	0.307	0.305	0,304	0,302
6	Indeks Modal Manusia	0.54	0.57	Indeks Modal Manusia	0.54	0.57	IPM	78.50	79.98	81.18	82.48	83.50	84.70
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Emisi GRK (TonCo2eq)	80777.69	93868.45	107789.67	121507.77	133701.77	136051.77
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77.2	77.87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77.2	77.87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73.48	73.63	73.84	73.99	74.16	74.30
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,20	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,48	6.06	5.80	5.72	5,66	5,02

Sumber: Data diolah

- **Highlight Intervensi Program Kegiatan Provinsi di Kota Sibolga**

Wilayah Pengembangan Barat: termasuk kota-kota dengan aktivitas pelabuhan seperti Sibolga dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.

Kota Sibolga berstatus Pusat Kegiatan Wilayah dengan volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pelabuhan, berfungsi sebagai hub logistik regional yang mendukung pengolahan ikan dan seafood. Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Humbang Hasundutan, tersebar PKL di Barus, Pandan, Tarutung, Siborong- borong, dan Dolok Sanggul. Kabupaten-kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas pertanian, mendukung industri lokal, pengolahan hasil pertanian dan pariwisata.

Untuk memastikan pembangunan yang terarah, Sembilan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) tersebar di Tebingtinggi, Pematangsiantar, Kisaran, Balige, Sidikalang, Sibolga, Padangsidimpuan, Rantauprapat, dan Gunungsitoli, yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi regional.

- **Peningkatan Infrastruktur**

Kota Sibolga Pembangunan menjadi lokasi strategis untuk pusat distribusi dan gudang logistik bersama dengan lokasi lainnya seperti Medan, Deli Serdang, Tebingtinggi, Serdang Bedagai, Tanjungbalai, Batu Bara, Pematangsiantar, Simalungun, Padangsidimpuan, Tapanuli Utara, Nias Selatan, dan Gunungsitoli. Pengembangan pelabuhan dan jalan lintas untuk mendukung pariwisata dan industri; Membangun hub logistik dan fasilitas *cold storage* di sepanjang rute untuk mendukung rantai pasok pertanian.

- **Posisi Kota Sibolga dalam Pengembangan Kawasan Sumatera Utara**

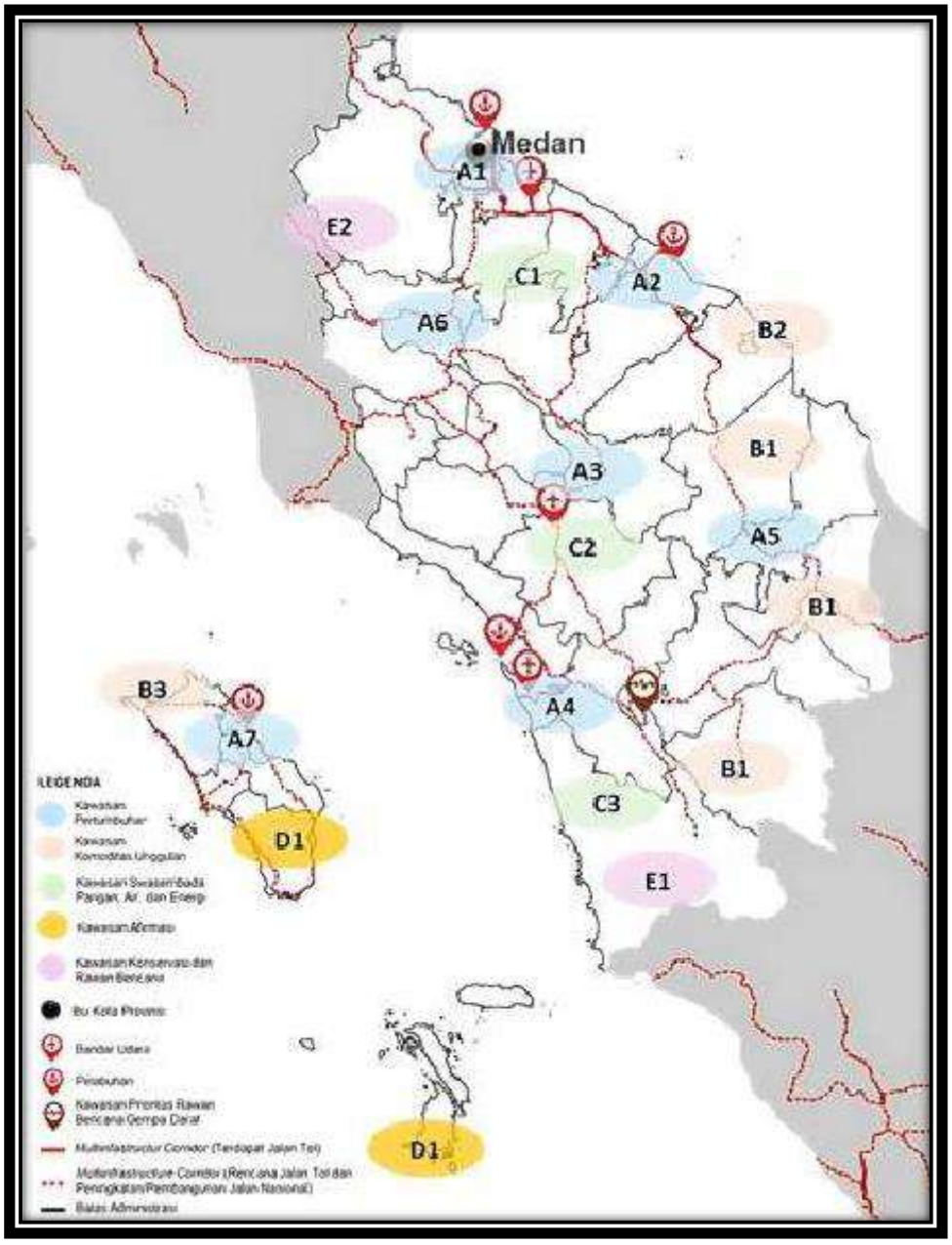
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, pengembangan Kawasan di Sumatera Utara terbagi atas a) Kawasan Pertumbuhan, b) Kawasan Komoditas Unggulan, c) Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi, d) Kawasan Afirmasi dan e) Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana.

Kota Sibolga masuk dalam Kawasan Pertumbuhan dengan Lokasi Prioritas dan indikasi intervensi sebagai berikut:

Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan

Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sibolga-Pandan- Padangsidimpuan, antara lain melalui:

1. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sibolga- Pandan-Padangsidimpuan (PHTC)
2. Pengembangan SPAM Regional Sibolga-Pandan
3. Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sibolga
4. Pengembangan Pelabuhan Sibolga
5. Preservasi jalan ruas Sibolga – Pandan- Padangsidimpuan, Sibolga – Tarutung.



Gambar 3.3
Kawasan Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2025-2029
Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

Tabel.27

Penyelarasan Arah Pembangunan RPJMD Kota Sibolga 2025-2029 dengan Arah Pembangunan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga 2025-2029
	Arah Pembangunan Kewilayahan (Arah per Provinsi)	**Strategi dan Arah Kebijakan**	**Strategi dan Arah Kebijakan**
	Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan	**Pemerataan Sarana Prasarana Ekonomi**	**Penguatan perekonomian berbasis potensi unggulan daerah disertai dengan upaya untuk mendorong ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, penciptaan tenaga kerja yang terampil, unggul dan kompetitif dengan dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai serta pemanfaatan IPTEK dengan memperhatikan aspek lingkungan**
	• Kota Sibolga • Kabupaten Tapanuli Tengah • Kota Sidempuan	Meningkatnya promosiunggulan daerah dan memperluas kemitraan strategis lintas sector	Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
		Mendorong pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan	**Meningkatnya Konektivitas Transportasi**
		Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perikanan	Peningkatan sarana dan Prasarana Transportasi
		Memperluas konektivitas dan aksesibilitas wilayah	

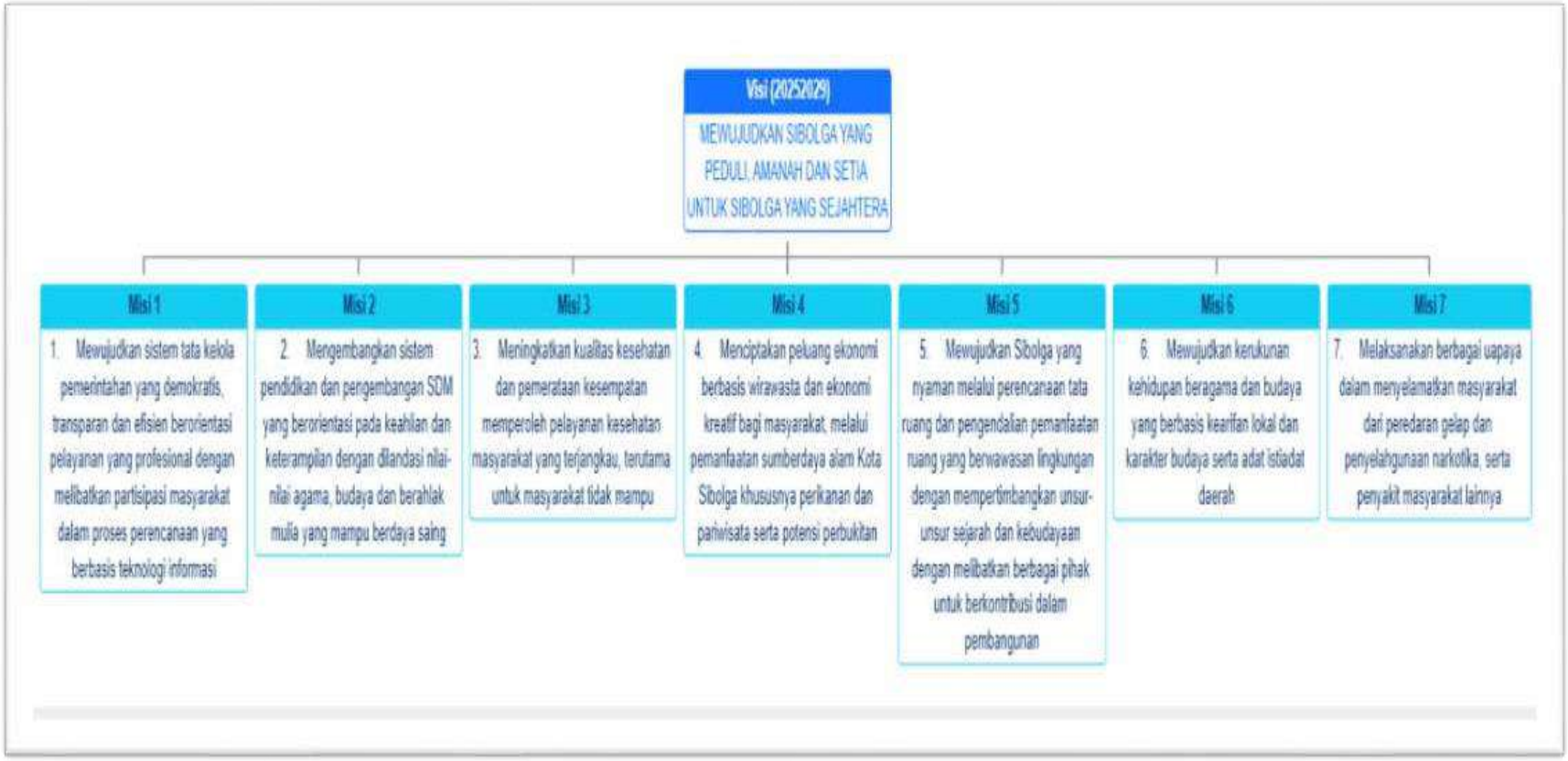
No	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029	RPJMD Kota Sibolga 2025-2029
	Arah Pembangunan Kewilayahan (Arah per Provinsi)	**Strategi dan Arah Kebijakan**	**Strategi dan Arah Kebijakan**
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah	

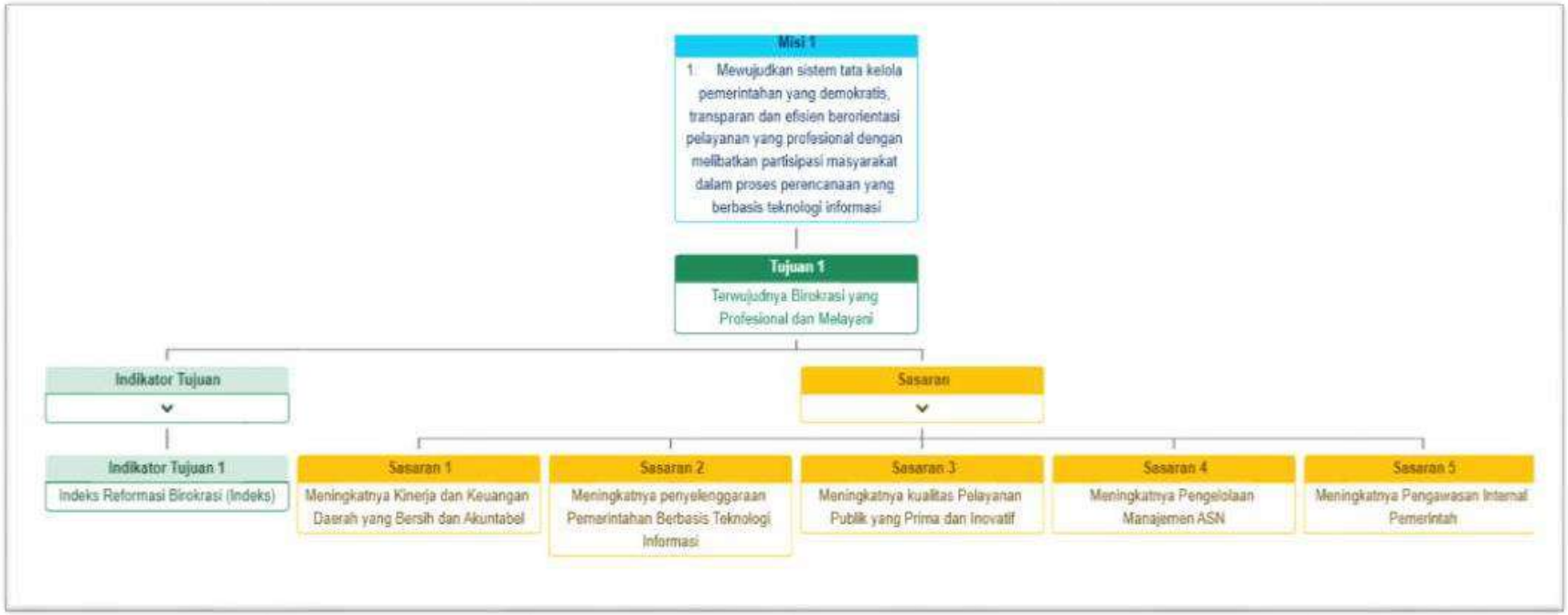
Cascading RPJMD dapat dilihat sebagai berikut ini :



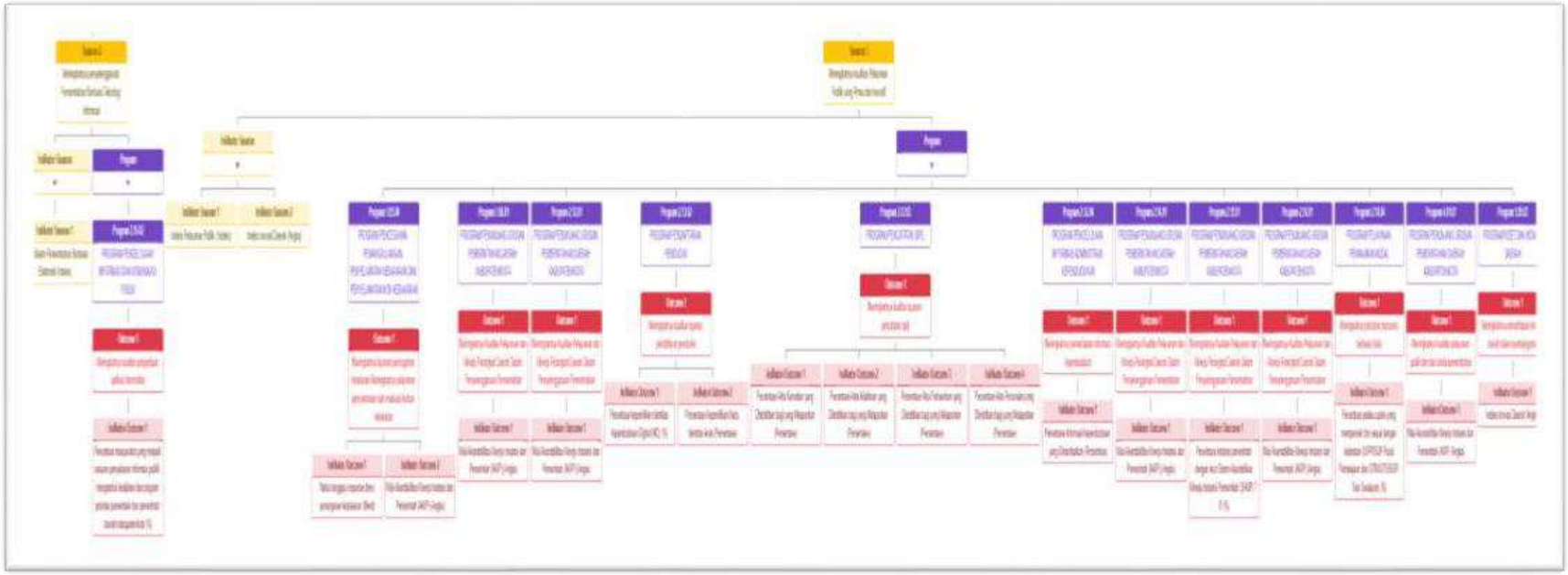
Gambar 3.4 Cascading RPJMD Kota Sibolga
Sumber : SIPD RI

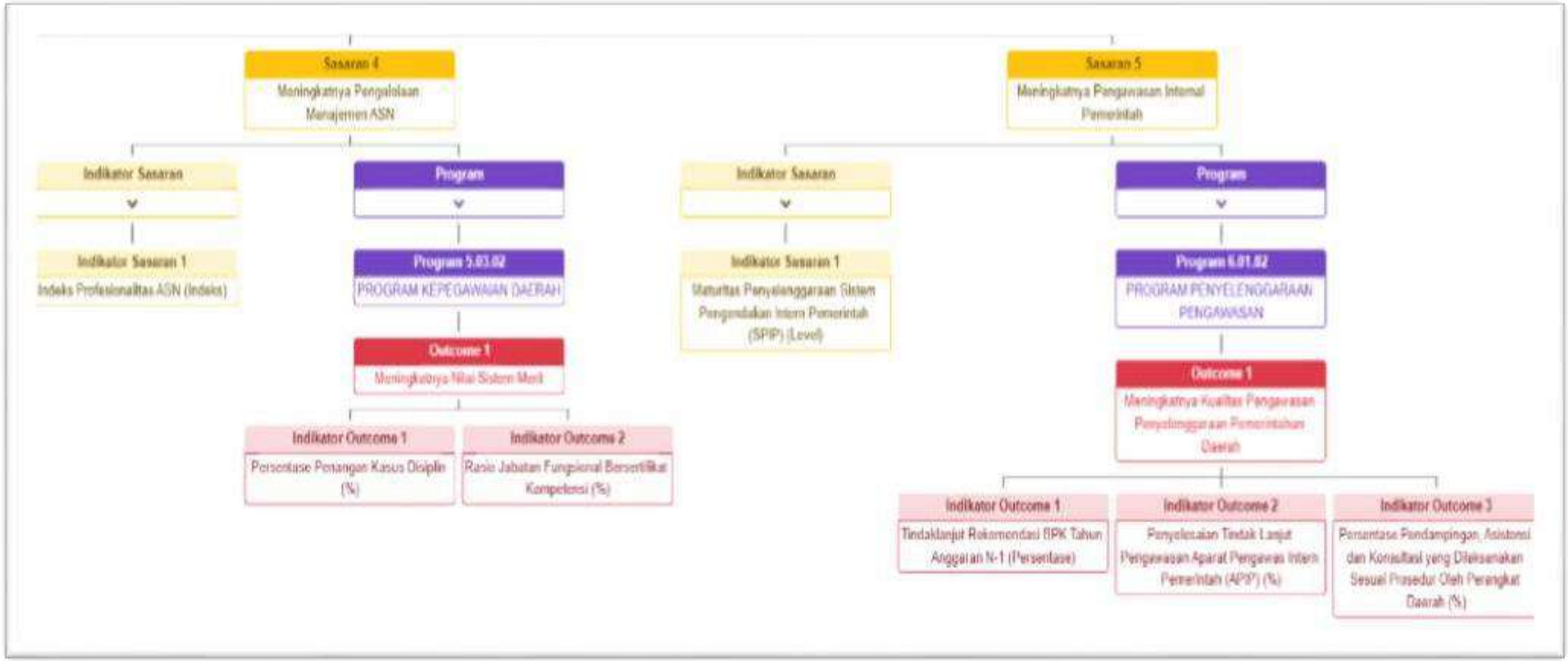
Untuk lebih jelas, Cascading dapat dilihat dapat dilihat sebagai berikut



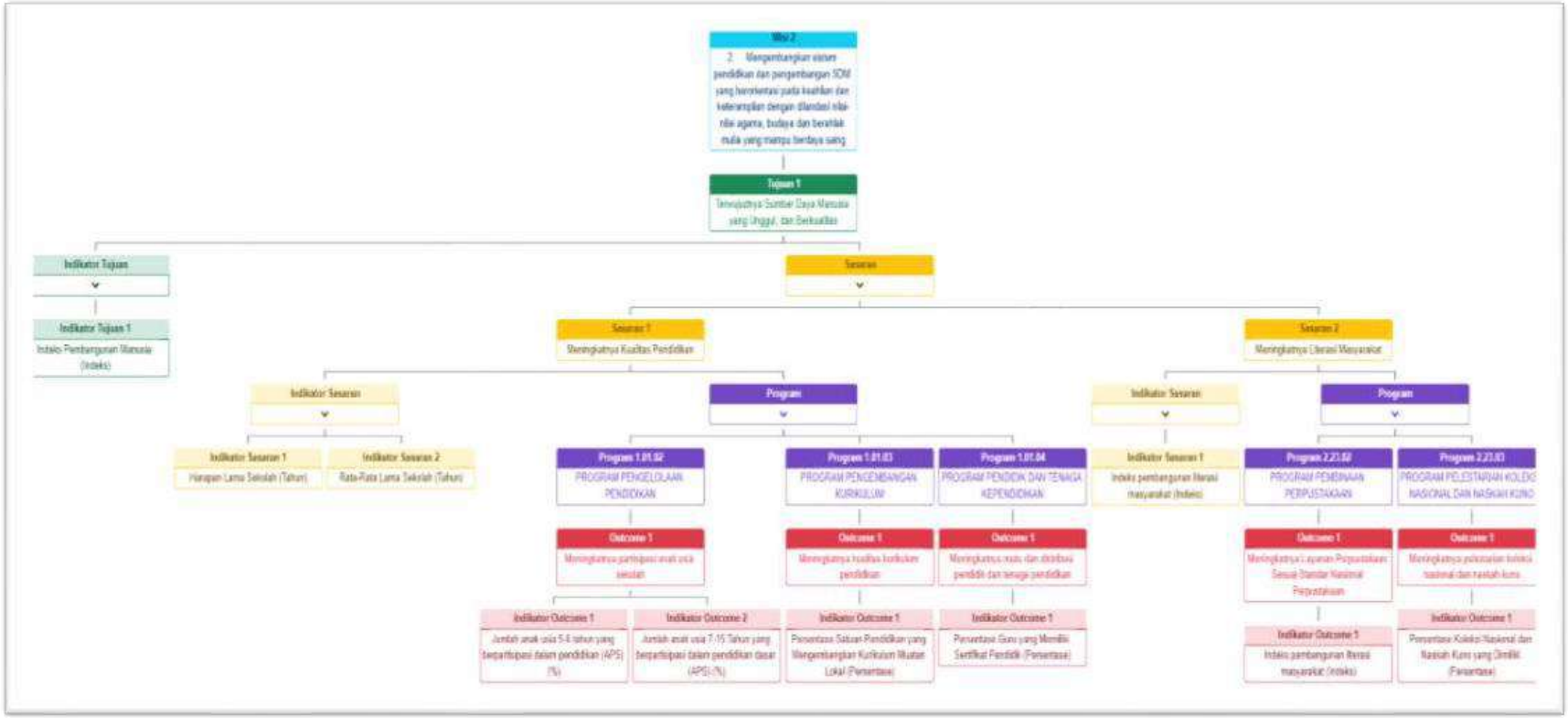

Misi 1
1. Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan efisien berorientasi pelayanan yang profesional dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan yang berbasis teknologi informasi
Tujuan 1
Terwujudnya Birokrasi yang Profesional dan Melayani
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Tujuan 1
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)
Sasaran 1
Meningkatnya Kinerja dan Keuangan Daerah yang Bersih dan Akuntabel
Sasaran 2
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi
Sasaran 3
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif
Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN
Sasaran 5
Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah

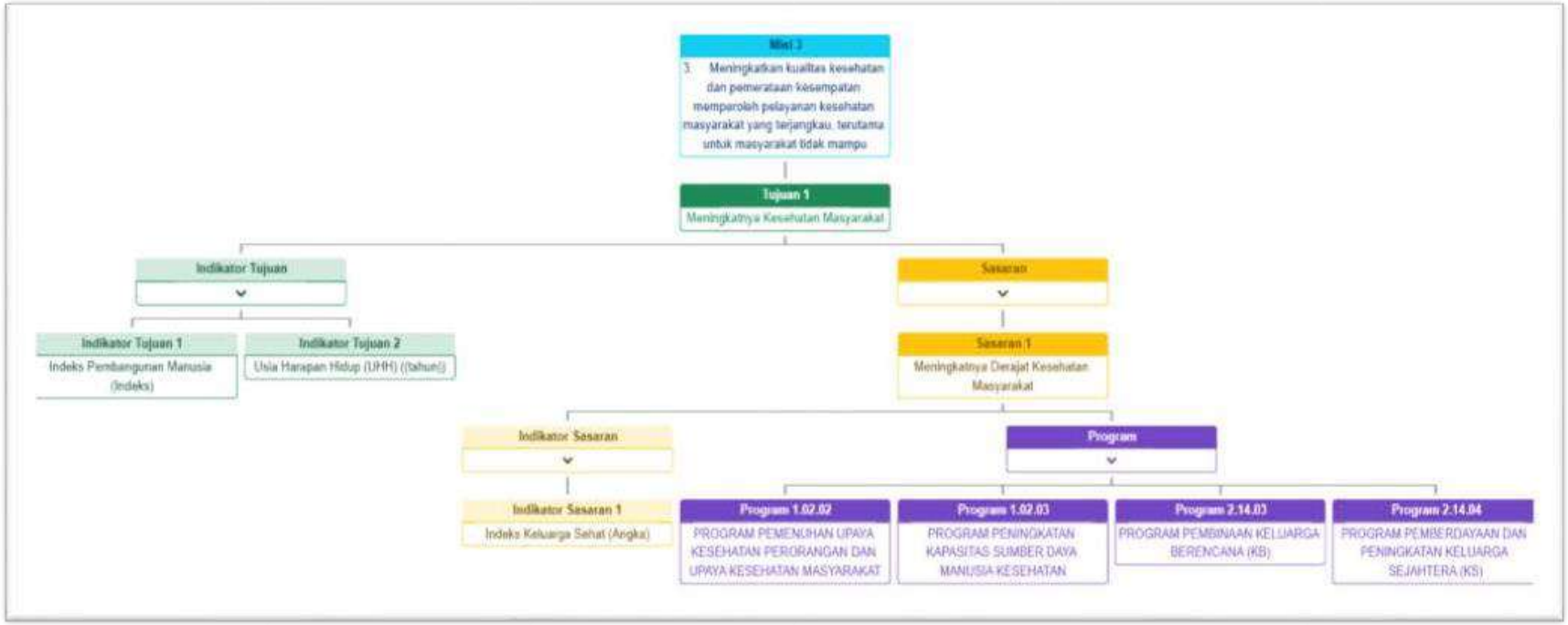


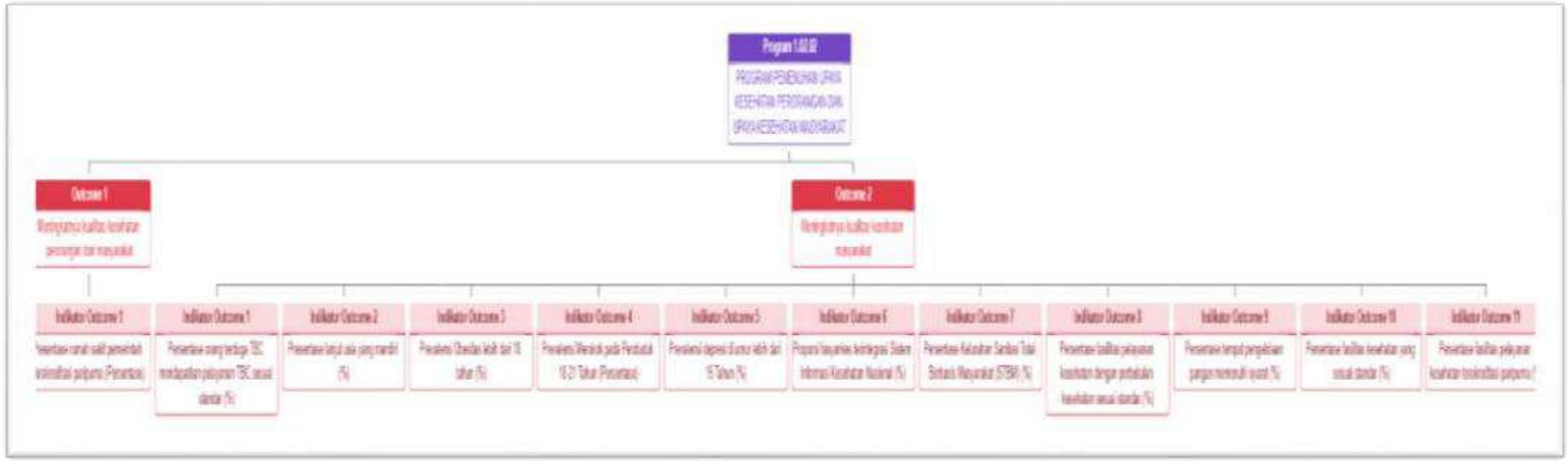


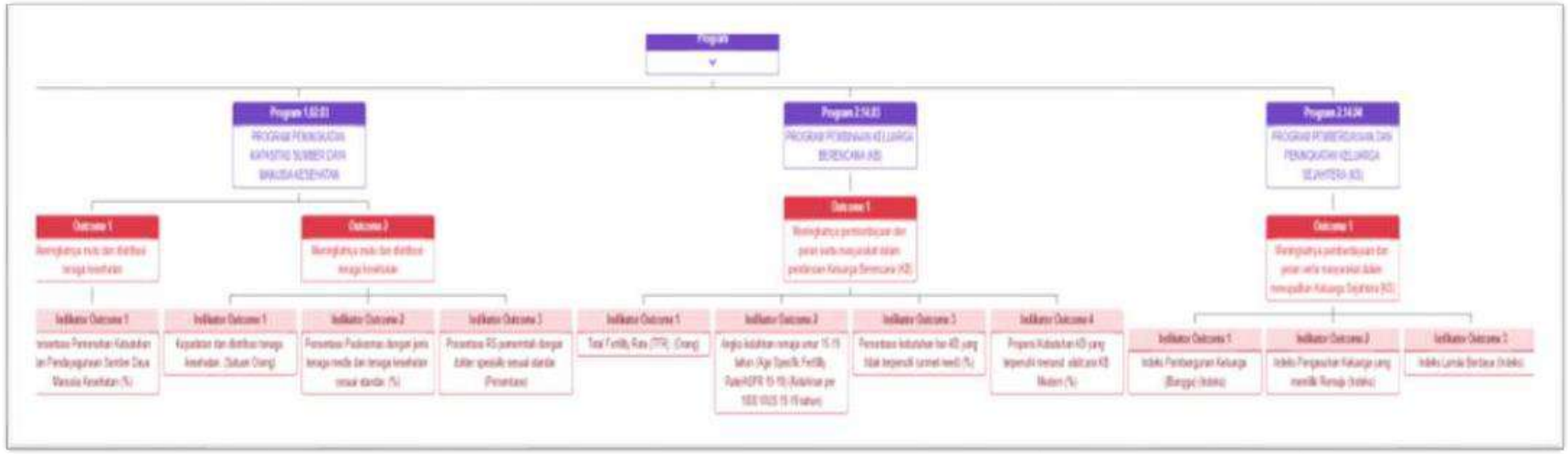

Sasaran 4
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen ASN
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)
Program
Program 5.03.02
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Outcome 1
Meningkatnya Nilai Sistem Merit
Indikator Outcome 1
Persentase Penanganan Kasus Disiplin (%)
Indikator Outcome 2
Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%)
Sasaran 5
Meningkatnya Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)
Program
Program 5.01.02
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Outcome 1
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Indikator Outcome 1
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)
Indikator Outcome 2
Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) (%)
Indikator Outcome 3
Persentase Pendampingan, Asistensi dan Konsultasi yang Dilaksanakan Sesuai Prosedur Oleh Perangkat Daerah (%)

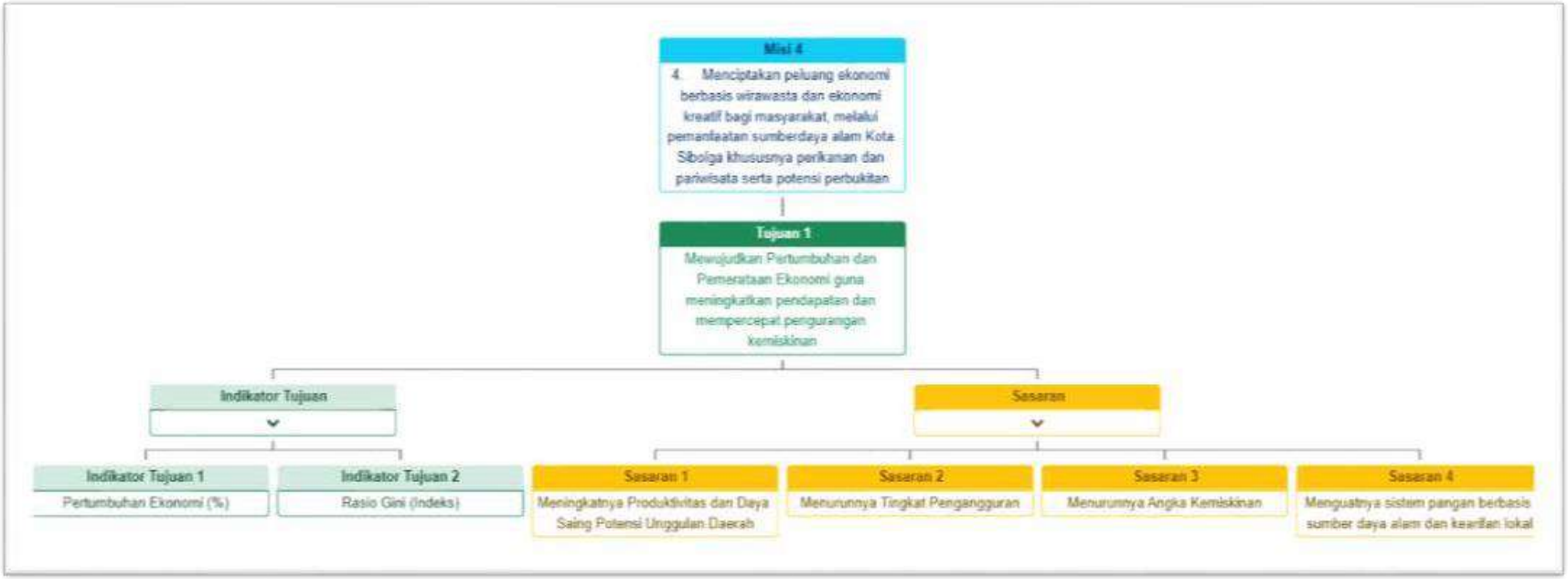


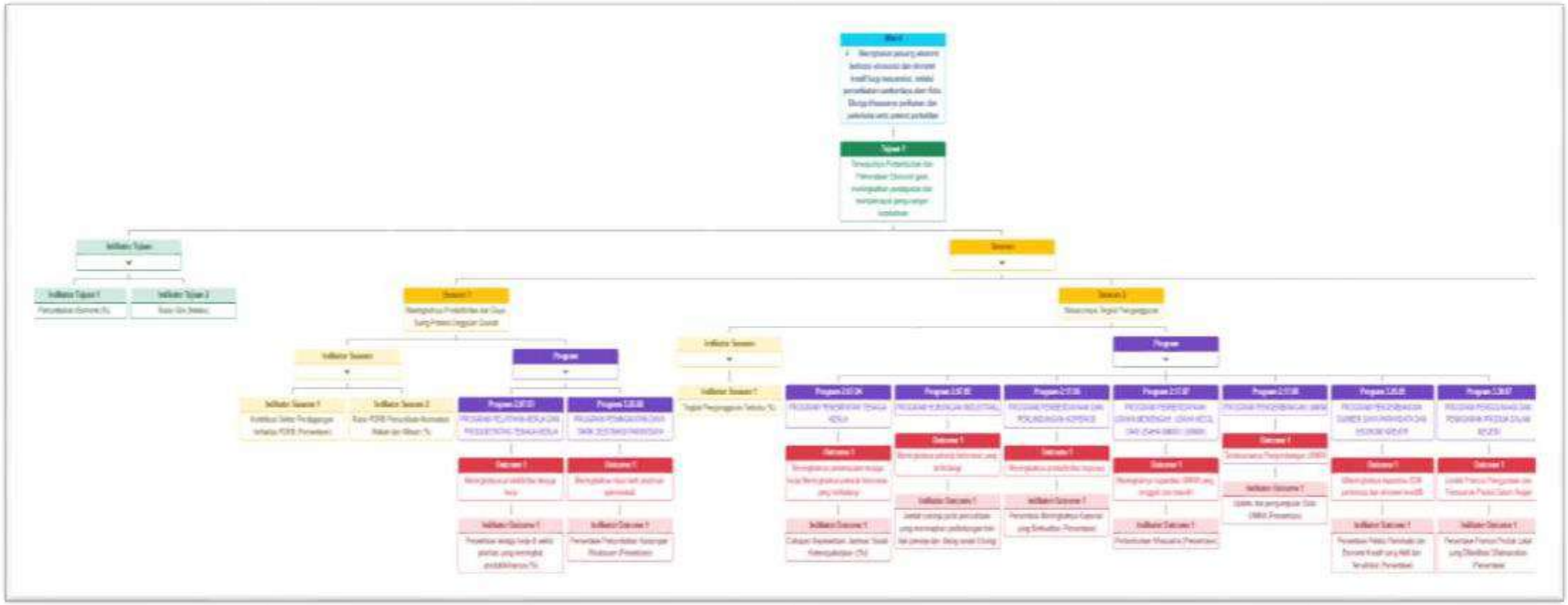

Misi 2
2. Mengembangkan sistem pendidikan dan pengembangan SDM yang berorientasi pada kualitas dan keterampilan dengan dilandasi nilai-nilai agama, budaya dan berakhlak mulia yang mampu bersaing
Tujuan 1
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul, dan Berkualitas
Indikator Tujuan
Indikator Tujuan 1
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
Sasaran
Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan
Sasaran 2
Meningkatnya Literasi Masyarakat
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Indikator Sasaran 2
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
Program
Program 1.01.02
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Program 1.01.03
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Program 1.01.04
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Indikator Sasaran 1
Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)
Program 2.23.02
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Program 2.23.03
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Outcome 1
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah
Outcome 1
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan
Outcome 1
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan
Outcome 1
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan
Outcome 1
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
Indikator Outcome 1
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)
Indikator Outcome 2
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)
Indikator Outcome 1
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)
Indikator Outcome 1
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)
Indikator Outcome 1
Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)
Indikator Outcome 1
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)

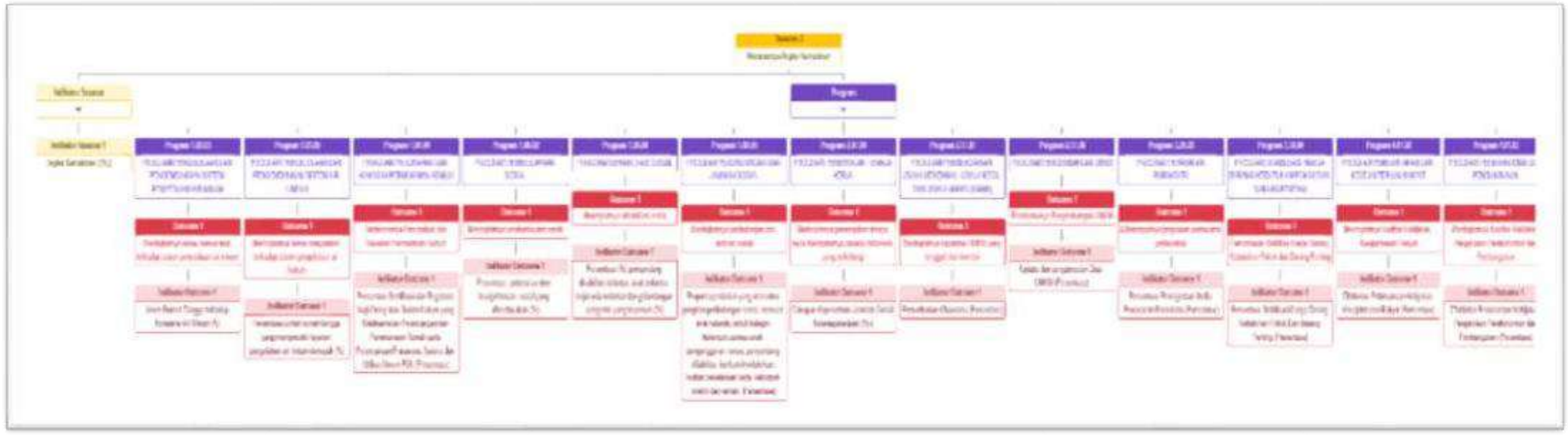

Misi 3
3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, terutama untuk masyarakat tidak mampu
Tujuan 1
Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
Indikator Tujuan
Indikator Tujuan 1
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)
Indikator Tujuan 2
Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))
Sasaran
Sasaran 1
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Indeks Keluarga Sehat (Angka)
Program
Program 1.02.02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Program 1.02.03
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Program 2.14.03
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Program 2.14.04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

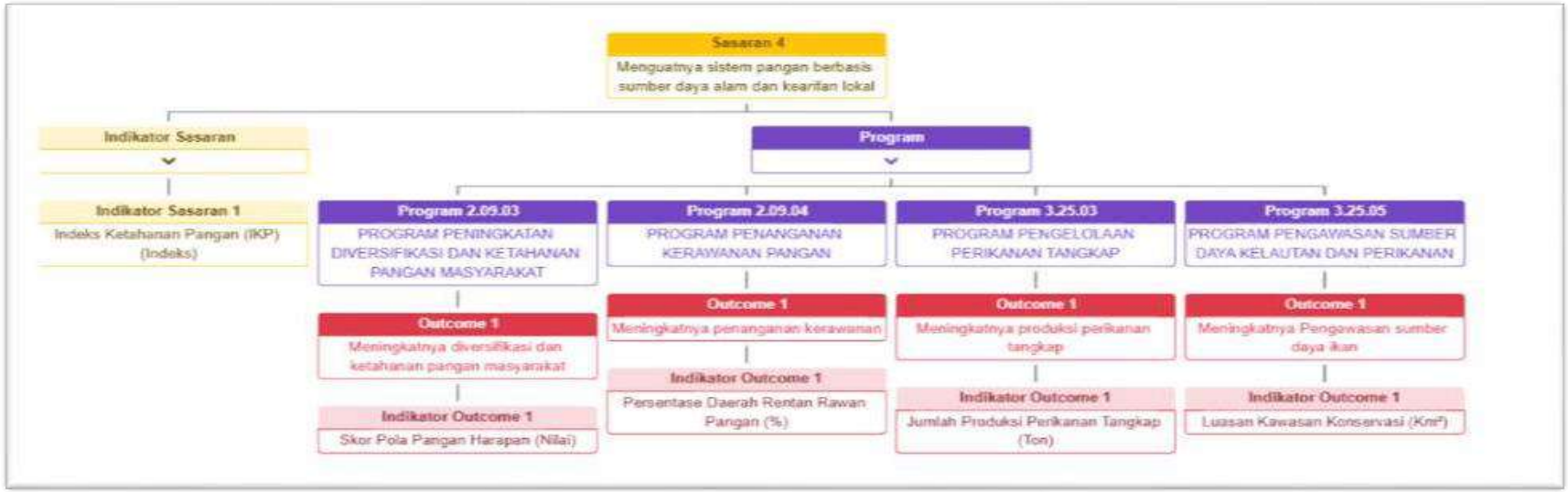


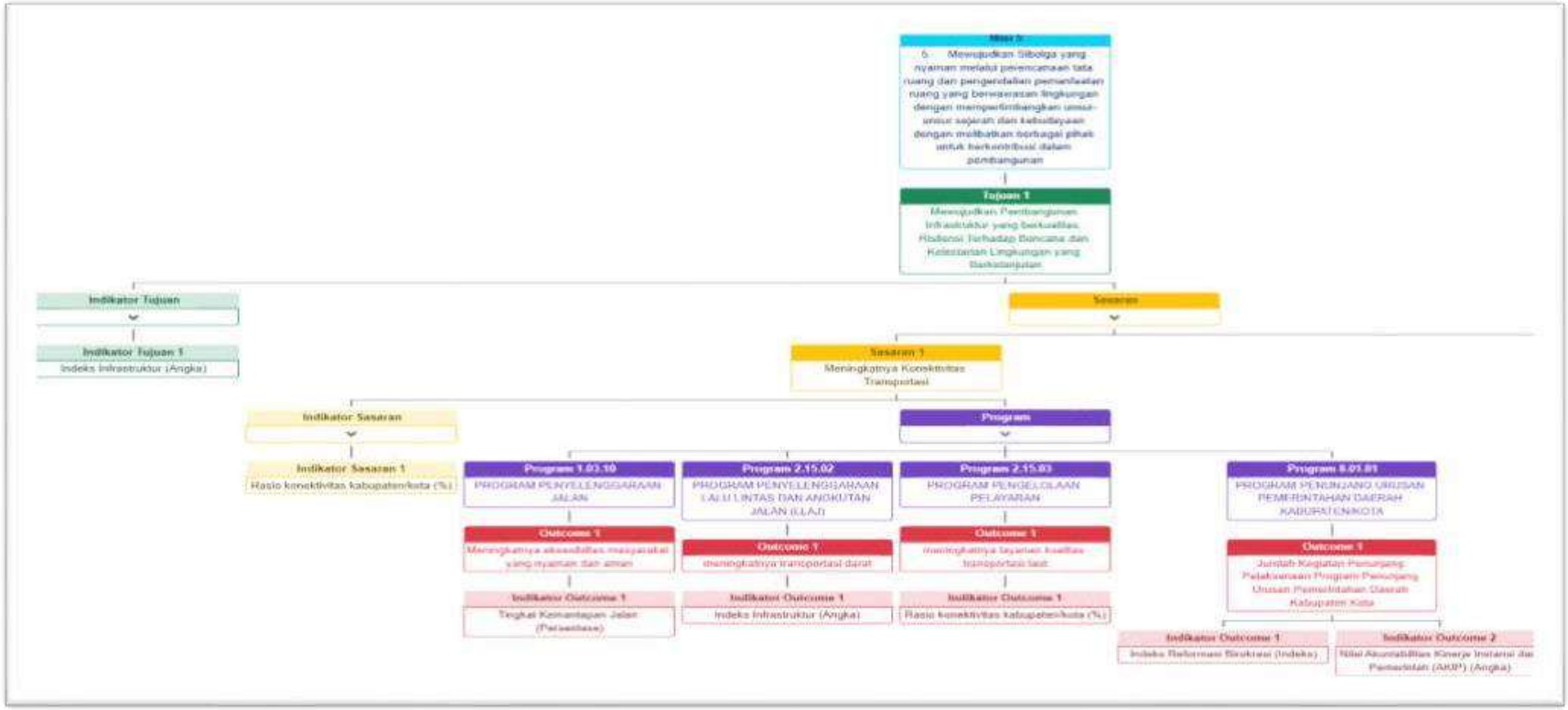


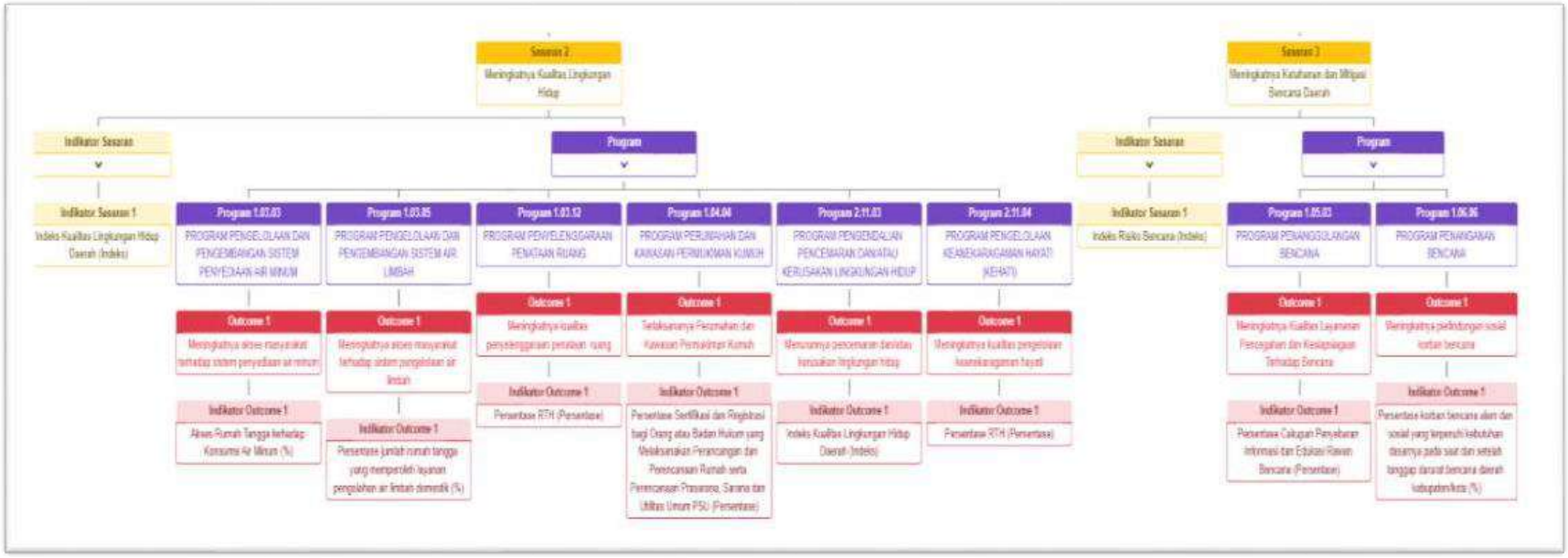

Misi 4
4. Menciptakan peluang ekonomi berbasis wirawasta dan ekonomi kreatif bagi masyarakat, melalui pemanfaatan sumberdaya alam Kota Sibolga khususnya perikanan dan pariwisata serta potensi perbukitan
Tujuan 1
Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan mempercepat pengurangan kemiskinan
Indikator Tujuan
Sasaran
Indikator Tujuan 1
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Indikator Tujuan 2
Rasio Gini (Indeks)
Sasaran 1
Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah
Sasaran 2
Menurunnya Tingkat Pengangguran
Sasaran 3
Menurunnya Angka Kemiskinan
Sasaran 4
Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal

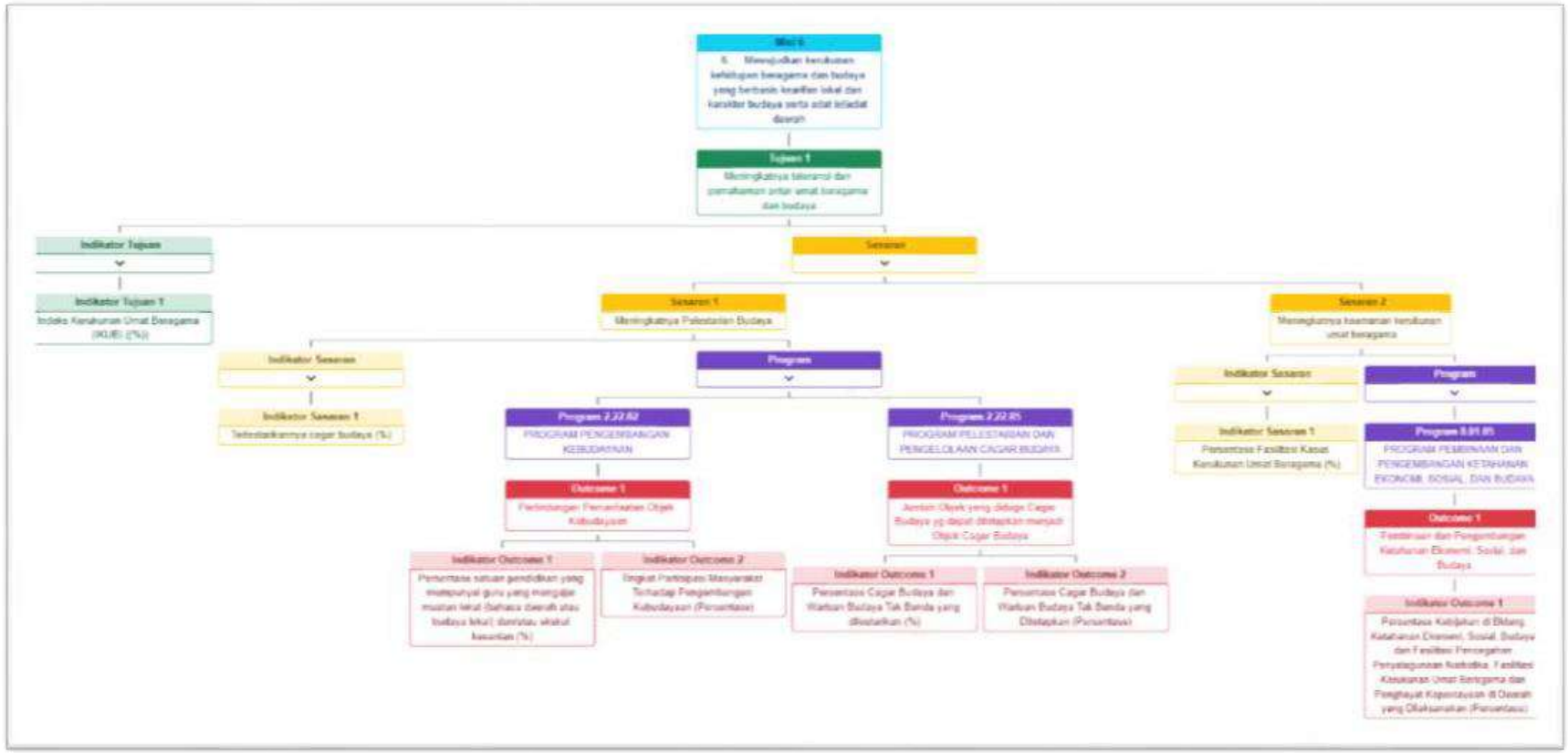


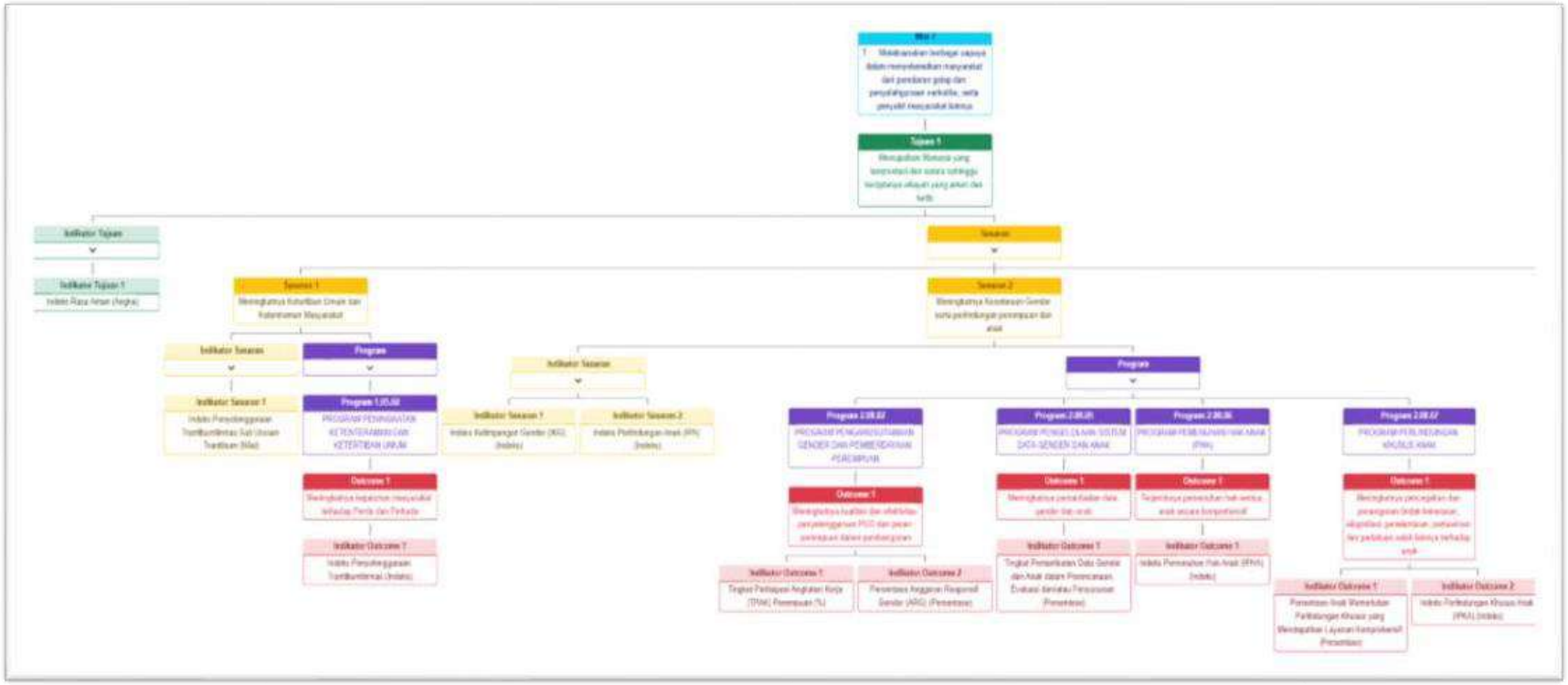


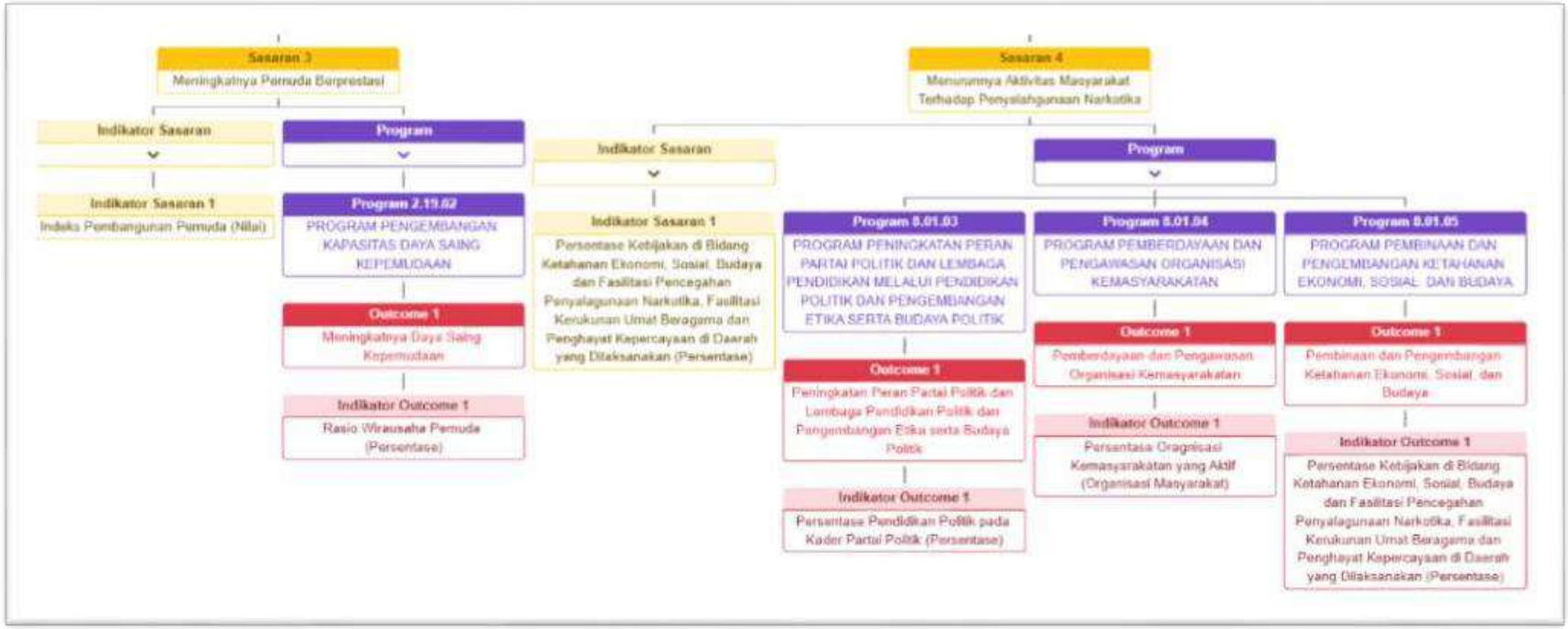

Sasaran 4
Menguatnya sistem pangan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal
Indikator Sasaran
Program
Indikator Sasaran 1
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)
Program 2.09.03
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Outcome 1
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
Indikator Outcome 1
Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)
Program 2.09.04
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Outcome 1
Meningkatnya penanganan kerawanan
Indikator Outcome 1
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)
Program 3.25.03
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Outcome 1
Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Indikator Outcome 1
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)
Program 3.25.05
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Outcome 1
Meningkatnya Pengawasan sumber daya ikan
Indikator Outcome 1
Luasan Kawasan Konservasi (Km²)


Misi 5
5. Mewujudkan Sibolga yang nyaman melalui perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan dengan memperhitungkan unsur-unsur sejarah dan kebudayaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan
Tujuan 1
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, Resiliensi Terhadap Bencana dan Kelestarian Lingkungan yang Berkelanjutan
Indikator Tujuan
Indikator Tujuan 1
Indeks Infrastrukur (Angka)
Sasaran
Sasaran 1
Meningkatnya Konektivitas Transportasi
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)
Program
Program 3.03.10
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Program 2.15.02
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Program 2.15.03
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Program 3.01.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Outcome 1
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
Outcome 1
meningkatnya transportasi darat
Outcome 1
meningkatnya layanan kualitas transportasi laut
Outcome 1
Jumlah Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Indikator Outcome 1
Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)
Indikator Outcome 1
Indeks Infrastruktur (Angka)
Indikator Outcome 1
Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)
Indikator Outcome 1
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)
Indikator Outcome 2
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)


Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)
Program
Program 1.03.03
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Outcome 1
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
Indikator Outcome 1
Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)
Program 1.03.05
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Outcome 1
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
Indikator Outcome 1
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (%)
Program 1.03.12
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Outcome 1
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
Indikator Outcome 1
Persentase RTH (Persentase)
Program 1.04.04
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Outcome 1
Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Indikator Outcome 1
Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)
Program 2.11.03
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Outcome 1
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Indikator Outcome 1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)
Program 2.11.04
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Outcome 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
Indikator Outcome 1
Persentase RTH (Persentase)
Sasaran 3
Meningkatnya Ketahanan dan Mitigasi Bencana Daerah
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Indeks Risiko Bencana (Indeks)
Program
Program 1.05.03
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
Outcome 1
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Indikator Outcome 1
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)
Program 1.06.06
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Outcome 1
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana
Indikator Outcome 1
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)


Misi 6
6. Meningkatkan kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang bertumpu kearifan lokal dan karakter budaya serta adat istiadat daerah
Tujuan 1
Meningkatnya toleransi dan pemahaman antar umat beragama dan budaya
Indikator Tujuan
Indikator Tujuan 1
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (%))
Sasaran
Sasaran 1
Meningkatnya Pelestarian Budaya
Sasaran 2
Meningkatnya kesamaan kerukunan umat beragama
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Terlestarikannya cagar budaya (%)
Program
Program 2.22.02
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Program 2.22.05
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Outcome 1
Peningkatan Pemanfaatan Objek Kebudayaan
Outcome 1
Jumlah Objek yang diduga Cagar Budaya yg dapat ditetapkan menjadi Objek Cagar Budaya
Indikator Outcome 1
Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian (%)
Indikator Outcome 2
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)
Indikator Outcome 1
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan (%)
Indikator Outcome 2
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Persentase Fasilitasi Kasus Kerukunan Umat Beragama (%)
Program
Program 3.01.05
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Outcome 1
Peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Outcome 1
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)




Sasaran 3
Meningkatnya Pemuda Berprestasi
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)
Program
Program 2.19.02
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Outcome 1
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan
Indikator Outcome 1
Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)
Sasaran 4
Menurunnya Aktivitas Masyarakat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika
Indikator Sasaran
Indikator Sasaran 1
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)
Program
Program 8.01.03
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Outcome 1
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Indikator Outcome 1
Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)
Program 8.01.04
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Outcome 1
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Indikator Outcome 1
Persentase Orgnisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Organisasi Masyarakat)
Program 8.01.05
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Outcome 1
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Indikator Outcome 1
Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait, beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Sibolga berisi program-program, untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 1 (satu) Urusan Wajib berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 1 (satu) Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 1 (satu) urusan pilihan dan 4 (empat) Unsur pemerintahan.

Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan instrumen operasional yang menjabarkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah ke dalam serangkaian kegiatan terstruktur yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Program ini disusun berdasarkan pendekatan money follows program yang mengaitkan secara erat antara prioritas pembangunan, ketersediaan anggaran, dan kapasitas kelembagaan daerah. Setiap program dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan.

Penyusunan Program Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi (RPJPD dan RPJMD) serta mempertimbangkan isu strategis sektoral, potensi dan tantangan khusus di bidang tugasnya. Program ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) OPD dan menjadi instrumen akuntabilitas kinerja yang terukur. Implementasi Program Perangkat Daerah mensyaratkan adanya sinergi lintas OPD, mengingat sifat pembangunan yang multidimensi dan saling terkait, untuk memastikan pendekatan yang Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas- bawah dan bawah-atas, Pendekatan Holistik- Tematik, integratif dan Spasial dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

I. Urusan Wajib berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pengelolaan Pendidikan
3) Program Pengembangan Kurikulum
4) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
6) Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

2. Kesehatan, Dinas Kesehatan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
3) Program peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan
4) Program Sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6) Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Aek Habil

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Pintu Angin

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Sambas

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Pelabuhan Sambas

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Puskesmas Aek Parombunan

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan.
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

RSU F.L Tobing

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan
3) Program peningkatan kapasitas sumber Daya Manusia Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
5) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
7) Program Penataan Bangunan Gedung
8) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
9) Program Penyelenggaraan Jalan
10) Program Pengembangan Jasa Kontruksi
11) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2) Program Pengembangan Perumahan
3) Program Kawasan Permukiman
4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)
6) Program Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Satpol-PP dan BPBD

1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3) Program Penanggulangan Bencana
4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

6. Sosial, Dinas Sosial

1) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah
2) Program Pemberdayaan Sosial
3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4) Program Rehabilitasi Sosial
5) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6) Program Penanganan Bencana
7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

1) Program Program Perencanaan Tenaga Kerja
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3) Program Penempatan Tenaga Kerja
4) Program Hubungan Industrial

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengurustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2) Program Perlindungan Perempuan
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4) Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6) Program Perlindungan Khusus Anak

3. Pangan

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3) Program Penanganan kerawanan Pangan
4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

4. Pertanahan

Dinas Pekerjaaan Umum dan Tata Ruang

1) Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum
2) Program Penyelesaian sengketa Tanah Garapan
3) Program penyelesaian Ganti kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan
4) Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee
5) Program Pengelolaan Tanah Kosong
6) Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
7) Program Penatagunaan Tanah
8) Program Pengurusan Hak-hak Atas Tanah

5. Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerukaan Lingkungan Hidup
3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Keracunan (Limbah B3)
5) Program Pembinaan dan Penawasan terhadap Izin Lingkungan dan

Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

6) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum adat (MHA), kearifan Lokal dan HAk MHA yang terkait dengan PPLH
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10) Program Pengelolaan Persampahan

6. Adminstrasi Kependudukan dan Pencatat Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2) Program Pendaftaran Penduduk
3) Program Pencatatan Sipil
4) Program Pengelolaan Informasi Adminstrasi Kependudukan
5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2) Program Penataan Desa
3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
4) Program Administrasi Pemerintah Desa
5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk
2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

9. Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
3) Program Pengelolaan Pelayaran

10. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Kominfo

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
7) Program Pengembangan UMKM
8) Program Penguatan Badan Hukum Koperasi

12. Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2) Program Promosi Penamaman Modal
3) Program Pelayanan Penanaman Modal
4) Program Pengendalian Pelaksanaan Program
5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

13. Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

14. Statistik, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Persandiaan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik

1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan
2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

3) Program Pembinaan Sejarah
4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
5) Program Pengelolaan Permuseuman

17. Perpustakaan Dinas Perpustakaan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pembinaan Perpustakaan
3) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

18. Kearsipan, Dinas Perpustakaan

1) Program Pengelolaan Arsip
2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

III. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan Perikanan

Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikan
5) Program Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan

2. Pariwisata

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrga

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata
3) Program Pemasaran Pariwisata
4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melakui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
5) Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian, Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5) Program Perizinan Usaha Pertanian
6) Program Penyuluhan Pertanian

4. Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3) Program Stabilisasi Harga Pokok dan Barang Penting
4) Program Pengembangan Ekspor
5) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
4) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

IV. Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3) Program Perekonomian dan Pembangunan

2. Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3) Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan,
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah Kepegawaian

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Program Kepegawaian Daerah

4. Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian Daerah

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

2) Program Riset dan Inovasi Daerah

VI. Unsur Pengawasan, Inspektorat

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

VII. Unsur Kewilayahan Kecamatan,

1. Kecamatan Sibolga Utara

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kecamatan Sibolga Kota

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

3) Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

3. Kecamatan Sibolga Sambas

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

4. Kecamatan Sibolga Selatan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa

VIII. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 disertai Indikator Target dan Pagu Indikatif

Setiap program yang dijalankan oleh perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang terukur, target yang jelas, serta pagu anggaran yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai alokasi belanja, termasuk program yang akan dilaksanakan, indikator kinerja, target capaian, serta besaran anggaran yang dialokasikan, dapat merujuk pada Tabel 28.

Tabel 28
Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					128.680.988.802,00		133.578.916.340,00		135.712.732.728,00		144.212.896.361,00		150.791.625.125,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					109.814.088.958,00		110.484.636.528,00		110.897.746.212,00		111.153.746.212,00		111.234.746.212,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	75	75	75	109.814.088.958,00	80	110.484.636.528,00	81	110.897.746.212,00	82	111.153.746.212,00	83	111.234.746.212,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					16.156.666.152,00		19.387.999.382,00		20.444.450.000,00		27.910.506.329,00		33.496.506.329,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	82,24	85,21	88,18	16.156.666.152,00	91,15	19.387.999.382,00	93,70	20.444.450.000,00	96,25	27.910.506.329,00	98,79	33.496.506.329,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang	98,86	99,19	99,51		99,84		100		100		100		Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)													dan Kebudayaan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					30.000.000,00		410.000.000,00		455.000.000,00		490.000.000,00		510.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	10	30.000.000,00	15	410.000.000,00	20	455.000.000,00	25	490.000.000,00	30	510.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.580.233.692,00		3.096.280.430,00		3.715.536.516,00		4.458.643.820,00		5.350.372.584,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1	1	1	2.580.233.692,00	1	3.096.280.430,00	1	3.715.536.516,00	1	4.458.643.820,00	1	5.350.372.584,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

Meningkatnya kualitas dan distribusi	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
institusi pendidikan	yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)													
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANG AN BAHASA DAN SASTRA					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan bahasa dan sastra	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,13	74,23	75,33	0,00	76,43	100.000.000,00	77,53	100.000.000,00	78,63	100.000.000,00	79,73	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KESEHATAN					313.710.924.317,00		352.823.415.099,00		386.411.417.557,00		371.556.906.693,00		395.133.109.959,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KOTA					152.393.506.338,00		150.617.636.711,00		153.685.754.307,00		160.222.437.433,00		162.312.672.831,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	95	95	33.038.102.643,00	96	33.698.864.696,00	97	34.372.841.990,00	98	35.060.298.829,00	99	35.761.504.806,00	Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	77,26	77,50	78		78,50		79		79,50		80		Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan					119.355.403.695,00		116.918.772.015,00		119.312.912.317,00		125.162.138.604,00		126.551.168.025,00	RSU FL.Tobing
	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		RSU FL.Tobing
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					159.448.911.073,00		198.427.094.970,00		228.797.445.963,00		207.256.127.531,00		228.593.002.215,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					58.603.170.600,00		93.957.160.000,00		121.797.376.000,00		96.792.113.600,00		117.919.524.960,00	RSU FL.Tobing

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		RSU FL.Tobing
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0	1,4	1,4	100.845.740.473,00	1,4	104.469.934.970,00	1,4	107.000.069.963,00	1,4	110.464.013.931,00	1,4	110.673.477.255,00	Dinas Kesehatan
	Persentase Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	0	5	10		15		20		25		30		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar (%)	84	85	87		89		91		92		92		Dinas Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	73	75	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi	46,7	50	60		70		80		90		90		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Kesehatan Nasional (%)													
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	80	81	82		83		84		85		86		Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	90	90	90		90		91		92		92		Dinas Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	74	75	77		79		81		83		83		Dinas Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	12,4	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		8,4		Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN					989.693.035,00		2.887.293.269,00		3.023.999.335,00		3.161.039.418,00		3.299.652.937,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN														
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan					177.500. 000,00		2.052.000. 000,00		2.172.000. 000,00		2.292.000. 000,00		2.412.000. 000,00	RSU FL.Tobing
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		RSU FL.Tobing
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	80	81	82	812.193. 035,00	83	835.293. 269,00	84	851.999. 335,00	85	869.039. 418,00	86	887.652. 937,00	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan. (Satuan Orang)	73,3	70	68		66		64		62		60		Dinas Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengandokter spesialis sesuaistandar (Persentase)	90	90	92		92		95		95		100		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					738.813. 871,00		751.390. 149,00		764.217. 952,00		777.302. 311,00		787.781. 976,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman														Dinas Kesehatan
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	80	81	82	738.813.871,00	83	751.390.149,00	84	764.217. 952,00	85	777.302. 311,00	86	787.781. 976,00	Dinas Kesehatan
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	50	50	55		60		65		70		75		Dinas Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan panganolahan dari lintas sektor	10	20	30		40		50		60		70		Dinas Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)													
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	73,3	75	76		77		78		79		80		Dinas Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	
meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	100	140.000.000,00	Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					130.263.857.478,00		143.029.821.467,00		157.025.018.199,00		173.418.001.012,00		190.848.509.404,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA					7.847.322.988,00		8.677.716.287,00		9.545.486.916,00		10.500.036.707,00		11.550.039.169,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	56,77	58,78	60,20	7.847.322.988,00	62,30	8.677.716.287,00	64,40	9.545.486.916,00	66,50	10.500.036.707,00	68,60	11.550.039.169,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	86,33	86,50	86,70		87		87,33		87,50		88		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					50.800.000.000,00		55.880.000.000,00		61.468.000.000,00		67.614.800.000,00		74.376.280.000,00	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir	Jumlah Luas Penanganan Erosi dan Sedimentasi (Ha)	4	4,74	5,09	50.800.000.000,00	5,45	55.880.000.000,00	5,81	61.468.000.000,00	6,16	67.614.800.000,00	6,52	74.376.280.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.063.534.490,00		1.084.805.180,00		1.106.501.283,00		1.128.631.305,00		1.151.203.935,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)	100	100	100	1.063.534.490,00	100	1.084.805.180,00	100	1.106.501.283,00	100	1.128.631.305,00	100	1.151.203.935,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
meningkatnya pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	0	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		146.410.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	60	65	68	100.000.000,00	75	110.000.000,00	80	121.000.000,00	85	133.100.000,00	90	146.410.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.960.000.000,00		5.456.000.000,00		6.001.600.000,00		6.601.760.000,00		7.261.936.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	4	4,74	5,09	4.960.000.000,00	5,45	5.456.000.000,00	5,81	6.001.600.000,00	6,16	6.601.760.000,00	6,52	7.261.936.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANG AN PERMUKIMAN					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	50	53,13	54,01	2.000.000.000,00	54,88	2.000.000.000,00	56,15	2.000.000.000,00	57,42	3.000.000.000,00	58,69	3.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					12.798.000.000,00		14.077.800.000,00		15.485.580.000,00		17.034.138000,00		18.737.551.800,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	70	73	75	12.798.000.000,00	77	14.077.800.000,00	79	15.485.580.000,00	80	17.034.138.000,00	83	18.737.551.800,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA														
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					49.585.000.000,00		54.543.500.000,00		59.997.850.000,00		65.997.635.000,00		72.597.398.500,00	
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	58,62	68,13	70	49.585.000.000,00	73	54.543.500.000,00	75	59.997.850.000,00	78	65.997.635.000,00	80	72.597.398.500,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANG AN JASA KONSTRUKSI					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi (Orang)	0	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					900.000.000,00		990.000.000,00		1.089.000.000,00		1.197.900.000,00		1.317.690.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENATAAN RUANG														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n penataan ruang	Persentase RTH (Persentase)	100	100	100	900.000.000,00	100	990.000.000,00	100	1.089.000.000,00	100	1.197.900.000,00	100	1.317.690.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					31.196.248.794,00		32.703.561.233,00		34.286.239.294,00		35.948.051.259,00		37.692.953.819,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KOTA					20.546.248.794,00		21.573.561.233,00		22.652.239.294,00		23.784.851.259,00		24.974.093.819,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	80	100	100	20.546.248.794,00	100	21.573.561.233,00	100	22.652.239.294,00	100	23.784.851.259,00	100	24.974.093.819,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN					400.000.000,00		420.000.000,00		441.000.000,00		463.050.000,00		486.202.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	16	40	400.000.000,00	50	420.000.000,00	76	441.000.000,00	88	463.050.000,00	100	486.202.500,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	80	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.950.000.000,00		3.060.000.000,00		3.175.500.000,00		3.296.775.000,00		3.424.113.750,00	
Meningkatnya kualitas kawasan pcrmukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	69	100	100	2.950.000.000,00	100	3.060.000.000,00	100	3.175.500.000,00	100	3.296.775.000,00	100	3.424.113.750,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERMUKIMAN KUMUH														
Terlaksananya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	0	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					7.000.000.000,00		7.350.000.000,00		7.717.500.000,00		8.103.375.000,00		8.508.543.750,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	98	100	100	7.000.000.000,00	100	7.350.000.000,00	100	7.717.500.000,00	100	8.103.375.000,00	100	8.508.543.750,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					15.631.140.751,00		17.543.965.312,00		16.774.719.945,00		20.788.911.608,00		18.415.005.229,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.502.484.751,00		13.144.136.032,00		11.691.891.945,00		15.476.132.108,00		13.127.439.229,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	80	70	72	6.970.034.751,00	75	6.054.636.032,00	75	6.807.391.945,00	76	10.591.632.108,00	78	8.089.439.229,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	78,61	80	82	4.532.450.000,00	84	7.089.500.000,00	86	4.884.500.000,00	88	4.884.500.000,00	90	5.038.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA					1.047.328.000,00		1.147.328.000,00		1.247.328.000,00		1.347.328.000,00		1.447.328.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
N DAN KETERTIBAN UMUM														
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (Indeks)	80	80	80	1.047.328.000,00	80	1.147.328.000,00	80	1.247.328.000,00	80	1.347.328.000,00	80	1.447.328.000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					2.039.000.000,00		2.195.000.000,00		1.895.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layananan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	59,32	60	63	965.000.000,00	65	1.115.000.000,00	68	815.000.000,00	70	715.000.000,00	75	715.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Tanggap Darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	909.000.000,00	100	915.000.000,00	100	915.000.000,00	100	920.000.000,00	100	920.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	0	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	1	165.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN					1.042.328.000,00		1.057.501.280,00		1.940.500.000,00		2.165.451.500,00		2.040.238.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	80	70	72	1.042.328.000,00	75	1.057.501.280,00	75	1.940.500.000,00	76	2.165.451.500,00	78	2.040.238.000,00	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	15	15	15		15		15		15		15		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.770.752.272,00		7.046.445.330,00		7.313.360.055,00		7.580.437.669,00		7.848.324.632,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					4.143.079.422,00		4.246.179.422,00		4.340.129.422,00		4.433.864.422,00		4.528.022.922,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	81,11	73,81	80	4.143.079.422,00	80	4.246.179.422,00	80	4.340.129.422,00	80	4.433.864.422,00	80	4.528.022.922,00	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Pemerintahan														
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					875.266.524,00		931.571.855,00		988.033.292,00		1.044.653.958,00		1.101.437.037,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%)	100	100	100	875.266.524,00	100	931.571.855,00	100	988.033.292,00	100	1.044.653.958,00	100	1.101.437.037,00	Dinas Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					692.335.620,00		739.022.333,00		785.821.779,00		832.736.215,00		879.767.939,00	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi (%)	100	100	100	692.335.620,00	100	739.022.333,00	100	785.821.779,00	100	832.736.215,00	100	879.767.939,00	Dinas Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					340.000.000,00		358.000.000,00		376.000.000,00		394.000.000,00		412.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirk an, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. (Persentase)	100	100	100	340.000.000,00	100	358.000.000,00	100	376.000.000,00	100	394.000.000,00	100	412.000.000,00	Dinas Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					513.050.706,00		548.111.720,00		583.253.954,00		618.479.034,00		653.788.614,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana daerah kabupaten/kot a (%)	100	100	100	513.050.706,00	100	548.111.720,00	100	583.253.954,00	100	618.479.034,00	100	653.788.614,00	Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					207.020.000,00		223.560.000,00		240.121.608,00		256.704.040,00		273.308.120,00	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	207.020.000,00	100	223.560.000,00	100	240.121.608,00	100	256.704.040,00	100	273.308.120,00	Dinas Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.548.000.000,00		1.576.960.000,00		1.606.499.200,00		1.636.629.184,00		1.672.459.727,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					900.000.000,00		918.000.000,00		936.360.000,00		955.087.200,00		974.188.944,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0,7	0,7	0,7	900.000.000,00	0,7	918.000.000,00	0,8	936.360.000,00	1	955.087.200,00	1	974.188.944,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					250.000.000,00		255.000.000,00		260.100.000,00		265.302.000,00		275.706.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa n ((%))	53	54	55	250.000.000,00	56	255.000.000,00	57	260.100.000,00	59	265.302.000,00	60	275.706.000,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					298.000.000,00		303.960.000,00		310.039.200,00		316.239.984,00		322.564.783,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	800	800	850	298.000.000,00	852	303.960.000,00	854	310.039.200,00	856	316.239.984,00	858	322.564.783,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					5.301.000.000,00		5.831.100.000,00		6.414.210.000,00		7.055.611.000,00		7.760.730.100,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAN PERLINDUNGA N ANAK														
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN					1.354.000.000,00		1.489.400.000,00		1.638.340.000,00		1.802.174.000,00		1.982.391.400,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraa n PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0,39	0,40	0,42	1.354.000.000,00	0,44	1.489.400.000,00	0,46	1.638.340.000,00	0,48	1.802.174.000,00	0,50	1.982.391.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	0,58	0,63	0,68		0,73		0,73		0,73		0,73		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGA N PEREMPUAN					950.000.000,00		1.045.000.000,00		1.149.500.000,00		1.264.430.000,00		1.390.895.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan	0,085	0,010	0,012	950.000.000,00	0,015	1.045.000.000,00	0,017	1.149.500.000,00	0,019	1.264.430.000,00	0,021	1.390.895.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)													Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					920.000.000,00		1.012.000.000,00		1.113.200.000,00		1.224.520.000,00		1.346.972.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	0	0	5,88	920.000.000,00	11,76	1.012.000.000,00	11,76	1.113.200.000,00	23,52	1.224.520.000,00	35,29	1.346.972.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00		292.820.000,00		322.102.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam p erencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	0	0	0	220.000.000,00	0	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	1	322.102.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					762.000.000,00		838.200.000,00		922.020.000,00		1.014.222.000,00		1.115.644.200,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,16	61,00	61,00	762.000.000,00	61,23	838.200.000,00	61,45	922.020.000,00	61,76	1.014.222.000,00	61,92	1.115.644.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					1.095.000.000,00		1.204.500.000,00		1.324.950.000,00		1.457.445.000,00		1.602.725.500,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	77,85	78,00	78,00	1.095.000.000,00	78,38	1.204.500.000,00	78,53	1.324.950.000,00	78,76	1.457.445.000,00	78,95	1.602.725.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	60,16	61,00	61,00		61,23		61,45		61,76		61,92		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					1.615.000.000,00		2.036.000.000,00		2.327.150.000,00		2.316.665.000,00		2.812.781.500,00	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					225.000.000,00		247.500.000,00		270.000.000,00		292.500.000,00		315.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0	10	10	225.000.000,00	10	247.500.000,00	10	270.000.000,00	10	292.500.000,00	10	315.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1.015.000.000,00		1.381.500.000,00		1.618.150.000,00		1.553.165.000,00		1.994.781.500,00	
Meningkatnya diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	79,3	90	90	1.015.000.000,00	90	1.381.500.000,00	90	1.618.150.000,00	90	1.553.165.000,00	90	1.994.781.500,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					220.000.000,00		242.000.000,00		264.000.000,00		286.000.000,00		308.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	10	10	220.000.000,00	10	242.000.000,00	10	264.000.000,00	10	286.000.000,00	10	308.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					155.000.000,00		165.000.000,00		175.000.000,00		185.000.000,00		195.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0	80	80	155.000.000,00	80	165.000.000,00	80	175.000.000,00	80	185.000.000,00	80	195.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					1.825.000.000,00		1.880.250.000,00		1.962.012.500,00		1.995.363.125,00		2.030.381.280,00	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					410.000.000,00		413.000.000,00		416.150.000,00		419.457.500,00		422.930.375,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	68,3	68,39	68,69	410.000.000,00	68,97	413.000.000,00	69,64	416.150.000,00	70,61	419.457.500,00	71,21	422.930.375,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					400.000.000,00		405.000.000,00		410.250.000,00		415.762.500,00		421.550.625,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragama n hayati	Persentase RTH (Persentase)	20,15	20,35	20,60	400.000.000,00	21,05	405.000.000,00	21,20	410.250.000,00	21,60	415.762.500,00	22,00	421.550.625,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIA N BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	80	100	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGA N DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					120.000.000,00		121.000.000,00		122.050.000,00		123.152.500,00		124.310.125,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	100	100	100	120.000.000,00	100	121.000.000,00	100	122.050.000,00	100	123.152.500,00	100	124.310.125,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	80	100	100	0,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					350.000.000,00		367.500.000,00		385.875.000,00		405.168.750,00		425.427.187,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0	0	25	350.000.000,00	25	367.500.000,00	50	385.875.000,00	75	405.168.750,00	100	425.427.187,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000,00		26.250.000,00		27.562.500,00		28.940.625,00		30.387.656,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	10	15	20	25.000.000,00	25	26.250.000,00	30	27.562.500,00	35	28.940.625,00	40	30.387.656,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	80	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					350.000.000,00		352.500.000,00		405.125.000,00		407.881.250,00		410.775.312,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	36	42	350.000.000,00	48	352.500.000,00	54	405.125.000,00	56	407.881.250,00	60	410.775.312,00	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.977.788.299,00		6.276.677.712,00		6.590.511.598,00		6.920.037.178,00		7.266.039.037,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.500.000.000,00		5.775.000.000,00		6.063.750.000,00		6.366.937.500,00		6.685.284.375,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	79,11	79,50	80	5.500.000.000,00	80,50	5.775.000.000,00	81	6.063.750.000,00	81,50	6.366.937.500,00	82	6.685.284.375,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					135.525.498,00		142.301.772,00		149.416.861,00		156.887.704,00		164.732.089,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	6,88	10	20	135.525.498,00	30	142.301.772,00	40	149.416.861,00	50	156.887.704,00	55	164.732.089,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	91,68	92	92,50		93		93,50		94		94,50		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					173.728.466,00		182.414.889,00		191.535.633,00		201.112.415,00		211.168.036,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100	173.728.466,00	100	182.414.889,00	100	191.535.633,00	100	201.112.415,00	100	211.168.036,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99	99	99		99		99		99		99		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99	99	99		99		99		99		99		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					138.534.335,00		145.461.051,00		152.734.104,00		160.370.809,00		168.389.350,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	100	100	100	138.534.335,00	100	145.461.051,00	100	152.734.104,00	100	160.370.809,00	100	168.389.350,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM					30.000.000,00		31.500.000,00		33.075.000,00		34.728.750,00		36.465.187,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
Meningkatnya kualitas proftl kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	30.000.000,00	100	31.500.000,00	100	33.075.000,00	100	34.728.750,00	100	36.465.187,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					8.572.087.706,00		9.429.346.477,00		10.414.538.494,00		11.176.202.604,00		11.839.064.805,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.068.587.706,00		5.575.496.477,00		6.175.303.494,00		6.513.354.904,00		6.709.590.455,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	72,86	72,90	73	5.068.587.706,00	73,20	5.575.496.477,00	73,25	6.175.303.494,00	74	6.513.354.904,00	82,39	6.709.590.455,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					228.800.000,00		251.680.000,00		276.848.000,00		304.532.000,00		334.986.080,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	5,80	23,50	23,50	228.800.000,00	47,05	251.680.000,00	47,05	276.848.000,00	100	304.532.000,00	100	334.986.080,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					84.700.000,00		93.170.000,00		102.487.000,00		112.735.700,00		124.009.270,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0	23,50	23,50	84.700.000,00	47,05	93.170.000,00	70,58	102.487.000,00	100	112.735.700,00	100	124.009.270,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					930.000.000,00		1.023.000.000,00		1.125.300.000,00		1.237.520.000,00		1.361.613.000,00	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	0	5,88	11,76	930.000.000,00	23,52	1.023.000.000,00	23,52	1.125.300.000,00	47,05	1.237.520.000,00	47,05	1.361.613.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					2.260.000.000,00		2.486.000.000,00		2.734.600.000,00		3.008.060.000,00		3.308.866.000,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n Desa (LKD) (Persentase)	16,41	24,44	75,55	2.260.000.000,00	75,55	2.486.000.000,00	100	2.734.600.000,00	100	3.008.060.000,00	100	3.308.866.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	0	25		25		50		50		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					10.248.204.644,00		10.419.019.736,00		10.595.083.311,00		10.776.282.748,00		10.962.826.927,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.816.770.137,00		3.893.105.539,00		3.970.967.650,00		4.050.387.003,00		4.131.394.743,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	77,26	78,5	79,5	3.816.770.137,00	80,5	3.893.105.539,00	81,5	3.970.967.650,00	82,5	4.050.387.003,00	83,5	4.131.394.743,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					430.000.000,00		460.100.000,00		492.307.000,00		526.768.490,00		563.642.284,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	35,29	41,17	47,05	430.000.000,00	52,98	460.100.000,00	58,82	492.307.000,00	64,70	526.768.490,00	70,58	563.642.284,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	60,44	60,94	61,44		61,94		62,44		62,94		63,44		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					3.544.434.507,00		3.615.323.197,00		3.687.629.661,00		3.761.382.255,00		3.836.609.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	2,14	2,14	2,12	3.544.434.507,00	2,11	3.615.323.197,00	2,10	3.687.629.661,00	2,10	3.761.382.255,00	2,10	3.836.609.900,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	5,8	5.8-5.7	5.7-5.6		5.6-5.5		5.5-5.4		5.4-5.3		5.3-5.2		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	21,25	21	19,86		19,45		19,1		18,8		18,3		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	73,5	73,8	74,1		74,4		74,7		75		75,3		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA					2.457.000.000,00		2.450.491.000,00		2.444.179.000,00		2.437.745.000,00		2.431.180.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
SEJAHTERA (KS)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera [KS]	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Indeks)	60.44 :61.4	61.4: 62.3	62.3:63 .1	2.457.000.000,00	63.1:63. 9	2.450.491.000,00	63.9:64.7	2.444.179.000,00	64.7:65	2.437.745. 000,00	65:65.2	2.431.180. 000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	66,2	70	70,50		71,00		71,50		72		72,50		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	65	67	68		69		70		71		72		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					23.343.096.462,00		24.460.251.383,00		25.675.763.940,00		26.941.920 .887,00		28.211.516 .977,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.953.469.322,00		9.401.142.887,00		9.871.200.022,00		10.364.628 .778,00		10.882.860 .270,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	56,77	58,78	60,20	8.953.469.322,00	62,30	9.401.142.887,00	64,40	9.871.200.022,00	66,50	10.364.628.778,00	68,60	10.882.860.270,00	Dinas Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGA RAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					10.189.627.140,00		10.699.108.496,00		11.234.063.918,00		11.795.767.109,00		12.385.555.457,00	
meningkatnya transportasi darat	Indeks Infrastruktur (Angka)	77,75	77,9	78,2	10.189.627.140,00	78,7	10.699.108.496,00	79,2	11.234.063.918,00	79,7	11.795.767.109,00	80,2	12.385.555.457,00	Dinas Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					4.200.000.000,00		4.360.000.000,00		4.570.500.000,00		4.781.525.000,00		4.943.101.250,00	
meningkatnya layanan kualitas transportasi laut	Rasio konektivitas kabupaten/kot a (%)	77,75	77,9	78,2	4.200.000.000,00	78,7	4.360.000.000,00	79,2	4.570.500.000,00	79,7	4.781.525.000,00	80,2	4.943.101.250,00	Dinas Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					13.414.115.809,00		13.671.896.625,00		13.947.752.778,00		14.226.910.221,00		14.504.610.123,00	
2.16.01 - PROGRAM					6.730.375.809,00		6.854.481.825,00		6.993.989.682,00		7.134.071.863,00		7.269.914.996,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	85,61	73,31	74,32	6.730.375.809,00	75,33	6.854.481.825,00	76,34	6.993.989.682,00	77,35	7.134.071.863,00	78,38	7.269.914.996,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.276.980.000,00		1.302.519.600,00		1.328.569.992,00		1.355.141.392,00		1.382.244.219,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	50	50	51	1.276.980.000,00	52	1.302.519.600,00	53	1.328.569.992,00	54	1.355.141.392,00	55	1.382.244.219,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.406.760.000,00		5.514.895.200,00		5.625.193.104,00		5.737.696.966,00		5.852.450.908,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,41	2,5	2,6	5.406.760.000,00	2,75	5.514.895.200,00	2,8	5.625.193.104,00	2,85	5.737.696.966,00	3	5.852.450.908,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.197.658.166,00		7.341.611.329,00		7.488.443.556,00		7.638.212.426,00		7.790.976.673,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.492.241.498,00		4.582.086.328,00		4.673.728.055,00		4.767.202.616,00		4.862.546.668,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	79,21	79,22	79,22	4.492.241.498,00	79,23	4.582.086.328,00	79,23	4.673.728.055,00	79,24	4.767.202.616,00	79,24	4.862.546.668,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					61.200.000,00		62.424.000,00		63.672.480,00		64.945.929,00		66.244.848,00	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	30	30	30	61.200.000,00	30	62.424.000,00	30	63.672.480,00	30	64.945.929,00	30	66.244.848,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					63.216.668,00		64.481.001,00		65.770.621,00		67.086.033,00		68.427.754,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	41	41,5	42	63.216.668,00	42,5	64.481.001,00	43	65.770.621,00	43,5	67.086.033,00	44	68.427.754,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					30.000.000,00		30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	16	16	16	30.000.000,00	16	30.600.000,00	16	31.212.000,00	16	31.836.240,00	16	32.472.964,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					300.000.000,00		306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	41	41,5	42	300.000.000,00	42,5	306.000.000,00	43	312.120.000,00	43,5	318.362.400,00	44	324.729.648,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					306.000.000,00		312.120.000,00		318.362.400,00		324.729.648,00		331.224.240,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	13	13	13	306.000.000,00	13	312.120.000,00	13	318.362.400,00	13	324.729.648,00	13	331.224.240,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					1.845.000.000,00		1.881.900.000,00		1.919.538.000,00		1.957.928.760,00		1.997.087.335,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0,84	0,84	0,84	1.845.000.000,00	0,84	1.881.900.000,00	0,84	1.919.538.000,00	0,84	1.957.928.760,00	0,84	1.997.087.335,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					100.000.000,00		102.000.000,00		104.040.000,00		106.120.800,00		108.243.216,00	
Terlaksananya Pengembangan UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)	0	100	100	100.000.000,00	100	102.000.000,00	100	104.040.000,00	100	106.120.800,00	100	108.243.216,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.768.063.892,00		5.875.425.170,00		5.984.933.673,00		6.096.632.347,00		6.210.562.993,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		5.202.000.000,00		5.306.040.000,00		5.412.160.800,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	79,16	82,16	82,16	5.000.000.000,00	82,16	5.100.000.000,00	82,16	5.202.000.000,00	82,16	5.306.040.000,00	82,16	5.412.160.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kot a (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					135.684.910,00		138.398.608,00		141.166.580,00		143.989.912,00		146.867.710,00	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	100	100	100	135.684.910,00	100	138.398.608,00	100	141.166.580,00	100	143.989.912,00	100	146.867.710,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu SatuPintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					79.378.982,00		80.966.562,00		82.585.893,00		84.237.611,00		85.922.363,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	100	100	100	79.378.982,00	100	80.966.562,00	100	82.585.893,00	100	84.237.611,00	100	85.922.363,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		162.364.824,00		165.612.120,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal Meningkatnya efektivitas kerja	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	153.000.000,00	100	156.060.000,00	100	159.181.200,00	100	162.364.824,00	100	165.612.120,00	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.510.000.000,00		7.112.600.000,00		7.600.117.000,00		8.216.739.840,00		8.601.497.646,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					2.110.000.000,00		2.401.800.000,00		2.688.501.000,00		3.012.291.520,00		3.378.200.360,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.04%	2.14%	2.24%	2.110.000.000,00	2.36%	2.401.800.000,00	2.47%	2.688.501.000,00	2.60%	3.012.291.520,00	2.73%	3.378.200.360,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N					4.360.000.000,00		4.670.000.000,00		4.870.000.000,00		5.162.000.000,00		5.180.000.000,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0,00	0,1	0,1	4.360.000.000,00	0,2	4.670.000.000,00	0,2	4.870.000.000,00	0,3	5.162.000.000,00	0,3	5.180.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					40.000.000,00		40.800.000,00		41.616.000,00		42.448.320,00		43.297.286,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0.40%	0.42%	0.44%	40.000.000,00	0.46%	40.800.000,00	0.48%	41.616.000,00	0.51%	42.448.320,00	0.53%	43.297.286,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					152.999.000,00		156.058.980,00		159.180.160,00		162.363.763,00		165.611.038,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					152.999.000,00		156.058.980,00		159.180.160,00		162.363.763,00		165.611.038,00	
Tercapainya Indeks kolaborasi, Pembangunan integrasi, dan Statistik (IPS) standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0	0	1	152.999.000,00	1	156.058.980,00	1	159.180.160,00	1	162.363.763,00	1	165.611.038,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					75.517.000,00		77.027.340,00		78.567.887,00		80.139.245,00		81.742.029,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					75.517.000,00		77.027.340,00		78.567.887,00		80.139.245,00		81.742.029,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	1	1	1	75.517.000,00	1	77.027.340,00	1	78.567.887,00	1	80.139.245,00	1	81.742.029,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					2.862.932.623,00		2.917.393.484,00		2.976.645.930,00		2.996.893.010,00		3.045.878.363,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					1.460.575.700,00		1.460.575.700,00		1.460.575.700,00		1.460.575.700,00		1.460.575.700,00	
Perlindungan Pemanfaatan Objek Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	100	1.460.575.700,00	100	1.460.575.700,00	100	1.460.575.700,00	100	1.460.575.700,00	100	1.460.575.700,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar	5	10	15		20		26		30		35		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian (%)													
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					973.043.047,00		992.503.908,00		1.012.353.986,00		1.032.601.066,00		1.053.253.087,00	
SDM yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	90	90	90	973.043.047,00	90	992.503.908,00	95	1.012.353.986,00	100	1.032.601.066,00	100	1.053.253.087,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian (%)	35	45	50		55		60		65		70		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					210.382.910,00		210.382.910,00		210.382.910,00		210.382.910,00		210.382.910,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kapasitas SDM Terkait Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya serta Lembaga yang Berperan dalam Pengelolaan dan Promosi Sejarah Lokal	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	20	25	210.382.910,00	30	210.382.910,00	35	210.382.910,00	40	210.382.910,00	45	210.382.910,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/pening galan sejarah/warisa n budaya bersifat kebendaan (%)	0	25	30		35		40		45		47		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					178.930.966,00		178.930.966,00		193.333.334,00		193.333.334,00		226.666.666,00	
Jumlah Objek yang diduga Cagar Budaya yg dapat ditetapkan menjadi Objek Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100	100	100	178.930.966,00	100	178.930.966,00	100	193.333.334,00	100	193.333.334,00	100	226.666.666,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0	0	25		25		25		25		0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					40.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		95.000.000,00	
meningkatnya pengololaan museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0	0	0	40.000.000,00	0	75.000.000,00	200	100.000.000,00	300	100.000.000,00	500	95.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					11.663.858.536,00		11.890.644.894,00		12.128.457.786,00		12.371.026.945,00		12.618.447.481,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.418.121.914,00		6.546.484.353,00		6.677.414.037,00		6.810.962.319,00		6.947.181.567,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	82,5	82,8	83	6.418.121.914,00	83,5	6.546.484.353,00	84	6.677.414.037,00	84,5	6.810.962.319,00	85	6.947.181.567,00	Dinas Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraa n Pemerintahan														
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					5.091.191.472,00		5.193.015.304,00		5.296.875.607,00		5.402.813.121,00		5.510.869.380,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	70	70	71	5.091.191.472,00	72	5.193.015.304,00	73	5.296.875.607,00	74	5.402.813.121,00	75	5.510.869.380,00	Dinas Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					154.545.150,00		151.145.237,00		154.168.142,00		157.251.505,00		160.396.534,00	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	1	1	154.545.150,00	1	151.145.237,00	1	154.168.142,00	1	157.251.505,00	1	160.396.534,00	Dinas Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEARSIPAN					1.597.450.242,00		1.629.399.247,00		1.661.987.232,00		1.695.226.975,00		1.729.131.512,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					1.334.494.180,00		1.361.184.064,00		1.388.407.745,00		1.416.175.899,00		1.444.499.418,00	
Meningkatnya Tata Kelola	Tingkat Ketersediaan	70	70	71	1.334.494.180,00	72	1.361.184.064,00	73	1.388.407.745,00	74	1.416.175.899,00	75	1.444.499.418,00	Dinas Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Arsip Dinamis dan Statis	Arsip (Persentase)													
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					232.356.062,00		237.003.183,00		241.743.247,00		246.578.112,00		251.509.670,00	
Meningkatnya Perlindungan Dari Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	1	1	232.356.062,00	1	237.003.183,00	1	241.743.247,00	1	246.578.112,00	1	251.509.670,00	Dinas Perpustakaan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					30.600.000,00		31.212.000,00		31.836.240,00		32.472.964,00		33.122.424,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	10	10	10	30.600.000,00	10	31.212.000,00	10	31.836.240,00	10	32.472.964,00	10	33.122.424,00	Dinas Perpustakaan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.488.884.277,00		10.828.429.463,00		11.177.158.750,00		11.541.905.713,00		11.899.993.092,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KO TA					7.658.884.277,00		7.708.429.463,00		7.758.358.750,00		7.814.725.713,00		7.866.995.092,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	0	89	89	7.658.884.277,00	89	7.708.429.463,00	89	7.758.358.750,00	89	7.814.725.713,00	89	7.866.995.092,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.680.000.000,00		1.892.000.000,00		2.100.000.000,00		2.314.000.000,00		2.516.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	90	91	92	1.680.000.000,00	92	1.892.000.000,00	92	2.100.000.000,00	92	2.314.000.000,00	92	2.516.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					265.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	9	91	92	265.000.000,00	92	265.000.000,00	92	270.000.000,00	92	270.000.000,00	92	270.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan sumber daya ikan	Luasan Kawasan Konservasi (KmÂ²)	0,04	0,04	0,05	105.000.000,00	0,06	105.000.000,00	0,07	105.000.000,00	0,08	105.000.000,00	0,09	105.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					780.000.000,00		858.000.000,00		943.800.000,00		1.038.180.000,00		1.141.998.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	44,27	46	46	780.000.000,00	46	858.000.000,00	46	943.800.000,00	46	1.038.180.000,00	46	1.141.998.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.309.282.753,00		12.857.515.583,00		10.939.189.388,00		11.442.779.015,00		14.318.740.061,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.860.282.753,00		5.918.885.583,00		5.978.074.438,00		6.037.855.183,00		6.098.233.735,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	74,56	82	82,82	5.860.282.753,00	83,23	5.918.885.583,00	83,65	5.978.074.438,00	84,06	6.037.855.183,00	84,48	6.098.233.735,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.000.000.000,00		5.700.000.000,00		3.498.000.000,00		3.847.800.000,00		6.833.380.000,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata&	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	21,40	5,00	6,00	2.000.000.000,00	7,00	5.700.000.000,00	8,00	3.498.000.000,00	8,50	3.847.800.000,00	9,00	6.833.380.000,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					665.000.000,00		672.000.000,00		626.541.850,00		666.092.585,00		672.215.903,00	
&Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata&	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20,00	20,00	20,00	665.000.000,00	22,00	672.000.000,00	22,00	626.541.850,00	25,00	666.092.585,00	25,00	672.215.903,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN					1.475.000.000,00		252.500.000,00		558.025.000,00		607.575.250,00		385.651.002,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PERLINDUNGA N HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif														
&Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif&	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0	0	0	1.475.000.000,00	0	252.500.000,00	5	558.025.000,00	5	607.575.250,00	5	385.651.002,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					309.000.000,00		314.130.000,00		278.548.100,00		283.455.997,00		329.259.421,00	
&Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif&	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0,00	0,00	1,00	309.000.000,00	1,00	314.130.000,00	3,00	278.548.100,00	4,00	283.455.997,00	5,00	329.259.421,00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.305.000.000,00		1.367.320.000,00		1.435.048.000,00		1.497.946.959,00		1.506.107.938,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN					204.000.000,00		208.000.000,00		212.241.600,00		216.484.432,00		220.816.160,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0	80	85	204.000.000,00	85	208.000.000,00	85	212.241.600,00	85	216.484.432,00	85	220.816.160,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN														
Meningkatnya Distribusi dan Kualiatas Pertanian														
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					685.000.000,00		735.000.000,00		790.000.000,00		840.000.000,00		835.000.000,00	
Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	0	75	80	685.000.000,00	85	735.000.000,00	85	790.000.000,00	85	840.000.000,00	85	835.000.000,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GAN BENCANA PERTANIAN														
Persentase Penanganan Bencana Pertanian														
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					51.000.000,00		52.020.000,00		53.060.400,00		54.121.607,00		55.204.040,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian (Angka)	0	2	5	51.000.000,00	7	52.020.000,00	7	53.060.400,00	8	54.121.607,00	10	55.204.040,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					365.000.000,00		372.300.000,00		379.746.000,00		387.340.920,00		395.087.738,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	100	100	365.000.000,00	100	372.300.000,00	100	379.746.000,00	100	387.340.920,00	100	395.087.738,00	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					13.943.045.566,00		14.569.585.566,00		15.276.367.844,00		15.952.997.844,00		16.665.597.844,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					102.000.000,00		104.040.000,00		106.020.000,00		108.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya Pembedahan Proses Perizinan dan Pendaftaran Berusaha	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	30	35	40	102.000.000,00	45	104.040.000,00	50	106.020.000,00	55	108.000.000,00	60	110.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					10.300.000.000,00		10.815.000.000,00		11.351.000.000,00		11.879.000.000,00		12.464.000.000,00	
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	33,33	16,67	16,67	10.300.000.000,00	16,67	10.815.000.000,00	16,67	11.351.000.000,00	16,67	11.879.000.000,00	16,67	12.464.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					2.400.000.000,00		2.509.500.000,00		2.621.750.000,00		2.768.400.000,00		2.894.000.000,00	
Pemantauan Stabilisai Harga Barang Kebutuhan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan	6,12	6	6	2.400.000.000,00	6	2.509.500.000,00	6	2.621.750.000,00	6	2.768.400.000,00	6	2.894.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pokok dan Barang Penting	Pokok Dan Barang Penting (Persentase)													
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	20	68	68	5.000.000,00	68	5.000.000,00	68	5.000.000,00	68	5.000.000,00	68	5.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISAS I DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN					1.131.045.566,00		1.131.045.566,00		1.187.597.844,00		1.187.597.844,00		1.187.597.844,00	
Presentase Alat- alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapann ya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	100	100	100	1.131.045.566,00	100	1.131.045.566,00	100	1.187.597.844,00	100	1.187.597.844,00	100	1.187.597.844,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Jumlah Promosi Penggunaan dan Pemasaran	Persentase Promosi Produk Lokal	20	30	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	Dinas Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Produk Dalam Negeri	yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)													dan Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERINDUSTRIAN					11.567.500.000,00		12.053.670.000,00		12.359.485.500,00		12.649.135.450,00		13.156.177.900,00	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KOTA					10.405.500.000,00		10.731.670.000,00		10.849.485.500,00		10.969.135.450,00		11.314.177.900,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraa n Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)	80,53	81,22	81,88	10.405.500.000,00	82,12	10.731.670.000,00	82,67	10.849.485.500,00	83,05	10.969.135.450,00	83,62	11.314.177.900,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah (AKIP) (Angka)	74,56	75	77		79		81		83		85		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI					930.000.000,00		1.035.000.000,00		1.185.000.000,00		1.315.000.000,00		1.440.000.000,00	

1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) Penerapan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara meliputi 6 (enam) bidang layanan dasar SPM:

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang,
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Urusan Sosial.

DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota
b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019. Perubahan aturan menibulkan perubahan konsep. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 memiliki konsep mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal,

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 memiliki konsep bahwa SPM merupakan target indikator kinerja Pemerintahan daerah (Kepala daerah) bukan lagi kesehatan atau Kementerian.
e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 di Pemerintah Kota Sibolga telah diterapkan pada Tahun 2020.
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
g. Permendagri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Umum Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja Kota Sibolga, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing misi berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan. Tujuan dan

sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing Urusan Pelayanan Dasar. Rumusan strategi dan Arah Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

URUSAN PENDIDIKAN

a. Pendidikan Anak Usia Dini :
   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
b. Pendidikan Dasar;
   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
c. Pendidikan Kesetaraan.
   Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

URUSAN KESEHATAN

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d. Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat
k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
b. Penyediaan air minum
c. Penyediaan sanitasi

URUSAN PERUMAHAN

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
c. layanan informasi rawan bencana
d. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
e. layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

URUSAN SOSIAL

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar PantiSosial;
c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar PantiSosial;
d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, maka Sibolga memiliki 26 Organisasi Perangkat Daerah, 4 kecamatan dan 17 kelurahan. Organisasi perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan yang menjadi pelaksana teknis dilapangan untuk merealisasikan pelaksanaan progam dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam1 (satu) tahun, Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja OPD dan Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan menggambarkan aktifitas yang sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah.

Capaian Kinerja Makro Menggunakan Indikator Kinerja Makro Sebagai Berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,94	76,69	77,07	77,52	78,11	0.76
2	Angka Kemiskinan	10,80	10,05	10,02	9,99	9,02	-9.71
3	Angka Pengangguran	8,72	7,05	6,79	6,52	6,44	-1.23
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,10	4,15	4,20	3,92	3,03	-22.70
5	Pendapatan Per Kapita	64,45	69,83	74,74	78,49	82,12	4.62
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,28	0,346	0,246	0,377	0.314	-16.71

Sumber data dari BPS Sibolga Dalam Angka Tahun 2026,

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor–sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhirrumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri–ciri barang privat adalah a) Scarcity, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiaporang memiliki akses ke barangtersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan,pembuatan, dan pembelian barangmodal. Barang modal dimaksudadalah barang–barang yang digunakan untuk proses produksi,tahan lama atau yang mempunyaiumur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin–mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya

memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden).Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke–n terhadap nilai pada tahun ke n–1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n–1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sibolga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2025 adalah sebesar 7.575,00 miliar rupiah. Sedangkan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 4.178,00 miliar rupiah.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar di Kota Sibolga pada tahun 2025. Lapangan usaha ini memberi kontribusi sebesar 28,29 persen terhadap PDRB ADHB.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2025 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 60,94 persen. sedangkan komponen pengeluaran perubahan inventori menjadi penyumbang terkecil PDRB pengeluaran dengan kontribusi sebesar 0,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, dari 3,92 persen pada tahun 2024 menjadi 3,03 persen di tahun 2025.

TABEL 30

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2020-2025

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 130,47	1 096,49	1 179,67	1.257,24	1.280,41	1.338,88
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	260,46	288,55	321,18	338,60	364,13	385,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	5,47	5,71	6,07	6,30	6,41	6,42
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	16,54	16,61	17,46	18,12	19,19	19,59
F	Konstruksi/Construction	676,48	713,60	772,00	829,96	861,47	870,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1 452,13	1 539,08	1 727,09	1.871,86	1.998,33	2.142,89
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	488,46	519,42	589,45	660,45	716,52	768,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	278,37	280,22	310,19	334,98	359,79	385,37
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	69,22	75,39	81,70	85,38	86,48	88,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	136,70	150,26	168,62	181,92	191,66	196,92
L	Real Estat/Real Estate Activities	278,76	288,18	306,42	318,70	327,21	330,67
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	31,16	31,73	36,67	39,54	41,88	44,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	453,54	452,07	457,65	482,29	527,07	542,98
P	Jasa Pendidikan/Education	235,98	246,62	265,24	279,92	294,98	317,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	72,96	72,81	79,12	91,98	100,60	108,91
R,S,T, U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	18,62	19,24	21,70	23,42	25,31	27,62
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product		4 644,67	5 531,54	5 531,54	5 796,11	6.820,80	7.575,00

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2026

TABEL 31

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (milyar Rupiah), 2020-2025

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	701,55	677,60	690,93	706,56	725,19	730,15
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	156,02	166,99	173,82	180,50	187,76	192,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,66	4,84	5,03	5,14	5,23	5,18
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	11,59	11,50	11,98	12,26	12,51	12,47
F	Konstruksi/Construction	395,76	406,92	414,97	431,27	443,86	443,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	937,21	983,13	1 038,77	1.093,74	1.145,55	1.202,34
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	307,58	318,66	341,79	364,76	383,70	406,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	179,16	180,15	196,12	208,05	219,42	228,70
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	58,09	62,63	65,94	67,87	68,51	69,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	87,14	92,27	96,65	101,16	106,32	107,67
L	Real Estat/Real Estate Activities	167,57	169,16	174,40	178,61	182,40	187,35
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	19,42	19,41	21,13	21,97	22,94	23,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	264,16	263,54	263,20	269,76	280,47	283,41
P	Jasa Pendidikan/Education	172,94	180,33	188,55	195,80	203,62	211,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	46,23	45,58	47,77	50,36	52,61	56,14
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	12,53	12,89	13,94	14,50	15,11	16,15
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	3 521,72	3 595,70	3 745,07	3.902,42	4.055,30	4.178,00

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2026

TABEL 32

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2020-2025

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	20,17	18,92	18,61	18.43	17,78	17,68
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	-0
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,65	4,98	5,07	4.96	5,06	5,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,10	0,10	0,10	0.09	0,09	0,08
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,30	0,29	0,28	0.27	0,27	0,26
F	Konstruksi/Construction	12,07	12,31	12,18	12.17	11,96	11,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	25,91	26,55	27,24	27.44	27,75	28,29
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	8,71	8,96	9,30	9.68	9,95	10,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	4,97	4,83	4,89	4.91	5,00	5,09
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1,23	1,30	1,29	1.25	1,20	1,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,44	2,59	2,66	2.67	2,66	2,60
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,97	4,97	4,83	4.67	4,54	4,37
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,56	0,55	0,58	0.58	0,58	0,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	8,09	7,80	7,22	7.07	7,32	7,17
P	Jasa Pendidikan/Education	4,21	4,25	4,18	4.10	4,10	4,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,30	1,26	1,25	1.35	1,40	1,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,33	0,33	0,34	0.34	0,35	0,36
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	100	100	100	100	100,00	100,00

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2026

TABEL 33

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut LapanganUsaha (persen), 2020-2025

No.	Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	-0,33	-3,41	1,97	2.26	2,64	0,68
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-0,93	1,32	1,46	1.77	2,44	0,39
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	-2,21	7,03	4,09	3.84	4,02	2,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,95	3,68	3,94	2.37	1,58	-0,91
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	2,26	-0,76	4,17	2.34	2,04	-0,36
F	Konstruksi/Construction	-6,40	2,82	1,98	3.93	2,92	-0,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	-0,90	4,90	5,66	5.29	4,74	4,96
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	-5,58	3,60	7,26	6.72	5,19	5,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	-0,72	0,55	8,86	6.08	5,19	4,23
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	6,87	7,82	5,28	2.93	0,94	1,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,02	5,89	4,74	4.68	5,09	1,28
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,43	0,95	3,10	2.41	2,12	2,72
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-1,73	-0,03	8,86	3.97	4,38	4,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	-0,24	-0,23	-0,13	2.49	3,97	1,05
P	Jasa Pendidikan/Education	2,47	4,27	4,56	3.84	4,00	3,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	-0,72	-1,40	4,81	5.41	4,47	6,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	-3,92	2,89	8,09	4.07	4,22	6,88
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	-1,36	2,10	4,15	4.20	3,92	3,03

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2026

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Sibolga menetapkan program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikelompokkan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Sibolga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat daerah/kota. Pada tingkat daerah acuan utama perencanaan pembangunan tertuang dalam RPJPD Kota Sibolga yang merupakan program pembangunan secara makro untuk rentang waktu 20 tahun. Selanjutnya RPJPD Kota Sibolga dijabarkan dalam RPJMD Kota Sibolga untuk rentang waktu 5 tahunan. Baik RPJPD dan RPJMD Kota Sibolga mengacu dan mempedomani RPJPD Provinsi, RPJM Provinsi dan RPJP dan RPJM Nasional.

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
Pendidikan					
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	83.01	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil	
		Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan			
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	87.05	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil	
		Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan			
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100.00	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil	
		Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah			
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	48.64	Sumber data dari Dinas Pendidikan	

	dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet			
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik Jumlah ruang kelas	59.08	Sumber data dari Dinas Pendidikan	
Kesehatan					
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N Jumlah ibu melahirkan tahun N	0.00	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	4.79	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	92.43	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	95.71	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	99.94	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	90.79	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun	100.00	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	

		waktu satu tahun ajaran Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama			
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	84.14	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	97.02	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	66.61	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100.00	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100.00	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	100.00	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	

1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100.00	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
Pekerjaan Umum					
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha) Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0.00	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km) Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	68.13	Sumber data dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N Jumlah total penduduk kabupaten/kota	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah rumah di kabupaten/kota	37.25	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha) Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	0.00	Menggunakan Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha) Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0.00	Menggunakan Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya Jumlah Persetujuan Bangunan	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	

		Gedung yang berlaku			
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	0.00	Menggunakan Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha) Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	0.00	Menggunakan Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	0.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah	0.00	Menggunakan Surat Keterangan dari BPBD Kota Sibolga	

		kabupaten/kota = 3			
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Satpol PP Kota Sibolga	
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan / Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	54.55	Pembilang dan Penyebut dari Satpol PP Kota Sibolga	
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana / Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	13.59	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana / Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	100.00	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap / Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Satpol PP Kota Sibolga	
Sosial					
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	87.88	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	0.00	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	36.60	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial Kota Sibolga	
1.f.5	Persentase korban	Jumlah korban bencana alam, sosial	100.00	Pembilang dan	

	bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota		Penyebut dari Dinas Sosial Kota Sibolga	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	75.00	Pembilang dan Penyebut dari Dina Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan	
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Jumlah perusahaan	19.86	Pembilang dan Penyebut dari Dina Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan	
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	77.71	Pembilang dan Penyebut dari Dina Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PMKPPPA	
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PMKPPPA	
Pangan					
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota Target jumlah cadangan pangan	0.00	Memakai surat keterangan dari Dinas PKPP.	
Pertanahan					
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah	84.13	Pembilang dan Penyebut dari	

	tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Daerah Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah		Dinas PU dan PR	
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR	
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	0.00	Surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
Lingkungan Hidup					
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	100.00	Pembilang dan Penyebuty dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	82.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH	
Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	99.95	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	98.89	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan 2 dokumen	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	98.76	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan	

		melaporkan		Capil	
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil	
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan					
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	Tuntas hasil 100%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA	
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	Tuntas hasil 100%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA	
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku Jumlah kerja sama desa yang ditangani	Tidak dapat dilaksanakan	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	77.92	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PP dan KB	
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	15.69	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PP dan KB	
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	29.65	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PP dan KB	
Perhubungan					
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	0.55	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perhubungan	
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perhubungan	
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0.00	Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan Kota Sibolga	
Komunikasi dan Informatika					
2.j.1	Persentase Perangkat	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan	100.00	Pembilang dan	



	Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika / Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah		Penyebut dari Dinas Kominfo Kota Sibolga	
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik	75.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kominfo Kota Sibolga	
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota / Jumlah penduduk	24.94	Pembilang dari Dinas Kominfo dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga	
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya / Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	15.01	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) / Σ Usaha mikro	3.44	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	
Penanaman Modal					
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N-Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota / Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	-72.86	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota / Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	7.54	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
Kepemudaan dan Olahraga					
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota / Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	35.25	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Parpora Kota Sibolga	
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota / Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	0.85	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Parpora Kota Sibolga	
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0.00	Surat Keterangan dari Dinas Parpora	

	masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)			
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Parpora Kota Sibolga	
Statistik					
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	0.00	Surat Keterangan dari Dinas Kominfo Kotaa Sibolga	
Persandian					
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	0.00	Surat Keterangan dari Dinas Kominfo Kotaa Sibolga	
Kebudayaan					
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	28.57	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Pendidikan Kota Sibolga	
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1 Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	0.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Pendidikan Kota Sibolga	
Perpustakaan					
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100	58.11	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100	15.72	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
Kearsipan					
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T = (a + i + s + j)/4	82.77	Sumber data dari Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	
3. Urusan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan					
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	100.00	Pembilang dan Penyebut dari	

		Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)		Dinas PKP dan P	
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	44.57	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKP dan P	
Pariwisata					
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) / Realisasi investasi Tahun N	100.00	Pembilang dan penyebut dari Disparpora Kota Sibolga	
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1 / Jumlah wisatawan asing tahun N-1	-78.45	Pembilang dan penyebut dari Disparpora Kota Sibolga	
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1 / Jumlah wisatawan tahun N-1	-13.41	Pembilang dan penyebut dari Disparpora Kota Sibolga	
Pertanian					
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 / Produksi tanaman pangan tahun N-1	0.00	Surat Keterangan , dari Dinas PKP dan P, Tidak adanya lahan pertanian di Kota Sibolga	
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 / Produksi hortikultura tahun N-1	0.00	Surat Keterangan , dari Dinas PKP dan P, Tidak adanya lahan pertanian di Kota Sibolga	
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1 / Produksi komoditas peternakan tahun N-1	-0.56	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga	
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini / Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga	
Kehutanan					
3.d	Tidak ada OutCome nya		"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019	
Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin / Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019	

Perdagangan					
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku / Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	39.60	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
Perindustrian					
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	0.00	Surat Keterangan dari Dinas Perindag Kota SIbolga	
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional / Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	27.27	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 / Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	0.00	Surat Keterangan dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri / Total investasi seluruh sektor	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
Transmigrasi					
3.h	Tidak Perlu diisi			tidak ada daerah transmigrasi	
Fungsi Penunjang Pemerintahan					
Perencanaan					
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan / Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	64.71	Pembilang dan Penyebut dari Bappeda Kota Sibolga	

Keuangan					
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	34.74	Pembilang dan Penyebut dari BPKPAD Kota Sibolga	
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Realisasi pendapatan daerah	16.42	Pembilang dan Penyebut dari BPKPAD Kota Sibolga	
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	55.80	Pembilang dan Penyebut dari BPKPAD Kota Sibolga	
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	29.96	Pembilang dan Penyebut dari BPKPAD Kota Sibolga	
Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78.13	Pembilang dan Penyebut dari Badan Kepegawaian Daerah	
Penelitian dan Pengambangan					
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	50.00	Sumber data dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
Fungsi Pengawasan					
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	2	2.00	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	2	2.00	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai2/Nilai 3/ Nilai 4/Nilai 5	2	2.00	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1 Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	42.03	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	

Pengadaan					
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	13.33	Pembilang dan Penyebut dari Bagian Pembangunan Setdakot Sibolga	
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	17.05	Pembilang dan Penyebut dari Bagian Pembangunan Setdakot Sibolga	
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	16.16	Pembilang dan Penyebut dari Bagian Pembangunan Setdakot Sibolga	
Hubungan dengan Perwakilan Daerah					
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Tepat	Sumber data dari BPKPAD Kota Sibolga	
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N / Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	58.33	Pembilang dan Penyebut dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sibolga	
Pelayanan Publik					
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	92.61	Pembilang dan Penyebut dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sibolga	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA

2.3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

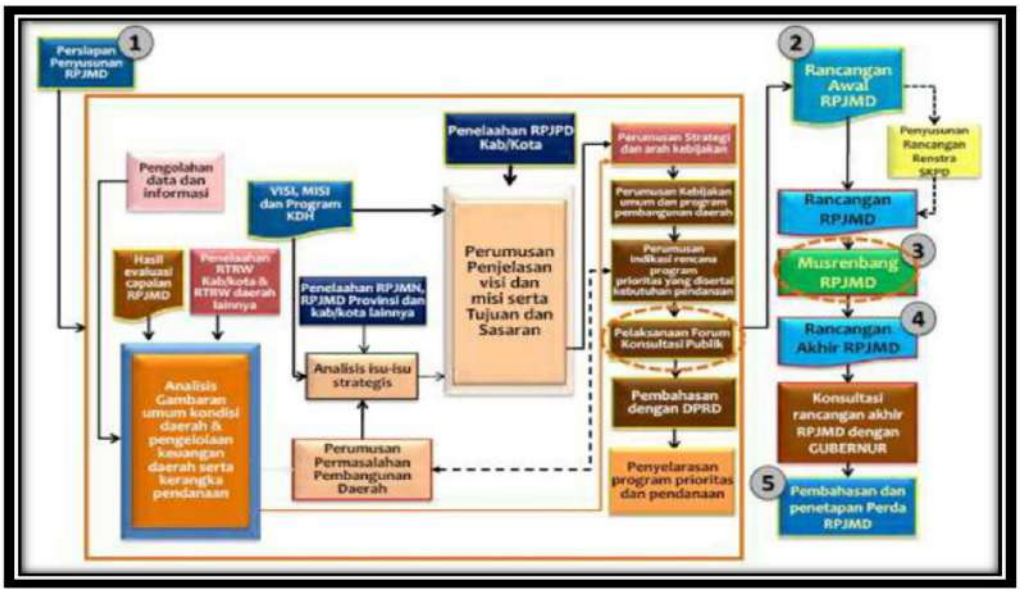
Analisis Capaian Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahn yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah dalam rangka untuk memenuhi target kinerja dari setiap Indikator Kinerja Sasaran (outcame) dan Indikator Kinerja (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam

pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJ PD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah “Kota Jasa yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (NAULI)” di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, yang terdiri dari 6 (enam) Misi yang di dalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJMPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020) dan Tahap IV (2021-2025). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penting lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga ini adalah pemahaman awal posisi Kota Sibolga yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar III.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mendepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

MISI 1	:	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG *GOOD GOVERNANCE* DENGAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
Sasaran	:	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
Strategi	:	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme akuntabel yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi,

inovatif, koordinatif, responsif, akan lebih mengedepankan pelayanan prima berbasis sistem informasi pemerintahan elektronik (*E-governance*).

MENINGKATNYA KUALITAS SDM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL;

STRATEGI :

- Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme serta secara bertahap akan meningkatkan tambahan bagi ASN sesuai degan tanggungjawab dan beban kerja.
- Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
- Melakukan Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kegiatan investasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

MISI 2 : MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN SEHINGGA DAPAT MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR.

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

MEMBERIKAN / MENINGKATKAN SUBSIDI/ BANTUANIURAN BPJS BAGI KELUARGA KURANG MAMPU DAN MEMPERMUDAH PENGURUSAN PERSYARATAN ADMINISTRASI UNTUK MENJADI PESERTA BPJS.

STRATEGI :

- Memberikan penyuluhan kesehatan/ pola hidup masyarakat kurang mampu. Dengan sosialisasi tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah SakitUmum dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas kesehatan yang lebih baik.
- Melakukan Penataan Pemukiman dan sarana prasarana. Khusus MCK dengan memberikan bantuan pembangunan toilet septic tank yang layak di masing-masing rumah penduduk secara bertahap.

- Memperbaiki bangunan drainase jalan dan membangun jalan drainase baru di pemukiman warga sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat tidak dapat menampung aliran air dengan baik.
- Memberikan penyuluhan secara kontinu untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang penting dan bermanfaatnya membuang sampah di tempatnya, dan pengelolahan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat.

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG PROPORSIONAL BERBASIS JUMLAH PENDUDUK UNTUK MENATA PEMUKIMAN WARGA AGAR TERCIPTANYA LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG TERANG DENGAN MEMANFAATKAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN KOTA PINTAR (*SMART CITY*).

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;

Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;
II. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Strategi :

- Melaksanakan program pembangunan yang proporsional dengan berbasis jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga capaian pembangunan yang direncanakan/ diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi.
- Melaksanakan program perencanaan tata ruang dan pengawasan serta pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung kota dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perdagangan dan jasa.
- Pembangunan dan penataan Infrastruktur kota yang berkualitas dengan mengedepankan input perencanaan yang komprehensif (luas dan lengkap).
- Melakukan program pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan dengan sistem pemberdayaan dan swakelola masyarakat bagi kawasan padat pemukiman khususnya pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong drainase.
- Melakukan pembangunan dan perbaikan seluruh trotoar jalan di Kota Sibolga sehingga bermanfaat bagi pengguna jalan untuk mendukung mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota tujuan wisata yang nyaman bagi pejalan kaki.
- Melakukan pemasangan dan penataan lampu jalan disetiap lingkungan.

- Melakukan perbaikan Infrastruktur pasar dan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan lainnya. Pembenahan pelabuhan ASP Sibolga yang menunjang kegiatan kepulauan Nias. Perdagangan barang dan sarana tranportasi ke daerah.

MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.

Tujuan : Mewujudkan Pendidikan Berkualitas;

Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;

Strategi :

- Menyiapkan Anggaran untuk subsidi wajib belajar 9 tahun bagi keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam pembiayaan sekolah anak mulai dari pakaian, sepatu, alat tulis dan beban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang berprestasi sampai ke tingkat perguruan tinggi.
- Meningkatkan kesejahteraan guru honor, tenaga kependidikan dan guru berbasis agama.
- Menertibkan lokasi - lokasi permainan yang mengganggu aktivitas pelajar dengan mengatur jam operasionalnya dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
- Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, pelajar yang bermain *Game* Warnet.
- Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.

MISI 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Tujuan : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial;

Sasaran : Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin;

Strategi :

- Memberikan pelatihan - pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kepada masyarakat agar ikan sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk kuliner, baik sebagai makanan basah maupun makanan kering seperti kerupuk ikan dan sebagainya.

- Memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang telah mampu membuka usaha.
- Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang berimplikasi kepada terbukanya peluang pasar bagi produk – produk.
- Membuka akses pasar dengan mendirikan BUMD Sandang untuk memudahkan pedagang memenuhi kebutuhan dagangan serta menampung penjualan produk-produk UMKM dengan membangun pasar singgah dan menjalin kerjasama dengan pengusaha ritel waralaba seperti: Indomaret, Alfamidi, Transmart dan lain-lain.

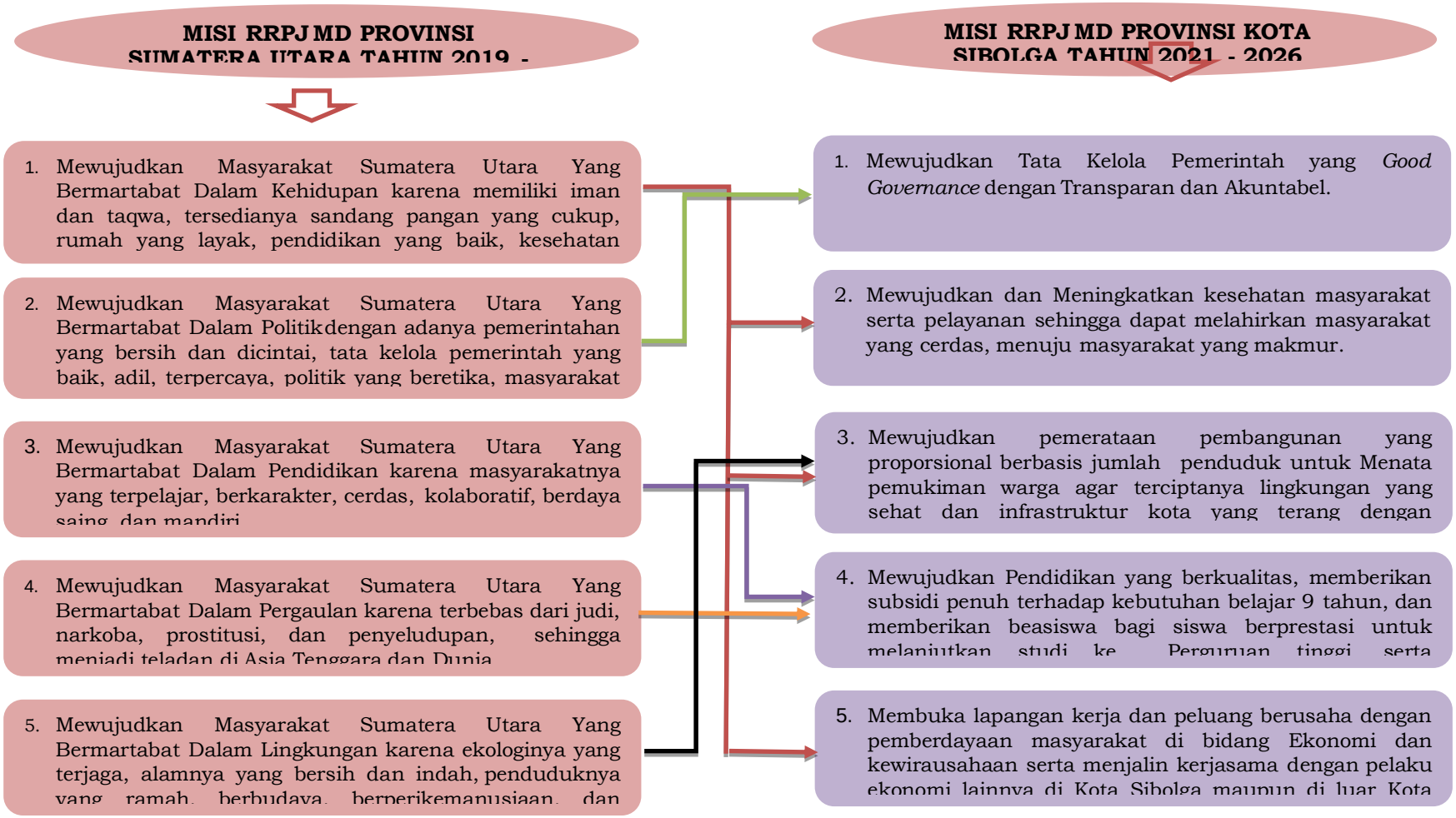
Tabel 34
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang *Good Governance* Dengan Transparan Dan Akuntabel.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Daya Saing Daerah.
Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Serta Pelayanan Sehingga Dapat Melahirkan Masyarakat Yang Cerdas, Menuju Masyarakat Yang Makmur.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat.	Indeks Pembangunan Manusia.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	Indeks Kesehatan. Pola Pangan Harapan (PPH).
VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				

Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Proporsional Berbasis Jumlah Penduduk Untuk Menata Pemukiman Warga Agar Terciptanya Lingkungan Yang Sehat Dan Infrastruktur Kota Yang Terang Dengan Memanfaatkan Tata Ruang Yang Berwawasan Kota Pintar (*Smart City*).	Terwujudnya Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan.	Indeks Resiko Bencana.	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). RPPLH Kota Sibolga. Air Minum Layak dan Berkelanjutan. Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengurangan Luasan Kumuh.
Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh Terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, Dan Memberikan	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas.	Indeks Pembangunan Manusia.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	1. Indeks Pendidikan.
VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Untuk Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.				
Membuka Lapangan Kerja Dan Peluang Berusaha Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Ekonomi Dan Kewirausahaan Serta Menjalin Kerjasama Dengan Pelaku Ekonomi Lainnya Di Kota Sibolga Maupun Di Luar Kota Sibolga.	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial.	Pertumbuhan Ekonomi. Gini Rasio. Angka Kemiskinan. Angka Pengangguran.	Meningkatnya pendapatan masyarakat. Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin. Mempermudah pelayanan Perizinan dan Investasi.	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta). Pendapatan Daerah. Indeks Pembangunan Gender. Indeks Kesetaraan Gender. Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif. Izin yang diterbitkan.

Sumber : Data diolah

Gambar 3.2 Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026



Sumber : Data diolah

KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegitan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, organisasi disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas (Arsenia, 2011). Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika (Martono, 2010).

Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terutama terkait dengan peraturan skala nilai peringkat Kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis.

Dalam penyusunan LKIP ini, evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan mempergunakan skala ukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah, dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 35
Kriteria Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76%≤ 90	Tinggi
3	66%≤ 75%	Sedang
4	51%≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Dalam tabel kriteria penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persayaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi Kinerja Program Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yang dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator atas makna indikator ada dua jenis:

- Indikator bermakna positif, artinya: Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek:

$$\frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\ \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya: Jika semakin besar realisasi berartisemakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{Realisasi-(Realisasi – Target)}}{\text{TARGET}} \times 100\ \%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

Nilai dibawah 55 : Kurang
Nilai > 55 s/d 80 : Cukup
Nilai > 80 s/d 95 : Baik
Nilai > 95 s/d 100 : Sangat baik

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai capaian kinerja digunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJMD dan RKPD.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Sibolga 2021-2026 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021, menetapkan Tahun 2021 sebagai tahun dasar pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai tolak ukur pelaksanaan Visi dan Misi Wali Kota. RPJMD tersebut memuat target kinerja Wali Kota Sibolga untuk 5 tahun kedepan. Target tersebut di uraikan dari misi pertama sampai dengan misi kelima.

C1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel							
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	N/A	-	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,42	93,07	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B (60,00)	B (60,09)	100,15	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,90	102,23	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	3,85	3,65	94,80	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,00	48,73	79,09	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayananan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur							
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	100	100	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (*Smart City*).							
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	137,80	191,35	70,01	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	75,16	109,31	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	78	78,35	100,49	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.							
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80	77,52	Tidak tercapai	Bappeda
			Indeks Pendidikan	14,13	13,78	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.							
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	82	66,58	81,20	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	5,20	3,03	58,27	Bappeda
			Gini Ratio	0,270	0,38	71,52	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	72,05	82.12	113,98	Bappeda/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	81.155.18	82.119.	101,19	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,80	9,02	108,64	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	3000	3023	99,24	Bappeda/BPS

C2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025			SUMBER DATA
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel									
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC (56,88)	B	N/A	N/A	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,73	2,24	2,42	2,6	2,42	93,07	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	CC (53,51)	CC (54,60)	CC (56,77)	B(60,00)	B (60,09)	100,15	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	79,53	85,40	84,76	85,00	86,90	102,23	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	2,91	3,08	3,08	3,85	3,65	94,80	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	0,60	61,00	48,73	79,88	Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025			SUMBER DATA
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Indeks Inovasi Daerah	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	Inovatif (38,64)	Inovatif	Inovatif	100	Bappeda
	Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayananan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur									
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (*Smart City*).									
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	167,20	167,20	165,75	137,80	191,35	70,01	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,63	64,90	47,42	68,76	75,16	109,31	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	77,75	78	78,35	100,49	PU, PKPLH
	Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.									
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	74,74	77,07	77,52	78	78,11	100,14	Bappeda
			Indeks Pendidikan	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru	13,78	14,13	11,95	84,57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.									
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	81,03	82	66,58	81,19	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	4,15	4,20	3,92	5,20	3,03	58,27	Bappeda
			Gini Ratio	0,3460	0,2460	0,377	0,270	0,38	71,52	Bappeda /BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	-	74,74	72,01	72,05	82,12	113,98	Bappeda /BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	Belum ada (indek baru)	Belum ada (indeks baru)	78.494,11	81.155.18	82.119.	101,19	Bappeda /BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	11,47	10,05	11,39	9,80	9,02	108,64	Bappeda /BPS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025			SUMBER DATA
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
			Angka Pengangguran	2882	3217	3107	3000	3023	99,24	Bappeda /BPS

C3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (2025)	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparansi dan Akuntabel						
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	B	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,42	2,60	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B (60,00)	B	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,90	77,55	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	3,65	2,700	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	48,73	Tidak ada (indeks baru)	BPKAD
			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Tidak ada (indeks baru)	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayananan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur						
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	Tidak ada (indeks baru)	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (*Smart City*).						
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	191,35	129,40	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,16	69,21	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	78,35	Tidak ada (indeks baru)	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.						
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	78,11	75,08	Bappeda
			Indeks Pendidikan	11,95	Tidak ada (indeks baru)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.						
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	66,58	Tidak ada (indeks baru)	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	3,03	5,55	Bappeda
			Gini Ratio	0,38	0,265	Bappeda/BPS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (2025)	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	82.12	73,32	Baapeda/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	82.119	Tidak ada (indikator baru)	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,02	9,50	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	3023	448.525 (Provinsi)	Bappeda/BPS

C4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	STANDAR NASIONAL/PROVINSI	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparansi dan Akuntabel						
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,42	3,86 (Provinsi)	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B (60,09)	B (Provinsi)	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,90	85,59 (Provinsi)	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	3,65	3,82	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	48,73	N/A	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	(inovatif)	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayananan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur						
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	-	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (*Smart City*).						
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	191.35	147,95 (Nasional)	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,16	_	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	78,35	-	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.						
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	78,11	76,47 (Provinsi)	Bappeda
			Indeks Pendidikan	11,95	11,79 (Provinsi)-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	STANDAR NASIONAL/PROVINSI	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	66,58	72,00 (Provinsi)	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	3,03	4,53 (Provinsi)	Bappeda
			Gini Ratio	0,38	0,295 (Provinsi	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	82.12	N/A	Bappeda/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	82.119.	78.31 (Provinsi)	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,02	7,24 (provinsi)	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	3000	448.525	Bappeda/BPS

C5. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparansi dan Akuntabel									
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	N/A	N/A	Pemerintah Kota Sibolga telah membangun Reformasi Birokrasi General maupun Tematik tahun 2025 sesuai dengan tema yang ditentukan; Penyusunan Rencana SAksi Baik General dan Tematik berdasarkan hasil rekomendasi penilain RB tahun 2024 dan sesuai dengankebutuhan tahun 2025; Pemerintah Kota Sibolga melakukan pengukuran capaian rencana aksi secara periodek (triwulan) Pemerintah Kota Sibollga telah berusaha melakukan penguatan Reformasi Birokrasi Kota Sibolga, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dan nilai Reformasi Birokrasi Kota Sibolga dengan langkah; Penetapan target kegiatan utama sepenuhnya berbasis baseline tahun sebelumnya; Penyusunan Renaksi dilakukan berpedoman berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumya, dan berupa intervensi terhadap perioritas permasalahan utama; Melakukan asistensi kepeda OPD dalam hal penyusunan Rencana Akasi; Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian Rencana Aksi secara berkala.		Bagian Organisasi Setdakot
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B (60,00)	60,09	100,15	Dari hasil Penilaian SAKIP menunjukkan bahwa Implementasi Akuntabilitas Kinerja 30 Oranisasi Perangkat Daerah Kota Sibolga dan pada Pemerintah Darah Kota Sibolga menunjukkan Kinerja Baik, walaupun disebagian OPD masih perlu perbaikan dan komitmen yang lebiih serius. Penilaian berdasarkan 4 kompenen antara lain : Komponen Perencanaan Kinerja : mengalami perbaikan sering dengan kenaikkan nilai dari 18,77 point tahun 2024 menjadi 19,59 point tahun 2025; Komponen Pengukuran Kinerja; pada komponen ini mengalami perbaikan seiring dengan kenaikan nilai dari 16,84 point tahun 2024 menjadi 17,71 point pada tahun 2025; Komponen Pelaporan kinerja: pada komponen ini ada perbaikan seiring dengan perbaikan capaian nilai dari 9,80 point tahun 2024 menjadi 10,65 point pada tahun 2025; Komponen Evaluasi Internal: pada komponen ini ada perbaikan seiring dengan perbaikan capaian nilai pada komponen ini yakni 11,96 point pada tahun 2024 menjadi 12,14 point pada tahun 2025.		Bagian Organisasi Setdakot

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Disamping itu ada langkah langkah yang dilakukan untuk mencapai indeks antara lain: Membangun Kerja sama Tim SAKIP Kota Sibolga antara Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setdakot Sibolga, dimana setiap tim melakukan penguatan kualitas terhadap tugas masing-masing. Mempedomani Peraturan tentang Penyusunan SAKIP; Pemko Sibolga melalui Bagian Organisai Setdakot Sibolga telah melakukan Pendampingan terhadap OPD dengan menhadirkan tenaga ahli dari *SMART* ID guna untuk peningkatan mutu Dokumen SAKIP yang meliputi : Dokumen Perencanaan, Pengukuran Kinerja serta Pelaporan Melakukan monitoring terhadap OPD perihal kegiatan upload dokumen SAKIP tahun 2025 ke ESR E-SAKIP KemenpanRB sesuai dengan dokumen yang diminta dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan . Tim SAKIP Kota Sibolga melalui Bagian Organisasi Setdakot Sibolga selalu melakukan koordinasi kepada LO dari Kemenpan RB guna untuk menamabah referensi untuk meningkatkan kualitas penyusunan SAKIP Kota Sibolga. Untuk mencapai target indikator tahun 2025 telah berupaya dengan maksimal, walaupun di sebagian OPD ketersedian anggaran sangat minim untuk mendukung capaian indikator tersebut.		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,90	102,23	1.Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 yaitu 86,90 yang merupakan nilai rata-rata dari 49 Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2025, yang berarti mutu pelayanan masuk dalam kategori baik dan mengalami peningkatan dari tahun 2024. 2.Dari 9 usur pelayanan publik yang diukur oleh 49 Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat, rata-rata unsur yang diukur masuk dalam Kategori Baik. 3.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat. 4.Meningkatnya komitmen Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) dalam menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat sebagai upaya perbaikan layanan..		Bagian Organisasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	3,85	3,65	94,80	Dari hasil pengukuran diatas berarti Pemko Sibolga belum mampu mencpai kemandirian daerah berdasarakan beberapa pilar; Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan adalah: 1.Kelemahan tata kelola data (*statistic sectoral*). 2. Rendahnya pilar ekosistem. 3. Inovasi. 4. Stabilitas Makroekonomi dan lingkungan bisnis.	Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah : 1.Penguatan Brida yakni memastikan setiap kebijakan berbasis data dan riset (*Evidance-Bassed Policy*). 2.Melakukan audit data sektoral yaitu rekonsiliasi data antara pemerintah daerah dengan BPJS dan Kementerian terkait secara berkala. 3.Fokus pada pilar unggulan yakni jika daerah memiliki potensi pelabulan atau parawisata fokus meningkatkan.	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,00	48,73	79,88	1.Untuk mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 6 dimensi utama yaitu 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, 2. Kualitas anggaran belanja, 3. Transparansi pengelolaan keuangan, 4. Penyerapan anggaran, 5. Kondisi keuangan daerah dan 6. Opini BPK atas LKPD, dimana bukti dukung untuk dimensi 2 dan 5 kurang lengkap sehingga mempengaruhi nilai; 2.OPD kurang proaktif, dapat dilihat dari penginputan data dari masing-masing OPD ke Aplikasi kurang maksimal, kesesuaian perencanaan dan penganggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia.	Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan dalah : Melakukan evaluasi dan tindaklanjut terhadap hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga; Membangun komitmen bersama dan koordinasi untuk penguatan dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga; Mengupayakan melengkapi data dukung pengukuran 6 dimensi, terutama pada dimensi 2 dan 5.	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	100	Berdasarkan hasil niali ditas berarti Pemerintah Kota Sibolga telah berhasil melakukan Inovasi dengan beberapa kebijkan : Penguatan beberapa Dinas seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Dinas Sosial Kota Sibolga, Rumah Sakit FL. Tobing Kota Sibolga dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga untuk membuat Inovasi Pelayanan. Berupaya melengkapi data dan mengisi 20 indikator serta mengupload bukti dukung di portal BSKDN. Untuk perbandingan data capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga hanya dapat disajikan 2 tahun, karena Indeks Inovasi Daerah baru dijadikan indikator Pemko Kinerja Utama Sibolga tahun 2024.		Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayananan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur									
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	100	100	Dari hasil Indeks Kesehatan 100 % berarti Kota Sibolga telah berhasil melalui beberapa Indikator kesehatan dan dengan kata lain Pemko Sibolga berhasil pembangunan kesehatan; Dari Penguatan layanan dasar (Preventif dan Promotif) orientasinya bukan hanya mengobati orang sakit, fokus utama harus bergeser pada pencegarah; Transformasi Puskesmas : Mengaktifkan Puskesmas		Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							sebagai pusat edukasi dan bukan sekedar tempat berobat. Posyandu Aktif : Memastikan layanan kesehatan menjangkau Lingkungan terutama untuk pemantauan tumbuh kembang anak (stunting) dan kesehatan lansia; Immunisasi Dasar Lengkap : menjamin cakupan vaksinasi mencapai seluruh balita tanpa kerkecuali; Intervensi masalah gizi (Stunting dan Wasting) Gizi buruk adalah hambatan terbesar salam menaikkan Indeks Kesehatan : Program pemberian makanan tambahan (PMT) : focus pada pangan local kaya protein hewani Edukasi 1000 Hari pertama Kehidupan (HPK) : intervensi sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun; 4. Perbaikan Lingkungan (Sanitasi & Air Bersih) Indeks kesehatan sangat bergantung pada faktor eksternal: *Open Defecation Free* (ODF): Memastikan 100% masyarakat tidak buang air besar sembarangan melalui penyediaan jamban sehat. Akses Air Minum Layak: Memastikan air yang dikonsumsi masyarakat bebas kontaminasi bakteri. 5. Pemanfaatan Teknologi & Data a. Digitalisasi Data Kesehatan: Menggunakan aplikasi (seperti Satu Sehat) untuk memantau kesehatan warga secara *real-time* sehingga intervensi bisa lebih cepat. b. Analisis Data IKU: Memastikan setiap indikator dalam LKjIP (yang kita bahas sebelumnya) dipantau per kuartal, bukan hanya di akhir tahun. 6. Penguatan Jaminan Kesehatan (UHC) a *Universal Health Coverage* (UHC): Memastikan 100% warga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan agar tidak ada hambatan biaya saat membutuhkan layanan medis.		
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (*Smart City*).									
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	137,80	191,35	70,01	Pada sasaran menurunnya Resiko Bencana dengan indikator Kinerja Utama Indeks Resiko Bencana (IRB) tahun 2025 memiliki target 137,80, sedangkan realisasi adalah 191,35. Hal ini berarti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan, namun sudah mampu menurunkan indeks resiko bencana ditahun 2025 ini, dimana indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Sibolga mengalami penguatan dari 0,33 ke 0,36. Penurunan Indeks Resiko Bencana juga dipengaruhi dengan meningkatnya nilai Indeks Kapasitas Daerah (IKD) kota Sibolga dari 0,28 menjadi 0,33.	Menyelesaikan Dokumen-dokumen kebencanan yang dibutuhkan; Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat; Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPBRB), Keltana (Kelurahan Tanggap bencana), Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana), SMAB (Sekolah Madrasah Aman Bencana); Peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam kesiapsiagaan bencana melalui sosialisasi yang dilakukan secara mandiri;	BPBD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Ada beberapa hal yang mendasari sehingga Indeks Resiko Bencana tidak tercapai antara lain: Adanya pemutahiran *baseline* pada komponen kerentanan , sehingga nilai IRB tahun 2025 tidak untuk dibandingkan dengan nilai IRB tahun 2025 tahun 2015-2024; Belum selesai menyiapkan dokumen –dokumen kebencanaan turunan dan dokumen kajian Resiko Bencana (KRB) yang mendukung peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah yang dapat mempengaruhi nilai Indeks Resiko Bencana; Kurangnya saranan dan prasarana informasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat; Belum terbentuknya penguatan kawasan seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPBRB), Keltana (Kelurahan Tanggap bencana), Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana), SMAB (Sekolah Madrasah Aman Bencana.	Peningkatan anggaran BPBD di Program Penanggulangan Bencana.	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	75,16	109,31	1. Pemko Sibolga telah melakukan Proses pengolahan data pemetaan untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan; tahun 2025 2. Untuk mendapatkan capaian nilai Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2025 terdapat 3 komponen, Indeks Kualitas air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dinama ketiga komponen tersebut dapat diukur, dimana dari hasil pengukuran/pengujian didapatkan hasil : untuk Indeks Kualitas Air target 54,4 dengan realisasi 79,42, untuk Indeks Kualitas Udara dari target 91,94 realisasi 83,70 dan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan target 49,20 dengan realisasi 52,07; 3. Pemerintah Kota Sibolga telah berhasil memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Kota Sibolga melalui upaya sosialisasi dan pelaksanaan penanaman pohon dan tamanan pada halaman perumahan ,perkantoran, dan perbukitan demi menciptakan ruang terbuka hijau.		PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	78	78,35	100,49	Indeks Infrastruktur tahun 2025 mencapai target tahun 2025, menggambarkan bahwa Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Sibolga mengalami peningkatan, dimana berkurangnya panjang jalan yang rusak berat dan rusak ringan dari 23,19 KM menjadi 20,09 KM. Bahwa persentase rumah tangga yang memiliki air minum layak dan berkelanjuta, serta persertase rumah tangga yang bersanitasi di Kota Sibolga mengalami peningkatan. Serta rumah tangga yang dialiri listrik di Kota Sibolga mencapai 100 persen.		PU, PKPLH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.									
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	78	78,11	100,14	Indikator Pembanguanan Manusia tahun 2025 mencapai target: menggambarkan bahwa, tingkat kesehatan masyarakat di Kota Sibolga kategori baik, seiring dengan capaian Indeks Kesehatan Kota Sibolga mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan, Pendapatan Perkapita juga melampaui target yang ditetapkan tahun 2025, walaupun Indeks Pendidikan mengalami tren menurun dari tahun 2024. Akan tetapi Pemerintah Kota Sibolga tetap berupaya untuk tetap memperhatikan pentingnya pendidikan melalaui upaya memberikan bantuan beasiswa kepada siswa berprestasi.		Bappeda
			Indeks Pendidikan	14,13	11,95	84,57	Hasil Indeks Perndidikan 11,95 merupakan hasil rata-rata dari lama sekolah dan rata-rata Harapan sekolah di Kota Sibolga. Indeks Pendidikan tidak mencapai target karena dipengaruhi : Faktor ekonomi dan faktor sosial; menpengaruhi tingkat kemampuan sebagian penduduk Kota Sibolga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi; Faktor Kebijakan Dari Kementerian Pendidikan, dimana saat ini Kabupaten /Kota tidak lagi mengelola pendidikan tingkat SMA, sehingga berpengaruh dengan harapan lama sekolah; Keterbatasan perguruan tinggi di Kota Sibolga untuk menjadi alternatif pilihan dari perguruan tinggi yang ada saat ini,	Pemerintah Kota Sibolga tahun 2025 melakukan upaya untuk meningkatkan Indeks Pendidikan antara lain : Program wajib belajar 13 tahun, bertujuan untuk peningkatan retensi siswa; Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain di luar Kota Sibolga serta memebrikan bantuan Beasiswa kepada kepada masyarakat kurang mampu (nelayan); Pemko Sibolga melalaui Dinas Pendidikan mengoptimalkan Program Pendidkan Paket C.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.									
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	82	66,58	81,19	Indeks Ketahanan Pangan tahun2025 tidak tercapai. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pertanian bahwa ada kelemahan/kekurangan komponen penilian yang dapat mengurangi bobot nilai antara lain : Kota Sibolga tidak memiliki lahan pertanian khusunya untuk produksi beras; Tidak tersedianya cadangan pangan daerah Karna keterbatasan anggran sehingga tidak terlaksana pengawasan keamanan pangan yang bersumber dari tumbuhan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan sementata pengawasan keamanan untuk Hewan dapat terlaksana.	Pemko Sibolga melakukan langkah–langkah untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan, antara lain: Pemko melalui Dinas Kelautan, perikanan dan ketahanan pangan membuat peta ketahanan dan kerentaan pangan di Kota Sibolga; Untuk mengatasi ketersedian beras Pemko Sibolga tahun 2025 telah melakukan Kerja Sama Antara Daerah dengan Pemerintah Tapanuli Selatan; Pemko Sibolga sealu berkoordinasi dengan Kantor BULOG Sibolga untuk mengetahui ketersedian pangan di Kota Sibolga.	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Pertumbuhan Ekonomi	5,20	3,03	58,27	Ada beberapa factor yang menyebabkab pertumbuhan ekonomi tidak tercapai antara lain : Kurangnya ivestasi masuk ke Kota Sibolga; Terjadinya refkofusing anggaran sehingga menurunya kemampuan daerah dalam hal pelaksanaan program-program sector produktif seperti: peningkatan kapasitas modal UMKM, pelatihan-pelatihan dan lainya Terjadinya Bencana alam di Kota Sibolga Nopember 2025 mambawa pengaruh untuk pertumbuhan ekonomi: banyak usaha yang tutup, terjadinya inflasi;	Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya –upaya antara lain: Dengan keterbatasan kemapuan keuangan daerah pemko mengadakan pelatihan bagi pelaku usaha Mikro dan clon pencari kerja Pemerintah Kota Sibolga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat korban bencana dan masyarakat yang berdampak guna untuk menekan inflasi Perbaikan infrstruktur yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor guna memperlancar jalur transfortasi keluar masuk Kota Sibolga	Bappeda
			Gini Ratio	0,270	0,38	71,52	1. Perbandingan persentase masayarakat menengah keatas lebih besar dari pada pertumbahan masayarakt ekonomi ke bawah di Kota Sibolga; 2. Keterbatasan lapagan kerja yang ada di Kota Sibolga tidak banding dengan angka kerja.	Pemerintah Kota Sibolga memperkuat pertumbuhan Usaha mikro dan Kecil demi memperkuat pertumbuhan ekonomi.	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	72,05	82.12	113,98	Penguatan perdagangan barang dan jasa di Kota Sibolga cukup baik; Semakin banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tumbuh di Kota Sibolga, Serta iklim investasi, usaha yang baik, menungkinkan orang untuk bekerja dengan tenang.		Baapeda/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	81.155.18	82.119	101,19	Sektor Perdagangan di Kota Sibolga berjalan dengan baik. Produk yang dihasilkan dari Kota Sibolga mengalami peningaktan dan laku dipasaran dan menjadi produk komuditas tersedia dan laku di derah lain serta menjadi menjadi factor pendukung untuk peningaktan PDRB perkapita Kota Sibolga		Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,80	9,02	108,64	Angka Kemiskinan tahun 2025 mencapai target : Berarti Pemko Kota Sibolga telah menjalankan kebijakan yang tepat sasaran dan peningkatan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, kebijakan tersebut dilakukan melalui program antara lain : Dimana untuk program perlindungan sosial berbasis insivide, keluarga dalam rangka untuk pemenuhan hak dasar seprti PKH. Pemberian pelatihan bagi bagi pencari kerja dan program pelatihan bagi kelompok UMKM melalui dinas Koperasi dan tenaga kerja. Serta adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta membaiknya tarap kesehatan masayarakat Kota Sibolga dapat dilihat dari Indeks Kesehatan yang mencapai target 100 persen.		Bappeda/BPS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Angka Pengangguran	3000	3023	99,24	Dipenhujung tahun 2025 triwulan 4/ November 2025 Kota Sibolga mengalami bencana alam dan tanah longsor mengakibatkan putusnya komukasi, akses jalan dan kelangkaan BBM sehingga berdampak kepada tutupnya sebagain besar usaha transportasi barang, usaha makan minum dan usaha jasa lainya mengakibatkan factor pendukung meningkatnya angka pengangguran di Kota Sibolga dan kurangya minat pengusaha untuk membuka usaha lain dan mengakitabatkan keterbatasan lowongan kerja ;	Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan Pelatihan kerja : Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti Usaha UMKM Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja	Bappeda/BPS

C6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparansi dan Akuntabel											
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	N/A	tercapai	89.200.000	67.645.687	75,83	Efisien (Dengan keterbatasan anggaran Pemko Sibolga dua tahun terkahir mampu untuk meningkatkan capain Indeks Reformasi dengan Capaian 100, % dari target yang ditentukan dengan capaian anggaran sebesar 75,83 persen)	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	2,42	93,07	2.061.500.000	2.061.500.000	100	Efisien (Walaupun SPBE tidak mencapai target akan tetapi	Kominfo

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										penggunaan anggaran termasuk efisien, karena anggaran diatas dipergunaka untuk menunjang biaya internet, sementara anggaran untuk mendukung program tidak tersedia (nol)	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B (60,00)	B (60,09)	100,15	88.300.000	82.965.467	93,96	Efisien Capaian Nilai SAKIP 100,15 persen berbanding lurus dengan capain anggaran sebesar 93,96 persen	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	86,90	102,23	58.666.400	49.386.160	84,81	Efisien Capain Nilai Indeks Kepuasan Masyakat 102,23 persen berbanding lurus dengan capain anggran sebesar 84,81, persen	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	3,85	3,65	94,80	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak tersedia anggaran pendukung	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,00	48,73	79,88	19.176.744.132,00	8.692.078.788,00	45,33	Efisien (Walaupun Indeks tidak mencapai target, akan tetapi capaian Indeks Pengelolaan	Bappeda/BPKAD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										Keuangan Daerah 48,73 persen berbanding luris dengan capaian anggaran sebesar 45,33 persen)	
			Indeks Inovasi Daerah	inovatif	inovatif	100	Nihil	Nihil	Nihil	Efisien/ Tidak tersedian anggaran pendukung namun capaian indicator mencapai 100 persen.	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayananan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur											
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	100	100	46.442.598.894	40.798.724.689	87,85	Efisien (Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga mencapai target, dimana capaian kenerja indikator mencapai 100% sedangkan anggaran yang dipergunakan hanya 87,85%	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).											
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	137,80	191,35	70,01	369.993.162	297.559.060	80	Tidak efisien	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,76	75,16	109,31	38.467.389	23.278.485	60,52	Efisien (Penggunaan anggaran untuk mendukung capaian Indeks	PKPLH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										Kualitas Lingkungan Hidup digunakan secara optimal berbanding lurus dengan persentase capaian Indeks)	
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	78	78,35	100,49	5.204.929.285	4.931.765.317	94,75	Efisien (Penggunaan anggaran untuk mendukung capaian Indeks Infrastruktur digunakan secara optimal berbanding lurus dengan persentase capaian Indeks)	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.											
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	78	78,11	100,14	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak tersedia anngaran pendumg namun capain indikator mencapai 100 persen	Bappeda
			Indeks Pendidikan	14,13	11,95	84,57	50.671.133.177	49.363.654.502	97,42	Tidak efisien	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.											
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	82	66,58	81,19	902.279.800	902.279.800	100	Efisien Anggaran untuk mendukung capaian Indeks Ketahanana Pangan secara khusus tidak	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										tesedia}	
			Pertumbuhan Ekonomi	5,20	3,03	58,27	811.146.574	3676.116.914	83,35	Tidak Efisien	Bappeda/Perindag
			Gini Ratio	0,270	0,38	71,52	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak tersedia anggaran pendukung	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	72,05	82.12	113,98	438.432.219,00	362.250.200,00	82,62	Efisien (Penggunaan anggaran untuk mendukung capaian Indeks Pendapatan Perkapita Penduduk digunakan secara optimal berbanding lurus dengan persentse capaian Indeikator)	Baapeda/Dinas Koperasi/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	81.155.18	82.119.	101,19	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak tersedia anggran pendukung	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,80	9,02	108,64	146.878.700	141874.800	96,59%	Efisien Penggunaan anggaran untuk mendukung capaian Angka Kemiskinan digunakan secara optimal sebanding lurus dengan persentse capaian Indikator	Bappeda/Diinas sosial
			Angka Pengangguran	3000	3023	99,24	484.197.830,00	235.944.300,00	48,73	Efisien (Penggunaan anggaran untuk mendukung capaian Angka	Bappeda/Koperasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET 2025	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
										pengangguran digunakan secara optimal berbanding lurus dengan persentase capaian Indikator)	

C7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparansi dan Akuntabel										
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	Peningkatan kinerja reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	100	Menunjang	Program peningkatan kinerja reformasi birokrasi menunjang untuk pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sibolga 2025 dimana Realisasi Capaian Indikator program (100 %) sesuai dengan target target yang telah ditentukan,	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	93,07	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah waktu penyediaan layanan internet Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan infrastruktur tekhnologi informasi Pemerintah Kota Sibolga	100	Menunjang	Realisasi capaian indikator program 100 persen, akan tetapi capaian target indikator SPBE tahun 2025 sebesar 93,07 persen, masih perlu ditingkatkan komitmen bersama terutama pimpinan OPD agar memanfaatkan sarana SPBE sebagai media untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan bersih dan akuntabel.	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	100,15	Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	100	Menunjang	Program/Kegiatan Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi menjadi Faktor pendukung dalam menunjang pelaksanaan serta untuk mencapai targer Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP) tahun 2025 seiring dengan Realisasi Capaian Indikator program (100 %) sesuai dengan target yang telah ditentukan, untuk penigkatan nilai SAKIP tahun 2025 dilakukan beberapa upaya antara lain pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan evaluasi serta	Bagian Organisasi Setdakot

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									pelaporan SAKIP bagi seluruh OPD.	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	102,23	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah laporan hasil Fasilitsi pelayanan publik dan tata laksana	100	Menunjang	Kegiatan fasilitasi dan tatalaksana telah menjadi faktor pendukung dalam menunjang pelaksanaan dan pencapaian indeks kepuasan maayarakat, dimana kegiatan fasilitasi pelayanan publik dilaksanakan melalui monitoring pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pelaporan. .	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	94,80	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian /kegiatan yang di diseminasikan	100	Menunjang	Program penelitian dan pengembangan daerah mendukung Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan tingkat capaian program 100% walau tanpa dukungan anggaran,	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	79,88	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Persentase capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah Persentase capaian pengelolaan pendapatan daerah	100 100 100	Menunjang Menunjang Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan Telah sesuai dengan yang direncanakan Telah sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda/BPKAD
			Indeks Inovasi Daerah	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase capaian rencana induk kelitbangan dan perhitungan indeks	100	Menunjang	Program penelitian dan pengembangan daerah menunjang untuk mendukung pencapaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga tahun 2025, dengan capaian Program adalah 100% dan tanpa anggaran pendukung pencapaian indeks inovasi daerah mencapai target yakni Inovatif, dengan tingkat capaian 100 % akibat dengan penguatan pelaksanaan inovasi pelayanan pada dinas yang melaksanakan pelayanan dasar kepada masyarakat.	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayananan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur										

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100	Menunjang	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan Program pemberdayaan bidang kesehatan merupakan faktor pendukung dalam menunjang pencapaian Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga tahun 2025, melalui program ini menimbulkan dampak yang positif antara lain : Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pemenuhan cakupan obat-obatan bagi masyarakat di Kota Sibolga tahun 2025 yang ditandai dengan tercapainya 12 SPM bidang Kesehatan sesuai target; Terciptanya kemandirian masyarakat Kota Sibolga yang mengenal, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan secara proaktif seiring dengan keberhasilan Kota Sibolga meraih UHC (*Universal Health Coverage*).	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (*Smart City*).										
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	70,01	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan pengurangan risiko bencana	100	Menunjang	Program Penangglangan Bencana merupakan faktor penunjang untuk Indeks Resiko Bencana Kota Sibolga tahun 2025, walaupun Kota Sibolga belum bisa mencapai target Indeks Resiko Bencana, dengan keterbatasan infrasruktur dan yang lainya Kota Sibolga dapat mengurangi resiko Bencana tahun 2025. Dengan kata lain capaian program yang mencapai 100 % sesuai dengan yang ditargetkan.	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	109,31	Ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang terhadap media air, udara dan laut	100	Menunjang	Program kegiatan Ketersedian data pengendalian , pencemaran dan keruskan lingkungan menunjang untuk pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sibolga, dan juga dapat dilihat berdasarkan capaian program sebesar 100 berbanding lurus dengan capain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 109,31persen.	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	100,49	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	68,11	Menunjang	Program Penyelenggaraan jalan menunjang untuk mendukung untuk pencapain Indeks Infrastruktur Kota Sibolga, walau Realisasi Program/Kegiatan (68,11%)	PU, PKPLH
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase rumah	100	Menunjang	Program pengelolaan dan sistem	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					Sistem Penyediaan Air Minum	tangga yang memiliki air minum layak dan berkelanjutan			penyedian air minum menunjang untuk mendukung capaian Indeks Infrastruktur Kota Sibolga, dimana realisasi Capaian program kegiatan mencapai 100 %	
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang bersanitasi total bermasyarakat(STMB)	37,25	Menunjang	Program pengelolaan dan pengembangan system air minum menunjang untuk pencapaian Indeks Infrastruktur Kota Sibolga, walau capaian capaian program hanya 37,25 %.	
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.										
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	100,14	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunanan daerah	Persentase capaian koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	Menunjang	Program koordinasi dan sinkronisasi peencanaan pembangunan daerah mendukung Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sibolga, dengan realisasi capaian Indeks sebesar 100,14 persen dari target yang ditentukan, tanpa dukungan anggaran Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tetap terlaksana.	Bappeda
			Indeks Pendidikan	84,95	Program Pengelolaan Pendidikan	Indikator belum	100	Menunjang	Program Pengelolaan Pendidikan menunjang untuk mendukung pemcapaian Indeks Pendidikan, dapat kita lihat bahwa persentase capaian program adalah 100 persen dengan capain Indeks Pendidikan sebesar 84,95 persen, walaupun tidak mencapai target akan tetapi program ini dan ketersediaan anggran berdampak langsung terhadap masyarakat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.										
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	81,19	Pengadaan infrastruktur pendukung kemandian pangan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	100	Menunjang	Capaian indikator kinerja 100 % namun tidak secara langsung menunjang indeks ketahanan pangan karna perhitungan nilai indikator dan hasilnya dilakukan oleh Kementerian melalui survei di Kota Sibolga	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	58,27	Program Peningkatan Sarana Distribusi	Jumlah sarana distribusi perdagangan	100	Menunjang	Realisasi Capaian indikator program 100 % sesuai dengan taget yang ditetapkan 100 %	Bappeda/Perindag

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
					Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian dan stabilitasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	Menunjang		
			Gini Ratio	71,52	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator kota terhadap pembangunan	100	Menunjang	Tidak ada program/kegiatan penunjang (hanya rilis BPS)	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	113,98	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dam Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	100	Menunjang	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro UMKM) menunjang untuk mendukung pemcapaian Pendapatan Perkapita Penduduk walupun tidak secara langsung, namun program ini sangat dibutuhkan untuk mendukung mengurangi pengaguran, dan dapat kita lihat bahwa capain Indikator Program berbanding lurus dengan capain indicator Kinerja.	Bappeda/BPS/UMKM
			PDRB Perkapita (Ribu)	101,19	-	-		-	Tidak ada program/ kegiatan penunjang (hanya rilis BPS)	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	108,64	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	100	Menunjang	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial meunjang untuk mencapai Angka Kemiskinan Kota Sibolga tahun 2025, dapat kita lihat bahwa dengan capaian program 100 persen, berbanding lurus dengan capaian Angka Kemiskinan dari target 9,80 persen menurun menjadi 9,02 persen, walaupun angka kemiskinan di Kota Sibolga masih relatif, namun Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan salah satu program untuk penanggulangan kemiskinan disamping program lain seperti pemberdayaan ekonomi dan pelatih keterampilan dan akses modal bagi pelaku usaha miikro dan kecil.	Bappeda/Dinas Sosial BPS
			Angka Pengangguran		Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	100	Menunjang	Program Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi menunjang untuk mencapai target angka kemiskinan, melalui program tersebut diberikan pembekalan keterampilan bagi pencari kerja sebagai salah satu usaha pemerintah Kota Sibolga untuk memberikan bekal bagi pencari kerja, maupun bagi yang	Bappeda/BPS/Koperasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
									ingin membangun usaha mengingat keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di Kota Sibolga.	

MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang *Good Governance* dengan Transparan dan Akuntabel.
Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel
Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Sibolga tidak berjalan dengan baik dengan berbagai kendala dan hambatan. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama strategis Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2021 - 2024, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 36

Target Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sibolga
Tahun 2021 – 2025

Tahun	Target	Realisasi		Capaian
2021	C	C	42,54	Tercapai
2022	B	C	45,96	Tidak tercapai
2023	B	C	47,44	Tidak tercapai
2024	B	CC	56,88	Tidak tercapai
2025	B	N/A	-	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sibolga tahun 2025 mencapai target, dimana capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah CC dari target adalah B, Pemerintah Kota Sibolga telah melakukan langkah-langkah/upaya untuk meningkatkan nilai RB sebagai berikut:

Membangun komitmen seluruh OPD pengampuh Reformasi Birokrasi untuk mengalokasikan program kegiatan yang mendukung Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sibolga.

Melakukan penguatan dan koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Kota Sibolga dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas dan nilai Reformasi Birokrasi Kota Sibolga dengan langkah sebagai berikut:

a. Penetapan target kegiatan utama sepenuhnya berbasis baseline tahun sebelumnya;
b. Penyusunan Rendaksi dilakukan berpedoman berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumya dan berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama;
c. Melakukan asistensi kepeda OPD dalam hal penyusunan Rencana Aksi;
d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian Rencana Aksi secara berkala.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak lainya. Sebagimana diatur melalui Perpres No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

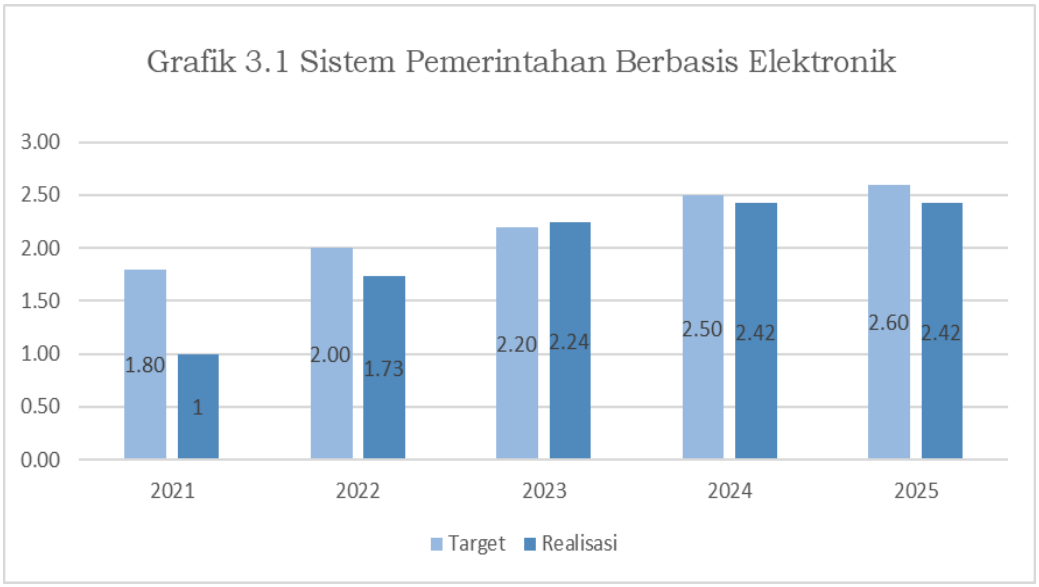
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah indikator yang digunakan menilai tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan disuatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah beralih ke sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan transparan.

Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama strategis Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun 2021 - 2025, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 37
Target, Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	1,80	1	Tidak tercapai
2022	2,00	1,73	Tidak tercapai
2023	2,20	2,24	101,82 %
2024	2,50	2,42	96,8 %
2025	2,60	2,42	93,07%

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Sibolga tahun 2025 tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,42 atau 96,8 % dari target sebesar 2,50.

Untuk mencapai target indikator kinerja ini terdapat hambatan/kendala sebagai berikut:

a. Pada tahun 2025 KemenpanRB tidak melaksanakan Evaluasi SPBE oleh karena itu Pemko Sibolga tidak dapat mengetahui apakah nilai SPBE mengalami kenaikan atau tidak, maka berdasarkan Surat Edaran Kemenpan RB nomor 6 Tahun 2025 bahwa jika tidak ada penilaian maka nilai untuk tahun 2025 tetap berpedoman pada nilai tahun sebelumnya yaitu tahun 2024. Dalam hal pencapaian nilai SPBE Kota Sibolga masih 2,42.
b. Masihnya rendahnya kemampuan operator SPBE pada sebagian OPD dikarenakan kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang digitalisasi;
c. Masih terdapat kebijakan yang belum terpenuhi untuk mendukung penguatan SPBE seperti kebijakan tentang tanda tangan elektronik serta kebijakan dari masing-masing OPD;
d. Tidak tersedia anggaran tahun 2025 khusus untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur yang menangani SPBE pada Dinas Kominfo dan OPD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan adalah

a. Perlu diadakan pelatihan bagi operator SPBE pada OPD.

b. Pemenuhan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan SPBE di Kota Sibolga.
c. Pemenuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi aparatur yang menangani SPBE pada Dinas Kominfo dan OPD terkait.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. SAKIP mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja guna memastikan efesiensi, efektivitas dan transparansi anggaran.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berupa :

Hasil (*Outcome*) : Bagaimana Tingkat pencapaian Kinerja yang diharapkan Terwujud, berdasarkan *Output* (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan.

Keluaran (*Output*) : Bagaimana Produk yang Dihasilkan secara Langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan *Input* (Masukan) yang digunakan.

Penilaian indikator pelaporan AKIP menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pelaksanaan Penilaian AKIP dilingkungan Pemerintah didasarkan oleh indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kota Sibolga dan memuat target-target yang harus dicapai perangkat daerah yang menjadi sebagai target capaian Pemerintah Kota Sibolga. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator sasaran utama strategis Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dari tahun 2021 - 2025, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 38

Target , Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi		Capaian
2021	B	CC	53,29	Tidak Tercapai
2022	B	CC	53,51	Tidak Tercapai
2023	B	CC	54,60	Tidak tercapai
2024	B	CC	56,77	Tidak tercapai
2025	B (60,00)	B	60,09	100,15%

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga dari tahun 2021 sampai dengan 2024 belum pernah mencapai target, baru tahun 2025 nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sibolga mencapai target, dimana target Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah B (60,00) dengan realisasi B (60,09) dengan tingkat capaian 100,15 %. Penyampaian laporan AKIP Kota Sibolga dan Perangkat Daerah tahun 2025 dilaksanakan, termasuk penyampaian hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Laporan AKIP, terhadap dokumen perencanaan lainnya yang menjadi dokumen pelaporan.

Dalam mencapai target nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Sibolga tahun 2025 ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sibolga antara lain :

a. Berdasarkan data capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 (sesuai tabel) nilai SAKIP Kota Sibolga selalu tidak mencapai target menjadikan beban moral bagi Pemerintah Kota Sibolga. Pada tahun 2025 melalui Bapak Sekretaris Daerah menekankan kepada Tim SAKIP Kota Sibolga agar lebih serius dan berusaha lebih keras agar nilai SAKIP mencapai target, langkah-langkah konkret yang dilakukan antara lain:
   - Membangun Kerja sama Tim SAKIP Kota Sibolga antara Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Setdakot Sibolga, dimana setiap tim melakukan penguatan kualitas terhadap tugas masing-masing.

- Mempedomani Peraturan tentang Penyusunan SAKIP
- Pemko Sibolga melalui Bagian Organisasi Setdakot Sibolga telah melakukan Pendampingan terhadap OPD guna untuk peningkatan mutu Dokumen SAKIP seperti : Dokumen Perencanaan, Pengukuran Kinerja serta Pelaporan.
- Melakukan monitoring terhadap OPD perihal kegiatan upload dokumen SAKIP tahun 2025 ke SR KemenpanRB sesuai dengan dokumen yang diminta dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Tim SAKIP Kota Sibolga melalui Bagian Organisasi Setdakot Sibolga selalu melakukan koordinasi kepada LO dari Kemenpan RB guna untuk menambah referensi untuk meningkatkan kualitas penyusunan SAKIP Kota Sibolga.

Untuk mencapai target indikator tahun 2025 telah berupaya dengan maksimal, walaupun di sebagian OPD ketersediaan anggaran sangat minim untuk mendukung capaian indikator tersebut.

Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Untuk mengukur indikator menggunakan nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kota Sibolga Tahun 2025 yang merupakan nilai rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sekali setahun. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Survei Kepuasan Masyarakat dari 2021 - 2025, dapat di lihat pada tabel berikut :

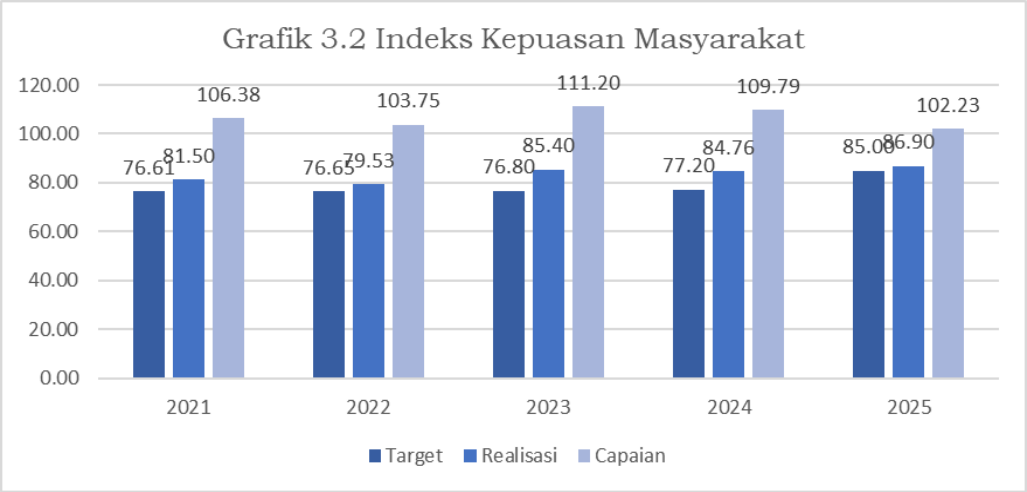
Tabel 38

Target, Realisasi dan Capaian Survei Kepuasan Masyarakat Kota Sibolga

Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	76,61	81,50	106,38%
2022	76,65	79,53	103,75%
2023	76,80	85,40	111,20%
2024	77,20	84,76	109,79%
2025	85.00	86,90	102,23%

Sumber : SKM Kota Sibolga Tahun 2025 Bagian Organisasi Setdakot



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Kota Sibolga tahun 2025 mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 86,90 atau 102,23% dari target sebesar 85.00. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 86,90 merupakan nilai rata-rata dari 49 Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025, berarti yang berarti mutu pelayanan masuk dalam kategori baik dan mengalami peningkatan.

Untuk mencapai target Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 Pemerintah Kota Sibolga telah melakukan upaya antara lain :

- Adanya komitmen Organisasi Penyelenggara Pelayanan untuk meyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui kualitas.
- Melakukan pendampingan dan asistensi kepada Organisasi Penyenggara Pelayanan.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan terhadap OPP.
- Melakukan pelaporan pelaksanaan SKM tingkat Kota Sibolga ke Menpan tepat waktu.
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Untuk mengukur indikator ini menggunakan 4 faktor penilaian dengan 12 pilar turunan penilaian yaitu lingkungan pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar dan Ekosistem Inovasi. Perbandingan antara target, realisasi dan

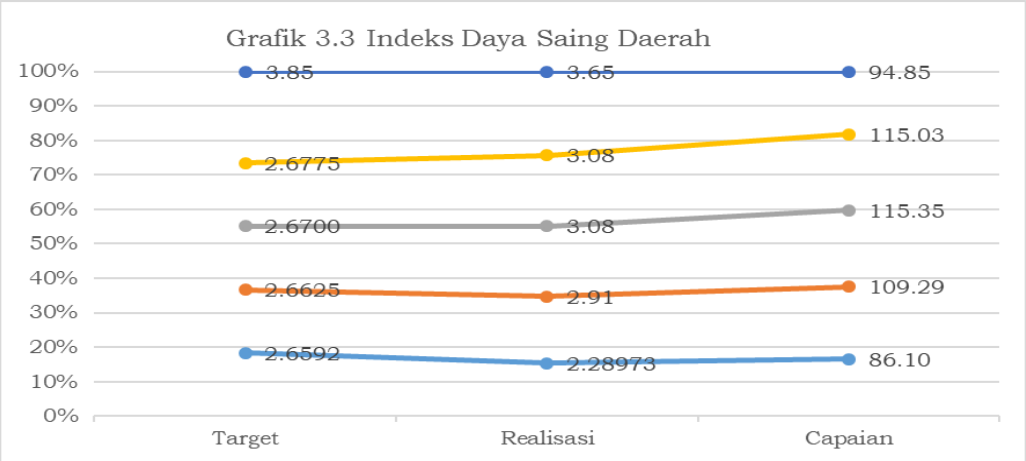
capaian indikator sasaran utama Indeks Daya Saing Daerah Kota Sibolga dari tahun 2021 - 2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 39

Target, Realisasi dan Capaian IDSD Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,6592	2,28973	86,10%
2022	2,6625	2,91	109,29%
2023	2,6700	3,08	115,35%
2024	2,6775	3,08	115,03%
2025	3,85	3,65	94,85%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Daya Saing Kota Sibolga tahun 2025 tidak dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,65 atau 94,85 % dari target sebesar 3,85.

Adapun penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

Kelemahan tata kelola data (*statistic sectoral)*, rendahnya pilar ekosistem, inovasi, Stabilitas Makroekonomi dan lingkungan bisnis. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

1. Penguatan Brida yakni memastikan setiap kebijakan berbasis data dan riset (*Evidance-Bassed Policy*).
2. Melakukan audit data sektoral yaitu rekonsiliasi data antara pemerintah daerah dengan BPJS dan Kementerian terkait secara berkala.

3. Pokus pada pilar unggulan yakni jika daerah memiliki potensi pelabulan atau parawisata fokus meningkatkan indikator pada pilar infrastruktur dan ukuran pasar.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. IPKD ditetapkan berdasarkan dimensi dan indikator tertentu meliputi :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- Kualitas anggaran belanja dalam APBD
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- Penyerapan anggaran
- Kondisi keuangan daerah
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

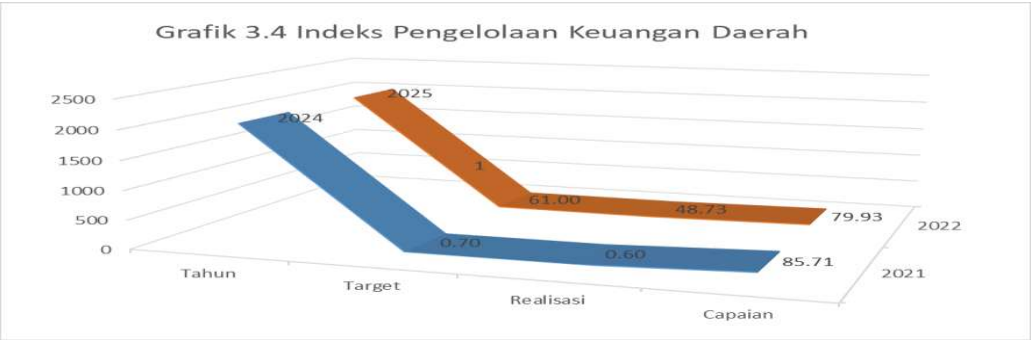
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ini baru dijadikan Indikator Kinerja Pemerintah Kota Sibolga sejak tahun 2024. Pada penilaian tahun 2024, Kota sibolga mengalami perubahan pada klaster dari kategori keuangan rendah menjadi kategori sedang namun masih dalam taraf perlu perbaikan. Indikator yang paling mempengaruhi penurunan hasil ada pada dimensi 6, karena opini Keuangan dari WTP menjadi WDP. Pencapaian antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga tahun 2024-2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 40

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	0,70	0,60	85,71
2025	61,00	48,73	79,93

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2025 tidak dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 48,73 atau 79,93% dari target sebesar 61,00.

Adapun penyebab kegagalan sehingga indikator diatas tidak mencapai target adalah :

- Untuk mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 6 dimensi utama yaitu:
- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Kualitas anggaran belanja.
- Transparansi pengelolaan keuangan.
- Penyerapan anggaran.
- Kondisi keuangan daerah dan.

Opini BPK atas LKPD, dimana bukti dukung untuk dimensi 2 dan 5 kurang lengkap sehingga mempengaruhi nilai.

OPD kurang proaktif, dapat dilihat dari penginputan data ke Aplikasi dari masing-masing OPD kurang maksimal, kesesuaian perencanaan dan penganggaran serta kurangnya kapasitas sumber daya manusia.

Sementara upaya yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah:

Melakukan evaluasi dan tindaklanjut terhadap hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga.

Membangun komitmen bersama dan koordinasi untuk penguatan dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga.

Mengupayakan melengkapi data dukung pengukuran 6 dimensi.

Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan suatu wilayah baik Kota atau Provinsi. Tujuan untuk mengukur sejauh mana suatu daerah berhasil dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan dan pelayanan publik.

Indeks Inovasi Daerah berfungsi untuk membantu pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pencapaian antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 41

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga
Tahun 2024-2025.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	Inovatif	Inovatif (38,64)	tercapai
2025	Inovatif	Inovatif (40,78)	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga Daerah tahun 2025 dapat mencapai target yang ditetapkan dimana realisasi indikator Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 adalah sebesar 40,78 (inovatif) atau 100 % dari target adalah Inovatif. Untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah tahun 2025 Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya antara lain:

Komitmen Pemko Sibolga beserta Perangkat Daerah untuk menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja.

Penguatan beberapa Dinas seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Dinas Sosial Kota Sibolga, Rumah Sakit FL. Tobing Kota Sibolga dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga untuk membuat Inovasi Pelayanan.

Berupaya melengkapi data dan mengisi 20 indikator serta mengupload bukti dukung di portal BSKDN dengan tepat waktu.

MISI 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur.

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan adalah ukuran yang menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan angka harapan hidup kesehatan fisik, mental dan infrastruktur kesehatan. Pengukuran indeks kesehatan bertujuan untuk adalah mengukur kualitas hidup, menunjukkan bagaimana kesehatan seseorang berubah seiring waktu, menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kesehatan, membantu membuat keputusan terkait kesehatan dalam skala besar dan atau komunitas dan menunjukkan area yang memerlukan perbaikan. Indeks Kesehatan Masyarakat menjadi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2024.

Pencapaian antara target, realisasi dan capaian indikator sasaran utama Indeks Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Sibolga disajikan hanya 2 tahun terakhir.

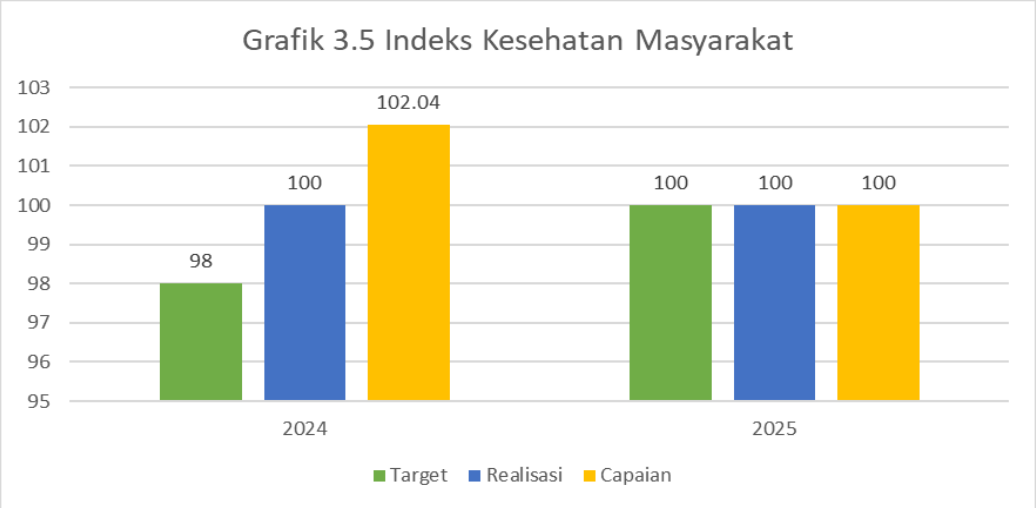
Tabel 42

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga

Tahun 2024-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	98	100	102,04
2025	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa indikator kinerja Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga tahun 2025 dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks 100 dari target sebesar 100. Dengan kata lain bahwa indeks pembangunan kesehatan masyarakat mengalami kemajuan. Data Indeks Kesehatan Masyarakat dapat dipergunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota Sibolga dan data tersebut juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Sibolga pada tahun berikutnya. Perbandingan data capaian Indeks Kesehatan Masyarakat tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Kesehatan Masyarakat baru dijadikan indikator Kinerja Pemko Sibolga tahun 2024 sehubungan adanya penyederhanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga, untuk

mencapai target Indeks Kesehatan di Kota Sibolga tahun 2025, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya/kebijakan atau upaya antara lain :

- Penguatan layanan dasar (Preventif dan Promotif) dimana orientasinya bukan hanya mengobati orang sakit, fokus utama harus bergeser pada pencegahan;
- Transformasi Puskesmas : Mengaktifkan Puskesmas sebagai pusat edukasi dan bukan sekedar tempat berobat.
- Posyandu Aktif : Memastikan layanan kesehatan menjangkau Lingkungan terutama untuk pemantauan tumbuh kembang anak (stunting) dan kesehatan lansia.
- Immunisasi Dasar Lengkap : menjamin cakupan vaksinasi mencapai seluruh balita tanpa kerkecuali.
- Melakukan Intervensi masalah gizi (Stunting dan Wasting):
- Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) : fokus pada pangan lokal kaya protein hewani.
- Edukasi 1000 Hari pertama Kehidupan (HPK) : intervensi sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun.

Perbaikan Lingkungan (Sanitasi & Air Bersih)

Indeks kesehatan sangat bergantung pada faktor eksternal: *Open Defecation Free* (ODF): Memastikan 100% masyarakat tidak buang air besar sembarangan melalui penyediaan jamban sehat.

Akses Air Minum Layak: Memastikan air yang dikonsumsi masyarakat bebas kontaminasi bakteri.

4. **Pemanfaatan Teknologi & Data**
   a. Digitalisasi Data Kesehatan: Menggunakan aplikasi (seperti Satu Sehat) untuk memantau kesehatan warga secara *real-time* sehingga intervensi bisa lebih cepat.
   b. Analisis Data IKU: Memastikan setiap indikator dalam LKjIP (yang kita bahas sebelumnya) dipantau per kuartal, bukan hanya di akhir tahun.
5. **Penguatan Jaminan Kesehatan (UHC)**
   a. *Universal Health Coverage* (UHC): Memastikan 100% warga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan agar tidak ada hambatan biaya saat membutuhkan layanan medis.

MISI III : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (*Smart City*)

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Indeks Risiko Bencana (IRB) ini dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$R \approx H * \frac{V}{C}$$

Dimana :

R = Tingkat Resiko Bencana
H = Indeks Bahaya
V = Indeks Kerentanan
C = Indeks Kapasitas

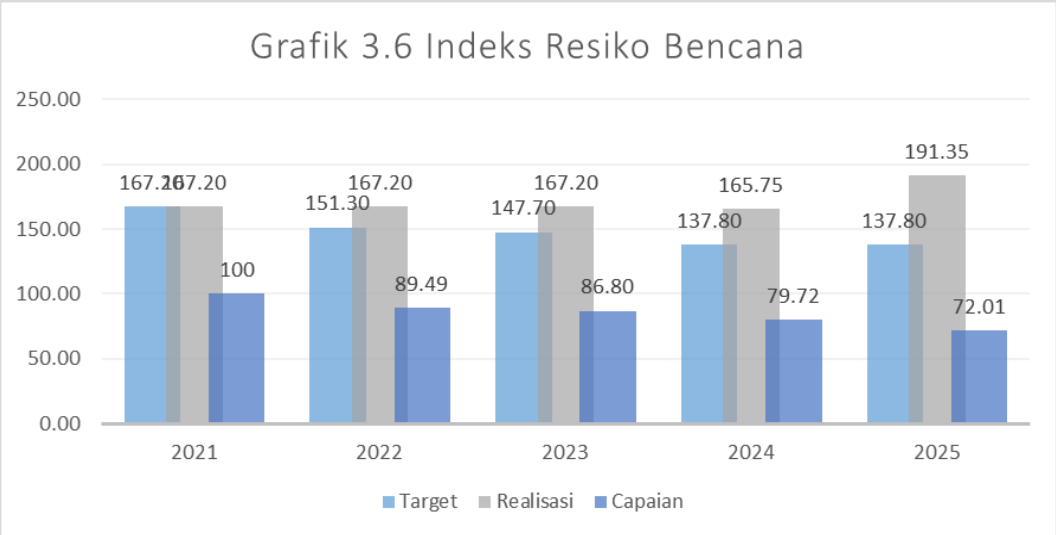
Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh indikator/prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks Resiko Bencana dari tahun 2021-2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Resiko Bencana Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	167,20	167,20	100%
2022	151,30	167,20	89,49%
2023	147,70	167,20	86,80%
2024	137,80	165,75	79,72%
2025	137,80	191,35	72,01%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa indikator kinerja Indeks Resiko Bencana Kota Sibolga tahun 2025 tidak dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Resiko Bencana adalah 191,35 dari target sebesar 137,80. Namun walaupun Indeks Resiko Bencana tahun 2025 tidak dapat mencapai target akan tetapi berdasarkan hasil penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025 Pemerintah Kota Sibolga mampu menurunkan Indeks Resiko Bencana berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah Kota Sibolga menguat dari 0,33 ke 0,36.

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sibolga sehingga tidak tercapaiannya Indeks Resiko Bencana tahun 2025 yaitu :

- Adanya pemuktahiran *baseline* pada komponen kerentanan, sehingga nilai IRB tahun 2025 tidak untuk dibandingkan dengan nilai IRB tahun 2025 tahun 2015-2024.
- Belum selesai menyiapkan dokumen–dokumen kebencanaan turunan dan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang mendukung peningkatan nilai Indeks Ketahanan Daerah yang dapat mempengaruhi nilai Indeks Resiko Bencana.
- Kurangnya sarana dan prasarana informasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.
- Belum terbentuknya penguatan kawasan seperti Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPBRB), Keltana (Kelurahan Tanggap Bencana), Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana), SMAB (Sekolah Madrasah Aman Bencana).

Solusi yang dilakukan Pemko Sibolga untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyelesaikan dokumen-dokumen kebencanaan yang dibutuhkan.
- Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
- Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPBRB), Keltana (Kelurahan Tanggap Bencana), Kencana (Kecamatan Tangguh Bencana), SMAB (Sekolah Madrasah Aman Bencana).
- Peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam kesiapsiagaan bencana melalui sosialisasi yang dilakukan secara mandiri.
- Peningkatan anggaran BPBD di Program Penanggulangan Bencana.

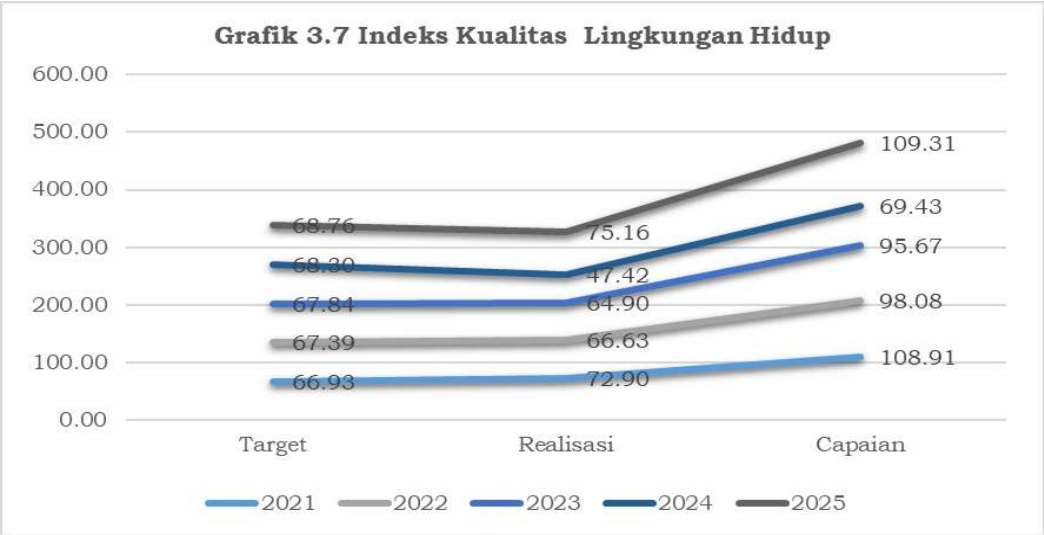
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup (air, udara dan tutupan lahan) di suatu wilayah dan periode tertentu. IKLH digunakan sebagai instrument kebijakan untuk mengevaluasi keberhasilan perlindungan lingkungan serta mendukung pengambilan keputusan. Indeks Kualitas lingkungan hidup dari tahun 2021-2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	66,93	72,90	108,91%
2022	67,39	66,63	98,08%
2023	67,84	64,90	95,67 %
2024	68,30	47,42	69,43 %
2025	68,76	75,16	109,31 %



Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sibolga tahun 2025 mencapai target, dilihat dari capaian Indikator 75,16 atau 109,31 % dari target 68,76. Adapun Faktor keberhasilan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Sibolga dapat melaksanakan pengukuran tiga komponen yang mendukung Indeks Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan lahan, dimana nilai dari ketiga indeks mempengaruhi beberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Pemko Sibolga melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentinya pengelolan lingkungan guna untuk mengurangi pencemaran;
3. Penanaman pohon pada ruang terbuka dan bukit dan halaman perumahan dan perkantoran untuk memperbayak ruang hijau;

4. Melakukan koordinasi dengan pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera untuk mempercepat proses pengolahan data pemetaan.

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah.

Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur adalah indikator atau alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas, ketersediaan dan aksesibilitas berbagai sarana fisik dan teknis di suatu wilayah seperti jalan, air bersih, drainase dan energi.

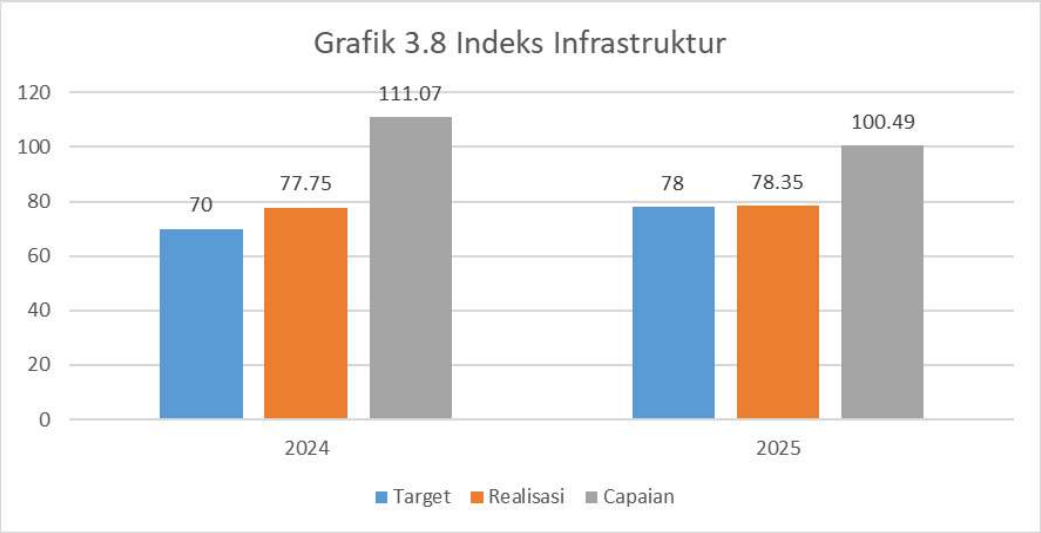
Indeks infrastruktur daerah adalah salah satu komponen indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Pencapaian antara target, realisasi dan capaian Indeks Infrastruktur Kota Sibolga Tahun 2024-2025 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 45

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Infrastruktur
Tahun Kota Sibolga Tahun 2024-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	70	77,75	111,07 %
2025	78	78,35	100,49%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tahun 2025 indikator kinerja Indeks Infrastruktur Kota Sibolga mencapai target dimana realisasi indikator Indeks Infrastruktur 78,35 atau 100,49% dari target sebesar 78. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

- Pemko Sibolga melakukan upaya pemenuhan infrastruktur jalan yang baik, dimana berkurangnya panjang jalan yang rusak berat dan rusak ringan dari 23,19 KM menjadi 20,09 KM.
- Pemko Sibolga berupaya meningkatnya jumlah tumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum.
- Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi jaringan listrik rumah tangga di Kota Sibolga

MISI IV	:	Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.
Tujuan	:	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas
Sasaran 1	:	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia

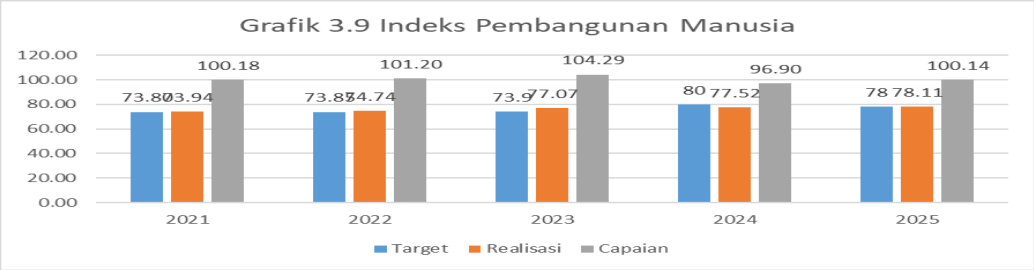
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian keseluruhan perkembangan non fisik dalam jangka panjang yang direfresentasikan oleh tiga dimensi yaitu 1) umur panjang dan sehat 2) pengetahuan dan 3) kualitas hidup yang layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah daerah tergolong maju, berkembang, atau terbelakang dan juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pengukuran IPM memberikan manfaat diantaranya adalah 1) Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; 2) Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah; 3) Digunakan sebagai salah satu dasar penentuan dana alokasi umum (DAU).

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2021-2025, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	73,80	73,94	100,18%
2022	73,85	74,74	101,20%
2023	73,9	77,07	104,29%
2024	80	77,52	96,90%
2025	78	78,11	100,14%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2021-2023 selalu mencapai target baik dari capaian target maupun realisasi target itu sendiri, berarti tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat cenderung membaik, namun tahun 2024 kembali tidak mencapai arget. Pada tahun 2025 Indeks Pembangunan Manusia dapat mencapai target dimana realisasi indikator Indeks adalah 78,11 atau 100,14 % dari target sebesar 78. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemko Sibolga untuk mencapai target adalah :

Dari sisi kesehatan Pemko Sibolga melakukan:

- Penguatan layanan dasar (Preventif dan Promotif) orientasinya bukan hanya mengobati orang sakit, fokus utama harus bergeser pada pencegarah, transformasi Puskesmas : Mengaktifkan Puskesmas sebagai pusat edukasi dan bukan sekedar tempat berobat.
- Posyandu Aktif : Memastikan layanan kesehatan menjangkau Lingkungan terutama untuk pemantauan tumbuh kembang anak (stunting) dan kesehatan lansia.
- Immunisasi Dasar Lengkap : menjamin cakupan vaksinasi mencapai seluruh balita tanpa kerkecuali.
- Intervensi masalah gizi (Stunting dan Wasting) Gizi buruk adalah hambatan terbesar salam menaikkan Indeks Kesehatan.

- Program pemberian makanan tambahan (PMT) : fokus pada pangan local kaya protein hewani.
- Edukasi 1000 Hari pertama Kehidupan (HPK) : intervensi sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun.
- Perbaikan Lingkungan (Sanitasi & Air Bersih)Indeks kesehatan sangat bergantung pada faktor eksternal: *Open Defecation Free* (ODF): Memastikan 100% masyarakat tidak buang air besar sembarangan melalui penyediaan jamban sehat.
- Akses Air Minum Layak: Memastikan air yang dikonsumsi masyarakat bebas kontaminasi bakteri.
- Pemanfaatan Teknologi & DataDigitalisasi Data Kesehatan: Menggunakan aplikasi (seperti Satu Sehat) untuk memantau kesehatan warga secara *real-time* sehingga intervensi bisa lebih cepat.
- Penguatan Jaminan Kesehatan (UHC)*Universal Health Coverage* (UHC): Memastikan 100% warga terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan agar tidak ada hambatan biaya saat membutuhkan layanan medis.
- Penguatan indeks pendidikan melalaui program paket C dan pemberian bantuan pendidkan gratis dan beasiswa perprestasi dari keluarga kurang mampu/nelayan;
- Melaksanakan kegiatan stabilitas harga melalui pasar murah demi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen utama kesejahteraan dan digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang merupakan faktor kunci yang menentukan apakah suatu negara merupakan negara maju, berkembang atau terbelakang. Indeks Pendidikan diukur dengan menggabungkan rata-rata tahun sekolah orang dewasa dengan perkiraan tahun sekolah untuk siswa dibawah umur 25 tahun yang masing-masing diberi bobot. Untuk perbandingan pencapaian antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Pendidikan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024-2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

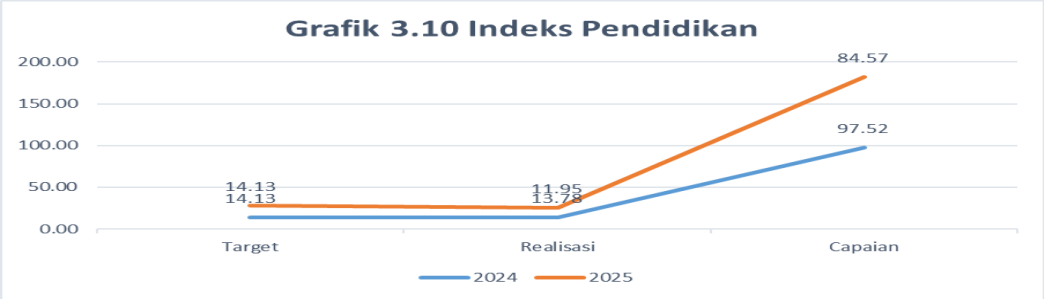
Tabel 47

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pendidikan Kota Sibolga

Tahun 2024-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	14,13	13,78	97,52 %
2025	14,13	11,95	84,57 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tahun 2025 indikator kinerja Indeks Pendidikan Kota Sibolga tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Pendidikan adalah 11,95 atau 84,57% dari target sebesar 14,13. Adapun penyebab kegagalan dalam pencapaian Indeks Pendidikan adalah :

- Faktor ekonomi dan faktor sosial; mempengaruhi tingkat kemampuan sebagian penduduk Kota Sibolga untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi.
- Faktor kebijakan dari Kementerian Pendidikan, dimana saat ini Kabupaten /Kota tidak lagi mengelola pendidikan tingkat SMA, sehingga berpengaruh dengan harapan lama sekolah.
- Keterbatasan perguruan tinggi di Kota Sibolga untuk menjadi alternatif pilihan dari perguruan tinggi yang ada saat ini.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah:

- Pemerintah Kota Sibolga tahun 2025 melakukan upaya untuk meningkatkan Indeks Pendidikan antara lain :
- Program wajib belajar 13 tahun bertujuan untuk peningkatan retensi siswa.
- Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi lain di luar Kota Sibolga serta memberikan bantuan Beasiswa kepada kepada masyarakat kurang mampu (nelayan).
- Pemko Sibolga melalui Dinas Pendidikan mengoptimalkan Program Pendidkan Paket C.

MISI 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Tujuan : Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan masyarakat

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan adalah alat mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Pencapaian antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024-2025 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 48

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Sibolga

Tahun 2024-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	80	81,03	101,29%
2025	82	66,58	81,19 %

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari Tahun 2025 indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan Kota Sibolga tidak dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Ketahanan Pangan sebesar 68,58 atau 81,19% dari target sebesar 82 dari hasil. Hasil ini didapat dari Hasil Survei/Penelitian dan penilaian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ada beberapa faktor yang yang mempengaruhi sehingga indikator diatas tidak mencapai target yaitu :

- Kota Sibolga tidak memiliki lahan pertanian sehingga mempengaruhi ketersediaan pangan di Kota Sibolga khususnya produksi beras.
- Tidak tersedianya cadangan pangan daerah yang dapat berpengaruh langsung terdapat ketahanan pangan.
- Karena keterbatasan anggaran sehingga tidak terlaksananya pengawasan keamanan pangan yang bersumber dari tumbuhan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan sementara untuk Hewan dapat terlaksana.

Sedangkan Pemko Sibolga melakukan langkah–langkah untuk mengatasi permasalahan antara lain :

- Pemko melalui Dinas Kelautan, perikanan dan ketahanan pangan membuat peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Sibolga.
- Pemko Sibolga tahun 2025 telah melakukan Kerja Sama Antara Daerah dengan Pemerintah Tapanuli Selatan tentang pengelolaan beras.
- Melakukan koordinasi secara rutin dengan Kantor Bulog Kota Sibolga untuk mengetahui tentang ketersedian pangan pemerintah pada setiap periode.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan *output* perkapita. Penyediaan Akomodasi makan dan minum serta perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan memberikan konstribusi terbesar dalam PDRB Kota Sibolga. Dalam pencapaian target, capaian Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49

Target, Realisasi dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sibolga Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,74	2,10	76,6%
2022	3,00	4,15	138,3%
2023	4,00	4,20	105%
2024	5,20	3,92	75,38%
2025	5,20	3,03	58,27%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga/Badan Pusat Statistik



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga tahun 2025 tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Pertumbuhan Ekonomi adalah 3,03 atau 58,27% dari target sebesar 5,20. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga indikator diatas tidak mencapai target adalah :

- Kota Sibolga tahun mengalami pelambatan beberapa sektor penopang pertumbuhan ekonomi.
- Pertumbuhan investasi yang melambat sehingga menghambat pertumbuhan lapangan kerja.
- Kota Sibolga megalami bancana banjir dan tanah longsor dapat mempengaruhi tingkat inflasi di Kota Sibolga.

Namun kesejahteraan masyarakat menujukkan arahan yang yang positif dapat dilihat dari penurunan angka pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kota Sibolga mengalami perbaikan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemko Sibolga untuk mengatasi permasalahan adalah :

- Mengoptimalkan sumber daya kelautan Kota Sibolga karena Kota Sibolga merupakan produksi tangkap laut untuk produksi ikan tertentu seperti Kacalang , tuna dan tongkol.
- Melakukan pasar murah waktu tertentu dan pada saat menjelang lebaran dan menjelang hari raya tahun baru guna untuk menjaga stabilitas harga pasar.
- Melakukan pelatihan bagi calon pencari kerja dan pelaku usaha kecil menengah dan mikro.
- Melakukan kegiatan pembekalan bagi masyarakat korban pemakai narkoba melalui Program Gerbang Harapan; guna mendapatkan bekal untuk menciptakan lapangan pekerja.

Gini Rasio

Gini Rasio adalah sebuah metode statistik untuk mengukur ketidaksetaraan/ketimpangan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan suatu populasi. Gini Rasio memiliki rentang skor antara 0 dan 1,0 dimana 0 mengidetifikasikan kesetaraan sempurna (setiap orang yang memiliki pendapatan yang sama), sementara 1 mengidetifikasikan ketidaksetaraan sempurna (satu orang memiliki seluruh pendapatan). Semakin tinggi nilai gini rasio semakin tinggi tingkat kesetaraan dalam distribusi pendapatan.

Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama Gini Rasio dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 50

Target, Realisasi dan Capaian Gini Rasio Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	0,280	0,276	101,43%
2022	0,2760	0,3460	74,64%
2023	0,2740	0,2460	110,22%
2024	0,270	0,377	60,37%
2025	0,270	0,38	71,52%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel dapat kita lihat bahwa capaian Indikator Gini Rasio Kota Sibolga tidak konsisten dengan kata lain mengalami fluktuasi. Tahun 2025 indikator Gini Rasio tidak mencapai target, dimana realisasi Gini Rasio adalah 0,38 atau 71,52% dari target 0,270. Adapun penyebab sehingga indikator tersebut diatas tidak mencapai target adalah :

Keterbatasan lapangan kerja serta kemampuan keuangan daerah, seiring dengan efisiensi anggaran sehingga tahun 2025 adanya pengurangan tenaga harian lepas.

Kejadian bencana banjir dan tanah longsor mempengaruhi perekonomian Kota Sibolga dan pendapatan masyarakat.

Tingkat inflasi mendorong tingkat kemampuan masyarakat Kota Sibolga dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya kelautan Kota Sibolga karena Kota Sibolga merupakan produksi tangkap laut untuk produksi ikan tertentu seperti Kacalang , tuna dan tongkol.
2. Melakukan pasar murah waktu tertentu dan pada saat menjelang lebaran dan menjelang hari raya tahun baru guna untuk menjaga stabilitas harga pasar.
3. Melakukan pelatihan bagi calon pencari kerja dan pelaku usaha kecil menengah dan mikro.
4. Melakukan kegiatan pembekalan bagi masyarakat korban pemakai narkoba melalui Program Gerbang Harapan; guna mendapatkan bekal untuk menciptakan lapangan pekerja.

Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama angka pendapatan perkapita penduduk dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 51

Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Per Kapita Penduduk (Juta) Kota Sibolga
Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	64,32	64,46	100,22%
2022	66,12	n/a	n/a
2023	67,92	74,74	110,04%
2024	69,72	72,01	103,28 %
2025	72,05	82,12	113,98 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Tahun 2025 indikator kinerja Indeks Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Sibolga mencapai target dapat dilihat dari capaian Indikator adalah 82,12 atau 113,98 % dari target 72.05. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian target ini adalah :

Semakin banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tumbuh di Kota Sibolga berdasarkan data pada Dinas Perizinan Kota Sibolga.

PDRB Perkapita (Rupiah).

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Target dan realisasi PDRB kota Sibolga tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan Produk Domestik Bruto. PDRB juga sebagai alat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi.

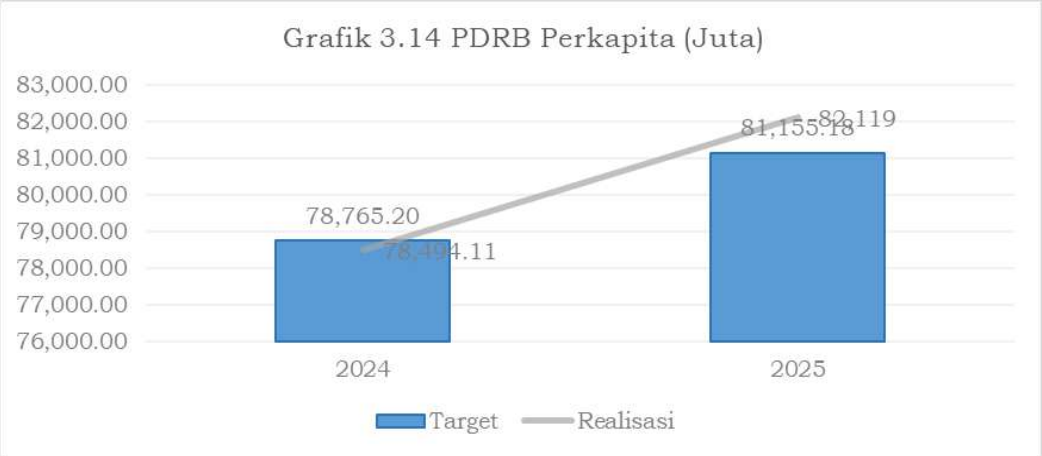
Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama PDRB Perkapita (Rupiah) Kota Sibolga dapat disajikan 2 tahun terakhir karena PDRB Perkapita (Rupiah) baru dijadikan indikator pada tahun 2024.

Tabel III.20

Target,Realisasi dan Capaian PDRB Perkapita (Juta) Kota Sibolga
Tahun 2024-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	78.765,20	78.494,11	99,65 %
2025	81.155.18	82.119	101,19 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Tahun 2025 indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Sibolga dapat mencapai target, dimana realisasi indikator PDRB Perkapita Pemerintah Kota Sibolga adalah 82.119 atau 101,19% dari target sebesar 82.155.18. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sibolga dalam keberhasilan pencapaian Indeks PDRB adalah :

1. Pemerintah Kota Sibolga melaksankan pelatihan dan pendampingan terhadap usaha UMKM dan usaha lainya untuk menjamin sektor perdagangan berjalan dengan baik.
2. Pendistribusian Produk yang dihasilkan dari Kota Sibolga mengalami peningaktan dan laku dipasaran dan menjadi produk yang tersedia dan diterima dan laku di derah lain menjadi menjadi faktor pendukung untuk peningaktan PDRB perkapita Kota Sibolga.

Tujuan : Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Sasaran 2 : Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk di suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiiki pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, sepanjang kurun waktu satu tahun terakhir.

Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perbandingan antara

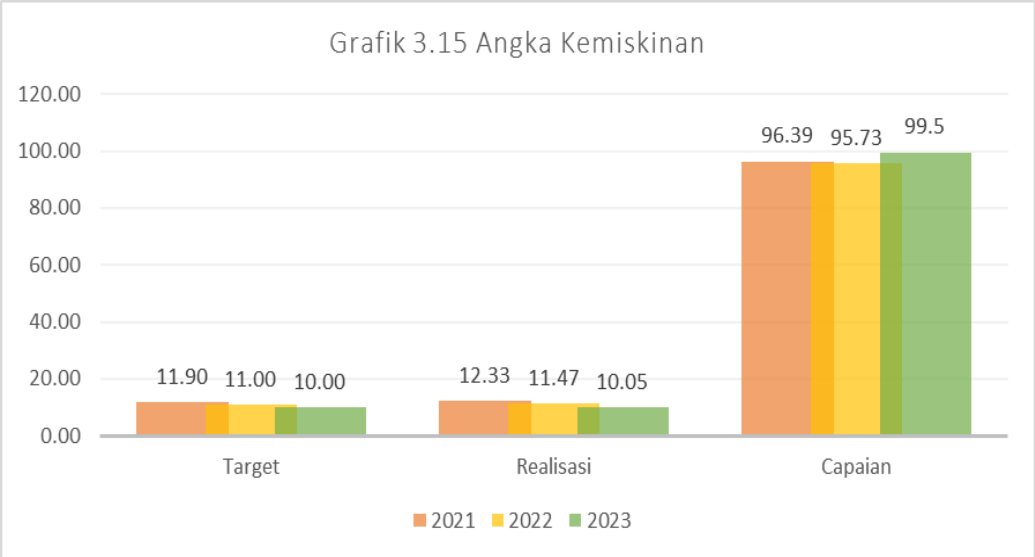
target dan realisasi indikator kinerja utama Angka Kemiskinan dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 52

Target, Realisasi dan Capaian Angka Kemiskinan
Kota Sibolga Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	11,90	12,33	96,39%
2022	11,00	11,47	95,73%
2023	10,00	10,05	99,5%
2024	9,80	11,39	83,78%
2025	9,80	9,02	108,64%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka kemiskinan dikota Sibolga tahun 2025 mencapai target, dimana realisasi indikator Angka Kemiskinan sebesar 9,02 atau 108,64 dari target 9,80. Untuk mencapai target menurunkan angka kemiskinan di Kota Sibolga tahun 2025 Pemko Sibolga telah melakukan upaya antara lain : Pemko Kota Sibolga telah menjalankan kebijakan yang tepat sasaran dan peningkatan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, kebijakan tersebut dilakukan melalui program:

Untuk program perlindungan sosial berbasis insivide, keluarga dalam rangka untuk pemenuhan hak dasar seperti PKH.

Pemberian pelatihan bagi pencari kerja dan program pelatihan bagi kelompok UMKM melalui dinas Koperasi dan tenaga kerja. Serta adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia serta membaiknya taraf kesehatan masyarakat Kota Sibolga dapat dilihat dari Indeks Kesehatan yang mencapai target 100%.

Program lain yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Angka Pengangguran

Angka pengangguran adalah jumlah atau persentase angkatan kerja yang sedang tidak bekerja dan aktif mencari kepekerjaan atau sedang bersiap usaha. Sedangkan tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama angka pengangguran dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53

Target, Realisasi dan Capaian Angka Pengangguran

Kota Sibolga Tahun 2021-2025

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	5300	3929	125,87%
2022	5070	2882	143,15%
2023	4840	3217	133,53%
2024	4610	3107	132,60%
2025	3000	3023	99,21%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 angka pengangguran di Kota Sibolga mengalami penurunan baik dari segi capaian target dan realisasi. Namun tahun 2025 angka pengangguran tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Angka Pengangguran adalah 3023 atau 99,21 persen dari target sebesar 300 jiwa. Adapun faktor penghambat sehingga indikator tidak tercapai adalah:

Dipenghujung tahun 2025 triwulan IV Kota Sibolga mengalami bencana alam dan tanah longsor mengakibatkan putusnya komunikasi, akses jalan dan kelangkaan BBM sehingga berdampak kepada tutupnya sebagian besar usaha transportasi barang, usaha makan minum dan usaha jasa lainya mengakibatkan faktor pendukung meningkatnya angka pengangguran di Kota Sibolga dan kurangya minat pengusaha untuk membuka usaha lain dan mengakitabatkan keterbatasan lowongan kerja. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah :
Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan Pelatihan kerja :Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti Usaha UMKM Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Pelatih Kerja.

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Kota Sibolga selama tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum untuk pencapaian indikator – indikator kerja masing-masing berjalan dengan baik dengan walaupun dengan keterbatasan dukungan anggaran tahun 2025 pada Perangkat Daerah yang terkait.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Era pembangunan berbasis kinerja bukan masalah bagaimana program/kegiatan sudah dilaksanakan atau belum dan seberapa besar realisasi serapan anggaran, melainkan bagaimana target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak sehingga pembangunan berbasis kinerja sesungguhnya merupakan upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Berikut ini disampailkan data besaran anggaran yang tersedia dan serapan anggaran dalam mendukung capaian indikator kerja pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tabel 54

Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	370.406.325.860,65	352.400.345.773,53	18.005.980.087,12
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	144.241.521.469,00	141.452.811.331,00	2.788.710.138,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga	144.241.521.469,00	141.452.811.331,00	2.788.710.138,00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87.236.779.009,00	84.695.285.729,00	2.541.493.280,00
5	Program Pengelolaan Pendidikan	55.212.923.007,00	54.975.682.802,00	237.240.205,00
6	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.791.819.453,00	1.781.842.800,00	9.976.653,00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	176.709.923.860,65	171.443.013.939,53	5.266.909.921,12
8	Dinas Kesehatan Kota Sibolga	82.415.137.876,00	75.460.296.148,00	6.954.841.728,00
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.149.603.675,00	34.133.474.761,00	1.016.128.914,00
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.082.475.114,00	40.480.295.989,00	5.602.179.125,00
11	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	876.509.312,00	575.693.049,00	300.816.263,00
12	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	126.487.885,00	111.617.999,00	14.869.886,00
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	180.061.890,00	159.214.350,00	20.847.540,00
14	Puskesmas Aek Habil	2.510.237.157,00	1.957.595.160,00	552.641.997,00
15	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.510.237.157,00	1.957.595.160,00	552.641.997,00
16	Puskesmas Pintu Angin	2.941.606.934,00	2.495.407.414,00	446.199.520,00
17	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.936.960.816,00	2.490.761.296,00	446.199.520,00
18	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.646.118,00	4.646.118,00	0,00
19	Rumah Sakit Umum Dr.F.L.Tobing Kota Sibolga	81.948.260.060,65	86.053.959.460,53	-4.105.699.399,88

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.836.771.024,65	83.473.300.156,53	-4.636.529.131,88
21	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.111.489.036,00	2.580.659.304,00	530.829.732,00
22	Puskesmas Sambas	2.303.796.969,00	1.747.765.992,00	556.030.977,00
23	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.299.916.809,00	1.743.885.832,00	556.030.977,00
24	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.880.160,00	3.880.160,00	0,00
25	Puskesmas Pelabuhan Sambas	2.349.049.001,00	1.995.165.758,00	353.883.243,00
26	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.344.893.951,00	1.991.010.708,00	353.883.243,00
27	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	4.155.050,00	4.155.050,00	0,00
28	Puskesmas Aek Parombunan	2.241.835.863,00	1.732.824.007,00	509.011.856,00
29	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.239.247.263,00	1.730.235.407,00	509.011.856,00
30	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.588.600,00	2.588.600,00	0,00
31	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.599.573.315,00	18.138.748.143,00	7.460.825.172,00
32	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Sibolga	25.599.573.315,00	18.138.748.143,00	7.460.825.172,00
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.289.304.130,00	5.694.018.388,00	595.285.742,00
34	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	41.327.550,00	41.327.550,00	0,00
35	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	77.593.250,00	77.593.250,00	0,00
36	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	27.470.400,00	27.470.400,00	0,00
37	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.540.357.100,00	1.520.726.500,00	19.630.600,00
38	Program Penataan Bangunan Gedung	12.523.660.250,00	5.874.093.120,00	6.649.567.130,00
39	Program Penyelenggaraan Jalan	5.099.860.635,00	4.903.518.935,00	196.341.700,00
40	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.499.859.809,00	6.107.746.490,00	1.392.113.319,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
41	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga	7.499.859.809,00	6.107.746.490,00	1.392.113.319,00
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.252.602.026,00	4.094.078.938,00	158.523.088,00
43	Program Pengembangan Perumahan	196.066.411,00	78.499.535,00	117.566.876,00
44	Program Kawasan Permukiman	2.135.011.005,00	1.049.527.500,00	1.085.483.505,00
45	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	916.180.367,00	885.640.517,00	30.539.850,00
46	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	10.612.207.115,00	10.048.662.014,00	563.545.101,00
47	Dinas Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Sibolga	6.554.550.239,00	6.222.450.951,00	332.099.288,00
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.238.108.828,00	5.939.116.251,00	298.992.577,00
49	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	216.448.411,00	188.498.500,00	27.949.911,00
50	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	99.993.000,00	94.836.200,00	5.156.800,00
51	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga	4.057.656.876,00	3.826.211.063,00	231.445.813,00
52	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.687.663.714,00	3.511.896.003,00	175.767.711,00
53	Program Penanggulangan Bencana	369.993.162,00	314.315.060,00	55.678.102,00
54	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	5.743.240.292,00	5.209.363.856,00	533.876.436,00
55	Dinas Sosial Kota Sibolga	5.743.240.292,00	5.209.363.856,00	533.876.436,00
56	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.401.395.532,00	3.239.494.556,00	161.900.976,00
57	Program Pemberdayaan Sosial	1.123.498.600,00	1.107.784.700,00	15.713.900,00
58	Program Rehabilitasi Sosial	855.827.880,00	554.089.800,00	301.738.080,00
59	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	146.878.700,00	141.874.800,00	5.003.900,00
60	Program Penanganan Bencana	215.639.580,00	166.120.000,00	49.519.580,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
61	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	58.191.322.862,00	54.137.045.630,00	4.054.277.232,00
62	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	684.197.830,00	390.548.000,00	293.649.830,00
63	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan	684.197.830,00	390.548.000,00	293.649.830,00
64	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	484.197.830,00	235.944.300,00	248.253.530,00
65	Program Penempatan Tenaga Kerja	200.000.000,00	154.603.700,00	45.396.300,00
66	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	223.911.107,00	133.014.301,00	90.896.806,00
67	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sibolga	223.911.107,00	133.014.301,00	90.896.806,00
68	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	99.640.277,00	46.516.952,00	53.123.325,00
69	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	70.983.246,00	42.189.286,00	28.793.960,00
70	Program Perlindungan Khusus Anak	53.287.584,00	44.308.063,00	8.979.521,00
71	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	902.279.800,00	902.279.800,00	0,00
72	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian	902.279.800,00	902.279.800,00	0,00
73	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	902.279.800,00	902.279.800,00	0,00
74	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11.206.178.997,00	10.712.847.128,00	493.331.869,00
75	Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga	11.206.178.997,00	10.712.847.128,00	493.331.869,00
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.830.878.140,00	9.504.462.054,00	326.416.086,00
77	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	117.669.309,00	104.125.700,00	13.543.609,00
78	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	38.467.389,00	23.278.485,00	15.188.904,00
79	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	234.136.739,00	234.070.269,00	66.470,00
80	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	150.181.020,00	27.784.000,00	122.397.020,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
81	Program Pengelolaan Persampahan	834.846.400,00	819.126.620,00	15.719.780,00
82	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.182.600.783,00	4.009.739.115,00	172.861.668,00
83	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga	4.182.600.783,00	4.009.739.115,00	172.861.668,00
84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.182.600.783,00	4.009.739.115,00	172.861.668,00
85	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.799.383.215,00	3.461.842.536,00	337.540.679,00
86	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sibolga	3.799.383.215,00	3.461.842.536,00	337.540.679,00
87	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.113.412.805,00	2.904.305.290,00	209.107.515,00
88	Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.380.000,00	6.380.000,00	0,00
89	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	679.590.410,00	551.157.246,00	128.433.164,00
90	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.489.271.048,00	5.082.899.654,00	1.406.371.394,00
91	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga	6.489.271.048,00	5.082.899.654,00	1.406.371.394,00
92	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.924.676.958,00	3.566.189.928,00	358.487.030,00
93	Program Pengendalian Penduduk	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00
94	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1.998.413.490,00	1.082.874.726,00	915.538.764,00
95	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	450.680.600,00	318.335.000,00	132.345.600,00
96	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	12.247.125.972,00	11.899.446.007,00	347.679.965,00
97	Dinas Perhubungan	12.247.125.972,00	11.899.446.007,00	347.679.965,00
98	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.948.699.391,00	4.691.313.172,00	257.386.219,00
99	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	7.128.278.881,00	7.038.179.835,00	90.099.046,00
100	Program Pengelolaan Pelayaran	170.147.700,00	169.953.000,00	194.700,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
101	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.552.936.424,00	6.328.052.504,00	224.883.920,00
102	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga	6.552.936.424,00	6.328.052.504,00	224.883.920,00
103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.149.602.524,00	5.965.462.804,00	184.139.720,00
104	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	330.303.900,00	289.559.700,00	40.744.200,00
105	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	73.030.000,00	73.030.000,00	0,00
106	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3.580.606.269,00	3.224.572.005,00	356.034.264,00
107	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Ketenagakerjaan	3.580.606.269,00	3.224.572.005,00	356.034.264,00
108	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.936.434.430,00	2.716.167.539,00	220.266.891,00
109	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	205.739.620,00	146.154.266,00	59.585.354,00
110	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	438.432.219,00	362.250.200,00	76.182.019,00
111	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.534.122.586,00	2.418.795.367,00	115.327.219,00
112	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.534.122.586,00	2.418.795.367,00	115.327.219,00
113	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.534.122.586,00	2.418.795.367,00	115.327.219,00
114	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
115	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
116	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00
117	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	1.892.354.890,00	1.890.891.100,00	1.463.790,00
118	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sibolga	1.892.354.890,00	1.890.891.100,00	1.463.790,00
119	Program Pengembangan Kebudayaan	1.262.041.232,00	1.261.287.100,00	754.132,00
120	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	478.665.820,00	478.395.500,00	270.320,00
121	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	151.647.838,00	151.208.500,00	439.338,00
122	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.874.853.941,00	3.660.618.113,00	214.235.828,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
123	Dinas Perpustakaan Kota Sibolga	3.874.853.941,00	3.660.618.113,00	214.235.828,00
124	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.877.638.941,00	2.717.339.902,00	160.299.039,00
125	Program Pembinaan Perpustakaan	997.215.000,00	943.278.211,00	53.936.789,00
126	Urusan Pemerintahan Pilihan	17.425.443.816,00	15.758.404.239,00	1.667.039.577,00
127	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	4.385.241.911,00	4.070.360.048,00	314.881.863,00
128	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan Dan Pertanian	4.385.241.911,00	4.070.360.048,00	314.881.863,00
129	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.385.241.911,00	4.070.360.048,00	314.881.863,00
130	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4.038.609.372,00	3.882.871.799,00	155.737.573,00
131	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kota Sibolga	4.038.609.372,00	3.882.871.799,00	155.737.573,00
132	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.038.609.372,00	3.882.871.799,00	155.737.573,00
133	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	861.146.564,00	721.849.914,00	139.296.650,00
134	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sibolga	861.146.564,00	721.849.914,00	139.296.650,00
135	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	49.999.990,00	45.733.000,00	4.266.990,00
136	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	541.146.574,00	541.116.914,00	29.660,00
137	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	270.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00
138	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	8.140.445.969,00	7.083.322.478,00	1.057.123.491,00
139	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Sibolga	8.140.445.969,00	7.083.322.478,00	1.057.123.491,00
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.593.195.738,00	6.591.101.278,00	1.002.094.460,00
141	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	547.250.231,00	492.221.200,00	55.029.031,00
142	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	98.065.805.407,00	88.016.397.556,42	10.049.407.850,58
143	Sekretariat Daerah	51.886.315.422,00	47.619.601.694,42	4.266.713.727,58
144	Sekretariat Daerah Kota Sibolga	51.886.315.422,00	47.619.601.694,42	4.266.713.727,58
145	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.829.842.877,00	38.440.491.664,42	2.389.351.212,58
146	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	9.072.730.849,00	7.261.809.780,00	1.810.921.069,00
147	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.983.741.696,00	1.917.300.250,00	66.441.446,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
148	Sekretariat DPRD	46.179.489.985,00	40.396.795.862,00	5.782.694.123,00
149	Sekretariat DPRD	46.179.489.985,00	40.396.795.862,00	5.782.694.123,00
150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.744.618.371,00	19.071.747.490,00	2.672.870.881,00
151	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	24.434.871.614,00	21.325.048.372,00	3.109.823.242,00
152	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	86.282.614.222,00	56.104.256.993,00	30.178.357.229,00
153	Perencanaan	5.389.139.464,00	4.573.926.204,00	815.213.260,00
154	Bappeda Kota Sibolga	5.389.139.464,00	4.573.926.204,00	815.213.260,00
155	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.646.996.893,00	4.107.996.257,00	539.000.636,00
156	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	476.919.307,00	323.100.847,00	153.818.460,00
157	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	265.223.264,00	142.829.100,00	122.394.164,00
158	Keuangan	71.243.820.833,00	44.049.171.941,00	27.194.648.892,00
159	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kota Sibolga	71.243.820.833,00	44.049.171.941,00	27.194.648.892,00
160	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.067.076.701,00	31.508.947.575,00	20.558.129.126,00
161	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	16.576.529.028,00	10.605.130.858,00	5.971.398.170,00
162	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.314.817.042,00	888.305.040,00	426.512.002,00
163	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.285.398.062,00	1.046.788.468,00	238.609.594,00
164	Kepegawaian	9.280.999.711,00	7.307.470.548,00	1.973.529.163,00
165	Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga	9.280.999.711,00	7.307.470.548,00	1.973.529.163,00
166	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.586.589.761,00	6.594.877.823,00	991.711.938,00
167	Program Kepegawaian Daerah	1.694.409.950,00	712.592.725,00	981.817.225,00
168	Pendidikan Dan Pelatihan	91.030.864,00	17.934.000,00	73.096.864,00
169	Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga	91.030.864,00	17.934.000,00	73.096.864,00
170	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	91.030.864,00	17.934.000,00	73.096.864,00
171	Penelitian Dan Pengembangan	277.623.350,00	155.754.300,00	121.869.050,00
172	Bappeda Kota Sibolga	277.623.350,00	155.754.300,00	121.869.050,00
173	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	277.623.350,00	155.754.300,00	121.869.050,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
174	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	9.068.753.567,00	8.504.486.806,00	564.266.761,00
175	Inspektorat Daerah	9.068.753.567,00	8.504.486.806,00	564.266.761,00
176	Inspektorat Kota Sibolga	9.068.753.567,00	8.504.486.806,00	564.266.761,00
177	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.724.233.567,00	8.160.876.806,00	563.356.761,00
178	Program Penyelenggaraan Pengawasan	344.520.000,00	343.610.000,00	910.000,00
179	Unsur Kewilayahan	23.987.781.805,00	20.452.664.500,00	3.535.117.305,00
180	Kecamatan	23.987.781.805,00	20.452.664.500,00	3.535.117.305,00
181	Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga	6.113.203.897,00	5.704.002.471,00	409.201.426,00
182	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.862.982.513,00	5.644.275.671,00	218.706.842,00
183	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	199.197.800,00	9.197.800,00	190.000.000,00
184	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	31.768.984,00	31.274.400,00	494.584,00
185	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	19.254.600,00	19.254.600,00	0,00
186	Kelurahan Angin Nauli	269.842.727,00	145.063.122,00	124.779.605,00
187	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	269.842.727,00	145.063.122,00	124.779.605,00
188	Kelurahan Hutabarangan	200.000.000,00	74.780.463,00	125.219.537,00
189	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200.000.000,00	74.780.463,00	125.219.537,00
190	Kelurahan Huta Tonga-Tonga	359.837.166,00	234.617.366,00	125.219.800,00
191	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	359.837.166,00	234.617.366,00	125.219.800,00
192	Kelurahan Sibolga Ilir	246.606.679,00	121.405.179,00	125.201.500,00
193	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	246.606.679,00	121.405.179,00	125.201.500,00
194	Kelurahan Simare-Mare	200.000.000,00	74.638.800,00	125.361.200,00
195	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	200.000.000,00	74.638.800,00	125.361.200,00
196	Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga	4.249.399.693,00	3.948.258.820,00	301.140.873,00
197	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.060.758.343,00	3.916.171.820,00	144.586.523,00
198	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	158.982.600,00	6.825.000,00	152.157.600,00
199	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	24.049.250,00	23.428.000,00	621.250,00
200	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.609.500,00	1.834.000,00	3.775.500,00
201	Kelurahan Kota Baringin	203.012.400,00	77.880.407,00	125.131.993,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
202	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	203.012.400,00	77.880.407,00	125.131.993,00
203	Kelurahan Pancuran Gerobak	202.212.400,00	77.590.300,00	124.622.100,00
204	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	202.212.400,00	77.590.300,00	124.622.100,00
205	Kelurahan Pasar Baru	202.212.400,00	76.031.317,00	126.181.083,00
206	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	202.212.400,00	76.031.317,00	126.181.083,00
207	Kelurahan Pasar Belakang	202.212.400,00	75.464.330,00	126.748.070,00
208	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	202.212.400,00	75.464.330,00	126.748.070,00
209	Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga	4.352.016.836,00	3.990.054.611,00	361.962.225,00
210	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.172.689.480,00	3.968.979.911,00	203.709.569,00
211	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	159.169.096,00	3.723.000,00	155.446.096,00
212	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.248.080,00	13.286.100,00	961.980,00
213	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	5.910.180,00	4.065.600,00	1.844.580,00
214	Kelurahan Pancuran Bambu	267.971.300,00	142.970.255,00	125.001.045,00
215	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	267.971.300,00	142.970.255,00	125.001.045,00
216	Kelurahan Pancuran Dewa	230.940.500,00	105.939.942,00	125.000.558,00
217	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	230.940.500,00	105.939.942,00	125.000.558,00
218	Kelurahan Pancuran Kerambil	264.212.000,00	139.211.500,00	125.000.500,00
219	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	264.212.000,00	139.211.500,00	125.000.500,00
220	Kelurahan Pancuran Pinang	264.703.000,00	140.056.920,00	124.646.080,00
221	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	264.703.000,00	140.056.920,00	124.646.080,00
222	Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga	5.123.523.407,00	4.785.689.997,00	337.833.410,00
223	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.956.978.221,00	4.772.137.497,00	184.840.724,00
224	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00
225	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	14.545.186,00	13.552.500,00	992.686,00
226	Kelurahan Aek Habil	248.020.800,00	122.654.800,00	125.366.000,00
227	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	248.020.800,00	122.654.800,00	125.366.000,00
228	Kelurahan Aek Manis	231.054.000,00	108.175.000,00	122.879.000,00
229	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	231.054.000,00	108.175.000,00	122.879.000,00
230	Kelurahan Aek Muara Pinang	312.194.200,00	188.790.800,00	123.403.400,00

No	Nama Program	Total		Sisa Anggaran
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
231	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	312.194.200,00	188.790.800,00	123.403.400,00
232	Kelurahan Aek Parombunan	244.606.000,00	119.388.100,00	125.217.900,00
233	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	244.606.000,00	119.388.100,00	125.217.900,00
234	Unsur Pemerintahan Umum	5.350.354.704,00	4.301.465.678,00	1.048.889.026,00
235	Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.350.354.704,00	4.301.465.678,00	1.048.889.026,00
236	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sibolga	5.350.354.704,00	4.301.465.678,00	1.048.889.026,00
237	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.661.632.593,00	1.567.224.389,00	94.408.204,00
238	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	478.811.573,00	477.012.961,00	1.798.612,00
239	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	387.919.688,00	387.919.688,00	0,00
240	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.372.969.010,00	1.437.613.000,00	935.356.010,00
241	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	449.021.840,00	431.695.640,00	17.326.200,00
Jumlah		668.778.402.243,65	599.675.067.175,95	69.103.335.067,70

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan konkuren. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di daerahnya.

3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	NIHIL	***NIHIL***	***NIHIL***	***NIHIL***	***NIHIL***

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL		

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) merupakan salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidkan dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Tahun 2025 yaitu :

No	Jenis Pelayanan	Indikator
1.	PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4
2.	PENDIDIKAN DASAR	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun
		Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
		Iklim keamanan SD
		Iklim keamanan SMP
		Iklim kebinekaan SD
		Iklim kebinekaan SMP
		Iklim inklusivitas SD
		Iklim Inklusivitas SMP

3	PENDIDIKAN KESETARAAN	Penduduk Usia 7 – 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga tahun 2024 yaitu :

No	Indikator	Target 2024
1.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun	85,21
2.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	45,13
3.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4	91,03
4.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun	99,19
5.	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	64,03
6.	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	54,68
7.	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	76,7
8.	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	64,42
9.	Iklim keamanan SD	73,52
10.	Iklim keamanan SMP	69,56
11.	Iklim kebinekaan SD	72,62
12.	Iklim kebinekaan SMP	72,69
13.	Iklim inklusivitas SD	60,56
14.	Iklim Inklusivitas SMP	59,78
15.	Penduduk Usia 7 – 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	22,41

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga selama 1 (satu) tahun anggaran dengan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Sibolga :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024
1.	PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun	85,21	88,44

		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	45,13	37,7
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4	91,03	92,31
2.	PENDIDIKAN DASAR	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun	99,19	98,95
		Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	64,03	86,56
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	54,68	87,67
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	76,7	96,87
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	64,42	94,68
		Iklim keamanan SD	73,52	79,43
		Iklim keamanan SMP	69,56	71,87
		Iklim kebinekaan SD	72,62	72,26
		Iklim kebinekaan SMP	72,69	68,9
		Iklim inklusivitas SD	60,56	65,46
		Iklim Inklusivitas SMP	59,78	70,31
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN	Penduduk Usia 7 – 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	22,41	8,14

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Sibolga bersumber dari APBD Kota Sibolga dan juga bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2025, anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan per setiap Jenis Layanan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	Pendidikan Dasar	45.747.586.288	45.654.148.902	99,81
2	Pendidikan Kesetaraan	812.042.884	810.467.600	99,81
3	Pendidikan Anak Usia Dini	8.653.293.835	8.511.066.300	98,36

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Sibolga sebanyak 44 orang yang terdiri dari : Adapun personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga yaitu hampir keseluruhan pegawai Dinas

pendidikan dan Kebudayaan kota Sibolga ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian SPM Bidang pendidikan yang terdiri dari Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Pengawas Sekolah serta Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan se Kota Sibolga.

1)	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural	:	41	orang
2)	Pegawai Negeri Sipil (NPS) Pengawas	:	3	orang
	Jumlah	:	44	orang

- **Kualifikasi pendidikan :**

Sebagai sebuah lembaga teknis daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga menyadari bahwa kapabilitas sumber daya manusia yang mempunyai kualfikasi dan berkemampuan dalam tugasnya sangat berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga dalam pencapaian tujuannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap memprioritaskan kualitas aparaturnya, baik melalui peningkatan jenjang pendidikan lanjutan maupun melalui pendidikan dan latihan (diklat) teknis dan fungsional, yang semuanya dapat dicapai dengan dukungan Pemerintah Kota Sibolga.

Pada saat ini staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga yang sudah memiliki gelar Master (S2) sebanyak 5 orang (11,36%). Pendidikan dan latihan teknis diberikan seluas-luasnya kepada seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga apabila kesempatan untuk itu terbuka, agar staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga memiliki kemampuan teknis terutama dalam perencanaan pembangunan.

Secara umum tingkat pendidikan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga sudah cukup baik, dimana komposisi untuk Strata 1 (S-1) lebih mendominasi yakni sebanyak 24 orang (54,54%) dibandingkan tingkat pendidikan Diploma, SMA, dan SMP . Adapun Keadaan PNS (Struktural) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut :

Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan PNS
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga

Kualifikasi Pendidikan	Jlh	Satuan	Pangkat/Golongan	Jlh	Satuan
Pasca Sarjana (S2)	5	Orang	Pembina Tk. I, IV/b	6	Orang
Sarjana (S1)	24	7Orang	Pembina, IV/a	2	Orang
Diploma	8	Orang	Penata Tk. I, III/d	7	Orang
SLTA	6	Orang	Penata, III/c	9	Orang
SMP	1	Orang	Penata Muda Tk. I, III/b	9	Orang
			Penata Muda, III/a	6	Orang
			Pengatur Tk. I, II/d	2	Orang
			Pengatur Muda Tk. I, II/b	2	Orang
			Golongan IX	1	Orang
J u m l a h	**44**	**Orang**	**J u m l a h**	**44**	**Orang**

Sumber Data : DUK Disdikbud 2025

4.1.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan :

1. Masih rendahnya angka partisipasi Penduduk Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan yang menunjukkan masih tingginya Angka ATS di Kota Sibolga
2. Masih rendahnya Capaian Kinerja Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B dimanana kinerjanya masih belum bisa mencapai target

Solusi :

1. Sosialisasi Program Pendidikan Kesetaraan ke stakeholder terlkait, memberikan kemudahan akses bagi Masyarakat dalam memberdayakan Satuan Pendidikan Non Formal, melakukan pendekatan berbasis komunitas untuk merangkul Anak Tidak Sekolah (ATS) dan masyarakat kurang mampu.

2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Satuan Pendidikan PAUD dan mendorong agar Satuan Pendidikan PAUD berfokus pada pemenuhan standar nasional melalui penguatan dokumen di aplikasi SISPENA, optimalisasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), peningkatan kompetensi pendidik (kualifikasi S1/diklat), dan perbaikan sarana prasarana. pendampingan intensif, pengelolaan administrasi yang rapi, dan inovasi pembelajaran yang berpusat pada anak.

4.1.7 Program dan Kegiatan

Dalam hal untuk mendukung Penerapan dan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Program/Kegiatan antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
   1.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
   - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
   - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
   - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
   - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
   - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
   - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
   - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
   - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

   1.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
   - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
   - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
   - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
   - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
   - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

1.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- Pengelolaan Dana BOP PAUD
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD

1.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Menurut permenkes nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pasal 2 ayat 3 bahwa jenis pelayanan daar pada SPM Kesehatan Daerah Kot Sibolga terdiri dari :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c. Pelayanan Kesehatan Bayio Baru Lahir
d. Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan terduga Tuberkulosis dan
l. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusi (human Immunodeficiency Virus)

4.2.2 Target Pencapaian

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan dan dicapai 100% target SPM setiap tahunnya ole pemda. Dalam pelaksanaannya alokasi anggaran untuk SPM didukung melalui APBD Kota Sibolga dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Berikut dibawah Target Pencapaian SPM, Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target		Ket
		Target (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	91,71%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	92,48%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	99,24%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	86,44%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	98,91%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	34,58%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	99,08%	

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	67,00%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	154,00%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	100	118,60%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	86,,00%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	100	88,28%	

4.2.2 Realisasi Capaian Kinerja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target %	Realisasi %	Ket.
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	91,71%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	92,48%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	99,24%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	86,44%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	98,91%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	84,14%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	98,09%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	67,00%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	154,00%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	100	118,00%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	86,00%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	100	88,28%	

4.2.3 Alokasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			
		Pagu	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	445,752,520	417,402,495	93,64%	
	2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	192,158,900	102,487,900	53,33	
	3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	189,256,360	182,015,860	96,23	
	4 Pelayanan Kesehatan Balita	3,211,244,164	3.031.375.282	94,40	
	5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	491,309,700	465,546.700	94,76	
	6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	972.240.725	957.375.051	98,47	
	7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	694,411.300	691.448.900	99,57	
	8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	352.358.800	195.020.400	55,35	
	9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	37.054.00	0	0	
	10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	65.164.700	63.133.500	94,19	

	11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	492.398.272	463.803.500	94,19	
	12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	439.314.800	437.642.300	99,62	

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga, baik SDM maupun infrastruktur kesehatan yang dimiliki

Tabel . 4.1. Jumlah SDM

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	55
2	UPTD Puskesmas Pintu Angin	80
3	UPTD Puskesmas Sambas	88
4	UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas	65
5	UPTD Puskesmas Aek Habil	74
6	UPTD Puskesmas Aek Parombunan	82
7	UPTD Laboratorium	13

Tabel 4.2 Jumlah Ambulan dan pusling Roda 4

No	Keterangan	Jumlah Ambulans	Jumlah Pusling
1	UPTD Puskesmas Pintu Angin	1	1
2	UPTD Puskesmas Sambas	1	1
3	UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas	1	0
4	UPTD Puskesmas Aek Habil	1	1
5	UPTD Puskesmas Aek Parombunan	2	0

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Mengingat SPM adalah penyediaan layanan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara dengan target kinerja seluruh warga negara harus memperoleh pelayanan minimal, dalam hal penganggaran pemenuhan SPM wajib menjadi prioritas utama dan tidak boleh dibatasi. Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih maksimal dan peran OPD serta masyarakat dalam melaksanakan SPM sehingga masyarakat dapat terlayani secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

4.2.7 Program dan Kegiatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan (Sub Kegiatan)
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif)
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV)

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasarmyang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPM oleh daerah.

Tabel 4.1

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 4.3.2

Target SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	80%

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 4.3.3

Realisasi SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	75%	37,25%

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum dan Sanitasi, serta dana APBD.

Tabel 4.3.4
Alokasi Anggaran SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
		Pagu	Relisasi	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	-	-
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
	a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	-	-	-
Jumlah Keseluruhan		**-**	**-**	**-**

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM, adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 46 Orang.

No.	Bidang	PNS
1.	Sekretariat	10
2.	Bidang Bina Marga	11
3.	Bidang Cipta Karya	6
4.	Bidang Sumber Daya Air, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum	10
5.	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	6
6.	UPTD Pengelolaan Air Limbah	3
Jumlah		46

4.3.6 **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dalam penerapan SPM yaitu sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Dikarenakan adanya efisiensi anggaran, alokasi anggaran untuk pekerjaan Air Minum dan Air Limbah tidak terealisasi. Oleh sebab itu capaian SPM untuk tahun 2025 masih sama dengan Tahun 2024 ;
2. Dalam peghitungan kebutuhan, panjang pipa atau lahan yang digunakan tidak sesuai bahkan terkadang bertambah atau berkurang dari yang telah diperhitungkan / diperkirakan sebelumnya;
3. Pelaksanaan pekerjaan, terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dengan lahan;
4. Keterbatasan fasilitas /peralatan yang diperlukan untuk mendukung pelayanan Air Limbah;
5. Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM;
6. Tangki Saptik
   - Kesadaran masyarakat untuk memelihara masih kurang;
   - Akses air bersih di Kota Sibolga belum merata sehingga MCK individual belum efektif di beberapa daerah;
7. IPAL
   - Kesulitan lahan siap hibah terutama di kawasan perkotaan maupun padat penduduk;
   - Sebagian masyarakat masih belum mau IPAL berada di samping rumahnya;
   - Lokasi lahan di bagian hilir permukiman dan tidak ada akses jalan untuk droping material maupun penyedotan lumpur tinja;

Berdasarkan permalahan diatas, solusi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan penganggaran pengadaan fasilitas atau peralatan yang mendukung serta pekerjaan fisik di tahun 2026 khusus dalam urusan Air Limbah dan Air Minum;
2. Adanya komunikasi yang baik antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dengan masyarakat sekitar;
3. Melaksanakan survei terlebih dahulu terhadap lokasi sebelum dilakukan pekerjaan pembangunan;
4. Tangki Septik
   - Pembuatan akses jalan minimal jalan setapak yang bisa dilewati kendaraan roda 3;
   - Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk merubah pola pikir;
   - Penyediaan akses air bersih untuk masyarakat sasaran program sanitasi;
5. IPAL
   - Lahan kalau bisa difasilitasi oleh pihak kelurahan atau daerah;
   - Sosialisasi tentang cara kerja IPAL dan apa saja fasilitas pendukung IPAL agar masyarakat teredukasi;

4.3.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Sibolga dalam menerapkan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

1. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
   - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
   - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
   - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
   - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Menurut peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Daerah Kabupaten/Kota teridiri atas:

Penyediaan dan rehabiltasi rumah layak huni bagi korban bencana :

1. Melakukan pendataan awal jumlah korban bencana dan kerusakan rumah
2. Pembentukan dan pelatihan tim satgas bencana sektor perumahan
3. Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, dilakukan bersama sama denga masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD
4. Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang
5. Pembangunan kembali rumah rusak berat
6. Pembangunan baru/relokasi rumah korban bencana
7. Bantuan akses rumah sewa layak huni

a. Penyediaan Rumah Layak Huni

- Penyediaan Rumah Layak Huni merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah;
- Pembangunan Baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana;
- Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan pengambilan fungsi struktur rumah dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama;
- Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang;
- Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi kerumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada;

b. Fasilitasi Relokasi ;
   - Fasilitasi dalam hal ini merupakan kegiatan – kegiatan yang mencakup anatara lain pendampingan/pembinaan, pembimbingan penyuluhan, pelayanan informasi dan bantuan teknis (termasuk pendampingan penggantian kerugian, penyusunan rencana tapak dan/atau DED rumah susun umum dan/atau rumah khusus Pembangunan rumah susun umum, Pembangunan rumah khusus, dan pengadaan tanah) bagi Masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah;
   - Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), daerah sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana dan daerah Kawasan khusus seperti Kawasan militer;
   - Relokasi program pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam hal ini merupakan kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau Masyarakat yang bertempat tinggal diatas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbilkan bahaya dengan status penguasaan bangunan milik, sewa, atau hak guna pakai/usaha/pemanfaatan;
   - Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

c. Sarana Dasar Permukiman;

d. Pengolahan Air Limbah Domestik;

4.4.2 Target Pencapaian

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan dan dicapai 100% target SPM setiap tahunnya oleh pemda. Dalam pelaksanaannya alokasi anggaran untuk SPM didukung melalui APBD Kota Sibolga. Berikut dibawah Target Pencapaian SPM, Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target		Ket
		Target (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Rumah Layak Huni	100	50,38%	
2	Fasilitasi Relokasi	100	50,38%	
3	Sarana Dasar Permukiman	100	N/A	
4	Pengolahan Air Limbah Domestik	100	N/A	

4.4.3 Alokasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	1 Indentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kab/Kota	100,000,000,-	10,000,000,-	10 %

4.4.4 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sibolga, baik SDM maupun infrastruktur yang dimiliki.

Tabel Jumlah SDM

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas PKPLH	39

4.4.5 Permasalahan dan Solusi

Mengingat SPM adalah penyediaan layanan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara dengan target kinerja seluruh warga negara harus memperoleh pelayanan minimal, dalam hal penganggaran pemenuhan SPM wajib menjadi prioritas utama dan tidak boleh dibatasi. Dalam pelaksanaan SPM bidang perumahan dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih maksimal dan peran OPD serta masyarakat dalam melaksanakan SPM sehingga masyarakat dapat terlayani secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

4.4.6 Program dan Kegiatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan (Sub Kegiatan)
1	2	3	4
1	Perbaikan	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni APBD Kab/Kota
2	Perbaikan	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni APBN Kementrian
3	Perbaikan	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni APBD Provinsi

4.4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Ketebntraman dan keteetiban umum
- Pelayanan Peneyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.1.2 Target Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.1.3 Realisasi Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target %	Realisasi %
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	29
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	0,15

4.5.1.4 Alokasi Anggaran

No	Program	Jumlah		%
		Anggaran	Realisasi	
A.Sub Urusan Ketentraman Dan ketertiban Umum				
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	187.153.411	187.153.411	100
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	149.990.596	149.990.596	100
1	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	149.990.596	149.990.596	100
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	37.162.815	37.162.815	100
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	37.162.815	37.162.815	100
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	47.208.000	47.208.000	100
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	47.208.000	47.208.000	100
1	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	47.208.000	47.208.000	100
2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.208.000	47.208.000	100

4.5.1.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Tahun 2024 didukung oleh personil sebanyak 196 orang antara lain :.

- Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2025 adalah 196 Orang dengan status sebagai berikut.:
  a. Pegawai Negeri Sipil : 22 orang
  b. Non Pegawai Negeri Sipil/THL : 174 orang

4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

Perencanaan : Peningkatan kualitas SDM Satpol melalui mengikutsertakan pelatihan atau bimtek masih sangat terbatas.

Koordinasi : Kurang maksimalnya respon dari OPD terkait dalam penanganan pelanggan Peraturan Daerah / Perkada.

Pendanaan : Keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia.

Adapun yang solusi yang diupayakan guna meningkatkan penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah:

Perencanaan : Memaksimal SDM yang ada dengan kebutuhan perencanaan yang diperlukan pada tahun selanjutnya.

Koordinasi : Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanganan pelanggaran Perda / Perkada

Pendataan : Memaksimalkan Anggaran dan SDM yang ada.

Adapun Solusi yang akan dilakukan:

Perencanaan : Menganggarkan di tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Koordinasi : Memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialiasi Perda / Perkada.

Pendataan : Menganggarkan di tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

4.5.1.7 Program / Kegiatan

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

- Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.5.2 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.2.1 Jenis pelayanan dasar

BPBD berdasarkan tupoksinya berada pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan bencana. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana..

4.5.2.2 Target Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

4.5.2.3 Realisasi Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %

3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %

4.5.2.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Alokasi Anggaran pada APBD TA.2024	
			APBN	APBD
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	-
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	369.993.162

4.5.2.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	
		PNS	Non PNS
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	26	53
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	26	53
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	26	53

4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Belum lengkapnya dokumen-dokumen kebencanaan berupa turunan dari Kajian Resiko Bencana (KRB) yaitu Rencana Kontijensi, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta PERDA Penanggulangan Bencana.
2. Kurangnya kualitas SDM aparatur BPBD dikarenakan minimnya pelatihan penyusunan dokumen kebencanaan dan pelatihan penanggulangan bencana.
3. Belum terbentuknya tim penanggulangan bencana lintas sektor seperti, Tim Reaksi Cepat (TRC) tingkat Kota serta pelatihan Bersama.
4. Belum terbentuknya Kecamatan/Kelurahan Tangguh Bencana.

5. Kejadian bencana bisa datang setiap saat, dengan permasalahan yang kompleks, dimungkinkan menguras sumberdaya yang besar, sedangkan sarana prasarana pada BPBD Kota Sibolga untuk beberapa jenis masih minim.
6. Kurangnya sarana peringatan dini yang belum menjangkau seluruh Kota Sibolga.
7. Belum berjalannya fungsi Pusdalops secara maksimal, sehingga dalam melakukan assaement menindak lanjuti laporan masyarakat masih terbentur dengan sistem komunikasi intern BPBD.
8. Perubahan Paradigma dan sulitnya menerapkan sadar bencana pada masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Setiap permasalahan yang dihadapi pasti ada upaya untuk mengatasi dan upaya – upaya mengatasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1. Mencoba mendapatkan/memperoleh dana APBD untuk penyusunan dokumen-dokumen kebencanaan.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan kebencanaan.
3. Melakukan pertemuan lintas sektor penanggulangan bencana untuk pembentukan tim lintas kota.
4. Membentuk Kecamatan/kelurahan tangguh bencana.
5. Menambah sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui APBD, permohonan bantuan sarana dan prasarana baik ke provinsi maupun ke BNPB.
6. Lebih mengefektifkan fungsi PUSDALOPS.
7. Sosialisasi dan pendekatan secara intens di setiap desa terhadap masyarakat, dan juga membuka diskusi-diskusi serta mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat langsung di dalam sebuah forum.

4.5.2.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
   b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota

4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimam (SPM) Urusan Sosial di Kota Sibolga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti;
b) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial;

4.6.2 Target Capaian

Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2025. Adapun target pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TARGET PENCAPAIAN SPM

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
		Sasaran/Indikator	Target Nasional (%)	Target Pemerintah Kota Sibolga (%)		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Rehabilitas Sosial Dasar penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemeis di Luar Panti,	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta Gelandangan dan pengemis di Luar Panti. Indikator : Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar,lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar panti	100,00	50,00	60,00	70,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial.	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota. Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.	100,00	80,00	80,00	80,00

4.6.3 Realisasi Capaian

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)			
		Sasaran/Indikator	Target SPM Tahun 2025 (%)	Realisasi SPM Tahun 2025 (%)	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti.	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti. Indikator : Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. $\frac{638}{1132}$ X 100	60,00	56,36	
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial.	Sasaran : Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota. Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. $\frac{844}{1084}$ X 100	80,00	77,85	

4.6.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
I	***PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL***	**752.712.400**	**752.573.100**	-
1	**Pengembangan Pengebangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**752.712.400**	**752.573.100**	-
a	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	752.712.400	752.573.100	-
II	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**845.228.180,00**	**547.347.900,00**	-
1	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial***	**845.228.180**	**547.347.900**	-
a	Penyediaan Permakanan	6.251.280	4.729.000	
b	Pemberian Bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	786.711.700	503.535.400	
c	Pemberian Layanan Rujukan	52.265.200	39.083.500	
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**146.878.700**	**141.874.800**	
1	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**146.878.700**	**141.874.800**	
a	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.028.600	33.136.200	
b	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	110.850.100	108.738.600	
IV	**PROGRAM PENANGAAN BENCANA**	**215.639.580**	**166.120.000**	
1	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	**215.639.580**	**166.120.000**	
a	Penyediaan Makan	91.639.580	64.620.000	
b	Penyedian Sandang	124.000.000	101.500.000	

4.6.5 Dukungan Personil.

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Seluruh Pegawai pada Dinas Sosial Kota Sibolga pada tahun 2025 berjumlah 21 (dua puluh tiga) orang PNS.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi.

Beberapa permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM bidang urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Sibolga antara lain:

a) Kurangnya tenaga aparatur yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, berjiwa sosial dan yang mempunyai sertifikat sosial sehingga prgram dan kegiatan yang disusun belum maksimal menerapkan capaian SPM,

Upaya pemecahannya : Menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar menempatkan aparatur yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, berjiwa sosial dan yang mempunyai sertifikat sosial

b) Belum adanya tempat penampungan yang memadai bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di Kota Sibolga.

Upaya pemecahannya : Merencanakan rehab total Kantor Dinas Sosial Kota Sibolga yang didalamnya tersedia satu ruangan sebagai rumah singgah/shelter di kota Sibolga.

c) Kegiatan yang diaggarkan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga belum terfokus kepada pencapaian SPM.

Upaya pemecahannya : Membuat perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan lebih memeperhatikan pencapaian SPM dan RPJMD.

d) Belum sinkronnya data PMKS/PPKS dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kota Sibolga sehingga sulit menentukan siapa saja yang berhak menerima pelatihan keterampilan dan Bantuan Sosial.

Upaya pemecahannya : Melakukan kegiatan pendataan yang lebih baik dan berkelanjutan, dengan menggunakan aplikasi yang terkoordinasi langsug dengan Pusdatin Kementerian Sosial.

Solusi

8. Mencoba mendapatkan/memperoleh dana APBD untuk Penyediaan Pelayanan Dasar Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Korban Bencana.
9. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan Kesejahteraan Sosial.
10. Menambah Sarana dan prasarana Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada SPM Dinas Sosial baik ke provinsi maupun ke Kementerian Sosial.

    Sosialisasi dan pendekatan secara intens di setiap Kelurahan terhadap masyarakat yang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, dan juga membuka diskusi-diskusi serta mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat langsung di dalam sebuah forum.

4.6.7 Program dan Kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti:

- Penyediaan Permakanan
- Penyediaan Sandang
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- Pemberian Layanan Rujukan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan di Kota Sibolga pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kota Sibolga, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Orsospol, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Sibolga lainnya.

Hasil pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2025, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan kembali agar apa yang menjadi target dan sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sibolga tahun 2025-2029 dapat dicapai dan dilaksanakan. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan

Dipindai dengan CamScanner

permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2025 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kota SIbolga.

Demikian penyampaian LPPD Kota Sibo|ga Tahun 2025, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang keberhasi|an senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kota Sibo|ga, semoga Allah SWT memberkahi kita semua

Sibo|ga, Maret 2026

WALI KOTA SIBOLGA

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Dipindai dengan CamScanner

WALI KOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR : 130 / 021 / TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyebutkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

4. Undang-Undang ....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membuat program kerja, menghimpun dan mengevaluasi data/informasi dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan;

b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti inventarisasi hasil evaluasi terhadap data dari Perangkat Daerah;

c. melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan secara berkala dan/atau pada saat dibutuhkan oleh Wali Kota Sibolga.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan, Tim dibantu oleh Kelompok Kerja yang mempunyai tugas dibidang administrasi dan/atau tugas lainnya yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini apabila tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga.

KELIMA ....

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 09 Januari 2026
WALI KOTA SIBOLGA,

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

LAMPIRAN....

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR : 130/021/ TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

I.	PEMBINA	:	1. WALI KOTA SIBOLGA
			2. WAKIL WALI KOTA SIBOLGA
II.	KETUA	:	SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA
III.	SEKRETARIS	:	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA SIBOLGA
IV.	ANGGOTA	:	1. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA
			2. INSPEKTUR KOTA SIBOLGA
			3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SIBOLGA
			4. KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA
			5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SIBOLGA
			6. KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SIBOLGA
			7. KEPALA DINAS SOSIAL KOTA SIBOLGA
			8. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN KETENAGAKERJAAN KOTA SIBOLGA
			9. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SIBOLGA
			10. KEPALA DINAS PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SIBOLGA
			11. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SIBOLGA
			12. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA
			13. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SIBOLGA
			14. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SIBOLGA

15. KEPALA ....

Dipindai dengan CamScanner

15. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA SIBOLGA
16. KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA SIBOLGA
17. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA SIBOLGA
18. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN KOTA SIBOLGA
19. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA
20. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SIBOLGA
21. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA SIBOLGA
22. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SIBOLGA
23. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA
24. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA SIBOLGA
25. KEPALA KANTOR KESBANGPOL KOTA SIBOLGA
26. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA SIBOLGA
27. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SIBOLGA
28. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA SIBOLGA
29. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA SIBOLGA
30. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA SIBOLGA
31. KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KOTA SIBOLGA
32. CAMAT SIBOLGA UTARA
33. CAMAT SIBOLGA KOTA
34. CAMAT SIBOLGA SAMBAS
35. CAMAT SIBOLGA SELATAN
36. DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA NAULI KOTA SIBOLGA
37. DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH SIBOLGA NAULI KOTA SIBOLGA

V. KELOMPOK ....

Dipindai dengan CamScanner

V. KELOMPOK KERJA

KOORDINATOR : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKOT SIBOLGA

ANGGOTA :
1. 3 (TIGA) ORANG FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKOT SIBOLGA
2. 6 (ENAM) ORANG STAF PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDAKOT SIBOLGA

WALI KOTA SIBOLGA,

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
I N S P E K T O R A T
Jalan Srikandi No. 1 Telp./Fax (0631) 21044 Sibolga
Email : inspektoratkotasibolga@gmail.com

Nomor LHP : 700.1.2.8/16/III/LHP.Re/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

LAPORAN HASIL REVIU

Tentang

**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025**

TAHUN 2026

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
I N S P E K T O R A T

Jalan Srikandi No. 1 Telp./Fax (0631) 21044 Sibolga
Email : inspektoratkotasibolga@gmail.com

Sibolga, 30 Maret 2026

Nomor : 700.1.2.8/16/III/LHP.Re/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sibolga
Cq.Kepala Bagian Pemerintahan

Di Sibolga

Dengan ini Kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025 sebagai berikut :

I. PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun 2025 dimana Substansi Informasi yang dimuat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 adalah menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kota Sibolga.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025 serta memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

II. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan Hasil Reviu yang telah kami lakukan, maka dengan ini kami sampaikan beberapa perbaikan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

1. Secara garis besar sistimatika penulisan LPPD Tahun 2025 sudah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 17 Februari 2026 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa isi materi dokumen LPPD Tahun 2025 sudah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 17 Februari 2026 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, namun ada beberapa hal yang perlu perbaikan antara lain :

   a) Masih terdapat beberapa OPD yang belum mengisi Capaian Kinerja dan sumber data dari Indikator Kinerja Kunci ;
   b) Matrik Capaian Kinerja Makro yang disajikan pada LPPD tahun 2025 belum sesuai dengan matrik Capaian Kinerja Makro pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020;
   c) Masih terdapat OPD yang belum menyajikan data terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM);
   d) Terdapat ketidakkonsistenan pencantuman besaran Capaian Kinerja makro , antara lain :
      - ❖ Besaran Angka Kemiskinan Tahun 2025 berbeda dengan Angka Kemiskinan pada Capaian Kinerja Indikator Makro , dimana capaian Angka Kemiskinan tahun 2025 pada tabel Capaian Kinerja Makro sebesar 9,02 berbeda dengan angka kemiskinan pada halaman 179 sebesar 10,50;
      - ❖ Besaran Capaian Kinerja Makro (Indeks Pembangunan Manusia) Tahun 2025 sebesar 78,11 berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia pada tabel 26 Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Sibolga (hal180), dimana capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,50
   e) Capaian Kinerja Makro belum menjabarkan secara spesipik mengenai keberhasilan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, Angka Kemiskinan dan Angka pengangguran yang menurun.

3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) belum mentaati jadwal yang sudah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan reviu dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dipindai dengan CamScanner

III. REKOMENDASI

Tim Reviu menyarankan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) agar :

1. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera menyajikan data Indikator Kinerja Kunci Hasil;
2. Menyelaraskan Matrik Capaian Kinerja Makro dengan matrik Capaian Kinerja Makro pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020;
3. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera menyajikan data terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Konsisten dalam membuat Capaian Kinerja Makro;
5. Menjabarkan secara spesipik mengenai Indeks Pembangunan Manusia , Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
6. Menyelaraskan Jadwal Reviu LPPD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan LPPD (Minggu ketiga Januari).

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reviu LPPD Kota Sibolga Tahun 2025 ini dibuat sesuai dengan dokumen yang peroleh selama reviu dilakukan untuk dapat digunakan sesuai keperluan.

Sibolga, 30 Maret 2026

ADE MAHLIGAI PUTRA LUBIS, ST, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810505 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Wali Kota Sibolga (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Sibolga (sebagai laporan);
3. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN HASIL REVIU
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

Nomor LHR : 700.1.2.8/16/III/LHP.Re/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

Berdasarkan Surat Tugas Walikota Sibolga Nomor: 7001.2.8/13/III/SPT.Re/2025 untuk melakukan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENUGASAN

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 17 Februari 2026 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025;
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Sibolga tahun 2025;
8. Surat Perintah Tugas Wali Kota Sibolga Nomor : 700.1.2.8/13/III/SPT.Re/2026 perihal Melakukan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2026;.
9. Surat Sekretariat Daerah Kota Sibolga Nomor 135/2026/PEM tanggal 27 Maret 2025 perihal Permintaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Dipindai dengan CamScanner

B. RUANG LINGKUP REVIU

Pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup :

a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   a.1 Capaian Kinerja Makro
   a.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
   a.3 Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
b. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
   b.1 Capaian Kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima daerah dari pemerintah pusat
   b.2 Capaian Kinerja pelaksanaan tugas bantuan yang diterima daerah dari Pemerintah Provinsi
c. Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal
   c.1 Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal
   c.2 Kendala Penerapan Standar Pelayanan Minimal
   c.3 Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

II. HASIL REVIU

Berdasarkan Hasil Reviu yang telah kami lakukan, maka dengan ini kami sampaikan beberapa perbaikan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :

1. Secara garis besar sistimatika penulisan LPPD Tahun 2025 sudah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 17 Februari 2026 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025

2. Bahwa isi materi dokumen LPPD Tahun 2025 sudah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 17 Februari 2026 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, namun ada beberapa hal yang perlu perbaikan antara lain :
   a) Masih terdapat beberapa OPD yang belum mengisi Capaian Kinerja dan sumber data dari Indikator Kinerja Kunci ;

Dipindai dengan CamScanner

b) Matrik Capaian Kinerja Makro yang disajikan pada LPPD tahun 2025 belum sesuai dengan matrik Capaian Kinerja Makro pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020;

c) Masih terdapat OPD yang belum menyajikan data terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM);

d) Terdapat ketidak konsistenan pencantuman besaran Capaian Kinerja makro , antara lain :

- ❖ Besaran Angka Kemiskinan Tahun 2025 berbeda dengan Angka Kemiskinan pada Capaian Kinerja Indikator Makro , dimana capaian Angka Kemiskinan tahun 2025 pada tabel Capaian Kinerja Makro sebesar 9,02 berbeda dengan angka kemiskinan pada halaman 179 sebesar 10,50;
- ❖ Besaran Capaian Kinerja Makro (Indeks Pembangunan Manusia) Tahun 2025 sebesar 78,11 berbeda dengan Indeks Pembangunan Manusia pada tabel 26 Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kota Sibolga (hal180), dimana capaian Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78,50

e) Capaian Kinerja Makro belum menjabarkan secara spesipik mengenai keberhasilan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, Angka Kemiskinan dan Angka pengangguran yang menurun.

3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) belum mentaati jadwal yang sudah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan reviu dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

III. REKOMENDASI

Tim Reviu menyarankan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) agar :

1. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera menyajikan data Indikator Kinerja Kunci Hasil;
2. Menyelaraskan Matrik Capaian Kinerja Makro dengan matrik Capaian Kinerja Makro pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020;
3. Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera menyajikan data terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Dipindai dengan CamScanner

4. Konsisten dalam membuat Capaian Kinerja Makro;
5. Menjabarkan secara spesipik mengenai Indeks Pembangunan Manusia , Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran;
6. Menyelaraskan Jadwal Reviu LPPD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan LPPD (Minggu ketiga Januari).

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reviu LPPD Kota Sibolga Tahun 2025 ini dibuat sesuai dengan dokumen yang peroleh selama reviu dilakukan untuk dapat digunakan sesuai keperluan.

Sibolga, 30 Maret 2026

Tim Reviu,

Diketahui:
INSPEKTUR KOTA SIBOLGA.

ADE MAHLIGAI PUTRA LUBIS, ST,M.
PEMBINA TK. I
NIP. 19810505 200502 1 003

1 Nama : Ade Mahligai Putra Lubis, ST,M.M
NIP : 19810505 200502 1 003
Jabatan : Penanggung Jawab

2. Nama : Ikmal, SE, MM
NIP : 19740604 200312 1 008
Jabatan : Wakil Penanggung Jawab

3. Nama : Lidya M Sigalingging, SH,MKN
NIP : 197512092002122004
Jabatan : Pengendali Teknis

4. Nama : Juni Fitria, S.Farm, Apt
NIP : 19890617 201507 2 001
Jabatan : Ketua Tim/PPUPD Muda

5. Nama : Aldi Prasetio Lubis, S.Kom
NIP : 19920403 201507 1 002
Jabatan : Anggota Tim/PPUPD Pertama

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Sibolga untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang di muat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Daerah telahdisajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini.

Sibolga, 30 Maret 2026

INSPEKTUR KOTA SIBOLGA

ADE MAHLIGAI PUTRA LUBIS, ST, M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810505 200502 1 003

Dipindai dengan CamScanner

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENDIDIKAN

1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar
- **Pendidikan**

1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini				
	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	2.766	X 100	83.01%	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil
	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	3.332			
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	14.280	X 100	87.05%	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil
	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	16.404			
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	219	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	219			
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik				
	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	107	X 100	48.64%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah seluruh toilet	220			
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik				
	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	345	X 100	59.08%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah ruang kelas	584			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KESEHATAN

- **Kesehatan**

1.b.1	Persentase kematian ibu				
	Jumlah kematian ibu tahun N	0	X 100	0.00%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah ibu melahirkan tahun N	1.630			
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita				
	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	306	X 100	4.79%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	6.394			
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar				
	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	1.574	X 100	92.43%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.703			
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar				
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	1.630	X 100	95.71%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.703			
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar				
	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	1.629	X 100	99.94%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.630			
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	5.845	X 100	90.79%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil
	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	6.438			
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar				
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	16.200	X 100	100.00%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	16.200			

1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar				
	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	49.824	X 100	84.14%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil
	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	59.217			
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	8.388	X 100	97.02%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil
	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	8.646			
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar				
	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	10.080	X 100	66.61%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	15.133			
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar				
	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.222	X 100	100.00%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	1.222			
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar				
	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	51	X 100	100.00%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	51			
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar				
	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	3.384	X 100	100.00%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	3.384			
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar				
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.905	X 100	100.00%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan
	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.905			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEKERJAAN UMUM

- **Pekerjaan Umum**

1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota				
	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	0	X 100	0.00%	Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga
	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1			
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota				
	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	38.178	X 100	68.13%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga
	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	56.04			
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota				
	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	100.348	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga,
	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	100.348			
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	6.034	X 100	37.25%	Pembilang dan Penyebut dari dinas PUPR Kota Sibolga
	Jumlah rumah di kabupaten/kota	16.198			
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir				
	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	0	X100	0.00%	Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga
	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	1			
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota				
	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	X100	0.00%	Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga
	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1			
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota				
	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	42	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota SIbolga
	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	42			
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah				

	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	1	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga,
	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	1			
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	0	X 100	0.00%	Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR,
	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	1			
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota				
	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	46	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga
	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	46			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN

- **Perumahan**

1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni				
	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	577	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	577			
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani				
	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	0	X 100	0,00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	1			
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani				
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	57	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	57			
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				
	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	0	X 100	0.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	1			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku				
	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	0	X 100	0.00%	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga
	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3			
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja				
	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	12	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Satpol PP
	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	12			
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan				
	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	6	X 100	54.55%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Satpol PP
	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	11			
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	500	X 100	13.59	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga
	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	3.678			
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	75	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga
	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	75			
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	19	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Satpol PP Kota Sibolga
	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	19			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN SOSIAL

- **Sosial**

1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29	X 100	87.88%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial
	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	33			
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	X 100	0.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial
	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	20			
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	56	X 100	36.60	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial
	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	153			
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti				
	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	12	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial
	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	12			
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota				
	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	624	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial
	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	624			
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar				
	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0	X 100	0.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial
	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	5.054			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KETENAGAKERJAAN

2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar
- **Ketenagakerjaan**

2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	3	X 100	75.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	4			
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).				
	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	28	X 100	19.86%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
	Jumlah perusahaan	141			
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan				
	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	11.400	X 100	77.71	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	14.669			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif				
	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	12	X 100	100.00%	Data tidak dapat disajikan
	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	12			
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif				
	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	6	X 100	100.00%	Data Simponi Kementerian PPA Tahun 2024, Sumber data dari Dinas PMK, PP dan PA dan Penyebut dari Disdukcatpil
	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	6			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN

- **Pangan**

2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				
	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	0	X 100	0%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPP
	Target jumlah cadangan pangan	1			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN

- **Urusan Wajib Pertanahan**

2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah				
	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	493	X 100	84.13%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR
	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	586			
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah				
	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	10	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PU dan PR
	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	10			
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan				
	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	0	X 100	0.00%	Surat keterangan dari Dinas PU dan PR
	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- **Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				
	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	19	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH
	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	19			
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani				
	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	16.565	X 100	82.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	20.201			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ADM. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

- **Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil**

2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan				
	Akta kelahiran yang diterbitkan	29.997	X 100	99.95%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga
	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	30.013			
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				
	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	28.192	X 100	98.89%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga
	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	28.509			
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan				
	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga
	2 dokumen	2			
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik				
	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	70.948	X 100	98.76	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga
	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	71.840			
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
	Akta kematian yang diterbitkan	944	X 100	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga
	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	944			
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
	Akta perkawinan yang diterbitkan	1.020	X 100	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga
	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	1.020			
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan				
	Akta perceraian yang diterbitkan	25	X 100	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Sibolga
	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	25			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- **Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal				
	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Tuntas hasil 100%	X 100	Tuntas hasil 100%	Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	Tuntas hasil 100%			
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri				
	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Tuntas hasil 100%	X 100	Tuntas hasil 100%	Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	Tuntas hasil 100%			
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa				
	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Tidak dapat dilaksanakan		Tidak dapat dilaksanakan	Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024
	Jumlah kerja sama desa yang ditangani				

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun					
	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota		1.87	77.92	2,24 %	Sumber data dari Dinas PP dan KB
	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan		2.4			
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)					
	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	1.540	X 100	15.69	Sumber data dari Dinas PP dan KB	
	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	9.815				
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)					
	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	5,277	X 100	29.65	Sumber data dari Dinas PP dan KB	
	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	17,8				

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERHUBUNGAN

- **Perhubungan**

2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota				
	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)			0.55%	Sumber data dari Dinas Perhubungan
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota				
	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota			0.00%	Sumber data dari Dinas Perhubungan
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan				
	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	0	X 100	0.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perhubungan
	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	27			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- **Komunikasi dan Informatika**

2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	27	X 100	50 %	Dinas Kominfo Kota Sibolga
	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	27			
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18	X 100	31,428%	Sumber data dari Dinas Kominfo Kota Sibolga
	Jumlah Layanan Publik	24			
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	17.691	X 100	11,110%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kominfo Kota Sibolga
	Jumlah penduduk	70.948			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

- **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi				
	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	86.071.996.035	X 100	15.01%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker
	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	74.836.585.445			
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal				
	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	443	X 100	3.44%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Naker
	Σ Usaha mikro	12.869			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL

- **Penanaman Modal**

2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota				
	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	106.129.885.912	X 100	-72.86%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	390.978.195.229			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- **Kepemudaan dan Olahraga**

2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				
	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	141	X 100	35.25%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Parpora Kota Sibolga
	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	400			
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	230	X 100	0.85%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Parpora Kota Sibolga
	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	26.954			
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi				
	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0	X 100	0.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Parpora Kota Sibolga
	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	1			
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi				
	Jumlah atlet peraih medali	50	X 100	100.00	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Parpora Kota Sibolga
	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	50			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN STATISTIK

- **Statistik**

2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah				
	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	0	X 100	0.00%	Surat Keterangan dari Dinas Kominfo Kota Sibolga
	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	1			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERSANDIAN

- **Persandian**

2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah				
	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	0	X 100	0.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Kominfo Kota Sibolga
	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	918			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN

- **Kebudayaan**

2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan				
	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	2	X 100	28.57%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Pendidikan Kota Sibolga
	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	7			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN

- **Perpustakaan**

2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat		
	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100	58.11	Sumber data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100	15.72	Sumber data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEARSIPAN

- **Kearsipan**

2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional		
	T = (a + i + s + j)/4	82.77%	Sumber data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

3. Urusan Pilihan
- **Kelautan dan Perikanan**

3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya				
	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	36.105,6	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga
	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	36.105,6			
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)				
	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	44.57 Kg / Kap / Tahun			Sumber data dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PARIWISATA

- **Pariwisata**

3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum				
	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	17.598.245.005	X 100	100.00%	Pembilang dan penyebut dari Disparpora Kota Sibolga
	Realisasi investasi Tahun N	17.598.245.005			
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing				
	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	25	X 100	-78.45%	Pembilang dan penyebut dari Disparpora Kota Sibolga
	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	116			
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota				
	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	58.924	X 100	-13.41%	Pembilang dan penyebut dari Disparpora
	Jumlah wisatawan tahun N-1	68.048			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANIAN

- **Pertanian**

3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan				
	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	1	X 100	0.00%	Tidak adanya lahan pertanian di kota sibolga, Sumber data dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga
	Produksi tanaman pangan tahun N-1	1			
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura				
	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	1	X 100	0.00%	Sumber data dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga
	Produksi hortikultura tahun N-1	1			
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan				
	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	913.64		-0.56%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga
	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	918.75			
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))				
	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	10.759		100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas PKP dan P Kota Sibolga
	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	10.759			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KEHUTANAN

1. Urusan Pilihan Kehutanan

3.d	**Outcome**	**Output**				
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- **Energi dan Sumber Daya Mineral**

3.e	**Mengukur persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota**				
	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	X 100	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019
	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERDAGANGAN

- **Perdagangan**

3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	99	X 100	39.60 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota Sibolga
	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	250			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERINDUSTRIAN

- **Perindustrian**

3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota				
	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	30	X 100	8,450	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota SIbolga
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional				
	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	105	27.27 %		Sumber data dari Dinas Perindag Kota Sibolga
	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	385			
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota				
	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	386	X 100	0.26%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota Sibolga
	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	385			
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor				
	Nilai investasi sektor industri	8.735.303.600	X 100	100.00%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota Sibolga
	Total investasi seluruh sektor	8.735.303.600			

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN TRANSMIGRASI

- **Transmigrasi**

3.h	**Output**	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Adanya Kawasan Transmigrasi pada Kota Sibolga
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Adanya Kawasan Transmigrasi pada Kota Sibolga
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Adanya Kawasan Transmigrasi pada Kota Sibolga

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
- **Perencanaan**

4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah				
	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	11	X 100	64.71	Pembilang dari Bappeda Kota Sibolga
	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	17			

- Keuangan

4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya				
	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	232.318.009.674	X 100	34.74 %	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unauditet
	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	668.778.402.243,65			
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah				
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	103.693.905.622,29	X 100	16.42%	Pembilang dan Penyebut dari BPKPAD dan LRA Unauditet
	Realisasi pendapatan daerah	631.532.073.312,21			
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N				
	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	352.400.345.773,53	X 100	55.80%	Pembilang dan Penyebut dari BPKPAD dan LRA Unauditet
	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	631.532.073.312,21			
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik				
	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	200.390.243.843,65	X 100	29.96%	Pembilang dan Penyebut dari BPKPAD dan LRA Unauditet
	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	668.778.402.244			

- Pengawasan

4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
	Nilai 1/2/3/4/5	2.00 Nilai	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga		
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)				
	Nilai 1/2/3/4/5	2.00 Nilai	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga		
4.e.3	Manajemen risiko Indeks				
	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	2.00 Nilai	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga		
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1				
	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	29	X 100	42.03%	Pembilang dan Penyebut dari Inspektorat Kota Sibolga
	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	69			

- Kepegawaian

4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)				
	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.043	X 100	78.13	Pembilang dan Penyebut dari BKD Kota Sibolga
	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.335			

- Penelitian dan Pengembangan

4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan				
	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	6	X 100	50.00	Pembilang dan Penyebut dari Bappeda Kota Sibolga
	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	12			

- Pengadaan

4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)		
	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	13.33	Sumber Data Dari Bagian Pembangunan Setdakot Sibolga
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan		
	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	17.05	Sumber Data Dari Bagian Pembangunan Setdakot Sibolga
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)		
	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	16.16	Sumber Data Dari Bagian Pembangunan Setdakot Sibolga

- Hubungan dengan Perwakilan Daerah

4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N				
	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu		Tepat	Sumber data dari BPKPAD Kota SIbolga	
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N				
	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	7	X 100	58.33	Pembilang dan Penyebut dari Bagian Hukum Setdakot Sibolga
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	12			

- Pelayanan Publik

4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik		
	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	92.61 Nilai	Sumber data dari Bagian Organisasi Setdakot Sibolga